Dr. Limas Dodi, M.Hum

Konsep dan Kontekstualisasi

MODERASI AGAMA DI INDONESIA

Pengantar:
Prof. Dr. H. Mohamad Anton Athoillah, MM., Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag.,
Prof. Dr. Ngainun Naim, M.H.I., Prof. Dr. H. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag.,
Prof. Muhamad Ali, Ph.D

Konsep dan Kontekstualisasi

MODERASI AGAMA DI INDONESIA

Dr. Limas Dodi, M.Hum

IAIN Kediri Press

Konsep dan Kontekstualisasi
MODERASI AGAMA DI INDONESIA

Penulis: Dr. Limas Dodi, M.Hum

Editor: Basar Dikuraisyin
Layout: Epullah
Desain Cover: Audina
Cetakan: I Oktober 2022

X + 413 hlm. : 15,5 x 23 Cm

ISBN:

Diterbitkan oleh:
IAIN Kediri Press
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur
64127 Telp. (0354) 689282, Fax (0354) 686564

Percetakan:
Nadi Pustaka offset
Jl.Nakulo No.19A Pugeran
Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
Telp. 0274-4333626 / 081578626131

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala,* Tuhan semesta alam yang selalu menaburkan rahmat, menyayangi dan mengasihi makhluk-makluk-Nya. Buku sederhana ini menjadi bukti autentik bahwa hidayah dan inayah Allah senantiasa mengiringi proses dan perjuangan penulis hingga dapat terselesaikan. Salawat beserta salam mengalir deras keharibaan baginda besar Nabi Muhammad SAW, *khatim al-ambiya' wa al-mursalin.*

Penulisan buku ini sebenarnya dilatar belakangi oleh sebuah momentum, dimana agenda moderasi agama belum menemukan formulasi tepat diterapkan di Indonesia. Negara yang penuh keragaman budaya, etnis, suku, budaya, bahasa dan agama. Sejak moderasi agama menjadi agenda prioritas nasional Kementerian Agama tahun 2018 lalu, sampai detik ini belum ditemukan implementasi ideal pelaksanaan moderasi agama yang sesuai. Praktik moderasi agama masih bersifat parsial di daerah-daerah, terpisah-pisah, tidak menentu, tidak ada rumusan maupun standar indikator implementasi. Begitupun di lembaga-lembaga pendidikan, dari pesantren, madrasah, sampai perguruan tinggi, moderasi agama baru hanya sebatas teoritik. Inilah *pe'er* yang masih dicarikan

formula, sedangkan di sisi lain, moderasi agama mendesak mesti diterapkan.

Desakan moderasi agama bukan tanpa alasan, rumus praktik dan teoritis juga demikan penting dengan banyak alasan logis. Semua alasan inilah yang menghantui penulis menyelesaikan buku ini, diantara alasan itu adalah *pertama,* pemahaman dan pengalaman keagamaan mengalami arus perkembangan yang cepat dan akhirnya menjurus pada wilayah ekstrem, mengancam dari esensi ajaran agama yang sebenarnya. Manusia terdiri dari elemen-elemen pemikiran dinamis, termasuk dalam mengamalkan ajaran agama. Setiap hari, jam bahkan detik, ada kajian-kajian keagamaan, pengamalan, diskusi, pelatihan, acara dan sebagainya yang menuntut pola tepat cara beragama di setiap doktrin beragama, maka bayangkan berapa banyak partikel pemikiran beragama yang muncul. Ini tentu menjadi kabar baik, namun juga ancaman.

Kedua, karakter keberagamaan kita tercatat paling fanatis. Perbedaan agama selalu menjadi entitas paling sensitif menimbulkan konflik. Sedikit dibakar, nyala api yang ditimbulkan sangat sistematik menyeruak ke segala arah. Ada sebagian orang yang merasa paling benar, sampai-sampai pengakuan atas keyakinannya hanya bisa digambarkan dengan cara memaksa orang lain untuk mengikuti kayakinannya. Bahkan memaksa dan menggunakan cara-cara kekerasan. Butuh jembatan moderasi agama untuk menghilangkan sensitifitas dan fanatisme beragama di tengah nuansa keragaman.

Ketiga, kebiasaan menyalahkan ideologi negara. Pemahaman agama yang justru mengancam keutuhan negara

kesatuan, merusak ideologi yang telah mapan. Menyalahkan pancasila, mengharamkan hormat berndera bahkan menganggap kafir bagi orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada juga yang mengajarkan bahwa rasa nasionalisme tidak sesuai ajaran agama, dan semacamnya. Ini yang ditakutkan, negara dan agama dibenturkan. Indonesia diharuskan sesuai dengan agama yang dianutnya, baik pada aspek materiil maupun formal. Satu sama lain saling mengklaim, menyebabkan harmonisa keberagamaan terganggung. Inilah masalah akut yang tengah menjangkiti keragaman kita.

Tidak ada jalan lain, moderasi agama adalah bentuk keharmonisan dalam keragaman, seperti Piagam Madinah yang mampu mendamaikan konflik umat Islam dan Yahudi, Traktrat yang menyelesaikan konflik kerajaan di Inggris. Begitu pula dengan moderasi agama, adalah konsesi strategis untuk menjembatani seluruh perbedaan agama melalui satu payung negara yang ditancapkan menggunakan bingkai nusantara. Moderasi agama sangat cocok bagi pola beragama di Indonesia yang menjunjung budaya, adat dan kultur lokal. Agama, budaya dan prinsip lokal berbaur menjadi pola sosial keagamaan. Inilah kekayaan negara kita, satu sisi bisa menjadi potensi luar biasa, dan di sisi lain jika tidak dipayungi konsep moderasi agama, berbalik menjadi ancaman.

Buku ini hadir sebagai jawaban atas kegelisahan mencari formula moderasi agama yang tepat, menawarkan model moderasi agama pada elemen-elemen sosial, mulai dari pendidikan, organisasi keagamaan sampai relung-relung ruang digital. Buku ini menyajikan ramuan konsepsi teoritis yang mendalam mulai dari sumber nash utama, sampai pada wilayah konsepsi sosial. Bukan hanya konsepsi teoritis, namun

disempurkan dengan implementasi kontekstual moderasi agama, sehingga menjadi sajian yang komprehensif. Besar harapan, buku ini dapat memberikan sumbangsih tinggi untuk negara kita Indonesia.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan, kepada beberapa pihak yang telah memberikan dorongan moral maupun intelektual, yang selalu meluangkan waktu untuk sekadar berdiskusi dan memberikan masukan berharga. Tanpa sentuhan pikiran dan kritik, tentu buku ini tidak dapat diterbitkan. *Syukron katsiran wa allah yajza' khoirun jaza'* kepada semua yang telah membantu dan dapat disebutkan satu persatu. Semoga keringat dan waktu yang terkorbankan dibalas oleh Allah Subhahu wa ta'ala. Amien ya robbal 'alamien.

Yang paling terakhir, meskipun buku ini ditulis dengan ketelitian dan menguras intelektual sekaligus tenaga yang tinggi dengan harapan menjadi sumbangsih pengetahuan yang sempurna, namun penulis meyakini masih terjadi kekurangan dan kelemahan dimana-mana. Oleh karena itu, penulis berharap masukan dan solusi kontruktif dari para pembaca yang budiman. Demikian, *wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh…*

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Mohamad Anton Athoillah, M.M
Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tantangan terbesar umat beragama saat ini, adalah membendung kaum ekstremis. Seperti yang diungkap Clow *"religious life is not only about religion, but also different social religions",* itu artinya, ada elemen lain yang lebih prinsipil daripada beragama, yaitu nilai-nilai, norma-norma yang hidup bersemayam di bawah alam sadar manusia. Ideologi ekstremis, hakikatnya, bukan semata ideologi agama, namun sebagaimana Arkoun menyampaikan bahwa lahirnya sikap ekstremis lahir dari *culture* yang terbentuk dari rasa, prinsip dan norma-norma sosial yang genetik. Jika demikian, untuk membendung kaum ekstremes harus disisir pada dataran norma sosial masyarakat Indonesia, mulai dari kearifan lokal sampai pada budaya nusantara sebagai bentuk dari nama lain "*moderasi agama*".

Saat Islam diakui sebagai agama yang *rahmat lil alamin* (bukan hanya *lil mu'minin*) memiliki prinsip *tsawabiq likulli zamanin wa halin* (relevan pada konteks zaman apapun), konsep moderasi agama memberikan obor di tengah kemelut masifitas gerakan dakwah kaum ekstremis, fundamentalis dan puritanis. Bahkan pemerintah, sejak tahun 2019-2024 mempriotaskan konsep moderasi agama sebagai *tameng*

menghempaskan gerakan ekstremis di Indonesia. Namun pergerakan tersebut, masih berada pada *level kedua*. Menurut saya, moderasi agama di Indonesia memiliki tiga level; *pertama,* level ontologis, dimana hakikat moderasi agama masih sebatas menyatukan arti, historisitas dan sumber. *Kedua,* berada pada dataran konsepsi, dimana moderasi agama menjadi teori dari berbagai aspek kajian. *Ketiga,* , moderasi agama telah berwujud bentuk implementatif dan bahkan mampu mewujudkan Islam yang toleran, damai dan berbasis kearifan lokal.

Saat pemerintah terkungkung pada labirin perancangan konsep, dan bahkan di perguruan-perguruan tinggi melakukan kajian-kajian strategis, moderasi agama harus mampu menyajikan tiga komponen dengan sangat lengkap. *Pertama,* sisi antologi disisir menggunakan tiga pendekatan sekaligus untuk memperolah pengetahuan yang komprehensif, yakni 1) diambil dari historisitas akar *washatiyah* sejak masa awal Islam, sampai menjadi istilah moderasi agama. 2) konsepsi digali dari sumber al-Quran dan al-Hadist menggunakan pendekatan normatif mulai dari kajian tafsir klasik sampai kontemporer, sehingga menemukan titik temu. 3) menggiring historitas dan normatifitas moderasi agama ke ranah sosiologis sebagai bentuk implementatif sekaligus menjawab kegelisahan pemerintah dan umat Islam tentang bagaimana bentuk nyata moderasi agama pada ranah pendidikan, ekonomi dan soial.

Ketiga aspek itulah, kenapa kemudian buku ini disebut keajaiban. Sebab komprehensifitas yang terkandung didalamnya, bukan hanya keluasan bahasan, tapi menyatukan historisitas, konsepsi normatif dan implementasi dengan melihat konteks keberagamaan di Indonesia, pada titik

tertentu, buku karya Limas Dodi ini adalah keajaiban. Seolah, menjadi pohon pengetahun yang menyatukan rerancak karya moderasi agama selama ini yang terdiri dari buku saku, bunga rampai, moderasi Islam secara normatif, dan semacamnya yang bersifat parsial. Baik PTKIN, masyarakat dan bahkan pemerintah, sumbangsih buku ini sangatlah relevan dan konstributif. Terutama dalam menemukan konsepsi ideal berangkat dari hasil riset tentang moderasi agama.

Buku karya Limas Dodi (yang akrab disapa Ade) ini bukan hanya memberikan sumbangkasih keilmuan terintegrasi, namun juga bagaimana moderasi agama dipraktekan dalam kehidupan. Tidak hanya menggunakan pendekatan normatif semata, melainkan menghadirkan kajian historis-emperical dan memberikan cara mewujudkan moderasi agama di kehidupan nyata. Inilah sebuah keajiaban keilmuan yang tertuang dari setiap bahasan karya ini. Semuga, buku ini bisa menjadi pedoman, atensi regulasi pemerintah dan pengayaan intelektual kaum akademis untuk mewujudkan Indonesia yang moderat, toleran, seimbang untuk menciptakan kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama yang sesuai dengan cita-cita Islam yaitu *rahmatul lil alamin…*

Bandung, 26 Oktober 2022

Prof. Dr. H. Mohamad Anton Athoillah, MM.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag

Guru Besar UIN Mataram

Secara *ad hock,* bagi Indonesia, moderasi agama bukan hanya keharusan lantaran kehidupan keberagamaan yang plural, multikultural, bukan pula moderasi agama sebuah ideologi. Namun jauh melebihi cara pandang demikian, moderasi agama kini menjadi sebuah nilai (*value of character*) yang tersebar ke seluruh elemen kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi agama tidak hanya tentang; cara kita beragama, namun juga cara kita bersosial, berbudaya, dalam pendidikan bahkan politik. Moderasi agama telah menyatu dengan kekayaan nusantara, kearifan lokal, ideologi Pancasila dan identitas bangsa.

Indonesia, tidak hanya plural, namun juga religius. pluralitas dan religuisitas, bukan merupakan desain individu, keingingan umat beragama ataupun desain negara, melainkan *rahmat* Tuhan (*sunnatullah*). Karena itulah, tidak jarang konsep pluralitas dan religiusitas kerapkali melahirkan masalah krusial dalam bersosial-beragama. Berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek beragama yang berlebihan (ekstrem) bahkan sampai mengesampingkan martabat kemanusiaan, adalah *meanstream* yang muncul belakangan ini. Bahkan mengarah pada ranah klaim kebenaran subyektif

dan pemaksaan kehendak atas dasar agama serta pengaruh kepentingan ekonomi, tanpa disadari, memicu konflik sosial keberagamaan yang berkepanjangan. Pada gilirannya kemudian, menimbulkan *gap* menganga ketidakselarasan semangat beragama dengan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kita tidak bisa menafikan ataupun menutup mata, bahwa saat ini Indonesia bahkan global, berada di tengah tantangan terbesar yang dinamakan radikalisme dan kekerasan ekstrem. Radikalisme yang paling menonjol bukan hanya ekstremisme berbasiskan agama, namun juga ekstremisme yang didorong oleh sikap ekklusifitas kelompok. Kenyataan ini bukan persoalan *sepele,* namun mengancam integritas bangsa dan anak-anak muda yang terkapar raadikalisme. Siapa saja bisa terkapar, sebab Indonesia di semua aspek –pendidikan, politik, sosial, ekonomi- yang didalamnya terdapat manusia beragama karena berbeda latar belakang, karakter, agama, suku, kepentingan dan persoalan lainnya.

Jika diperhatikan, ekstremisme berbanding lurus dengan pola dan *trend* keagamaan di Indonesia. Pola keberagamaan yang terjebak pada eksklusifitas dan instan, berdampak pada sikap tertutup tidak mau menganggap pandangan orang lain benar. *Trend* spiritualitas ekslusif melahirkan sikap *true claim, kerdil* dan *sempit.* Begitupun dengan *trend* beragama instan, membawa pemahaman agama hanya pada dataran tekstual semata. Ekslusif dan instan inilah yang memunculkan kelompok-kelompok yang mempromosikan praktek keagamaan ekstrem, karena tidak mau membuka wawasan dan cenderung bersikap *takfiri.*

Bahkan ekstremisme bukan hanya di dunia nyata, pada ranah digital sangat menghawatirkan. Hilangnya otoritas dan populernya penceramah dari kalangan non otoritatif (*death of expertise*) mewabah tanpa filterasi dan bebas menyebar di media-media sosial. Tokoh agama yang moderat tidak mampu bersaing di dunia media sosial, sehingga isi ceramah memberikan virus ekstrem dan dapat diakses secara bebas. Realitas demikian, lambat laun menumbuhkan sikap-sikap ekslusif dan mencerna pemahaman agama sesuka hati tanpa mengedepankan *sanadiyah.* Inilah yang mengancam anak-anak muda, masyarakat yang lemah iman dan orang awam sebagai sasaran virus ekstremis.

Apa yang harus kita lakukan? Tiga hal, *pertama,* unifikasi keragaman tafsiri keagamaan dengan cara mencerdaskan kehidupan keberagamaan melului pemusatan kajian Islam yang terorganisir. Sumber agama, tidak ditafsirkan semau sendiri tanpa ada sandaran baku yang bersifat metodologis. *Kedua,* esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat diperkuat melalui keberadaan pemerintah. Kontrol dan upaya-upaya preventif yang terpusat pada aspek moderasi agama. *ketiga,* dari unsur otoritatif tokoh agama, bisa memberikan contoh nilai-nilai universal, multilkulturalisme, kejujuran, hak tetangga, *tawasuth, tawazun, tasamuh* dan *I'tidal.* Bahkan tokoh agama sebagai garda terdepan, harus melek literasi digital untuk memfilter dan menyebarkan ajaran keagamaan yang moderat.

Ketiga hal di atas, bisa kita temukan dengan sangat rinci dan aplikatif dalam buku karya adinda Limas Dodi ini. Moderasi Islam dibahas dengan sangat komprehensif, mulai dari sandaran nash yang bersifat historis, normatif,

sosiologis, kontekstual sampai peta pemukan Islam *rahmat lil alamin.* Buku adinda Limas Dodi ini menggambarkan problem ekstremis lengkap, pola-trend kehidpan masyarakat beragama di Indonesia, sampai pada gambaran detail pola keberagamaan di bidang pendidikan, pesantren, demokrasi, bernegara bahkan digital. Buku ini selain komprehensif, juga mampu menggabungkan teoritis dan implementatif. Semuga buku ini bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara….

Mataram, 29 Oktober 2022
Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Ngainun Naim, M.H.I

Guru Besar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Islam Indonesia adalah Islam yang berkarakter moderat. Hal ini bisa dilacak dari jejak historis awal Islam masuk ke Indonesia sampai sekarang. Jika tidak memiliki karakter moderat, kecil kemungkinan Islam tumbuh, berkembang, dan mewarnai kehidupan masyarakat selama berabad-abad.[1]

Jejak awal Islam di Indonesia menunjukkan bahwa tasawuf menjadi aspek yang menentukan. Salah satu karakter tasawuf adalah penekanannya pada aspek esoterik. Aspek esoterik ini cukup adaptif dan fleksibel dengan budaya lokal. Karakternya berbeda dengan fikih yang cenderung lebih kaku. Hal inilah yang menjadikan Islam bisa tumbuh dan berkembang secara baik.

Aspek lain yang tidak bisa diabaikan adalah strategi dakwah yang ditempuh. Strategi dakwah yang dikembangkan oleh Walisongo, misalnya, memiliki peranan yang sangat strategis pada penerimaan Islam secara luas. Titik tekan dakwahnya adalah perilaku yang semakin baik dari waktu ke

[1] Alwi Shihab, *Antara Tasawuf Sunni & Tasawuf Falsafi Akar Tasawuf di Indonesia,* (Bandung: IMaN, 2009).

waktu. Para ahli dakwah menyebut bahwa dakwah Walisongo adalah *role model* bagi dakwah kontemporer.[2]

Realitas yang semacam ini semestinya menjadi pelajaran penting bagi kehidupan sosial keagamaan Indonesia kontemporer. Kehidupan sekarang ini memiliki kesinambungan dengan masa lalu. Justru karena pertalian dengan masa lalu itulah penting untuk menjadikan sejarah sebagai bahan pelajaran penting dalam menjalani kehidupan kekinian.

Setiap zaman memiliki dinamika yang khas. Dinamikanya tidak sama antar masa. Dinamika yang ada menyediakan ruang belajar agar kehidupan sosial keagamaan dapat semakin baik dari waktu ke waktu. Namun demikian ini adalah sesuatu yang idealis. Realitas tidak selalu sesuai dengan konstruksi idealitas. Tantangan demi tantangan menjadikan idealitas semakin menjauh.

Salah satu tantangan kehidupan sosial keagamaan adalah munculnya organisasi sosial keagamaan yang bercorak ekstrem. Secara sederhana, kelompok ekstrem ini terbagi menjadi dua, yaitu ekstrem dalam tindakan dan ekstrem dalam pemikiran. Ekstrem dalam tindakan dilakukan oleh kelompok yang biasanya disebut sebagai kelompok radikal. Kelompok ini menjadi tantangan dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia dengan aksi-aksi yang mereka lakukan. Eksistensi kelompok ini semakin kuat dengan tingkat penyebaran yang semakin hari semakin luas. Jumlah anggotanya juga semakin banyak dari waktu ke waktu. Kiprah kelompok ini juga semakin luas dan telah tersebar di berbagai

2 Totok Agus Suryanto, "Islam Nusantara: Social Engineering Da'wah Perspective Walisongo". *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 5, Nomor 1, 2022: 141-156.

lini kehidupan[3], mulai dari birokrasi, bisnis, dunia usaha, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Semakin hari keberadaan kelompok radikal semakin menunjukkan eksistensinya.

Kelompok radikal sendirinya sesungguhnya tidak tunggal. Ada banyak jenis dan varian. Antara satu kelompok dengan kelompok lainnya tidak selalu memiliki kesamaan visi dan orientasi organisasi. Tidak jarang di antara kelompok radikal justru terlibat dalam kompetisi yang ketat dalam mencapai sebuah tujuan.[4] Hal ini bisa dimaklumi karena salah satu karakter kelompok radikal adalah eksklusif dan tidak memiliki basis toleransi. Mereka yang berbeda akan mudah dikeluarkan dari kelompok.

Terminologi Islam radikal sendiri sesungguhnya masuk dalam wilayah perdebatan. Tidak semua pihak sepakat dengan kosakata Islam radikal. Ada yang sepakat, ada juga yang tidak. Masing-masing memiliki basis argumentasi tersendiri. Meskipun demikian, Islam radikal itu betul-betul ada. Ia telah eksis dan menjadi bagian tidak terpisah dari kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Ia merupakan realitas yang tidak mungkin untuk ditolak.[5] Meskipun memiliki agenda, model gerakan, dan strategi yang berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, namun mereka memiliki satu titik kesamaan, yaitu mengabsahkan cara kekerasan dalam

---

[3] Mochamad Thoyyib, "Radikalisme Islam Indonesia," *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam* (2018).

[4] Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal Dan Moderat, Diskursus Dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 7–8.

[5] Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia,* (Jakarta: Teraju, 2002).

mewujudkan cita-cita mereka.[6] Meskipun demikian, dalam aktualisasinya tidak sama.

Pada sisi yang lain ada ekstrem dalam pemikiran. Biasanya dikonotasikan pada kelompok yang disebut dengan liberal. Islam liberal di Indonesia memiliki sejarah panjang dan memiliki keterkaitan dengan gerakan pembaruan Islam. Buku yang pertama kali menggunakan kata Islam Liberal adalah karya Greg Barton,[7] lalu disusul dengan Charles Kurzman,[8] dan diperkokoh oleh Ulil Abshar-Abdalla yang mendirikan Jaringan Islam Liberal.[9]

Sebagaimana Islam radikal, Islam liberal juga tidak tunggal. Pemetaan yang dilakukan Zuly Qodir cukup menarik sebagai ikhtiar untuk memahami eksistensi Islam liberal. Menurut Qodir, ada empat tipologi pemikiran Islam liberal, yaitu liberal-progresif, liberal-radikal, liberal moderat, dan liberal-transformatif.[10]

Kedua kelompok ekstrem ini dinilai sama-sama meresahkan. Kelompok ekstrem radikalis meresahkan masyarakat karena tindakan mereka yang kerap mengganggu ketertiban dan kenyamanan. Kelompok liberal meresahkan

---

[6] Wasisto Raharjo Jati, “Radicalism in the Perspective of Islamic-Populism: Trajectory of Political Islam in Indonesia,” *Journal of Indonesian Islam* (2013).

[7] Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia (Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Ahmad Wahid, Djohan Effendi, dan Abdurrahman Wahid*), (Jakarta: Paramadina, 1999).

[8] Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global,* (Jakarta: Paramadina, 2001).

[9] Ahmad Bunyan Wahid. "Questioning Liberal Islam in Indonesia: Response and Critique to Jaringan Islam Liberal." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies,* Volume 44, Nomor 1 (2006): 23-51.

[10] Zuly Qodir, *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002,* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

masyarakat karena pikiran-pikirannya dinilai keluar dari *mainstream* sehingga mengganggu kemapanan yang ada.[11]

Pada titik inilah menjadikan sejarah sebagai bahan pertimbangan signifikan dalam mengembangkan model keberagamaan yang tepat dalam konteks kehidupan Indonesia. Islam yang sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia adalah Islam yang bercorak moderat. Karakter semacam ini tidak bisa tumbuh dan berkembang secara natural. Di tengah kompetisi antar aliran keagamaan, dibutuhkan usaha-usaha serius untuk membumikan Islam yang bercorak moderat.

Pada titik inilah kebijakan moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama penting untuk diapresiasi, dipahami, dan dijadikan sebagai bahan untuk aktualisasi dan implementasi. Lewat berbagai cara diharapkan keberagaan yang moderat semakin membumi di Indonesia. Islam semacam inilah yang terbukti mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tetap harmonis di tengah kemajemukan yang ada.

Buku karya Dr. Limas Dodi,M.Hum., ini menambah daftar kontribusi untuk membumikan Islam moderat di Indonesia. Buku-buku semacam ini seharusnya semakin banyak ditulis dan disosialisasikan. Saya mengapresiasi dan menyampaikan selamat atas terbitnya buku ini. Semoga segera disusul oleh buku-buku selanjutnya.

Tulungagung, 28 Oktober 2022

Prof. Dr. Ngainun Naim, M.H.I.

---

[11] Mujamil Qomar, *Pemikiran Islam Metodologis,* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag

GURU BESAR UIN SUNAN AMPEL - SURABAYA

Sebagai sebuah kebijakan, moderasi beragama telah diluncurkan sejak era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Namun kebijakan ini baru sedemikian kuat daya dorongnya dan "ketenarannya" sejak Yaqut Cholil Qoumas dilantik menjadi Menteri Agama pada Desember 2020. Di tangan Gus Yaqut, demikian panggilan beken Menteri Agama, konsep moderasi beragama diturunkan menjadi serangkaian langkah konkret, mulai pelatihan, pembentukan penggerak, hingga pencanangan tahun toleransi. Istilah moderasi beragama saat ini bisa dikatakan sebagai *word of the Year 2022*.

Di samping menjadi prioritas RPJMN 2020-2024, ada alasan lain mengapa diskursus moderasi beragama menjadi begitu kuat. Yaitu, adanya pergeseran kehidupan keagamaan di Indonesia setidaknya sejak pasca-Reformasi 1998. Sejak saat itu, pengalamaan kehidupan kagamaan di Indonesia memasuki babak sejarah baru.

Sekalipun di dunia internasional, Indonesia tetap dikenal sebagai negara mayoritas Muslim dengan kehidupan keagamaan yang ramah dan toleran serta berhasil mensinergikan antara Islam dengan modernitas, namun kekerasan dan konflik sosial dengan sentimen agama bukan

lagi isu pinggiran. Pengeboman rumah ibadah, penyerangan kelompok agama lain, penyebaran ideologi radikal, penghadapan agama dengan nasionalisme, penyingkiran kelompok lain melalui label sesat dan kafir, hingga permainan politik identitas dengan sentiment agama yang sangat kental, adalah hal-hal yang saat ini sedang kita hadapi.

Inilah kondisi kehidupan sosial-keagamaan kita saat ini. Diskursus moderasi beragama harus dibaca dalam konteks ini. Moderasi beragama lahir sebagai jawaban atas situasi di atas. Sekalipun moderasi beragama terlahir sebagai kebijakan politik, namun karena konteks yang dihadapi berada dalam wilayah kesadaran dan keyakinan, maka ia juga menjadi sebuah gerakan kebudayaan, yang menyasar pada aspek kesadaran. Di sinilah konsep moderasi beragama menjadi sangat penting.

Di dalam buku Moderasi Beragama yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, dinyatakan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku, yang mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Posisi moderat juga merujuk pada keseimbangan antara komitmen terhadap agama yang diyakininya dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Indikator moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Sampai di sini, pemaknaan moderasi beragama tidak bermasalah. Namun pendefinisian atas istilah "moderasi beragama" akan jatuh pada penghakiman, bahkan pelanggaran kebebasan berkeyakinan, jika ia melangkah ke wilayah pemikiran. Sayangnya, kaki-kaki definisi "moderasi

beragama" melangkah hingga ke wilayah pemikiran. Moderasi beragama juga dimaknai sebagai paham keagamaan yang berada di tengah antara konservatisme dan liberalisme, wahyu dan rasio.

Pertanyaannya adalah: Jika moderasi beragama diajukan sebagai antitesa dalam ekstremisme/radikalisme keagamaan yang melazimkan tindakan kekerasan, apakah liberalisme agama membawa ke arah kekerasan? Pertanyaan yang sama juga bisa diajukan dalam kasus pemahaman keagamaan konservatif, apakah konservatisme beragama melahirkan kekerasan?

Pertanyaan ini bahkan bisa diperlebar: Apa standar seseorang disebut sebagai moderat dalam beragama jika didefinisikan sebagai pemahaman keislaman yang seimbang antara rasio dan wahyu? Apakah pikiran-pikiran yang dikembangkan oleh Gus Dur, misalnya, masuk kategori moderat ataukah tidak? Kalau dikatakan ya (atau tidak), apa yang menjadi patokannya. Mungkin bagi pengikut Gus Dur, Gus Dur adalah pemikir Muslim moderat, tapi tidak sedikit yang menuduhnya sebagai liberal karena keberaniannya dalam melakukan reinterpretasi teks agama. Kasus serupa juga terjadi pada mantan Menteri Agama RI. Munawir Syadzali, yang mereinterpretasi ayat-ayat waris. Di sisi lain, banyak kiai pesantren yang mungkin di mata banyak kalangan dinilai sebagai Muslim konservatif. Apakah orang-orang ini akan kita keluarkan dari kamar Islam moderat?

Alih-alih mendefinisikan moderasi beragama (atau dalam hal ini Islam moderat) dengan cara membuat standar keabsahan tentang cara berpikir, istilah 'Islam moderat' sebaiknya diletakkan dalam konteks di mana istilah itu lahir.

Istilah ini lahir sebagai antitesa dari cara beragama yang mengabsahkan penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan. Muslim moderat bisa berwujud pada seorang Muslim konservatif maupun Muslim liberal. Konservatisme dan liberalisme dalam pemahaman keagamaan sama sekali tidak berkonsekuensi pada tindakan kekerasan. Oleh karena itu, istilah 'Muslim moderat' tidak harus mengeluarkan Muslim konservatif dan hanya memasukkan Muslim liberal, atau sebaliknya. Satu hal yang menandai Islam moderat adalah bahwa kelompok ini tidak menyetujui kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan.

Esposito merumuskan definisi minimalis tentang siapa Muslim moderat. Menurutnya, "Minimal, Muslim moderat adalah mereka yang hidup dan bekerja dalam masyarakat, mengusahakan perubahan dari bawah, menolak ekstremisme agama, dan menganggap kekerasan dan terorisme sebagai sesuatu yang haram. …[Muslim] moderat merupakan kelompok masyarakat yang sangat beragam dan bermacam-macam yang bisa menjangkau spektrum dari kelompok konservatif hingga reformis liberal".

Jadi, Islam moderat merujuk pada orang atau kelompok Islam yang melakukan perubahan dari bawah sebagai konsekuensi dari misi dakwah, namun cara-cara yang dilakukan tidak ekstrem dan menolak kekerasan sebagai sarana mencapai tujuan.

Dengan meletakkan definisi Islam moderat seperti ini, kita tidak masuk dalam jebakan praktik inkuisisi pemikiran atau keyakinan seseorang. Yang kita fokuskan adalah pada kekerasannya, bukan pada *mode of thought*-nya.

Dalam konteks inilah sebetulnya buku yang ditulis Sdr. Limas Dodi ini lahir. Buku yang dihasilkan dari riset akademik ini memperkaya diskursus moderasi beragama saat ini. Tulisan-tulisan seperti ini, dengan berbagai cara pandang yang digunakan, semuanya mengarah pada upaya untuk memastikan bahwa Indonesia adalah rumah bersama bagi keragaman bangsa. Salah satu cara untuk memastikan kehidupan damai kita sebagai bangsa adalah dengan memperkuat diskursus dan praktik moderasi beragama.

Surabaya, 17 November 2022

Prof. Dr. H. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag.

PREFACE
CONTEXTUALIZING ISLAMIC RELIGIOUS MODERATION IN A JAVANESE CITY
Prof. Muhamad Ali, Ph.D.

Professor Muhamad Ali is Director of Middle East and Islamic Studies, and Associate Professor of Islamic Studies at the Religious Studies Department, University of California, Riverside, U.S.A.

This book at your hand, authored by Dr. Limas Dodi, M. Hum, from the State Islamic Institute at Kediri, East Java, is a fine contribution to the study of a contested concept of religious moderation from a Muslim perspective contextualized within a local setting of the multi-religious and multi-racial city of Kediri. The conceptualization of the problem of moderation is quite eclectic, making references to a wide range of sources on religion and Islamic studies – both critical (including Western atheists and religion scholars) and normative (such as the non-Muslim and Muslim theologians, scholars, activists, and researchers), alongside interviews of the respondents, also references to the Qur'anic passages and the Constitution of Medina as well as the Indonesian state's philosophy, laws, and local customs in Java. The book reflects a multi-cultural context of the author and the cosmopolitanism of the study of Islam as developed at the State Islamic institutes and universities in Indonesia.

The author begins his discussion with what religious moderation means linguistically in Arabic, English and Indonesia. For example, the author follows the four qualities: *tawazun* (balance), *tawasuth* (middle path), *tasamuh* (tolerance) and *i'tidal* (justice) as formulated by the Nahdlatul Ulama (NU), one of the Islamic organizations in Indonesia. But religious moderation has been interpreted by other Islamic scholars and organizations broadly as an idea and action that is nether extravagant nor thrifty. One of the key characteristics is the middle path between two or more sides or extremes in faith, ritual, and social interaction. The book also endorses the official interpretations of religious moderation as formulated and promoted by the current Ministry of Religion: no exaggeration, no violence, and no extremism. Although the book does not discuss specifically the Ministry of Religion's four indicators: commitment to the nation, tolerance, non-violence, and the accommodative attitude toward local culture, it explores them throughout the chapters of the book. For example, the author defines tolerance as agreement with difference, respect, acceptance of the other and positive attituded toward the other.

In terms of conceptualization, the book sees diversity and religiosity as being intertwined. Diversity is viewed a challenge rather than a threat and it seeks to promote the contextualization of religious moderation in Indonesia. Hence, there is an invitation for the readers to accept the national consensus consisting of the Pancasila, the 1945 Constitution, *Bhineka Tunggal Ika* (Unity in Diversity) and the Unitary State of the Republics of Indonesia, as these fours are in line with religious modernism, democracy, and pluralism.

The book explores four cases of the contextualization of religious moderation: the realm of education, particularly the classical and modern *pesantren*; Muslim women's participation; the Chinese Muslim's experience and the socio-economic standing of the city of Kediri. The author argues that the overwhelming majority of the pesantren is the space of religious moderation; few of the pesantrens that may teach radical ideologies need not be generalized as representing the entire complex of Islamic educational system and culture of Indonesia. However, radical ideologies have come from religious teachers and deserve attention as to the best way to prevent them to emerge and develop.

The question of the role of women, particularly Muslimat NU in the Regency of Kediri is an important one, particularly in challenging radicalism. The author tries to discuss the way in which Muslim women have played their role in cultivating religious moderation and therefore preventing people who lack knowledge and wisdom from being attracted to radical motives and means. Some of the Muslim women have defined radicalism as a religious ideology that condones violence in fulfilling the goal, but many people, perhaps particularly in the West, have tended to associate terrorism with Islam although, Muslims say, not all who become radical are Muslims. The book indicates that several Muslims in Kediri were influenced by a radical ideology as they were found making a bomb although the police force were able to identify and contain their threatening activity. The Muslimat NU used an interpersonal approach to the individuals so they would be prepared to de-radicalize them and to be re-engaged to the society. The Muslimat have carried out a variety of activities such as the

majlis ta'lim or religious learning space for the preachers and teachers disseminating an inclusive, tolerant and moderate religious understanding to the people. The Muslimat NU also worked with the pesantrens as well as colleges and universities to disseminate moderate Islamic interpretations.

The topic of Chinese Muslims and religious moderation is quite interesting: its sociological approach to the diversity and peace building theory are important. This is because Chineseness and Islamic identity have often been antagonistic, but Chinese Muslims ("Muslim Tionghoa"), played an important role in the Islamization process in Southeast Asia, including Indonesia. Commercial cities such as Kediri offer cases in which Chinese-descendants who had become localized for long continue to play their important part in practicing the culture of moderation. The book shows the compatibility of Islam and Chinese philosophy as interpreted by the interviewee: religion as salvation and service, inner peace, social control, solidarity. Chinese Muslims have continued practicing religious moderation in different ways through the cultivation of socio-religious harmony, education, and social interaction. On a similar vein, the author seeks to formulate models of inter-religious harmony as manifested among the Chinese Muslims in Kediri: religious collaboration, socio-cultural interaction, and religious prioritization. Moreover, the author attempts to formulate multi-layered but hierarchical relations between religious leaders, customary law (*adat*) leaders and the government and discusses briefly a peacebuilding theory in explaining the Chinese Muslim and the Communicative Forum of Religious Communities (FKUB) experience in Kediri.

The four case concerns an economic and social change and its connection to religious moderation in the city of Kediri, especially the *Kampung Inggris* (The English Village) of Pare. The author's eclectic use of Karl Marx and Max Weber's *Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism* is interesting although it needs a further, deeper analysis of the way in which individualism, communalism, and religious moderation are related in this case.

The author also cites different religious attitudes: exclusivism, inclusivism, pluralism, eclecticism and universalism, and makes an interesting observation: "We cannot judge the attitude of a religious person in its wholeness because human beings are compartmentalized and limited by their knowledge, choices, and commitment to their faith: some are more flexible than others, shaped by their knowledge and environment. Nonetheless, at the core, religious diversity should be treated by emphasizing the common values of humanity without hindering the religions of the others." (p. 269). The author believes in the role of religion and cultural strategy in dealing with religious diversity in Indonesia, maintaining the path of the founding fathers and the state philosophy of Pancasila as the common ground and the national laws that offer Muslims and non-Muslims alike equal rights and shared responsibilities in advancing the nation to be a peaceful, just, and prosperous one.

This book is informative and important in conceptualization and particularly in the local cases it presents. It is a welcome addition to the scholarship and hence it is recommended for scholars, students and the general readers interested in

the themes of religious moderation and contemporary Islam in Indonesia.

University of California, Riverside, U.S.A., 21 Nov 2022

Prof. Muhamad Ali, Ph.D.

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kegelisahan Akademik

Beberapa dekade terakhir, umat Islam diterpa gelombang problem yang begitu komplek, bukan hanya pada aspek politik, namun telah menyebar ke seluruh elemen kehidupan, termasuk yang paling sensitif adalah aspek teologis. Sejarah mencatat, Islam terpecah ke beberapa golongan berlatar politik dan keyakinan keagamaan, sebulah Syi'ah, Khawarij, Sunni. Kini wajah perpecahan umat Islam merambat ke wilayah ideologis, benturan antar aliran seperti aliran fundamentalisme dan liberalisme menghempaskan pemahaman Islam keluar dari jalur *rahmat li al-alamin*nya.[1] Problem ideologis ini, membawa pemahaman bahwa di tubuh umat Islam sendiri masih mengalami keretakan.

Fundamentalisme, telah membawa Islam pada kejumudan yang begitu kelam. Bermaksud mempertahankan ajaran dasar Islam, namun menjauhkan Islam dari kemajuan, relevansi dan futuristik sebagai ciri Islam modern. Menganggap segala ritual kultur dan pemikiran

[1] Haide Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme* (Yogyakarta: LKiS, 2021), 21-22.

visioner sebagai bentuk *bid'ah, tahayyul* dan bahkan *khurafat*.[2] Segala pembaruan pemikiran Islam ditolak, dilawan, bahkan dilenyapkan.[3] Fundamentalisme meyakini bahwa Islam harus kembali ke akar dasarnya, tanpa pembaruan dan hanya berputar sekitar teks. Seketika, ajaran Islam tampak seperti melawan dialektika dan estetika.

Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah yang ingin melakukan upaya "pemurnian" ajaran Islam dari segala bentuk bid'ah dan tahayul adalah terjerumus ke dalam bentuk pemikiran dan sikap fundamentalisme. Upaya pemurnian tersebut, melahirkan kelolompok-kelompok aliran keras yang selalu bertindak irrasional dan tidak jarang mengarah pada anarkisme, sebutlah gerakan-gerakan Wahabi di Saudi Arabia, Sayid Qutub di Mesir, Khumaini di Iran dan sebagainya.[4] Gerakan-gerakan ini berakar dari pemikiran fundamentalis-tekstualis yang bercorak dua arah; memahami ajaran Islam secara tekstualis bertumpu pada dasar kata, mengingkankan adanya puritanisme untuk mengembalikan ajaran Islam.

E. Marty (1999) dalam Adzim menilai, gerakan fundamentalisme bukan hanya menimpa ajaran Islam, seluruh agama terjangkit penyekit fundametalis, seperti

---

[2] Lihat dalam Nunu Burhanuddin, "Akar Motif Fudnamentalisme Islam: Reformulasi Tipologi Fundamentalisme dan Prospeknya di Indonesia", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, 2(2016): 199-210.

[3] Periksa dalam Tamat Suryani, "Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme", *Jurnal Keagamaan Nasional* 3, 2(2017): 272-273.

[4] Askar Nur, "Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam", *al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, 1(2022): 16.

fundamentalisme Kristen, fundamentalisme Hindu, Budha dan sebagainya. Itu menandakan bahwa fundatalisme menjadi masalah semua agama.[5] Ada dua pemikiran Islam menurut kaum fundamentalis, *pertama* prinsip *opposition* (perlawanan). Melawan semua bentuk ajaran Islam yang dianggap membahayakan ajaran mereka, baik itu sekularisme, modernisme ataupun westernisme. Asumsi "berbahaya" yang dimaksud, adalah bertentangan, berlawanan, tidak sama dengan apa yang menjadi pemahaman kaum fundamentalis. *Kedua,* prinsip *tekstualis-skriptualis.* Kelompok ini menolak secara keras sikap kritis dan dialektika pembaruan atas interpretasi teks al-Quran dan al-Hadist. Menurut mereka, teks atau nash harus dipahami seperti apa adanya saja (tekstualis) tanpa ada nalar dan interpretasi bentuk apapun.[6]

Anah (2021) menyebut suatu temuan menarik tentang paham klasik Islam fundamentalisme, ternyata mereka sedang bersikeras memperjuangkan ajaran teologis yang disebut *al-wala' wa al-bara'* (doktrin kesetiaan dan pemisahan).[7] Doktrin ini secara mengibarkan pemahaman bahwa umat Islam tidak boleh melakukan komunikasi dan interaksi dengan umat beragama lainnya, interaksi dan komunikasi hanya sesama umat Islam saja. Kecuali umat Islam berada pada jalur kelemahan dan keterpurukan, maka boleh bertumpu pada non muslim, dengan catatan ketika

[5] M. F. Adzim, M. F; N. S. Vrikati, "Studi Islam Dalam Kaca Mata Normatif Dan Historis". *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman* 8, 3 (2020): 441–452.

[6] A. Ahda, "Tinjauan Kritis Fundamentalisme Dan radikalisme Islam Masa Kini. Kuriositas" 11, 1 (2017): 19–36.

[7] S. Anah, S, "Masyarakat Islam Indonesia Pada Abad Modern Dan Kontemporer", *Jurnal Keislaman* 4, 2 (2021): 190–214.

telah kuat harus merebut kembali superior umat Islam. Ajaran teologis ini secara tidak langsung mengharamkan sikap toleransi, kerukunan umat beragama dan bahkan hak asasi manusia. Inilah yang menjadi problem, pemikiran fundamentalisme membuat Islam menjadi inklusif.[8]

Bagi pemahaman fundamentalis, bahkan memandang bahwa segala kerusuhan dan konflik berdarah yang melibatkan agama adalah perbuatan dari penganut non muslim. Mereka berpendapat, agama Katolik, Protestan dan Kristen dikenal tipe umat yang memiliki etos kerja tinggi, gigih memperjuangkan keinginannya, termasuk ketika melakukan dakwah. Oleh karena itu, non muslim lah yang ditengarai kelompok paling bertanggungjawab terhadap segala ketidakharmonisan sosial yang memantik konflik agama seperti yang menimpa agama-agama Islam, Kristen, Hindu di Bali, Bandung, Poso dan lain-lain. Sehingga kaum fundamentalis merasa berkewajiban untuk memberatan kaum non muslim sekalipun itu melalui kekerasan. Asumsi tidak berdasar inilah yang membumbui terjadi konflik agama.

Jika ditelusuri, banyak antitesa yang menyangkal pendapat kaum fundamentalis tantang konsep *al-wala' wa al-bara'*. Semisal ontologi kata "Islam" saja sudah mampu menjadi argumentasi, kata "Islam" merupakan kosa kata yang seakar dengan kata "salam", yang memiliki arti "perdamaian, ketentraman, ketenangan dan kerukunan".[9] Dalam al-Quran, kata salam bukan hanya menyiratkan

[8] Asep Arsyul Munir, "Agama, Politik dan Fundamentalisme", *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, 1(2018): 149-169.

[9] Jaelani, "Menyorot Fudnamenalisme-Radikalisme Islam: Tinjauan Historis atas Gerakan Hizbugg Tahrir Indonesia", *Jurnal*

tentang prinsip toleransi dalam beragama, melainkan secara moral memiliki dua perilaku keagamaan yakni sikap bekerjasama dengan kaum non muslim dalam kehidupan dan bertugas mengibarkan panji kerukunan umat beragama. Seperti yang tersurat dalam al-Quran surat al-Furqan ayat 63, bahwa makna "salam" dalam kaitannya dengan bersikap kepada non muslim yaitu umat Islam wajib mengingatkan non muslim agar menyembah kepada Allah, namun jika mereka tidak menerima atau angkuh, maka umat Islam meninggalkan sembali mengucapkan salam.[10]

Pada wajah berlawanan, muncul juga pemahaman ajaran Islam yang sangat berbanding terbalik dengan fundamentalisme. Jika fundamentalisme memiliki pemikiran tekstual dan mengikuti apa adanya nas pada kondisi apapun, jika liberalisme menafsirkan nash al-Quran dan hadist secara bebas, bahkan identik keluar dari lingkaran teks. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian memunculkan ide pembaruan pemikiran Islam, golongan inilah yang mencoba menafsirkan al-Quran bukan hanya kontekstual, namun juga bebas. Mereka menganjurkan berijtihad, menolak taklid, menentang otoritas teks bahkan menafsirkan ajaran Islam sesuai pola pikir *maslahah* yang subyektif. Mereka juga mendewakan akal (*ra'yi*). Inilah yang dikenal dengan kelompok "Islam Liberal".[11]

Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan Ekonomi dan Humaniora 7, 2(2021): 1-12.

[10] Djamiatul Islamiyah, "Distinction: Islam and Islamic Fundamentalism", *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu: Kajian Kebudayaan dan Keislaman* 16, 32, (2020): 88.

[11] Tiar Anwar Bachtiar, *Pertarungan Pemikiran Islam di Indoensia: Kritik-Kritik terhaap Islam* (Jakarta: Pustaka ala-Kautsar, 2017), 86.

Dalam perkembangannya, Fachri Aly dan Bachtiar Effendi (1986) melihat ada empat bentuk Islam liberal yang berkembang di dunia, begitupun di Indonesia, yaitu modernisme, universalisme dan neo modernisme. Modernisme memang jarang disebut sebagai suatu paham ajaran, karena lebih identik dengan sifat massa, namun para pemikir modern kerap menamai pemahamannya dengan *modernisme,* secara eksplisit, aliran modernisme mencurahkan pemikiran yang menekankan pada aspek rasionalitas.[12] Tokoh pemikir seperti Nurcholish Madjid dan Djohan Effendi kerap menjadi *icon* perintis pemikiran Islam modernis. Namun Kazuo (1999) menilik pemikiran Islam modernis berbeda dengan liberalisme, modernisme menafsirkan nash secara bebas namun tetap berada pada lingkaran teks, sekalipun itu nilai-nilai substansialnya saja. Sementara liberalisme pada sisi-sisi tertentu untuk mencapai maslahah subyektif, rela keluar dari lingkaran teks. Sementara neo modernisme lebih visioner lagi, yakni ajaran Islam harus terlibat pada segala proses modernisme, bahkan harus menjadi ajaran yang paling unggul dengan cara menghilangkan tradisi keislaman yang lama.[13]

Universalisme lebih tepat dimaknai golongan yang mendukung modernisme, namun lebih umum yakni dengan mengusung ajaran Islam harus bersifat universal. Konsep universalisme bukan hanya pada ranah ideologi, namun juga geografis. Secara ideologi, ajaran Islam

---

[12] Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam, Antara Modernisme dan Posmodernisme.* M. Imam Aziz; M. Jadul Maula, (Yogyakarta: LKiS, 2017), 29.

[13] Abdul Basid, "Islam Nusantara: sebuah Kajian Post Tradisionalisme dan Neo Modernisme", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 5, 1(2017): 1-14.

harus mampu ditafsirkan dengan mengusung pemikiran *rahmat li al-alamin,* bukan pada kandungan teks literal atau bertentangan dengan prinsip kedamaian dunia. Secara geografis, ajaran Islam tidak hanya memandang sisi lokalis, temporal ataupun nasionalisme, melainkan harus dipandang secara global, mendunia. Sebab masalah akan muncul jika agama Islam hanya bersifat parsialistik atau lokalis.[14] Perintis dan pemikirnya seperti Jalaluddin Rahmad, Endang Saefudin Anshari dan M. Amien Rais.

Menyikapi kedua kutub ajaran Islam tersebut, Arif Gunawan mengatakan bahwa keduanya berakar dari kata fundamentalisme; fudnamentalisme liberal (Islam libaral). Fundamentalisme literal percaya bahwa segala problem sosial bisa dintuntaskan melalui cara-cara formalisasi syariah, hukum yang digunakan di Indonesia harus menggambarkan sifat literlek al-Quran dan hadist, hukum Allah adalah hukum tekstual. Penerapan syariah Islam bersifat simbolis, bukan substantif. Sementara fundamentalisme liberal, meyakini sebaliknya, bahwa kebebasan interpresi al-Quran adalah solusi dari semua masalah sosial. Tidak jarang, kaum ini melepaskan dari teks dan melihat agama dari sisi memaslahatan sebagai imbas dari kebebasan berpikir.[15]

Antara fundamentalisme dan liberalisme, sama-sama menuai benturan idelogis, tidak jarang ulah paham ini melahirkan kontak konflik agama. Fundamentalisme

---

[14] Asep Maulana Rohimat, *Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil'alamin* (Surakarta: IAIN Surakarta Press, 2017), 120.

[15] Lihat dalam Arif Gunawan Santoso, *Pergeseran Strategi Fundamentalisme Islam: Studi HTI sebagai Gerakan Sosial* (Ciputat: Irama Offset, 2017), 201.

mengarah pada anarkisme, terorisme, puritanisme, seperti keberadaan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Wahabi, Persatuan Islam Indonesia (Persis) dan sebgainya. Sementara di sisi lain, liberalisme menciptakan pola interpretasi ajaran Islam yang sangat bebas tanpa batasan-batasan. Tipe pemikiran liberalis, khawatir melupakan nash dan mengedepankan akal pemikiran manusia yang terbatas. Lebih condong pada pemikiran sekular dan rentan keluar dari jalur syariah. Karena bagaimanapun, ajaran Islam tidak hanya tekstual, tapi juga kontekstual. Tidak hanya akal, tapi juga wahyu. Maka kedua paham ajaran Islam ini, sebenarnya mengalami banyak kelemahan, dimana para sarjana muslim menamainya dengan *islam kiri* dan *islam kanan*.[16]

Menilik kedua masalah tersebut, konsep moderasi Islam hadir sebagai paradigma dan wacana baru dengan menawarkan konnsep "jalur tengah" ajaran keislaman yang mengedepankan nilai-nilai *ukhuwah, plural* dan *tasamuh.* Suatu ajaran Islam Islam yang bertujuan menciptakan kesatan umat, membangun peradaban dan memanusiakan manusia seperti yang tertera dalam al-Quran surat al-Furqan ayat 67, al-Isra' ayat 29 dan 110, dan banyak ayat-ayat lain yang melegitimasi bahwa umat Islam harus bersikap moderat. Sikap beragama yang tidak condong liberal, dan tidak pula fundamen.[17] Ajaran Islam model ini dikenal lebih populer disebut "moderasi beragama" atau Islam moderat.

---

[16] Ahmad Bustomi; Zuhairi, "Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi dalam Pandangan Islam", *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 5, 2(2021): 158-159.

[17] Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 59.

Istilah moderasi agama, berangkat dari istilah "moderasi" dan "agama". Istilah moderasi berarti "jalan tengah", tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, namun bersikap adil dari setiap tindakan sosial. Sementara "moderasi agama" berarti cara beragama dengan menempatkan diri pada jalur tengah, tidak bersikap ekstrem dan tidak pula berlebih-lebihan dalam menjalani ajaran Islam.[18] Melainkan memosisikan dirinya berada di tengah-tengah. Prinsip moderasi beragama ada dua; adil dan seimbang. Yang dimaksud bersikap adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada yang berhak. Sementara seimbang, berada ditengah diantara dua kutub; semisal intengrasi antara prinsip beribadah dan prinsip muamalah. Kaum moderat memnandang beragama dengan cara melakukan penghambaan kepada Allah sebagai bentuk menjalankan perintah-Nya serapa mengupayakan terciptanya kemuliaan bagi manusia. Sedangkan kaum ekstrem, terjebak pada prakterk beragama kepada Allah namun dengan mengesampingkan sosial kemanusiaan.[19] Fundamentalisme menitikberatkan pada penafsiran apa adanya teks (tekstualis mutlak) sedangkan kaum liberalisme bertumpu pada kekuatan akal semata yang bebas menerka (kontekstualis murni). Namun Islam mo-

---

[18] Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), 109.

[19] Asep Abdurrohman, "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam", *Rausyan FIkr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, 1(2018): 29-30.

derat, ada diantara tentah-tengah; pada sisi tertentu tekstual dan pada sisi yang lain kontekstual.

Melawan kaum ekstrem, solusinya hanyalah menanamkan konsep moderat. Dalam Islam konnsep moderat dinamakan dengan *washathiyah,* ketika telah diresmikan oleh pemerintah Indonesia menjadi *moderasi agama,* suatu pemikiran dan perilaku keagamaan yang berasaskan moderat (*washat*). Saat ini Kementerian Agama lagi *getol-gotol*nya merumuskan konsep implementatif moderasi beragama. Suatu cara pandang beragama yang moderat, mengamalkan agama tidak ekstrem, baik ekstrem *kanan* maupun *kiri.* Kaum ekstremisme seperti radikalisme dan fundamentalisme melahirkan ujaran kebencian (*hate speech*) hingga menimbulkan konflik hubungan antar umat beragama yang kini *booming* dan melanda krisis toleransi di Indonesia. Konsep moderasi agama menjadi pembicaraan dan pencarian konsep implementasi yang ideal sesuai dengan sifat multikulturalisme di Indonesia.[20]

Oleh karena itu, pencarian konsep implementasi moderasi agama di Indonesia dan global, perlu dijembatani melalui kajian-kajian historis, otorisasi (al-Quran dan al-Hadist), filosofis dan *maqasidi* untuk menemukan pijakan ideal. Buku ini menyajikan konsep moderasi agama sekaligus implementasinya pada masyarakat beragama. Buku ini berupaya menjawab kegelisahan umat beragama, menemukan titik konsepsi moderasi agama di tengah perumusan konsep. Disinilah letak signifikansi dan *novelty* buku ini, menawarkan konsep moderasi agama

[20] Abdullah Munir dkk., *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia* (Bengkulu: Zigie Utama, 2019), 32-33.

yang memadukan antara sisi ontologis dan epistemologis dilengkapi dengan praktik implementasi. Menjadi konsepsi ideal tentang moderasi agama.

B. Metode Penelitian

Buku ini mengkaji konsep dan implementasi tentang moderasi beragama di Indonesia secara hierarkis. Pembahasan dimulai dengan sajian teoritis yang berlatar sejarah dan sumber ontologis. Pada bagian ini, metode penggalian data dilakukan secara pustaka (*library research*) atau dikenal dengan penelitian literature.[21] Oleh karena itu, pada bagian ini sumber pustaka menjadi data primer, namun penentuan data primer disesuaikan dengan autentisitas sumber tersebut. Jika sumber pustaka tersebut merupakan literatur utama (*grand theory*), maka menjadi sumber primer, namun juga berupa literatur pengembangan (*midle theory*) maka masuk kategori sumber sekunder. Beberapa sumber primer yang diambil dari buku ini banyak golongan dari sumber utama yang menjelaskan tentang konsep moderasi agama (*washathaniyah*). Sumber-sumber rujukan kitab inilah menjadi sumber primer. Karena kriteria sumber primer minimal ada tiga; 1) bersifat *grand theory;* 2) ide utama dari seorang pengarang; dan 3) dirujuk benyak ilmuan.[22]

Karena termasuk penelitian pustaka, maka dibutuhkan hipotesis yakni asumi penulis yang sangat menda-

---

[21] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

[22] I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 81-83.

lam tentang suatu obyek. Hipotensis yang dibentuk berdasarkan pada penguasaan peneliti terhadap konsep moderasi agama, dari hipotensis itulah dikembangkan menggunakan sumber primer dan sekunder. Oleh karena itu, kajian literatur sebenarnya merupakan justifikasi dari hipotesis. Karena menjadi justifikasi, maka literatur-literatur yang diambil telah dipilah secara kualitatif dan penuh pertimbangan autentisitas. Pengambilan sumber data pada penelitian literatur sangat menentukan sejauh mana kajian tersebut parsial atau komprehensif.[23]

Pemilihan sumber pustaka, pada penelitian kualitatif disebut dengan proses analisis data. Salah satu teori analisis data yang familiar digunakan adalah model Miles dan Hubermand, dimana pemilihan pustaka sebagai sumber penggalian data dilakukan melalui tiga pola; 1) reduksi, memilih data yang sesuai dengan pedoman pertanyaan dan membuang yang tidak sesuai; 2) editing, yakni memilih yang sesuai dengan rumusan masalah dan membuang yang tidak sesuai; 3) menyimpulkan, yakni menjadikan data final baik berbentuk naratif maupun tabel sebagai hasil akhir analisis data. Proses ini memastikan bahwa penelitian kualitatif pada studi literatur memiliki nilai realibel yang setara dengan penelitian di lapangan.[24]

Selain *kualitative liberary*, penelitian ini juga bersifat *mixed doble research* yakni mamadukan dengan penelitian lapangan untuk melengkapi konsep moderasi agama yang diambil dari penelitian literature. Untuk yang penelitian lapangan (*field research*), penulis memilih kualitatif dengan

[23] Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana, 2020), 49.

[24] Ibid., 9.

alasan hanya kualitatif-lah yang mampu menggali peristiwa sampai ke dasar data.[25] Pendekatan yang digunakan bersifat fenomenologi, dimana penulis menyelami dan kemudian memotret praktik keberagamaan sebagai implementasi korelatif dengan teori-teori moderasi agama. pendekatan ini disebut-sebut paling efektif karena menawarkan kerangka sosial yang akurat.[26]

Pada tahap penggalian data, hanya menggunakan teknik tunggal yakni interview. Meskipun sebenarnya masih ada observasi dan dokumentasi pada penelitian kualitatif, namun penulis lebih memilih tunggal, asumsinya, penulis telah memahami realiatas soial pada obyek termasuk *activity* dan *human* sebagai bagian penting dari *place* pada penelitian kualitatif. Maka untuk itu, hanya memerlukan interview untuk menjawab hipotesis yang dimiliki. Selain hasil interview, pada penyajian data, didukung oleh data-data teoritis yang bersumber dari beberapa jurnal penelitian, berita dari sumber akurat dan pendapat pada tokoh, sehingga hasil penggalian data bisa bertemu langsung dengan hipotesis, [27] sehingga menghasilkan temuan yang valid.

C. Desain Penelitian

Kajian ini terdiri dari beberapa bab pembahasan yang satu sama lain saling berhubungan dan membentuk sajian komprehensif, yakni memulai dengan dasar pijakan,

---

[25] Wijaya, H., *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik.* (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray., 2016), 72.

[26] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 6-7.

[27] John W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Trans* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 11-12.

hipotesa, pendekatan, problem dan kemudian mengusung solusi dari wacana, problem tersebut. Nilai komprehensif menjadikan kajian ini mudah dipahami dan sistematis. Bab pembahasan tersebut adalah:

Bab I, berisi pendahuluan yang berisi tentang kegelisahan akademik yang menyajikan problem-problem krusial dan mutakhir dilengkap dengan hasil-hasil penelitian yang akurat, kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan, jenis dan teknik penggalian data yang bersifat literatif. Terakhir pada bab ini berisi desain penelitian penulisan buku ini. Pada bab 1 inilah, bisa pula dikatakan keragka buku yang diawali dengan penyajian masalah, pendekatan dan formulasi.

Bab II berisi tentang konsepsi moderasi agama yang dimulai dengan mengkaji tuntutan adanya moderasi di tengah realitas keragaman dan keberagamaan, konsep moderasi agama, karakteristik, peran moderasi agama diantara himpitan kaum kanan dan kiri serta futuristik moderasi agama ke depan.

Bab III berisi tentang korelasi antara realitas keragaman dan moderasi agama. Pada bab ini dikaji fakta keragaman, signifikansi keragaman dan moderasi agama, hubungan keragaman dan moderasi agama.

Bab IV bab ini membahas tentang relevansi moderasi agama yang dapat diterapkan di Indonesia. Kajian ini penting dilakukan, untuk mengukur signifikansi dan kesesuaian antara konsep moderasi agama dengan nilai-nilai sosial, kenegaraan dan prinsip agar moderasi agama mampu diterapkan. Kajian ini membahas relevansi dan kontekstualisasi moderasi agama dengan beberapa hal;

keragaman, kemajemukan, identitas, radikalisme dan pluralisme.

Bab V pada bab ini telah mamasuki pembahasan mengenai implementasi moderasi agama. Setelah mengkaji konsepsi teoritis pada bab sebelumnya, penulis menyajikan sajian implementatif. Bagian ini memotret kontekstualisasi moderasi agama di pesantren, dari kajian kurikulum moderasi agama pada pesantren klasik, modern. Kemudian dilengkapi model implementasinya di kedua corak pesantren tersebut.

Bab VI, mengkaji praktik moderasi agama yang dilakukan oleh komunitas perempuan Muslimat Nahdhatul Ulama di Kediri. Organisasi ini bergerak menciptakan kerukunan antar umat beragama melalui konsep moderasi. Salah satu pola yang dibangun adalah menghadirkan deradikalisasi melalui dakwah.

Bab VII, bagian ini membahas hasil penelitian tentang praktik moderasi agama yang terpotret dari realitas sosial masyarakat Muslim dan Tionghoa di pusat Kota Kediri. menyajikan eksistensi, pola sosial, keragaman dan praktik moderasi agama sehingga menimbulkan pemandangan sosial yang rukun. Pada bab ini pula dibahas analisis berupa implikasi sosial dan religius dari adanya praktik moderasi agama.

Bab VII, bab ini mambahas tentang praktik moderasi agama yang dilakukan oleh masyarakat kampung inggris, Pare Kediri. menampilkan pola moderasi agama dari aspek perubahan religius dan ekonomi. Bahasan pertama dimulai dengan memotret sosial ekonomi, korelasi dan

perubahan sosial. Dan ditutup dengan kajian moderasi agama sekaligus implikasinya.

BAB II
KONSEPSI MODERASI BERAGAMA

A. Keragaman dan Keberagamaan: Keharusan Moderasi Agama

Secara global, bukan hanya Indonesia, keragaman diyakini goresan takdir. Datang tanpa diinginkan, tidak perlu diminta, pemberian Tuhan yang maha mencipta, tidak untuk dinego tapi diterima tanpa bisa menghindar (*taken for granted*). Nyaris di semua negara, termasuk yang paling komplek Indonesia, keragaman suku, budaya, etnis dan agama menjadi realitas. Namun tidak ada satu negara-pun, yang sepadan dengan keragaman Indonesia. Bukan hanya memiliki enam agama resmi (Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu), ada ribuan bahasa, suku, tradisi yang hidup di Indonesia. Bayangkan, Badan Pusat Statistik (BPS) pernah melarsir pada tahun 2020 jumlah suku dan cabang suku sebanyak 1331 dan 633 merupakan suku-suku bersar.[28] Berapa bahasa, tradisi, budaya, prinsip, karakter, yang terpola di Indonesia.

[28] Syamsul Bahri, "Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikulturalisme di Indonesia (Landasan Filosofis dan Psikologis Pengembangan Kurikulum Berebasis Multikulturalisme)", *Jurnal DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran* 19, 1(2018): 69-88.

Benar-benar suatu keragaman dan keberagamaan yang indah dan suatu keniscayaan.

Uniknya, meskipun agama menjadi entitas yang paling banyak dipeluk dan dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat, namun cara mengekspresikan agama di masyarakat tidak bersifat tunggal, tidak benar-benar menyatu sekalipun sesama satu agama. Ekspresi beragama dipengaruhi oleh ratusan bahkan ribuan kepercayaan leluhur, tradisi nenek moyang. Tradisi dan budaya yang sangat beragam, juga mempengaruhi cara beragama, bahkan interpreasi dari sifat kebudayaan, tidak jarang dianggap sebagai produk agama. Clifford Geertz, seorang peneliti dari Inggris, meneliti persinggungan budaya dan agama pada masyarakat Jawa, mengatakan hal yang sama bahwa praktik keagamaan yang plural dipengaruhi oleh pemahaman agama dan tradisi nenak moyang.[29] Tanpa disadari, praktik tersebut mendarah daging sampai mengental secara turun temurun.

Dengan kompleksitas keragaman tersebut, bisa dibayangkan betapa banyak pandangan beragama, keyakinan, prinsip, paradigma dan kepentingan-kepentingan umat beragama. Semua perbedaan itu bercampur aduk, bersinggungan, bersentuhan, bergesekan bahkan sampai pada wilayah-wilayah sensitif. Sekalipun memercik konflik bernuansa keagamaan, namun konflik tersebut dapat diatasi dan Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat perdamaian tertinggi. Prestasi tersebut disebabkan oleh ideologi Pancasila, Islam moderat dan

[29] Lihat dalam artikel Salh Yucel, "Fethullah Gulen: Spiritual Leader in a Global Islamic Context", *Journal of Relegion & Society* 12, 2(2010): 9.

ulama-ulama yang mengusung persatuan dan toleransi. Semua perbedaan disulap menjadi *hikmah,* potensi, dikembangkan secara kilas balik melahirkan kentraman.[30]

Di kalangan sarjana, keragaman agama bukan hanya terlintas pada ruang-ruang kepercayaan dan keyakinan, akan tetapi menjurus pada aspek ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan ritual dan praktik beragama. Perbedaan menafsikan ajaran agama terjadi pada satu wujud agama, seperti berbagai khazanah penafsiran para ulama dan pemikir Islam. Hal demikian bukan fenomena tabu, karena perbedaan bukanlah masalah, melainkan bagian dialektika keilmuan. Pangkal paling mencolok akibat perbedaan penafsiran tersebut adalah masing-masing kelompok mendirikan aliran yang diyakini kebenarannya. Terbukti dengan banyaknya aliran-aliran, sakte-sakte, sempalan, baik aliran madzhab maupun teologis.

Semisal dalam Islam, ada beberapa mazhab fikih yang berbeda-beda memberikan ketetapan hukum dalam beribadah. Madzhab Syafi'I, Hambali, Maliki dan Hanafi, antar madzhab tersebut secara berbeda-beda memutuskan hukum suatu praktek beribadah, ambillah seperti shalat, zakat, puasa, dan nikah, muamalah, dan sebagainya. Jika ditelusuri, keragaman tersebut lahir seringin perbedaan konteks dan zaman. Itulah megapa pada ajaran madzhab Syafi'iyah saja dikenal dua pendapat; pendapat lama (*qaul qadim*) dan pendapat baru (*qaul jadidd*). Keragaman tersebut juga dipengaruhi oleh eksistensi nash al-Quran juga yang terdiri dari nash yang besifat pasti (*qath'i*) dan sangkaan

[30] Sebagaimana dikutip oleh Geoffrey Hughes, "European Social Antropology in 2018: An Increasingly Recursive Public", *Social Antropology* 10, 1(2019): 1469-1485.

(*dzanni*) tergantung pada konteks yang manafsirkan dan dimana tempat hukum *dzanni* itu dipraktekan. [31]

Menyadari keragaman demikian, Indonesia menancapkan ideologi Pancasila sebagai tonggak kuat membentengi keragaman.[32] Melalui asas demokrasi yang diusung, seluruh perbedaan pandangan dan kepentingan diakomodasi menjadi suatu kesatuan yang elegan. Keragaman dilindungi sebagai keniscayaan, bukan suatu patologis. Semua agama diakui, dijalankan tanpa mengusik satu sama lain, saling bekerjasama pada ruas jalan kesadaran bersama pada batang tubuh Pancasila, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dianggap suatu hak dasar manusia untuk memeluk dan meyakini agama, dipraktekan ritual tanpa ada paksaan dan gangguan dari agama lain yang berbeda.[33]

Sekalipun demikian, bukan berarti dibiarkan menggelinding lepas tangan tanpa kontrol dan kebijakan. Diingat, bahwa ancaman terbesar sebagai sebuah negara yang beragam, multikultural dan plural adalah konflik bernuansa agama. Kenapa demikian? Karena agama apapun di dunia, memiliki sifat dasar keberpihakan yang kaya akan muatan-muatan emosional dan budaya bagi para penganutnya. Bahkan bagi kaum fanatisme, agama dianggap benda suci yang sangat sakral, mistis dan

---

[31] Zaenuddin Hudi Parosojo; Mustaqim Pabbajah, "Akomodasi Kultural dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, 1(2020): 1-28.

[32] Giyandra Meisarani, "Resolusi Konflik di Dunia Islam: Studi Kasus al-Shabaab di Somalia", *Jurnal Hubungan Internasional* XII, 2(2019): 284-285.

[33] Lihat dalam Sam Haris, *the End of Faith : Religion, Terror and the Future of Reason* (New York: Norton, 2005), 25.

angker. Tidak jarang, kesakralan tersebut menganggap semua perbedaan pandangan orang lain dianggap keliru dan kafir. Fanatisme yang mengarah pada sikap ekstrem inilah, musuh utama keberlangsungan negara yang penuh keragaman.

Konflik bernuansa agama bukan hanya menimpa antar agama, melainkan ke seluruh aspek keyakinan, termasuk aliran keagamaan dan madzhab pada satu agama yang sama (sektarian) atau bisa juga terjadi pada kelompok agama yang berbeda (komunal). Umumnya, konflik bernunsa agama ini dimulai dari sikap saling menyalahkan paham ajaran agama seseorang, merambat ke aliran-aliran, menutup diri dengan pemahamnnya sendiri, menuduh pendapat orang lain bukan termasuk agama yang benar, sehingga memuncak sampai tersulut konflik sektarian dan konflik komunal.[34] Bibit-bibit konflik bernuansa agama kerapkali memang dimulai dari stigma dan asumsi.

Konflik yang dilatari agama bahkan lebih dahsyat dibanding dengan konflik lainnya, meningat klaim kebenaran interpretasi ajaran agama menjurus langsung pada aspek keyakinan manusia, yang mengandung nilai psikologis dan spiriualis. Konflik antar agama maupun aliran agama sekterian dan komunal, sebenarnya, tersulut bukan keinginan dari Tuhan, akan tetapi lebih banyak disulut oleh kepentingan pribadi dan golongan. Pikiran dan akal manusia sangat terbatas, sementara kitab suci keagamaan dicipta pada arah pandang yang luas.[35] Jadi jika

---

[34] Lihat dalam Christoper Hichens, *God is Not Great* (Toronto: McClelland & Stewart, 2007), 7-14.

[35] Akhmad Rizqon Khamami, "Dialog Antar-Iman sebagai Resolusi Konflik, Tawaran Mohammed Abu Nimer", *al-Tahrir* 14, 2(2014):

berbicara masalah kebenaran, hasil interpretasi manusia yang berbeda, belum tentu benar, namun Tuhan saja yang maha benar. Oleh kerena itu, sejatinya sebuah perbedaan tidak menjadi masalah serius.

Islam merupakan agama mayoritas di Indoensia. Perbedaan berpikir dan pengetahuan sudah sangat biasa terjadi. Indoensia juga dikenal dengan negara paling kompleks budayanya. Jadi konflik perbedaan pemahaman agama bisa saja disulut oleh keragaman budaya. Pada perkembangannya, perbedaan penafsiran ajaran agama terbagi ke dalam tiga kutub aliran keagamaan, yakni fundamentalism, liberalisme dan titik tengah diantara kedua aliran tersebut adalah aliran moderat. Fundamentalisme dan liberalisme kerapkali melahirkan sikap-sikap beragama yang ekstrem. Fundamentalisme terlalu mendewakan makna apadanya teks, sedangkan liberalisme bersikap sebaliknya yakni mendewakan akal dan ilmu pengetahuan. Keduanya disebut aliran ekstrem fundamen dan ekstrem liberal, atau juga aliran Islam *kiri* dan aliran Islam *kanan*.[36] Kedua aliran agama inilah yang sampai detik ini merasupi keragaman dan pluralisme di Indonesia, sering menyulut konflik.[37] Oleh karena itu, keduanya perlu dilakukan moderasi melalui pemahaman agama yang moderat (*washathiyah*) yang disbeut dengan konsep "*moderasi beragama*".

249-271.

[36] Sandy Nur Ikfal Raharjo, "Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012-2013", *Jurnal Kajian Wilayah* 6, 1(2015): 35-51.

[37] Wira Hadi Kusuma, "Agama dan Resolusi Konflik (Analisis terhadap Konflik Keagamaan di Indoenesia)", *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 15, 1(2015): 1-12.

Kehadiran konsep moderasi agama bertujuan untuk merumuskan titik temu antara dua kutub ekstrem yang saling bertentangan sebagai langkah taktis beragama yang *washatan.* Untuk itu, untuk menyamakan persepsi dan konsep moderasi yang sebenarnya, perlu dipahami secara benar konsep moderasi beragama sebagai implikasi dari sumber autentik yakni al-Quran dan al-Hadist. Konsep moderasi agama menegaskan bahwa agama mengajarkan perdamaian, mencegah kerusakan dan mengobati patologi sosial. Agama menciptakan moral, etika dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[38] Penghargaan akhir dari moderasi agama bagi negara adalah penguatan komitmen bersikap moderat dalam kehidupan keagamaan.

Keharusan moderasi agama di Indonesia adalah keniscayaan, tidak mungkin dihilangkan. Dalam konteks keragama agama dan budaya, ide dasar moderasi agama yang diangkat adalah mencari titik temu persamaan, bukan malah memperuncing suatu perbedaan. Moderasi agama memperjelas posisi, memahami ajaran agama secara komprehensif, menghargai pendapat dan mengedepankan konsep *tabayyun* dan *musyawarah.*[39] Secara rinci, ada tiga alasan mendasar kenapa moderasi agama perlu diterapkan di negara ini:

Pertama, salah satu esensi agama adalah terpeliharanya harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia

---

[38] Lihat dalam Bhikhu Parekh, *Politics, Religion & Free Speech in Rethingking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge, Massachutts: Harvard University Press, 2002), 330.

[39] Karen Amstrong, *the Battle for God: a History of Fundamentalism* (New York: Alfred A. Knoft, 2001), 45.47.

ciptaan Tuhan, termasuk keinginan mempetahankan ekesistensi. Itulah sebabnya semua agama selalu memiliki misi perdamaian dan keselamatan. Untuk mencapai hal tersebut, agama selalu menawarkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Agama juga mengajarkan bahwa perlindungan nyawa manusia harus menjadi prioritas. Menghancurkan satu kehidupan sama dengan menghancurkan seluruh kehidupan umat manusia.[40] Orang-orang ekstrim seringkali mengabaikan sisi kemanusiaan dan melakukan praktik keagamaan berdasar pada kepentingan individu atas nama Tuhan untuk menegakkan kebesaran Tuhan.

Model beragama semacam ini cenderung menganggap cara beragama orang lain rendah dan tidak sempurna, dasar merendahkan agama lain tersebut didasarkan pada atas nama Tuhan. Padahal motivasi beragama yang dianut didorong oleh hawa nafsu, kepentingan indiividu dan kekuasaan untuk menjadikan dirinya otoriter dengan cara menjadikan agama sebagai tunggangannya. Tidak jarang, orang beragama seperti ini menghalalkan segala cara untuk mencapai yang diinginkan, seperti mengaitkan teks keagamaan dengan hawa nafsunya.[41] Dampaknya, orang seperti ini cenderung ekstrem, keras dan menyalahkan pendapat orang lain. Agama dipolitisir, dimanipulasi dan dicocokan dengan apa yang mengunungkan dirinya. Sehingga agama menjadi tidak seimbang.

---

[40] Elizabeth K. Nottingham, *Religion and Society.* Diterjemahkan oleh Abdul Muis Naharong, *Agama dan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 21.

[41] Oliver Mcternan, *Violence in Gods Name Religion in an Age of Conflict* (London: Darton Longman and Todd, 2003), 45.

Kedua, setelah agama lahir berabad-abad lamanya, manusia juga bermetamorfosis beragam jenis, berbeda suku, bahasa, warna kulit, adat istiadat, pemikiran, peradaban yang tersebar ke seluruh penjuru bumi. Agama sebagai teks yang suci, pasif, obyek keagaaan juga mengalami perkembangan signifikan berbanding lurus dengan perubahan umat manusia. Umat beragama menulis karya-karya yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, Bahasa Arab di Timur pada awal mula peradaban menjadi pusat keilmuan.[42]

Teks-teks agama menjelaskan banyak hal termasuk kebenaran mutlak. Namun seiring perkembangan penafsiran agama, banyak penganut agama yang tidak lagi menjadikan ajaran agama murni sebagai landasannya, mereka lebih menuhankan pemikiran, logika atas pengaruh-pengaruh dari luar teks keagamaan. Dengan demikian, konflik bernuansa agama tidak bisa dihindari. Kemajemukan agama, budaya, suku, bahasa bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan seluruh Asia bahkan se dunia. Kondisi ini mengharuskan adanya moderasi agama agar relasi peradaban dunia berjalan rukun dan stabil.

Ketiga, dalam konteks Indonesia, perlu dilakukan reinterpretasi agama sebagai strategi budaya untuk memperhitungkan keragaman agama. Sebagai negara yang sangat heterogen, sejak awal para *founding fathers* bangsa berhasil mewarisi suatu model relasi antara pemerintah dan rakyat dalam bernegara dalam satu kerangka ideologi

---

[42] Ahmad Asroni, "Resolusi Konflik Agama: Perspektif Filsafat Perennial", *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 16, 1(2020): 64-78

Pancasila.[43] Sehingga disepakati bersama bahwa Indonesia bukan negara agama saja, melainkan juga negara yang kaya budaya, norma sosial, etika, bahasa dan aspek-aspek multikularisme lainnya.[44] Oleh sebab itu, nilai yang hidup di Indonesia bukan hanya agama-agama yang bersifat plural, namun juga multikultural. Sehingga antara semua nilai tersebut menyatu sebagai jati diri bangsa, yang santun, mengutamakan musyawarah, toleran dan tawazun sebagaimana diajarkan pada konsep moderasi agama.

B. Memahami Moderasi Agama

Istilah "moderasi agama" berangkat dari akar kata bahasa latin yaitu "moderasi", yang berarti "tengah-tengah, sedang-sedang". Kata ini juga berarti pengendalian diri (karena kekuatan dan kelemahannya yang besar). Dalam kamus Bahasa Indonesia, (KBBI) memberikan dua arti untuk kata moderasi. Artinya, 1) kurangi kekerasan dan 2) hindari yang ekstrem.[45] Bila dikatakan "orang ini moderat", berarti orang tersebut rasional, normal dan tidak ekstrem. Sementara kamus bahasa Inggris, berasal dari *moderation* berarti "rata-rata, inti, standar, atau selaras". Secara umum, moderasi berarti mempromosikan keseimbangan keyakinan, moral, dan kepribadian, baik dalam berurusan dengan orang lain sebagai individu

---

[43] M. Amin Abdullah, *Kesadaran Multikultural: sebuah Gerakan "Interes Minimalization"* lihat dalam M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2015), xvi

[44] Richard Dawkins, *the God Devolusion* (London: Black Swam, 2006), 319

[45] I Nyoman Sudira, "Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia", *Global: Jurnal Politik Internasional* 19, 2(2017): 156-171

maupun lembaga negara. Hakikatnya, kata moderasi agama lebih cocok dimaknai dengan bahasa Arab karena akar kata moderasi adalah Bahasa Arab. Dalam Bahasa Arab, moderasi disebut *wasath* atau juga *wasathiyah* yang bermakna di tengah-tengah (*tawasut*), bersifat adil, tidak memihak, tapi memihak pada kebenaran (*adil*) dan seimbang dalam bersikap (*tawazun*).[46] Konsep *wasath* ini kemudian dilesatikan menjadi moderasi islam (*wasathiyah islamiyah*).

Konsep moderasi Islam secara komprehensif memiliki beberapa unsur yaitu unsur ketuhanan (*uluhiyah*), mengandung unsur kemanusiaan (*basyariyah*), menggabungkan unsur materi (*madiyah*) dengan aspek immateri (*ruhiyah*), antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tidak keras dan tidak terlalu lembut. Inilah nilai-nilai moderasi Islam yang diajarkan sejak Nabi Muhammad. [47]

Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris, kata moderasi diistilahkan dengan *moderation* yang berarti tidak berlebihan. Dalam artian, ketika seseorang dikatakan moderat, itu berarti dia rasional, normal dan tidak ekstrim. Di sisi lain, dalam bahasa Arab, kata "moderat" biasa disebut moderat atau wasatiyah. Kata "orang yang bersifat moderat" sendiri diperkenalkan ke dalam

---

[46] Muhammad Nasrullah, "Tarekat Syadziliyah Dan Pengaruh Ideologi Aswaja Di Indonesia," *Jurnal Islam NU Nusantara* 04, no. 02 (2020): 47–56, http://jurnalnu.com/index.php/as/index

[47] Nazmudin. "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal of Govenment and Civil Society* 1,1 (2107): 81-82.

bahasa Indonesia. Ini memiliki tiga implikasi. Artinya, 1) mediator, mediator (perdagangan, bisnis, dll), 2) mediator antara para pihak yang berkonflik (pembagi, mediator), 3) permainan. Menurut para ahli bahasa Arab, jelas bahwa kata itu "cocok untuk tujuan itu." Dalam istilah Bahasa Arab, itu disebut العتد الاوزلذ Yang terbaik dari semuanya adalah di tengah. Misalnya, sikap dermawan adalah sikap kikir dan boros, dan sikap berani adalah sikap pemalu dan sembrono.[48]

Orang yang mengamalkan prinsip *wasatiyah* kadang disebut *wasit*. Kata Wasatiyah juga didefinisikan dalam bahasa Arab sebagai "pilihan terbaik". Apapun pemaknaan *wasathiyah,* yang paling ujung tetaplah kembali pada makna asal yaitu seimbang dan adil. Ini berarti memilih di antara berbagai opsi ekstrem dalam konteks ini. Kata wasit juga tergabung dalam kata bahasa Indonesia "wasit". Ini memiliki tiga implikasi: 1) *wasilah*, perantara 2) penengah, di antara kontroversi (pemisah, mediator). 3) Pemimpin pertandingan. Menurut ahli bahasa Arab, kata *wasath* juga berarti "apa pun yang baik untuk tujuannya." Misalnya, kata "dermawan" berarti sikap antara pelit dan boros, dan kata "berani" berarti sikap antara pemalu (*aljubn*) dan keras kepala (*tahawur*).[49]

Dalam bahasa Arab, kata *tawasuth* memiliki antonim atau kebalikan yang berbanding terbalik yakni kata *tasharruf* yang berarti "berlebihan", semisal berlebihan

---

[48] Toto Suharto, "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Al-Tahrir", Jurnal Pemikiran Islam 17, 1 (2017): 1-10.

[49] Darlis, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural", *Rausyan Fikr* 13, 2 (2017), 225-255.

dalam beragama yang kemudian melahirkan pemikiran ekstrem. Kata ekstrem diartikan dengan "melangkah terlalu jauh, pergi dari satu ujung ke ujung yang lain, berbelok, dan mengikuti tindakan/jalan yang berlawanan". Dalam KBBI, kata "ekstrem" diartikan sebagai "paling tinggi, paling keras". Dalam Bahasa Arab kata ekstrem memiliki dua kata yang sama yaitu *alguluw* dan *tasyaddud.* Namun sebenarnya, kata *tasyaddud* tidak disebutkan secara tekstual dalam Al-Qur'an, tetapi turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, seperti kata-kata seperti *syadid, syidad*, dan *asydad*.[50] Ketiga kata ini sebatas merujuk pada akar kata yang berarti kaku dan padat, dan tidak dianggap ekstrim atau menerjemahkan *tasyaddud.*

Dalam beragama, perilaku "berlebihan" dapat digunakan untuk menyebut orang yang memiliki sikap ekstrim dan berlebih-lebihan dalam menuaikan agama sehingga sering menyalahkan pendapat orang lain. Secara analogi, moderasi itu seperti gerakan dari tepi dan selalu cenderung ke arah pusat atau poros (gaya *sentripetal*), sedangkan radikalisme adalah gerakan berlawanan menjauhi pusat atau poros, ke luar dan ekstrim (gaya *sentrifugal*). Ia bergerak dinamis seperti pendulum jam. Itu tidak berhenti di ekstrem, tetapi bergerak menuju pusat. Oleh karena itu, menggunakan analogi ini dalam konteks agama, sikap moderat adalah pilihan, cara pandang, sikap, dan tindakan dalam pilihan ekstrim yang ada, sedangkan ekstremisme agama adalah pemahaman dan pengamalan

[50] A. Mas'ud, *Strategi Moderasi Antar Umat Beragama* (Jakarta: Kompas, 2018), 12.

agama.[51] Dengan demikian, moderasi agama dipahami dengan sebuah pandangan, perilaku dan sikap toleran (tidak ekstrem) dalam beragama. Tindakan beragama dalam sosial selalu diputuskan melalui cara-cara toleran, seimbang, adil dan tidak berlebih-lebihan.

Tentunya harus ada kriteria tertentu apakah suatu pandangan, sikap, atau perilaku agama khusus kalau sikap tersebut ekstrem atau sebaliknya. Langkah ini dapat didasarkan pada sumber-sumber sakral yakni teks keagamaan, budaya, konstitusi negara, dan kesepakatan sosial. Moderasi agama dimaknai sebagai perilaku beragama yang seimbang antara perbuatan beragama seseorang (eksklusif) dengan ketauhidan (komprehensif). Tawazun atau titik tengah dalam beragama dapat menghindari sikap-sikap fanatis, visioner dan ekstrem.[52]

Dari sikap frontal demikian, maka moderasi agama adalah solusi terhadap keberadaan pemikiran *kanan* dan *kiri*, yang satu super-konservatif atau sayap kanan, dan yang lainnya liberal atau sayap kiri. Dalam sejarah, konsep mederasi agama sebenarnya adalah solusi terhadap *gap* ekstremes dan aliran keras yang ada di dunia, bukan hanya lokal, regional, nasional maupun global. Moderasi agama menciptakan keseimbangan, perdamaian dan kerukunan manusia.[53] Pandangan moderat demikian,

---

[51] Yulianto, "Implementasi Budaya Madrasah dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, 1(2020): 111-123.

[52] Luh Riniti Rahayu; Putu Surya Wedra, "Moderasi Beragama di Indonesia", *Intizar* 25, 2(2019): 95-100.

[53] H.A. Karim, "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin dengan Nilai-Nilai Islam", *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 4, 1(2019): 1-14.

berdampak positif bagi kemajemuan peradaban manusia, negara dan pemerintah serta antar penganut agama yang berbeda saling membantu, menghormati, bekerjasama. Begitupun dengan multikulturalisme di Indonesia, hanya moderasi agama yang mampu menjadi *resoler value* yang menjembatani kehidupan yang majemuk.

Di sisi lain, moderat kerapkali dipandang suatu animo negatif oleh pemahaman masyarakat, terutama bagi kalangan muslim fanatis dalam konteks beragama di Indonesia. Masyarakat menganggap tipe beragama moderat menandakan bahwa penganut agama tersebut tidak sungguh-sungguh, dangkal beragama, tidak serius dan tidak komitmen.[54] Moderat tidak hanya dimaknai berpikir dan beragama damai, melainkan juga terdapat kompromi teologis antara banyak norma; agama, budaya dan sosial. Menurut pemahaman masyarakat, agama tidak boleh dicampur adukan dengan normatifitas lain, karena agama bersifat sakral dan profan. Dari anggapan inilah, pemahaman agama yang moderat dinilai candu yang menggambarkan tipe umat Islam cenderung setengah-setengah.

Agama adalah sebuah kata yang tidak akan pernah membuahkan hasil untuk diperbincangkan sebagai topik seminar di forum resmi, topik diskusi kelas, atau topik perbincangan di realita sosial. Dengan dimulainya dalam prinsip beragama, keinginan beragama dengan mempercayai kekuatan supratural muncul di hati manusia, penganut-penganut animisme, dinamisme merupakan dua

[54] Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia", *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, 2(2019): 45-55.

kepercayaan yang dipandang sebagai produk agama. Setelah agama ketuhanan diturunkan di bumi, hal ini tidak serta merta memungkinkan orang untuk mengamalkannya sepenuhnya. Bahkan, ajaran ini bertahan dari kegagalan gaya hidup populer sebagai alasan untuk mengambil keuntungan dari kepentingan sementara orang-orang "tidak bermoral".[55]

Di masa lalu, berbagai konflik dan perang besar, alasan paling umum adalah agama. Selama Abad Pertengahan, Prancis mengalami perang saudara melawan agama. Francis I dari Perancis (1515-1517) percaya bahwa hanya ada satu raja, satu agama, dan satu hukum di negara ini. Akibatnya, Protestantisme Prancis (*Huguenots*) diperlakukan tidak adil. Tak lama kemudian, jumlah *Huguenot* meningkat, dan akhirnya terjadi delapan perang besar antara tahun 1562 sampai tahun 1672.[56]

Historisitas konflik demikian juga terjadi pada masa Nabi Nuh. Nabi Yunus dan orang-orang Kaum Sadum serta umat Nabi Nuh, diusir dari kaunya. Bani Rashib, Nabi Isa dan kaum Israel, dan bahkan Nabi Muhammad dibuang dan dilempari batu ketika mereka membuat *daawat* kepada orang-orang Bani Thaif. Mereka pindah dari Mekah ke Madinah karena kaum Quraisy tidak henti-hentinya memberikan tekanan fisik dan mental kepada Nabi Muhammad. Inilah potret dimana kaum ekstremes

---

[55] Moh. Bahrudin,"Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Menyiarkan Paham Keagamaan Moderat Di Provinsi Lampung", *Jurnal Analisis* 3, 2 (2017): 62-65.

[56] Khaled Abou el-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, (Jakarta: Serambi,2006), 78.

dan fanatis tidak mampu menjaga keharmonisan sosial keagamaan.[57]

Sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan hadits. Sumber utama dalam Islam adalah al-Quran sebagai firman Allah yang mengajarkan tentang nilai-nilai perilaku moderat. Konsep nilai moderat inilah yang disampaikan Nabi Muhammad kepada umat manusia sampai akhir zaman untuk bersikap moderat dalam beragama. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai model universal untuk memecahkan seluruh problem sosial dan menciptakan solusi Untuk itu, metode tafsir tematik al-Qur'an hadir untuk memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kekinian yang mendera kaum intelektual. Hal ini dibuktikan dengan kondisi di Indonesia, dari sekian banyak ideologi, agama, bahasa di dunia mampu ditoleril dengan sangat baik.[58] Pandangan ini didasarkan pada fakta yang tidak dapat disangkal bahwa hanya Islam sebagai agama yang bersifat universal dan inklusif. Sifat ini membutuhkan seperangkat keistimewaan yang melekat dalam Islam, bukan dalam agama lain.

Pemaknaan moderasi agama akan semakin rumit pemaknaannya jika dikaitkan dengan kepentingan komunitas atau aliran keagamaan tertentu. Di sisi lain, makna yang sama mengarah pada pemahaman tentang sikap yang dapat diwujudkan dalam tindakan. Ada

---

[57] Nurul Faiqah, Toni Pransiska, "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai", *Ijurnal Ilmiah Keislaman* 17, 2(2018): 33-60.

[58] Harin Hiqmatunnisa; Ashif Az-Zafi, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn", *Jurnal JIPIS* 29,1 (2020): 19-21.

beberapa tujuan yang ingin kita capai dengan terus menerus menggemakan moderasi beragama di Indonesia, diantaranya: *pertama*, moderasi beragama sangat penting sebagai kerangka penataan kehidupan beragama dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Dengan berkembangnya teknologi informasi, kita juga menghadapi masyarakat milenial yang juga merupakan komunitas digital.[59] Di zaman modern ini, sangat memungkinkan untuk meningkatkan kompleksitas masyarakat dalam beragama.

Beberapa orang terlalu memahami teks suci tentang moderasi agama dari sudut pandang teks semata, bukan pada konteks pelaksanannya di masyarakat. Bahkan dengan fanatisme berlebihan yang mengarah pada eksklusivitas, radikalisme, dan bahkan terorisme. Beberapa orang menafsirkan isi al-Quran terlalu banyak untuk membedakan antara ayat-ayat Tuhan dan ayat-ayat non-Tuhan. Beberapa orang mengubah pemahaman al-Quran menjadi pesan yang menarik dan justifikasi. Semua cara penafsiran tersebut cenderung menimbulkan konflik yang dapat menyatukan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, kaum ekstremis kerapkali menjadi penafsir dan penggiat teks keagamaan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kepentingan mereka. Pada kenyataannya, orang tidak bisa menghindari kontradiksi.

[59] Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*. (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 88.

C. Konsep Moderasi Agama dalam Islam

Para ulama telah sepakat bahwa al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, dan hadist adalah sumber hukum kedua. Oleh karena itu, Hal ini dilakukan mulai sejak generasi masa Rasulullah sampai akhir hayat selama umat Islam masih berlangsung.[60] Konsep moderasi menjadi prioritas setelah didengungkan dan bergema di berbagai negara, baik media cetak juga elektronik. Kata moderasi beragama telah menjadi bahasa masyarakat, sekalipun bersumber dari serapan bahasa Arab yang disadur dari al-Quran dan Hadis. Namun jika ditanya apakah istilah moderasi beragama disebutkan dalam al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam pertama?. Tentu jawabannya tidak, karena al-Quran dana hadis bukan kamus bahasa Arab, namun panduan hidup bagi manusia. Kata moderasi agama yang tertera dalam al-Quran dan hadis bukan lafadhnya, namun substansi dan makna. Substansi tersebut wajib dipelajari dan diajarkan untuk menemukan nilai tujuan moderasi agama dalam Islam.[61] al-Quran dan hadits merupakan sumber dan referensi suci bagi umat Islam untuk mengatasi problem kehidupan.

Dewasa ini, tantangan global yang didorong oleh teknologi canggih yang diciptakan oleh negara sekuler tak terbendung lagi. Padahal, itu suatu keharusan, jadi jangan takut. Dunia Islam tidak dapat bersaing dengan

---

[60] P.R.M. Faizal; A.A.M. Ridhwan; A.W. Kalsom, "the Entreprenuers Characteristic from al-Quran and al-Hadis", *International Journal of Trade, Economic and Finance* 4, 4(2019): 191-195.

[61] Septi Aji Fitra Jaya, "al-Quran dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam", *JII : Jurnal Indo-Islamika* 9, 2(2019): 204-209.

mereka karena mereka jatuh cinta, tenang dan tenggelam dalam romansa peradaban yang dicapai dalam beberapa abad terakhir.[62] Oleh karena itu, sekarang setelah dunia Islam menjadi mudah berpengaruh, ekonomi, industri, teknologi, dan media massa ada di tangan mereka. Dunia menjadi lebih kecil di zaman teknologi dan informasi. Tampaknya berbagai suku, bahasa, budaya dan agama berkumpul dalam satu wadah.

Pada konteks ini realitas di lapangan menunjukkan bahwasanya keberadaan umat Islam pecah menjadi beberapa golongan, sekte, ideologi, dan sekte yang saling berbenturan, seperti yang terjadi di Timur Tengah, di mana perang saudara berkecamuk. Dan ini adalah kesempatan unik bagi penentang Islam untuk menghancurkannya. Yang dihadirkan sekarang adalah label Islam ekstremis, Islam teroris, dan Islam fundamental selalu menggantung di pundak mereka.[63] Kondisi di atas sulit untuk dibendung dan diatasi karena pemahaman ajaran agama Islam saat ini tidak seimbang, tidak tepat, lemah, *taklid* dan fanatik. Karena itu, mereka membenci agama lain dan tidak percaya satu sama lain. Terlebih lagi, dunia Islam tertinggal jauh di belakang mereka dalam bidang ekonomi, industri dan teknologi di mana umat Islam sebelumnya berada di garis depan peradaban dunia.

Sebagaimana diutarakan Yusuf al-Qaradhawi bahwa sebagai ulama yang menggagas konsep moderasi Islam

---

[62] Eka an Aqimuddin, "Islam sebagai Sumber Hukum Internasional", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 5, 1(2019): 331-332.

[63] Askar Nur, "Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam", *Jurnal al-Ubudiyah* 2, 1(2021): 21-24.

menyatakan bahwa cara pandang agama yang berlebihan, menyebabkan kebingungan di antara umat beragama yang ditandai dengan sikap berikut: a) berpegang teguh pada pendapatnya sendiri; b) kebanyakan orang mewajibkan orang untuk melakukan apa yang tidak diwajibkan; c) mementingkan kuantitas; d) sikap kasar dan tidak ramah; e) prasangka buruk terhadap orang lain; f) jatuh ke dalam jurang ketidakpercayaan.[64]

Keenam hal pada atas ditimbulkan lantaran pemahaman kepercayaan umat Islam ekstrem dan tidak toleran. Sebagai imbas, terjadilah pemahaman agama yang berlebihan, fanatis dan condong menyalahkan pendapat agama lain. Pemahaman ajaran Islam yang tidak seimbang, membuahkan pemahaman bahwa Islam terkesan inklusif. Padahal Islam datang ke dunia sebagai rahmad bagi semua manusia, alam dan bumi, "Islam membawa rahmat pada sekalian alam dan Nabi Muhammad itu sendiri diutus ke dunia ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak umat manusia".[65]

Kandungan moderasi agama yang tersimpan dalam al-Quran dan al-Hadis mengingkankan adanya harmonisasi sosial keagamaan, ketenangan, tertib sosial. Bukan sebaliknya, membawa pada konflik, saling caci memaki, bahkan terdapat distorsi. Seandainya umat Islam sanggup menggali, mengetahui akan ayat-ayat serta mengaktua-

---

[64] Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqasid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 41-42.

[65] Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 201.

lisasikan ayat-ayat tadi dalam kehidupan nyata, global dan kepercayaan lain, maka akan membawa manfaat besar.[66]

al-Quran surat al-Hujarat ayat: 13 dan ar-Ra`du : ayat 3 sudah mengikrar janji bahwa umat Islam yang melaksanakan ajaran al-Quran (termasuk moderasi agama) niscaya mereka akan harmonis dan tenang mampu hidup berdampingan. Namun hal demikian bisa tercipta, jika manusia mampu mengali dan tahu nilai- nilai toleransi dan moderasi beragama yang terdapat dalam al-Quran. Karena konsep moderasi mengungkap rahasia kehidupan, nikmatnya bertoleransi terhadap suku, bangsa budaya dan kepercayaan lain, lantaran Nabi Muhammad sendiri sudah melakukannya pada masyarakat Madinah dan sudah menciptakan undang-undangnya yang diberi nama "Piagam Madinah".[67] Al- Quran sudah mengajak manusia untuk mengamati dan meneliti mengenai toleransi bukan pada kehidupan bermasyarakat saja namun termasuk kehidupan apapun.

Khalifah Umar saat mengadili Jabara bin Iham karena saat menunaikan haji Jabara memahari kaumnya, kemudian Umar mengetahuinya, lalu Umar menampar dengan tamparan yang sama saat Jabara menampar kaum tersebut. Itu artinya, meskipun Japara seorang raja, namun tetap harus berlaku adil. Adil berarti seimbang, tidak memihak dan berada pada jalur kebenaran. Sekalipun orang yang diadili adalah bangsawan dan raja, jika keputusannya adil, maka siapapun dapat menang atau diuntungkan.

[66] Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019), 78-79.

[67] Nurush Shobahah, "Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik", *Ahkam* 7, 1(2019): 195-214.

Sebaliknya, yang salah salah mendapat ganjaran hukuman sekalipun yang salah adalah seorang raja.[68]

Surat al-Qasas ayat 77 menjelaskan bahwa umat manusia yang moderat adalah umat yang bersikap seimbang terutama dalam menjalankan kepantingan dunia dan akhirat. Agama tentu tidak hanya mengajarkan keduniaan, tapi juga akhirat. Bukan hanya akhirat, tapi juga keduniaan, jadi keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan.[69]

Secara kontekstual, karakter masyarakat berbeda-beda. Sebab masyarakat bukan hanya satu individu, tapi kumpulan individu yang saling bekerjasama untuk mencapai keinginan bersama. setiap individu mempunyai cara hidup, adat, norma dan istiadat di setiap lingkungan. Era pluralisme global ini tidak bisa dihindari. Karena dunia ini seperti sebuah desa dan berbagai orang saling berinterksi bersama. Logikanya, masyarakat yang majemuk memiliki potensi konsflik yang besar karena berdiri banyak perbedaan keyakinan.[70]

Hal ini sulit diatasi kecuali saling toleransi. Dalam menghadapi situasi seperti itu, al-Qur'an memberikan konsep *Wasatiyah*, yang dalam istilah modern disebut moderasi beragama. Agama tidak dipahami secara ekstrim, tetapi dengan cara yang baik, ramah, damai, santun dan

---

68 Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 202.

69 A. Nur; Mukhlis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar AtTafasir)", *Jurnal An-Nur* 4, 2 (2019): 20-21.

70 Afifudin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis* (Situbondo: Tanwirul Afkar, Januari 2018), 1.

rukun.[71] Jadi tidak terkesan bahwa Islam telah datang ke dunia untuk melawan kekejaman dan kengerian yang kejam. Sebuah studi mendalam tentang ayat Al-Qur'an mengungkapkan bahwa Al-Qur'an membawa rahmat bagi semua makhluk hidup dan lingkungan alam, bukan hanya umat manusia. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Sultan Ottoman Sultan Muhammad al-Fati memerintah kota Konstantinopel, menghormati pendeta Kristen, dan melindungi gereja mereka.[72]

Menyeimbangkan fenomena alam, moralitas, hubungan dengan masyarakat majemuk, menambah nilai lebih bagi kepentingan dunia dan kehidupan masa depan, mengandalkan keadilan dan konsekuensi moralnya, dan bahkan menyeimbangkan tindakan. Keseimbangan manajemen hidup dijelaskan dalam al-Quran dan hadist. Ibadah yang berlebihan dilarang dalam hadist karena membeirkan daya derita dan kemudharatan bagi manusia. Selama Isra` Miraj, Nabi berulang kali meminta kepada Allah untuk mengurangi jumlah shalat menjadi lima kali sehari. Yang penting ibadahnya harus ikhlas, bukan main-main.[73]

Di samping Al-Qur`an menyebutkan posisi umat Islam menjadi umat penengah yang sebagai penyeimbang berdasarkan perilaku keberagamaan umat Yahudi dan Nasrani, hakikat ajaran Islam itu sendiri sejatinya sudah

---

[71] Agus Akhmadi, "Religious Moderation In Indonesia's Diversity", *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, 2 (2020): 12-14.

[72] Agus Mustafa, *Islam Jalam Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Agama* (Bandung: Mizan Saifuddin, 2019), 991-992.

[73] Agus Mustafa, *Mengarungi 'Arsy Allah* (Surabaya: Padma Press Qardhawi, 2017), 17-19.

mencerminkan "moderasi" pada semua ajarannya. Sejarah tidak dapat dibantah, bahwa umat Islam menjadi penengah dari ideologi kaum musyrikin yang menjadikan benda dan mitos sebagai Tuhan. Di sisi yang lain, ada kelompok metafisik yang mengingkari logika. Disitulah Islam hadir sebagai penengah. Ini pertanda ajaran Islam bisa sebagai penengah dan relevan menggunakan fitrah kemanusiaan.

Pada aspek ibadah, agama Islam memberikan kewajiban beribadah pada waktu tertentu (*ibadah mahdhah*). Seperti melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa, berzakat dan menunaikan ibadah haji. Selain aspek ibadah *mahdhah* tersebut, Islam memberikan ruang *muamalah* yang luas kepada umat Islam agar bersosial, melaksanaan kewajiban sosial baik untuk keluarga ataupun masyarakat. Sementara pada aspek akhlak, ajaran Islam memberikan terapi nilai terhadap kejiwaaan, hati manusia dan siraman sufi untuk menekan sekuat mungkin sifat liar manusia yang ditimbulkan oleh nafsu. Jasad dan ruh memiliki estitika yang berbeda, namun keduanya perlu dijembatani oleh akhlak sebagai pengontrol.[74]

Jika dipahami dengan baik, pernyataan diatas memberikan pedoman bagi umat Islam untuk bersahaja pada tiga hal utama, yaitu: 1) bersikap seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat; 2) menyeimbangkan nikmat yang Allah berikan dengan cara berbagi kepada manusia yang membutuhkan melalui zakat ataupun sadakah; 3)

---

[74] Ahmad Nurcholish, *Merajut Damai Dalam Kebinekaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 14.

keseimbangan antara ciptaan Tuhan dan pemeliharaan alam semesta dengan larangan menimbulkan kekacauan.[75]

Upaya menciptakan keseimbangan di atas dapat tercapai dengan sukses apabila setiap muslim benar-benar istiqamah mewujudkan iman dan amal shaleh dalam kehidupan sehari-hari dan selalu disertai dengan doa-doa pertolongan kepada Allah. Dalam rangka menyeimbangkan kepentingan dunia dengan akhirat, umat Islam juga dituntut untuk bersikap rendah hati dalam memberi dan bersedekah. Arti kata "qawâman" pada ayat al-Quran bermakna moderasi yang berarti "tengah-tengah" atau diartikan tidak condong ke pihak manapun.

Moderasi beragama adalah suatu perilaku, perilaku juga pemikiran yang bisa sebagai penengah (*washith*) pada upaya menyikapi atau merampungkan aneka macam masalah yang berkaitan menggunakan kepercayaan, baik pengamalan ajaran kepercayaan yang dianut sakte pemeluknya juga terhadap disparitas atau kontradiksi yang herbi perkara antara kepercayaan yang tidak selaras, sebagai akibatnya masalah adalah menghindari kemudharatan, dimana sikap manusia harus bersikap toleran dan adil.[76]

Selain itu Islam juga membuka pintu untuk mencapai toleransi terhadap pemeluk agama yang ereda dengan berbuat baik dan adil kepada mereka selama mereka menjaga dua hal utama yaitu tidak melawan umat Islam

---

75 al-Ashfahani, Ragib, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an* (Damaskus: Dâr al-Qalam, t.th), 209-210.

76 D. Dawing, "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural", *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13, 2(2017), 225–255.

demi agama dan tidak mengusir kaum muslim dari tempat dimana mereka tinggal.[77] Melihat kandungan dalil-dalil Al-Quran sebagaimana diuraikan di atas dapat dipahami bahwa moderasi beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Keluhuran sikap dan perilaku umat Islam di hadapan Allah tidak hanya dinilai dari kesalehan pribadi mereka dalam melaksanakan ibadah mahdhah kepada Allah tetapi juga dari sejauh mana kesalehan sosial.

D. Karakteristik Moderasi Agama

Di tengah pemahaman agama yang bebas dan pola perilaku konvensional serta doktrinal karena penekanan pada hal-hal liberal, diperlukan konsep keberagamaan yang menepis pemahaman tersebut. Gejolak pemikiran beragama moderat berimbas pada prilaku keagamaan baik individu maupun kelompok. Pola pemikiran dan sikap moderat dinamakan *wasatha* (ummat menengah) yang memiliki kepribadian yang memiliki karakteristik tertentu, diantaranya adalah: *tawazun* (keseimbangan), *tawasuth* (jalan tengah), *tasasmuh* (toleran) dan *i'tidal* (adil). Dalam artian, pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifras* (berlebihan agama) atau *tafris* (mengabaikan ajaran agama). Tawazun dalam setiap aspek kehidupan, misalnya antara duniawi dan ukrawi diseimbangkan.[78]

---

[77] Dudung Abdul Rohman, *Moderasi Agama dalam Bingkai Keislaman di Indonesia* (Jakarta: LEKKAS, 2021), 20-21.

[78] Fauzul Iman, "Menyoal Moderasi Islam", Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 385.

Bentuk lain dari karakteristik tersebut dalam masyarakat yang menggambarkan kesimbangan adalah aspek kemanusiaan dan teologis, rohani dan jasmani, akherat dan duniawi, akal dan wahyu[79] Ajaran Islam dan agama Islam memiliki sikap-sikap yang turut menyebabkan kemunduran kaum mukmin itu sendiri, menunjukkan bahwa mereka tidak mengamalkan sikap-sikap Tawassu, Taadur, dan Tawazun tersebut di atas.

Banyak umat Islam telah berubah dari gerakan horizontal yang berasal dari kehidupan dunia ke gerakan vertikal, menghabiskan waktu jika mereka masih hidup di dunia ini untuk masa depan. Nilai moderasi, yang menekankan satu sisi kehidupan dari sisi lainnya, juga tak kalah pentingnya. Dan biasanya, tindakan seperti itu akan menjauhkan diri dari dunia untuk menyelamatkan diri sendiri tanpa orang lain.[80] Padahal menyelamatkan diri sendiri tanpa orang lain adalah tindakan destruktif dan naif. Adat dan ritual yang dikembangkan oleh para sufi dianggap sebagai senjata bagi para ulama seperti *faqr* (kemiskinan), *khauf* (takut), *alJu`* (lapar). Inilah tindakan sufi yang membuat umat Islam justru mengalami kemiskinan, ketakutan, dan kelaparan. Kesabaran membuat kaum muslimin diam tentang segala sesuatu yang terjadi pada mereka, Tawakal mengabaikan kaum muslimin untuk melihat masa depan, dan berjuang untuk ikatan antara

[79] H. Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2019), 192-193.

[80] Ibrahim Siregar, "Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Sistem Kekeluargaan Masyarakat Dalihan Natolu", Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 150-151.

Tuhan (ittihad) dan ekstasi (alFana) Tenggelam dalam ilusi berlarut-larut umat Islam.[81]

Agar umat Islam tidak sempat melakukan amar ma`ruf nahi munkar untuk mendapatkan gelar Umat terbaik (khaira ummah) b) *Tasamuh* (toleransi) Kita mengakui perbedaan dalam berbagai aspek, terutama aspek agama. Islam, sebagai agama suci, memiliki akidah monoteistik, sebagaimana agama-agama awal memiliki akidah yang sama. Lebih khusus lagi, masyarakat yang agamanya sebenarnya tidak bisa menolak ajakan hawa nafsu, menyimpang dari jalan ketuhanan, dan menyimpang dari sisi kemanusiaan akibat kebodohan mereka yang lebih memilih jalan setan. Selain itu, agama berkaitan dengan tuntutan dan kebutuhan pemeluknya.[82] Singkatnya, agama berinteraksi dengan relasi, kebutuhan finansial, kebutuhan akan keadilan, dan sebagainya.

Agama juga bersifat universal karena merupakan pengetahuan universal. Karena agama bersifat universal, pemeluk semua agama sebenarnya membentuk komunitas yang disebut Al-Qur'an sebagai Unmawahida. Paling tidak, itu adalah komunitas aspek kemanusiaan yang harus selalu dibangun di antara pemeluk agama lain. Karena universalitas dasar agama, Islam melarang memaksakan keyakinan seseorang pada siapa pun, dan tidak ada yang berhak memaksakan keyakinannya pada orang lain.

---

[81] Iffati Zamimah, "Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab)", *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 1, 1(2018): 21-23.

[82] Irwansyah, "Radikalisme Agama: dari Kasus Dunia sampai Sumatera Utara", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam,* Vol. 8, No. 1 (Juni, 2018), 243.

Dalam hal ini, Allah berpesan kepada Nabi Muhammad untuk tidak memaksakan kepercayaan atau agama tertentu, termasuk Islam, kepada orang atau sekelompok orang untuk memperingatkan mereka agar tidak menjadi utusan. Rasul hanya berkewajiban untuk menyampaikan ajaran agamanya, dan karena satu-satunya yang memiliki otoritas untuk menegakkannya adalah Allah SWT, ia memiliki otoritas untuk menegakkan ajaran agama yang disampaikan kepada pengikutnya. memberinya. Jika di atas secara normatif menjelaskan bahwa ajaran Islam juga tidak mewajibkan adanya paksaan untuk memeluk suatu agama, baik pemeluk agama secara individu maupun kolektif bisa menjadi semua pemeluk agama yang berbeda, mengapa manusia tidak mau berusaha? Kita bertindak damai, hidup rukun, tidak saling mengganggu kehidupan sosial, dan saling menghormati hak kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan.[83]

Dengan kata lain, multi-agama dianggap lebih praktis daripada satu agama, karena melibatkan orang-orang yang terdiri dari beragam etnis dan budaya yang berbeda. Yusuf Ali, dikutip Syahrin, mengomentari tafsir surat Yunus ayat 99 di atas, bahwa orang beriman tidak boleh marah ketika berhadapan dengan orang kafir, dan harus menahan diri dari tindakan kekerasan, memaksa orang lain untuk percaya dengan cara yang berbeda, karena iman yang ada

[83] Julianti, "Internalisasi Nilai toleransi Melalui Model Telling Story pada Pembelajaran PKn Untuk mengatasi Masalah tawuran (Studi kasus Tawuran pelajar Sekolah menengah di Sukabumi)", *Jurnal Penelitian Pendidikan* 14,1 (2019): 1-12.

di mereka, dipaksa, adalah iman yang dibuat-buat dan itu bukan iman.[84]

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Islam sebenarnya membenci kekerasan dan ketidaksesuaian atas nama agama (Islam) dan mendukung hak asasi manusia yang muncul dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.[85] Mengingat dalam lingkungan sosial yang kecil seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hadir berbagai pemuka agama untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tentram dan harmonis antar pemeluk agama.[86] Tokoh agama seperti almarhum KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak henti-hentinya berusaha dengan berbagai cara rasional, memberinya gelar pahlawan nasional dan bahkan oleh lawan politiknya menjadi simbol pluralisme.[87]

Karena kesabarannya dalam memperjuangkan hak-hak minoritas, Gus Dur selalu dikenang oleh para penganut agama di Indonesia. Gus Dur dikenal muslim yang moderat, saat Ia menjadi presiden di negara Indonesia, Ia bahkan mengesahkan agama resmi negara yakni Agama Konghucu, Ia berpandangan bahwa agama Konghucu banyak dianut di Indonesia, mak negara wajib melindungi.[88] Oleh karena itu, ia menyarankan agar

[84] K.A. Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Purita* (Jakarta: Serambi, 2018), 32-33.

[85] Khalif Muammar, *Tanggapan Kritis Terhadap Wacana Islam Liberal*, (Kuala lumpur: Akademi Kajian Ketamadunan, 2006), 91-93.

[86] M. Hanafi, *Moderasi Islam* (Ciputat: Pusat Studi Ilmu al-Qur'an, 2018), 143.

[87] M. Hilmy, "Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia", *Jurnal Miqot* 36, 2 (2018); 17-19.

[88] M. Muclis Hanafi, "Konsep al-Wasathiyyah dalam Islam", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 8, 2(2019): 19-20.

keterbukaan harus diprioritaskan ketika setiap umat beragama mencari kebenaran dalam agamanya.

Demikian pula sebagaimana dikutip Zainuddin, Mukti Ali menyatakan bahwa pemeluk agama yang berbeda tidak dapat berkompromi dalam masalah teologis, karena setiap pemeluk agama memiliki keyakinannya sendiri-sendiri sesuai dengan keimanan. Oleh karena itu, yang perlu diupayakan adalah bagaimana mengatur perbedaan pendapat agar tercipta keharmonisan antar kaum pagan. Dengan demikian, semua pemeluk agama harus mempercayai bahwa apa yang mereka lindungi adalah agama yang paling baik dan paling benar. Pada saat yang sama, Anda perlu membuat orang lain percaya bahwa agama yang Anda lindungi adalah agama yang terbaik dan paling benar. c) *Musawa* (egaliter) bukan merupakan diskriminasi. Karakter dalam ajaran Islam ini telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang berhasil menjalin ikatan ijma' di kalangan masyarakat Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. [89]

Pasal-pasal dalam *Piagam Madinah*, seperti pasal 1, 12, 15, dan 16, memiliki prinsip keadilan dan persamaan. Pasal-pasal ini saling berhubungan bahwa semua penduduk Madinah pada saat itu memiliki status yang sama di hadapan hukum. Kesetaraan mendapatkan hak dan kewajiban, dan di atas segalanya, persamaan hak sebagai perusahaan independen. Piagam Madinah telah menunjukkan kepada orang-orang hari ini bahwa semua manusia, tanpa memandang ras, komunitas, agama,

---

[89] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 2019), 70-72.

jenis kelamin, status sosial, dll, berdiri sama di hadapan Tuhan.[90] Kesepakatan-kesepakatan yang termuat dalam Piagam Madinah tersebut bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas masyarakat.

Kemudian, pada poin berikutnya yakni; d) *Syura*, kata syura diartikan sebagai penggalian pendapat terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, konsep *syura* dimaknai dengan pertukaran pendapat untuk mengetahui dan menetapkan apa yang diyakini kebenarannya. Syura juga diartikan sebagai wadah pertukaran ide, gagasan, ide dan saran yang diberikan untuk memecahkan suatu masalah sebelum akhirnya diputuskan. Namun ada pula pemikir lain yang berpendapat bahwa Syura bagi pemahaman masyarakat tidak mengikat, Syura dianggap sebagai mekanisme untuk meminta nasehat, tetapi setelah nasehat diberikan, kecuali kamu mentaati kebaikan orang, kamu akan diinstruksikan. Syura hanya dilihat sebagai kesusilaan adat dan martabat moral pemimpin.

Konsep *syura* (musyawarah), mengandung konsep bahwa pengambilan keputusan tidak selalu suara mayoritas, tetapi jika pendapat ternyata lebih rasional dan unggul, pengambilan keputusan didasarkan pada keputusan minoritas. Bahwa orang lain menyarankan bahwa hal itu dapat dilakukan. Abu Bakar as-Shiddiq, dalam memimpin kekhalifahannya tidak selamanya menerima pendapat mayoritas, seperti saat memutuskan suara mayoritas pada sistem pembayaran pembangkang

[90] Mudofir Abdullah, "Argumen Pengarusutamaan Budaya dan Kearifan Lokal (Lokal Wisdom) dalam Proyek Moderasi Beragama di Indonesia", Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 274.

zakat, Abu Bakar lebih memilih suara minoritas yang rasional dan maslahah. Begitupun dengan Umar Bin Khattab yang pernah menolak pembagian harta rampasan sekalipun hal demikian adalah suara mayoritas.[91] Dengan dua kebijakan khalifah tersebut, menandakan bahwa setiap kebijakan pemimpin Islam diproses melalui musyawarah.

Oleh karena itu, mushawarah adalah inti dari nilai yang diajarkan oleh agama Islam, musyawarah diterapkan pada kehidupan sosial. Bahkan tradisi bermusyawarah adalah kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam yang dikembangkan oleh Islam.[92] Menurut Rahman yang dikutip oleh Shafi Marriff, Syura adalah pedoman abadi bagi umat manusia sebagai makhluk sosial. Ruang lingkup Syura dapat diterapkan di organisasi manapun, tetapi yang terpenting tidak melanggar prinsip-prinsip umum hukum Islam. Beberapa ahli tafsir seharusnya membatasi masalah musyawarah pada masalah-masalah sekuler dan bukan masalah yang secara khusus dijelaskan secara rinci oleh agama.

Sejumlah besar ahli ushuliyyah, memahami bahwa ruang lingkup Syura mencakup masalah sekuler dan agama, serta catatan untuk praktisi konseling tentang masalah agama, agama, yang perlu umat Islam ketahui dan pahami penelitiannya. Dengan cara ini, kita dapat merenungkan isu-isu agama tanpa instruksi, isu-isu global

---

[91] Muhammad Ali, "The Muhammadiyah's 47 th Congress and Islam Berkemajuan", *STUDIA ISLAMIKA: Indonesian Journal for Islamic Studies,* Vol. 22, No. 2 (2015), 378.

[92] N. Faiqah; T. Pransiska, "Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai", *Al-Fikra,* 17, 1(2019), 33–60.

dengan instruksi tetapi tanpa arah, dan isu-isu di dunia yang sedang berkembang dan berubah.[93]

Kemudian, e) *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif) terbuka terhadap perkembangan dan perubahan yang konstan. Salah satu ciri konsep moderat dalam Islam adalah pembangunan dan perkembangan, baik dari segi metode, hukum maupun aspek lainnya, terbuka terhadap perubahan. Seiring berjalannya waktu, perubahan sosial sangat dibutuhkan, oleh karena itu perubahan dan pembangunan tidak dapat dielakkan.[94] Dalam bidang hukum Islam berkembang secara dinamis mendunia dengan munculnya permasalahan-permasalahan sosial, dan tidak mungkin menyelesaikannya dengan hanya mengandalkan khazanah hukum yang ada. Salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak praktik ijtihad secara individu maupun kolektif. Hingga Ijtihad berperan penting untuk melakukan pembaruan hukum Islam sebagai respon terhadap dinamika hukum yang terjadi di masyarakat.

Terakhir, f) *Tahadhdhur* (beradab) Ini adalah harta yang mendukung estitika moral dan etika, salah satu maksud dan tujuan kedatangan Islam. Hadits tersebut menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia semata-mata demi integritas moral.[95] Dalam hadits lain, Nabi bersabda,

---

[93] Nur Syam, *Islam Nusantara Berkemajuan: Tantangan dan Upaya Moderasi Agama* (Semarang: FATAWA PUBLISHING, 2018), 214.

[94] S. Rozi, "Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia", *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, 1(2019): 26–43.

[95] Syaiful Arif, *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural* (Depok: British Council 2017), 81-83.

"Tidak ada yang lebih baik daripada pahala akhlak yang baik, orang yang benar-benar berperilaku baik, setingkat dengan derajat orang yang ahli dalam shalat dan zakat."

E. Posisi Moderasi diantara Ekstrem *Kiri* dan *Kanan*

Kebanyakan kajian tentang moderasi agama seringkali hanya berfokus pada pemosisian moderasi agama untuk menjembatani problem konsevatifisme beragama yang juga diistilahkan dengan sayap *kanan* dan *kiri*. Bahkan, moderasi beragama disebut paling kiri, serta mereka yang memiliki pemahaman agama yang lebih konservatif, serta perspektif, sikap, dan perilaku keagamaan yang bebas. Baik di ujung kiri dan kanan, keduanya seperti pergerakan gaya *sentrifugal* dari poros tengah ke satu di sisi ekstrem.[96] Mereka yang mendukung cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan yang dermawan cenderung sangat mendewakan ruhnya dalam memaknai ajaran agama, sehingga tercerabut dari teks, namun berdiri di sisi lain. konteks ini. Promosi keagamaan bertujuan untuk menyampaikan dua ekstrem ini dengan menginternalisasikan isi ajaran agama di satu sisi dan menekankan pentingnya mengkontekstualisasikan teks-teks agama di sisi lain.[97] Sebagai contoh, pandangan keagamaan sebagian ulama yang menghalalkan seks selain

---

[96] Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 59; Zakiyuddin, "Modifikasi Multikulturalisme untuk Pendidikan Agama", *Jurnal Studi Islam* 5, 1 (2008):1-36.

[97] Priyantoro Widodo; Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen", Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen 15, 2 (2019): 2-3.

nikah adalah contoh penafsiran liberal yang termasuk golongan kiri.

Penafsiran ini juga didasarkan pada teks Al-Qur'an tentang *al-abid* dan *ar-riq* (budak/budak), tetapi penerapannya dalam konteks saat ini terlalu jauh atau terlalu ekstrim dari makna teks oleh sebagian besar pemuka agama. tradisi perbudakan telah dihilangkan. Di sisi lain, pandangan agama yang hitam putih dalam memahami teks-teks agama, seringkali dibawa ke ekstrem yang berlawanan dan terasa bertentangan.[98] Dalam konteks agama, pandangan, sikap, dan tindakan ekstrem seperti itu mendorong orang percaya untuk menolak menerima pandangan orang lain dan menegaskan interpretasi mereka sendiri tentang kebenaran.

Oleh karena itu, istilah "garis keras" adalah radikal atau radikalisme seringkali dihubungkan dengan cara beragama yang berlebihan atau *ultra konservatif.* Indikatornya adalah berpandangan bahwa perbedaan sikap dan perilaku agama umat lain dianggap salah bahkan sesat. Ia memiliki pandangan yang berbeda. Kaum super konservatif tidak hanya menolak, tetapi juga mengkritik dan berusaha menghilangkan adanya perbedaan pandangan dari orang lain. Baginya, cara pandang hitam-putih dalam beragama membuatnya lebih percaya diri daripada menerima berbagai tafsir yang dianggap tidak nyaman.[99] Oleh karena itu, kaum superkonservatif yang ekstrem, meskipun

---

[98] Abu Yasid. *Islam Akomodatif Rekontruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), 190.

[99] Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim As'ari: Moderasi, Keumatan dan Kebangkitan,* Edisi 4, (Jakarta: Kompas, 2021), 134.

minoritas, cenderung lebih ribut dan lebih publik daripada kaum moderat yang lebih pendiam dan lebih bijaksana.

Misalnya, kemenangan kaum ekstremis bukan karena banyaknya orang, tetapi karena kelompok mayoritas mayoritas yang diam. Secara konseptual, pandangan, sikap, dan adat-istiadat keagamaan yang ultra konservatif muncul dari pandangan agama yang sangat sakral dan seringkali mengabaikan dimensi kemanusiaan. Pandangan yang berpusat pada ketuhanan mengajarkan para Penganut untuk mendefinisikan ibadah sebagai upaya untuk secara sempit "berbagi" Tuhan melalui serangkaian ritual ibadah. Konsep "melindungi Tuhan" yang tertanam dalam pemikiran mereka membuat kelompok ini berarti ibadah dan agama hanya dalam arti "pemuasan kehendak Tuhan", mengabaikan nilai dan fungsi agama bagi kemanusiaan, meningkat.[100]

Ada banyak alasan mengapa sekelompok orang mempromosikan ideologi ekstrem dan "keras" dalam agama. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa tindakan mereka mengarah pada kebaikan dan membantu mencegah kejahatan. Mereka juga memungkinkan untuk mengoreksi pemahaman, sikap dan perilaku umat beragama yang menganggap dirinya sesat. Beberapa di antaranya adalah kelompok promosi keagamaan yang ditujukan untuk menengahi kelompok yang memiliki pandangan, sikap dan perilaku keagamaan yang liberal, serta yang memiliki pemahaman keagamaan yang lebih ultra-konservatif.[101]

[100] Khalid Rahman; Aditia Muhammad Noor, *Moderasi Agama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme* (Malang: UB Press, 2020), 100-101.

[101] P. Widodo; Karnawati, K. "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia", *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan*

Ekstrim yang bertentangan dengan apa yang dianggapnya tidak adil dan anti aturan agama (*thogut*). Ini karena ia merasa terancam dengan menjamurnya orang lain (*others*) dan munculnya gerakan kolektif liberal yang ekstrim.

Radikalisme dan kekerasan tentu tidak melekat dalam doktrin agama manapun. Itulah sebabnya ideologi ekstrem tidak akan pernah bisa mempengaruhi mayoritas komunitas agama. Karena hakikat agama yang sebenarnya adalah menghargai harkat dan martabat manusia, yang niscaya diterima oleh masyarakat umum. Mereka yang menganjurkan pandangan dan ideologi ekstrim dalam agama biasanya lebih cenderung menghindari pertentangan ekstrem, berkumpul dalam kelompok kecil, dan memilih gerakan dan tindakan radikal. Yang membuat kelompok yang sangat radikal terlihat "keras" dari yang sifat asal dan sering menarik perhatian dengan melakukan tindakan yang luar biasa.[102] Sekali lagi, tujuannya adalah untuk mendapatkan empati. Dengan menggunakan strategi ini, kelompok ini pernah dapat menakut-nakuti orang, tetapi pada akhirnya mereka tidak berhasil.

Dakwah Nabi sendiri dibuat dengan penuh cinta. Untuk mencegahnya, kita perlu mendorong integrasi kelompok agama moderat. Keegoisan kelompok harus dihindari untuk mempromosikan kerukunan dan mencegah penyebaran ekstremisme agama. Dalam konteks tatanan sosial politik Indonesia, ekstremisme agama telah menjadi perhatian semua partai politik selama hampir dua dekade,

Agama Kristen 15, 2 (2019) 9-14.

[102] Busyro; Aditiya Hari Ananda; Tarihoran Sanur Adlan, "Moderasi Islam (Wasathiyyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia", *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3, 1(2019): 340.

bukan hanya di Indonesia tapi juga telah mengglobal. Kekerasan atas nama agama yang terjadi di berbagai negara telah menimbulkan ketegangan antar semua kelompok dan adanya tanda-tanda saling curiga terhadap kelompok agama tertentu sebagai penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Juga merupakan pengalaman pahit bagi Indonesia. Serangkaian serangan teroris merenggut nyawa ratusan orang yang tidak bersalah.[103]

Ekstremisme agama dengan kekerasan menggambarkan gambaran gelap pesan agama yang damai kepada alam semesta. Tentu saja, dalam konteks kebangsaan yang majemuk, hal ini juga sangat mengkhawatirkan. Menyadari efek negatif radikalisme baik di sayap kiri maupun sayap kanan membutuhkan visi moderasi keagamaan yang didefinisikan secara konseptual di atas. Visi moderasi beragama juga penting dalam konteks bernegara dan bernegara. Sebab, seperti disebutkan di atas, salah satu indikator moderasi beragama adalah adanya komitmen nasional, bukan ekstrem yang menjadikan agama sebagai idealisme. Ia adalah sebuah bangsa, tetapi pada saat yang sama, tidak mengecualikan semangat dan nilai-nilai spiritual agama dari idealisme bangsa secara keseluruhan.[104]

F. Tantangan Moderasi Agama Ke Depan

Berbagai dinamika keagamaan di masyarakat lumrah terjadi bagi masyarakat. Tetapi mejadi rancu bila dinamika

[103] Dudung Abdul Rahman, *Moderasi Agama dalam Bingkai Keislmaan Indonesia* (Yogyakarta: LEKKAS Press, 2021), 88-89.

[104] Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim As'ari: Moderasi, Keumatan dan Kebangkitan…,* 143.

tersebut direspon menggunakan perilaku merusak. Secara statistik, Indonesia adalah negara yang toleran dan terbuka, termasuk pada kedatangan orang asing. Bukan berarti orang asing akan merugikan agama atau tatanan kehidupan berbangsa, tetapi kedatangan mereka di negeri ini memerlukan perhatian khusus dan kedudukan serta kehadirannya di Indonesia kelak. Tak heran, ada berbagai isu global yang mengancam keruntuhan setiap negara, termasuk Indonesia. Untuk menghadapi berbagai beban transportasi internasional yang disebut globalisasi membutuhkan kewaspadaan dan kewaspadaan penuh.[105]

Apabila dianalisis secara mendalam, beberapa data historis dan data realitas yang terjadi maka tidak terdapat jalan lain kecuali menyusun langkah preventif dan taktik pada semua elemen rakyat dan perangkat negara buat menghalau faham dan genre nir sahih supaya hancur menurut bumi pertiwi. Menyimak banyak sekali insiden dan pemaparan banyak sekali forum riset akan mencatat bahwa dalam prinsipnya kepercayaan nir bisa menciptakan kedamaian pada muka bumi justeru kepercayaan tak jarang sebagai argumentasi pada merespon banyak sekali perkembangan yang terdapat.[106]

Setiap agama memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan cintanya. Ada orang yang menembakkan meriam untuk berkorban, ada orang yang merayakan dengan

---

[105] Ghufron, G. (2020). Relasi Islam-Kristen: Studi Kasus di Desa Tegalombo, Pati, Jawa Tengah. *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, *9*(1), 1.

[106] K. Nurul, "Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al- Qur'an", *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, 1 (2022): 12.

festival bulan, dan ada orang yang mengorbankan banyak ternak. Ini adalah bagian dari dinamika keagamaan Indonesia. Sebuah peradaban tidak bisa mati, di tangan pemiliknya. Setelah perang ideologis bersama dengan orang-orang munafik yang membenci negara, Barat mengirim misionaris untuk mempromosikan separatisme.

Selama periode ini, berbagai sekolah, seperti tanaman musim hujan, tumbuh di mana-mana. Pemahaman ini merupakan terjemahan dari cara pandang masyarakat terhadap berbagai hal dalam kehidupan. Negara Indonesia yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa, namun bukan berarti terjadi perbedaan pendapat, dan tidak ada konflik dengan agama atas nama agama. Umat beragama kemudian akan berdiri di depan arena dengan bendera dan atribut aliran doktrinal, memahami pandangan mereka terhadap moderasi beragama.[107] Umat beragama, bahkan yang tidak menganut ajaran agama, selalu mengharapkan perilaku yang baik agar dapat hidup berdampingan dan berinteraksi dengan orang lain dengan rasa kekeluargaan. Hal ini wajar karena kedamaian dan kebahagiaan adalah inti dari kehidupan manusia.

Di sisi lain, situasi yang mengancam kehidupan, harta benda, barang atau peradaban sangat dihindari. Namun, perilaku ini merupakan inti dari semua doktrin agama dan dapat dicapai ketika sikap moderasi beragama dipraktikkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Secara teoritis, studi agama tidak cukup untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama, tetapi harus dibarengi dengan

[107] S.T. Rahmat, "Dialog Antropologis Antaragama dengan Spiritualitas Passing Over", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2, 2 (2017): 181–198.

pengamalan yang komprehensif menurut agama dan keyakinan masing-masing. Purwanto menjelaskan bahwa pengetahuan menyerap beberapa bentuk yang diketahui dari luar dan menegaskannya di dalam jiwa. Sedangkan amal adalah mentransfer pengetahuan dari dalam jiwa mewujudkannya di luar jiwa.[108]

Hal inilah yang membuat masyarakat modern menjadi problem religius, terjadinya kerusuhan antarumat beragama, aksi terorisme, kerancuan persepsi umum bahwa agama yang mulia, dan berbagai justifikasi terhadap agama tersebut membutuhkan waktu yang lama. [109] Masyarakat umum secara subyektif melakukan generalisasi terhadap suatu identitas tertentu, namun ada juga yang sangat menyadari dan melihatnya sebagai kebutuhan untuk secara aktif merespon berbagai fenomena keagamaan. Namun, penulis menekankan bahwa agama dan umat memiliki tempat masing-masing, yang menghindari generalisasi.[110]

Karena itu, ada pengiriman (impor) barang ke dalam negeri dengan personil yang bisa mengoperasikan teknologi. Peralatan rumah tangga, peralatan kantor, kendaraan, peralatan komunikasi, peralatan medis, lembaga pendidikan. Masyarakat telah secara aktif diuntungkan dari interaksi lintas batas dalam aspek globalisasi. Terbentuknya

---

[108] Y. Purwanto; Q. Qowaid, Q; L. Ma'rifataini L; R. Fauzi, R. "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum", *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 17, 2(2019): 110–124.

[109] M. Riza, "Relasi Antar Iman di Negeri Syari'at Islam (Studi Peran dan Fungsi FKUB dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Aceh Tengah)", *Jurnal As-Salam 3,* 1(2019): 48–60.

[110] A. Salim; A. Andani, "Kerukunan Umat Beragama; Relasi Kuasa Tokoh Agama dengan Masyarakat dalam Internalisasi Sikap Toleransi di Bantul, Yogyakarta", *Arfannur*, 1, 1(2020): 1–14.

kerjasama dengan negara lain di bidang sosial. Ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan adalah aspek positif dari globalisasi. Negara tidak segan-segan mengirimkan WNI ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Untuk produk luar negeri yang sangat sulit digunakan.[111]

Menurut para antropolog, esensi budaya adalah semiotik, suatu bentuk eksplorasi dunia isyarat dan tanda. Oleh karena itu, analisis budaya tidak didasarkan pada eksperimen penelitian non-budaya seperti hukum, tetapi budaya dianalisis atas dasar interpretasi makna. Kebudayaan berasal dari kata *culture* dengan awalan to dan akhiran an. Dalam bahasa Sansekerta, buddhayah adalah bentuk jamak buddhi (akal atau akal), yang diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan akal manusia. Oleh karena itu kebudayaan selalu berpihak pada akal dan akal manusia, dan pengertian yang tidak selaras dengan pengertian itu (akal) tidak dapat digolongkan sebagai pengertian kebudayaan. [112]

Koentjaraningrat menyebut kebudayaan sebagai suatu sistem gagasan, perilaku, dan ciptaan manusia yang menyeluruh dalam konteks kehidupan masyarakat dan menjadi umum melalui pembelajaran. Dia melanjutkan dengan mengatakan:

> "Budaya sebagai kata sifat menunjuk ke perspektif masalah. Perspektif budaya menitikberatkan pada norma dan nilai yang terkandung dalam gagasan, perilaku, dan karya manusia. Diantaranya adalah pertimbangan

[111] E. Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan", *Jurnal Bimas Islam*, 12 2 (2019): 323–348.

[112] I. Fahmi Arrauf Nasution, "Minoritas dan Politik Perukunan (FKUB, Ideologi Toleransi dan Relasi Muslim-Kristen Aceh Tamiang)", *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19,1(2017): 53–74.

> dan proyeksi yang berhubungan dengan peran ilmuwan masa depan dan peminat ilmu sosial lainnya. Perannya sebagai penerjemah, ilmuwan dasar, konsultan dan aktivis komunikasi. Ketika budaya menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, Indonesia berkembang menjadi negara dengan masyarakat yang harmonis."[113]

Di sisi lain, dampak jangka panjangnya adalah masyarakat dan negara Indonesia akan bangkit dari segala krisis dan menjadi negara maju. Pengembangan budaya perlu dibahas dalam konteks upaya peningkatan kapasitas. Kemampuan untuk apa? Untuk pemulihan dari semua krisis. Berdiri bersama untuk memperbaiki hidup manusia. Berdiri untuk kemakmuran, yaitu kebebasan, keadilan, dan solidaritas. Praktek ajaran agama masih sangat terbatas, tetapi ketika agama memanggil mereka, mereka langsung bereaksi.

> "Saya jarang pergi ke masjid, tetapi jika Anda peduli dengan masjid Anda, Anda lebih dekat dengan saya."

Ungkapan seperti itu adalah kata-kata penyemangat yang terlihat ketika seseorang atau kelompok berusaha mengganggu keberadaan tempat ibadah. Semangat seperti inilah yang menyebabkan "alergi" bid'ah dalam menyebarkan pahamnya. Oleh karena itu, norma yang lebih bersahabat menempuh jalan lain: ekspansi ekonomi dan budaya. Berbagai ideologi dan gerakan yang menggoyahkan eksistensi agama. Hal ini karena ada pandangan bahwa agama modern hanya ada dalam kitab-kitab suci dan tempat-tempat peribadatan. Agama

---

[113] F. M. Kambooa, "The approach of the Quran in the education of generations to moderation", *Journal of University of Anbar For Islamic Sciences* 9, 37 (2017): 29.

hanyalah bagian dari bentuk. Ia berperan ketika kehadiran agama tidak lagi diperlukan pada acara pengukuhan, acara aqikah, akad nikah, atau salat jenazah selain pekerjaan ini atau kegiatan lainnya.[114]

Teori sekularisasi klasik oleh perumus awal San Simon dan Auguste Comte mengarah pada gagasan bahwa modernitas dan agama tidak dapat diintegrasikan, tetapi dapat disatukan. Belakangan, karena berbagai alasan, para pemikir sosialis kapitalis masyarakat modern (Marutsu, Durkheim, Weber) sepakat bahwa era agama akan berlalu. Semakin modern masyarakat, semakin kompleks gaya hidup mereka, semakin rasional dan individual mereka, dan semakin jauh dari nilai-nilai agama (bukan agama). [115]

Sekularisme jelas menentang agama dan dasar negara. Karena pemahaman ini mengabaikan peran agama dalam segala hal yang mengatasnamakan modernitas.[116] Oleh karena itu, tidak heran jika sekularisme menjadi sebuah idealisme yang harus disikapi dengan tekad dan kebijaksanaan. Tentunya dengan menggunakan sekularisme sebagai bahan penelitian dan melihatnya dari sudut yang berbeda secara kompleks.

Radikalisme berarti membutuhkan perubahan yang sangat sulit (seperti hukum) untuk secara radikal memajukan pikiran dan tindakan. Ketika kata radikal menjadi

---

[114] H. Khotimah, "Internalisasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pesantren", *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1, 1(2020): 62.

[115] S. Mukzizatin, "Relasi Harmonis Antar Umat Beragama dalam Al-Qur'an", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, 1(2019): 161–180.

[116] H. K. Kunu, "Interaksi Simbolik Islam-Kristen Tantangan Toleransi (Studi Kasus Simbol Salib Terpotong di Kotagede Yogyakarta)", *Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, 1(2020): 76–90.

radikalisme, itu berarti teori radikal dalam politik: sebuah pemahaman yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara dramatis dan kekerasan. Sikap ekstrim di arena politik. Gerakan radikal memanifestasikan dirinya dalam bentuk ketidaksetujuan pribadi dan kolektif terhadap situasi di sekitarnya. Ada kontradiksi dengan doktrin kebaikan yang dapat diperoleh melalui fakta.[117] Oleh karena itu, pengetahuan agama yang sesuai dengan perspektif yang ditempuh mempengaruhi sikap dan perilaku radikal.

Tujuan mulia mengembalikan pola hidup masyarakat kepada ajaran agama seharusnya, namun pada kenyataannya terdapat kendala yang sangat bertentangan dengan maksud demikian. Penganut agama yang tidak mempunyai dasar keagamaan, cenderung mudah terkapar pemikiran-pemikiran radikal. Ini tidak berarti bahwa langkah-langkah untuk mengantisipasi dan menghindari radikalisme perlu dipahami dan dikoordinasikan sampai batas tertentu (*khittah*) dan membutuhkan kesatuan dalam pelaksanaan ajaran agama. [118]

Di Indonesia, seperti yang sering terjadi di Timur Tengah, gerakan fundamentalis dan radikalisme agama umumnya bersifat lokal, sebagai nasionalis agama murni daripada teroris internasional. Ada jaringan, tetapi sangat longgar karena merupakan veteran Mujahidin di Afghanistan yang

---

[117] K. Kamarusdiana, "Al-Qur'an dan Relasi Antar Umat Beragama; Diskursus Tentang Pendidikan Pluralisme Agama di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, 3(2018): 241–254.

[118] M.K. Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Al-Risalah*, 11, 1(2020): 22–43

dilatih oleh Amerika Serikat selama invasi Uni Soviet ke Afghanistan.[119] Ideologi radikal tidak hanya menunjukkan sikap yang tidak dapat diterima terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga mengajarkan penganutnya untuk tidak menerima ideologi lain, meskipun mereka menganut agama yang sama. Gerakan radikal membahayakan tidak hanya negara tetapi juga umat beragama. Dari penjelasan tersebut, ekstremisme Islam mampu mengatasi musuh-musuh partai politik yang dihormati dalam urusan sosial, politik, atau agama hanya dengan Syariah Islam, sehingga berdirinya negara Islam.

Kembalinya masyarakat kepada ajaran agama dapat terjadi dalam berbagai cara, namun dengan pola dan perilaku lintas batas, bahkan dengan maksud yang sama, sebenarnya berseberangan dengan cara-cara beragama yang benar. Pemberian pengetahuan mengenai dampak negatif pemikiran radikal dan kegiatan keagamaan, serta pendidikan untuk melindungi bangsa dari pemekaran adalah inti dari moderasi agama sebagai upaya mencegah radikalisme.

Pemicunya bisa berupa "ketidaksetujuan" nyata atau paparan pemikiran lain. Membangun Terorisme Sayap Kanan di Indonesia. Di antara dasar-dasar munculnya terorisme adalah idealisme dan teologi. Kedua faktor inilah yang paling mendasar dari gerakan teroris, karena ideologi dan teologi menjadi alasan mengapa orang mengambil langkah mendasar untuk menguntungkan

[119] A. Aritonang, "Peran Sosiologis Gereja Dalam Relasi Kehidupan Antar Umat Beragama Indonesia", *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)*, 9, 1(2019): 69–102.

kelompoknya.[120] Terjemahan ideologis dan teologis yang ketat dapat berkontribusi pada spesies terorisme. Itu sedang ditanam. Terorisme merupakan masalah global yang sering terjadi di berbagai negara, baik individu atau kelompok. Teroris melawan dengan cara yang tidak adil dan sangat berbahaya. Menerima ajaran yang salah (doktrin), belajar dari orang yang salah, atau belajar sesuatu tanpa bimbingan guru bisa menyesatkan.

Dalam ajaran Islam, terorisme dalam segala tindakannya tidak dibenarkan dengan alasan atau tujuan apapun. Karena efek terorisme menimbulkan kerugian materil dan menebar ketakutan pada jiwa masyarakat. Perilaku gerakan teroris mengakibatkan kerusakan material dan immaterial, bahkan yang paling berbahaya yang meninggalkan bekas luka psikologis.[121] Rasa takut mengganggu dan menimbulkan rasa takut (*fear*) pada individu atau kelompok tertentu.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memerangi serangan teroris. Tidak ada ruang untuk yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, dapat melumpuhkan aktivitas kehidupan. Dalam keadaan lemah tersebut, efek selanjutnya adalah para pelaku teroris memiliki kebebasan yang lebih untuk melakukan aksinya. Separatis adalah individu atau kelompok yang mencari bantuan dalam membagi suatu negara. Semula, para separatis

---

[120] B. Busyro; A.H. Ananda; T.S. Adlan, "Moderasi Islam (Wasathiyyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia", *FUADUNA : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3, 1(2019): 1.

[121] A. U. Albab "Interpretasi Dialog Antar Agama Dalam Berbagai Prespektif", *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, 1(2020): 22–34.

menanggapi ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan kelompok dan masyarakat dengan cara-cara ekstrem seperti militer, penculikan tokoh-tokoh kunci, dan aksi terorisme. Dalam ajaran Islam, dia tidak pernah menyarankan kepada pengikutnya bahwa dia memimpin gerakan separatis. Sejarah Indonesia melaporkan bahwa beberapa kelompok separatis telah mengguncang stabilitas negara. [122]

[122] S. Arif, "Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid", *Jurnal Bimas Islam* 13, 1(2020): 73–104.

BAB III
KERAGAMAN DAN KONSEPSI MODERASI AGAMA

A. Keragaman, Masalah atau Ancaman?

Negara Indonesia merupakan wujud nyata suatu negara multikultural. Eksistensi Indonesia sangat merepresentasikan masyarakatnya yang kaya akan keberagaman suku, agama, bahasa, serta budaya yang dimilikinya. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga identitasnya ini tidak dapat dilepaskan dari internalisasi ideologi bangsa ini yaitu Pancasila dengan semboyannya yang telah dikenal di dunia Internasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini secara filosofis berakar dari Puisi Lama (*kakawin*) Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular,[123] yang secara umum berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu jua".

Sebenarnya, tidak mudah menjaga kebersamaan hidup berbangsa dan bernegara yang dihuni oleh beraneka ragam masyarakat multi etnis. Banyak konflik yang muncul di berbagai belahan dunia, yang apabila ditelusuri akar permasalahannya selalu terkait dengan isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan. Konflik Poso atas nama agama, konflik Sampit di Kalimantan Tengah (suku

[123] Ni Putu Winanti dan Ni Gusti Ayu Kartika, "Bhinneka tunggal ika in kakawinsutasoma in multicultural societyof Denpasar City," *International Journal of Research in Social Sciences* 8, no. 3 (2018): 6–15.

Dayak dan Madura), konflik Mesjid di Lampung Selatan (konflik masyarakat dan imigrasi), dan banyak konflik baru yang muncul belakangan ini surplus bagi Negara Indonesia.[124]

Upaya pembangunan perdamaian menjadi sebuah keniscayaan agar persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Pembangunan perdamaian sendiri dalam diskusi internasional sering disebut dengan *peacebuilding*.[125] Definisi sederhana dari *peacebuilding* sendiri merupakan seebuah rekonstruksi politik, ekonomi, soial yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik melalui konsep perdamaian abadi.[126] Definisi lain dari *peacebuilding* yaitu konsep nilai komprehensif yang mencakup dan mendorong adanya sikap damai antar masyarakat yang berpotensi konflik melalui cara-cara tranformatif.[127]

Di pusat Kota Kediri sendiri terdapat dua komunitas umat beragama yang hidup berdampingan. Komunitas yang dimaksud yaitu umat muslim dan Tionghoa. Masjid Agung Baiturrahman, situs Setono Gedong, dan Klenteng Tjoe Hwie Kiong seolah menjadi bukti konkret bahwa di sana kehidupan umat Muslim dan Tionghoa sangat toleran

[124] Wulan Purnama Sari, Sinta Paramita, dan Suzy Azeharie, "Kerukunan dalam Komunikasi antar Kelompok Agama Islam dan Hindu di Lombok," *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 23, no. 1 (2019): 63–75.

[125] Isti Fatonah, "The Role of Multicultural Education towards the Strengthening of Bhinneka Tunggal Ika (Case Study University of Muhammadiyah Metro)," *ADDIN* 13, no. 1 (26 Juni 2019): 149–66, https://doi.org/10.21043/addin.v13i1.2871.

[126] Johan Galtung, "Violence, Peace and Peace Research," *Jounal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 171.

[127] Ridwan al-Makassary, Amelia Fauzia, dan Irfan Abubakar, *Masjid dan Pembangunan Perdamaian* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture [CSRC], 2011), 21.

dan kondusif. Melihat kenyataan yang ada, konflik berlatar sosial-keagamaan sangat mungkin terjadi. Namun, fakta yang ada di lapangan justru berbanding terbalik.

Persatuan bangsa Indonesia tidak hanya didasarkan pada pluralisme budaya, tetapi juga pada kesatuan idelogi, pandangan, dan pandangan hidup bernegara. Hal ini tercermin secara nyata dalam peraturan ideologi bangsa sebagai dasar dan pedoman berbangsa di Indonesia. Dan itu jelas tertera dalam lambang provinsi yang berbunyi 'Bhinneka Tunggal Ika' yang artinya 'Berbeda-beda (suku, agama, bahasa) tapi tetap satu (indonesia)'. Meski berbeda, mereka tetap sama dalam kehidupan sosial berdasarkan hukum, hak, kewajiban, dan kekeluargaan. [128]

Disadari, Indonesia merupakan negara multikultural namun bukan penganut multikulturalisme. Oleh karena itu, multikulturalisme bukanlah solusi untuk menyikapi keberagaman Indonesia. Di Indonesia, beberapa kategori multikulturalisme dipertaruhkan. Memang multikulturalisme memiliki konsekuensi negatif berupa potensi konflik sosial karena adanya komunitas yang beragam. Akibat dari perbedaan yang ada dalam masyarakat akibat nilai-nilai budaya berdasarkan latar belakang sosial budaya. Multikulturalisme juga mengarah pada perilaku eksklusif berupa kecenderungan untuk menjauh dari masyarakat. Bahkan dimungkinkan untuk mendominasi komunitas lain. Nilai negatif lain yang harus dihindari adalah pandangan diskriminatif berupa perlakuan diskriminatif terhadap sesama anggota masyarakat. Hal

[128] M. Minftahuddin, "Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis. Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 5,1 (2015), 41–54.

ini dapat menimbulkan bias subjektif untuk menekankan esensi/karakter kelompok.

Konflik seringkali disulut oleh asumsi yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan politik. Kepentingan didasari oleh adanya keberpihakan yang tidak seimbang. Kepentingan inilah dalam ilmu budaya, harus dapat diminamilisir melalui penanaman nilai-nilai dan norma agama ke dalam tubuh politik dan ekonomi. Sebab kepentingan hanyalah tubuh *fisical* yang ditopang atau disulut oleh keadaan hati manusia. Sehingga benar bahwa akar dari kepentingan adalah pemikiran yang muncul di dalam hati dan kemudian menyembuh menjadi suatu perbuatan. Kepentingan tersebut berubah menjadi konflik ketik tidak dapat terpenuhi. Konflik mengubah kehidupan sosial, pola sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, institusi sosial, kelas sosial, dan struktur kekuasaan dan otoritas.[129] Toleransi diperlukan dalam situasi seperti itu. Sikap yang menghargai perbedaan keluasan pandangan manusia karena faktor-faktor yang dipengaruhi oleh budaya, falsafah, agama, kepercayaan, nilai-nilai masyarakat, dan sebagainya. Juga sikap menghargai perbedaan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Jangan berbicara buruk tentang orang lain tanpa alasan atau bukti.[130]

Memahami perasaan orang lain. Juga, berbicara dengan sopan sesuai dengan standar etika dan adat

---

[129] Rizal Mubit, "Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11,1 (2016): 163–84.

[130] Bagus Novianto, "Moderasi Islam Di Indonesia Perspektif Peradaban Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 5, 2 (2018): 86–102

istiadat. Toleransi untuk beribadah kepada orang lain sesuai dengan norma agama. Jangan memaksakan kehendak. Saling memahami, menerima perbedaan dan menjalin kebhinekaan Indonesia. Menghormati hak privasi orang lain, termasuk pilihan agama dan kepercayaan. Keberagaman dan pluralisme budaya tidak hanya dapat menimbulkan konflik sosial, tetapi juga perubahan sosial. Selo Soemardjan mengataan bahwa perubahan sosial merupakan sistem pada pola kehidupan masarakat yang dipengaruhi oleh norma, sikap, nilai yang hidup pada masyarakat itu sendiri. John Lois Gillin dan John Philip Gillin berpendapat sama bahwa perubahan sosial bersifat alamiah karena sebab geografis, demokrafis, perubahan ideologis dalam masyarakat.[131]

Fenomena globalisasi mempengaruhi seluruh komponen sosial masyarakat, termasuk diantaranya adalah tatanan sosial budaya dan tatanan beragama. Bagaimana menghindari gesekan dalam keragaman budaya?, proses asimilasi adalah kuncinya. Asimilasi diartikan sebuah proses menggabungkan dua atau lebih budaya yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat untuk membentuk budaya baru yang dapat diterima oleh pihak yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1996), asimilisi merupakan penggabungan dua budaya atau lebih yang diciptakan oleh anggota masyarakat untuk membentuk budaya baru sesuai konsensus yang disepakati.[132] Kondisi ini

[131] Ahmad Nurcholish, "Islam Dan Pendidikan Perdamaian." *Al-Ibrah* 3, 2 (2018): 115–44.

[132] Ida Bagus Brata, "Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa." Jurnal Bakti Saraswati (JBS) 5, 1 (2016): 12-13.

mendorong masyarakat untuk membaurkan budaya yang ada untuk mengakomodasi semua pihak yang mengatur bentuk-bentuk tatanan sosial yang ada. Asimilasi ditandai dengan pengurangan perbedaan antara individu dan kelompok melalui upaya untuk menghilangkannya, dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama, dan meningkatkan kesatuan perilaku, sikap, dan emosi.[133]

Gesekan dan konflik menjadi perhatian ketika keragaman budaya tidak dibarengi dengan unsur kesatuan. Apalagi ketika budaya *hoax* tak terbendung. Maka jika perubahan budaya adalah hal yang tepat untuk dilakukan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, maka ucapan Khasdyah Dwi Dewi Setyoningtias sangat tepat bahwa etnosentrisme dalam masyarakat Indonesia masih tinggi, sehingga tanpa filterasi budaya, masyarakat Indonesia secara alami akan memburuk.[134] Pluralisme budaya di Indonesia juga melahirkan pluralisme. Pendekatan pluralis dapat dicapai melalui penyatuan antar budaya. Pendekatan ini digagas oleh Eddie Lembong, seorang pria keturunan Tionghoa dan pendiri Yayasan Nabil (Konstruksi Nasional). Dalam pendekatan pluralisme di Indonesia, gagasan fertilisasi silang antar budaya, penempatan keragaman budaya di Indonesia, dapat diperlakukan sebagai strategi pengelolaan pluralisme di Indonesia.

---

[133] Mahfud, Choirul. "The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-China Relations in Islamic Cultural Identity." *Journal of Indonesian Islam* 8, 1 (2014): 23-38.

[134] Rizal Mubit, "Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia." Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman 11, 1 (2016): 163-184.

Budaya unggul dikawinkan dengan budaya unggul bangsa lain untuk menghasilkan budaya alternatif. Pemupukan lintas budaya, berbeda dengan gagasan multikulturalisme.[135] Pemulihan berikutnya. Jika hilang, kehidupan bangsa menjadi rapuh dan rentan diserbu oleh bangsa lain. Kita jatuh ke dalam hegemoni spiritual yang menciptakan gaya hidup individualistis, hedonistik dan kehilangan inti kebangsaan. Kehidupan masyarakat tidak tentram karena didominasi oleh budaya dan gaya hidup asing. Inilah sebabnya mengapa restorasi budaya sangat mendesak dan relevan. Padahal, dalam situasi saat ini dimana kita sudah mulai menjauh dari kaidah-kaidah kehidupan yang luhur, sudah menjadi kebutuhan bagi bangsa.

Pemulihan kembali menjadikan hidup sebagai pilihan terakhir. Paling tidak, budaya yang lahir dari kearifan lokal harus baik hati, saling menghormati, menjunjung tinggi persaudaraan yang kuat, gotong royong, keadilan, beradab, dan tentu saja percaya pada satu-satunya karakter dasar negara kita. Mengenai keragaman budaya ini, para founding fathers bangsa menyadari bahwa ini akan menjadi isu yang penting dan sensitif. Dengan memperkuatnya, yaitu dengan memperkuat Pancasila sebagai ideologi dan melestarikan tradisi lokal yang menjadi akar budaya

[135] Budiman Mahmud Musthofa, "Pengembangan Budaya Menuju Kesejahteraan Budaya: Pelajaran Dari Pengembangan Masyarakat Di Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat", *Sosio Informa* 4, 3 (2018); 78-88.

sumber nilai-nilai luhur negara. Itu tidak memiliki akar, jadi itu hanya menunggu sampai rontok.[136]

B. Realitas Keragaman di Indonesia

Kata "moderasi" berkorelasi dengan beberapa istilah. Kata "moderasi" dalam bahasa Inggris berasal dari kata *moderation* dan berarti sikap yang moderat daripada sikap yang berlebihan. Ada juga kata moderator. Ini berarti pembicara (parlemen), mediator (mediator perselisihan). Dengan pengertian tersebut, moderasi agama di Indonesia berarti "tengah-tengah" yakni tidak condong ke ekstrem ataupun tekstual, tidak liberal tidak pula literal, tidak ke kanan tidak pula ke kiri, namun berada di tengah-tengah yang toleran, seimbang dan moderat.[137]

Dalam KBBI, "moderasi" diartikan menghindari kekerasan dan menghindari yang ekstrem. Moderasi berangkat dari kata dasar yaitu "moderat" yakni sikap untuk menghindari kekerasan dan keterbukaan yang ekstrim serta kecenderungan yang netral. Kata "moderator" berarti seseorang yang bertindak sebagai perantara (hakim, arbiter, dll), tetapi pemimpin sidang (rapat, diskusi) yang mengarahkan diskusi atau pembahasan masalah, mesin yang mengatur atau mengendalikannya. Oleh karena itu, ketika kata "moderasi" dikontraskan dengan kata "religius", adalah "moderasi agama". Penghistilahan demikian mengandung arti bahwa moderasi bertujuan

[136] C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, cet. Ke-5. (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 23.

[137] Sakina, Ade Irma. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia." *Share: Social Work Journal* 7, 1 (2017): 71-80.

untuk menghindari kekerasan dalam beragama sesama manusia.[138]

Pemaduan kedua istilah tersebut, mengacu pada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai landasan dan asas, selalu menghindari tindakan dan pengungkapan yang ekstrem (ekstremisme), serta jalan tengah yang menghargai seluruh elemen kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Persatuan dan kesatuan serta bangsa Indonesia. Moderasi dan moderasi adalah sikap orang dewasa yang baik dan sangat dibutuhkan. Kekerasan dan kejahatan, termasuk radikalisasi dan ekstremisme, ujaran kebencian dan pemberitaan palsu, terutama yang dilakukan atas nama agama, adalah kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, mematikan, tidak wajar dan tidak etis.[139]

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, belakangan ini menyoroti sikap agama dalam dinamika berbangsa dan bernegara, dan dalam berbagai kesempatan mendesak para pemuka agama untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai yang berfokus pada keragaman. Cenderung berdasarkan ajaran agama yang menyimpang, Presiden mendorong para pemuka agama dan pemuka agama untuk membawa wawasan keagamaan yang mendalam dan luas kepada masyarakatnya masing-masing. Tokoh agama berperan penting dalam menjaga kekayaan dan pluralisme Indonesia sebagai modal sosial, karena tidak dapat disangkal bahwa agama adalah etos yang dominan

[138] Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 56.

[139] Suprapto. "Sasak Muslims And Interreligious Harmony: Ethnographic Study of the Perang Topat Festival in Lombok-Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 11, 1 (2017): 77-98.

di negara ini. Bagi masyarakat Indonesia, keberagaman adalah kehendak Tuhan.[140]

Keanekaragaman bukanlah sebuah tuntutan, itu adalah pemberian dari Tuhan Pencipta kita, itu bukan sesuatu yang harus dibeli, itu harus diterima begitu saja. Indonesia merupakan bangsa dengan keragaman suku, agama, bahasa dan budaya yang tiada bandingnya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dianut masyarakatnya, Indonesia memiliki ratusan atau ribuan suku bangsa, bahasa lokal, kearifan dan keyakinan yang telah lama hidup pada masyarakat setempat.[141]

Mengingat keragaman masyarakat Indonesia yang begitu kompleks, dapat diprediksi batapa banyaknya pemikiran, pandangan dan keyakinan semua warga negara, termasuk agama. Untungnya, kami memiliki bahasa yang sama, bahasa Indonesia, sehingga kami dapat mengkomunikasikan keyakinan yang berbeda ini dan dengan demikian orang dapat saling memahami.[142] Namun demikian, salah urus keragaman dapat menciptakan gesekan.

Memang, jika Tuhan berkehendak, tidak akan sulit untuk membuat hamba-hamba Tuhan seragam dan satu jenis. Namun kuasa Tuhan bahwa manusia harus berbeda

---

[140] Triwardani, Reny, and Christina Rochayanti. "Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal." *Reformasi* 4, 2 (2014); 99-100.

[141] Tumanggor, Rusmin. "Masalah-masalah sosial budaya dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia." Jurnal masyarakat dan Budaya 12, no. 2 (2010): 231-254.

[142] Yunus, Rasid. "Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 13, 1 (2013): 67-79

satu sama lain untuk menciptakan kehidupan yang stabil, bisa berlajar, berpikir dan mengambil hikmah satu sama lain. Keanekaragaman itu indah, bukan? Keberagaman bangsa Indonesia harus kita hargai.[143] Selain perbedaan agama dan pandangan dunia, terdapat pula perbedaan penafsiran ajaran agama dalam masing-masing agama, khususnya mengenai praktik dan ritual keagamaan, ada pendukung yang meyakini kebenaran penafsiran.

Demikian pula dalam agama, Konstitusi kita menjamin kebebasan umat beragama untuk menerima dan mengamalkan ajaran agamanya menurut keyakinan dan keyakinannya. Ideologi nasional kita, Pancasila, sangat menekankan pada terciptanya kerukunan antar umat beragama. Indonesia juga menjadi panutan bagi negara-negara lain di dunia dalam hal keberhasilan mengatasi keragaman budaya dan agama, dan dianggap berhasil mencapai hidup berdampingan yang harmonis antara agama dan bangsa. Agama dan budaya bersanding untuk menciptakan kedamaian, bukan dipaksa bertemu. Sebab agama bisa menyelesaikan konflik. Karena agama, dimanapun ia berada, memiliki karakter prasangka dengan kandungan emosional dan subjektivitas yang tinggi, hampir selalu membentuk ikatan emosional dengan penganutnya. Bahkan bagi para pengikutnya yang fanatik, agama adalah "objek" yang suci, angker, dan suci.[144]

---

[143] bidin, Zaenal. 2016. "Menanamkan Konsep Multikulturalisme Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Global* 1, 3(2019): 68.

[144] Azyumardi Azra, *Identitas Dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia.* (Jakarta: Universitas Indoneisa, 2018), 18.

Alih-alih menjalani kehidupan yang damai dan tenang, fanatisme ekstrem terhadap kebenaran penafsiran agama seringkali menimbulkan permusuhan dan perselisihan di antara mereka. Konflik dengan latar belakang agama dapat mempengaruhi kelompok atau aliran yang berbeda dalam satu agama (denominasi atau dalam satu agama) atau terjadi pada kelompok yang berbeda dalam agama yang berbeda (komunitas atau antar agama). Awal mula konflik agama ini biasanya disebabkan oleh sikap bertanggung jawab terhadap penafsiran dan pemahaman agama, merasa benar sendiri, dan tidak terbuka terhadap penafsiran dan pandangan orang lain.[145]

Menghargai keragaman tafsir, dan menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam praktik kehidupan beragama, daripada memenjarakan radikalisme dan intoleransi.Anda membutuhkan visi dan solusi yang umat Islam berikan. Semangat moderasi beragama terletak pada menemukan titik temu antara dua ekstrem agama tersebut. Di satu sisi, ada pendukung agama yang ekstrem yang percaya pada kebenaran absolut dari penafsiran teks-teks agama, sementara menganggap bahwa penafsir lain sedang menuju ke arah yang salah. Golongan ini biasa disebut dengan superkonservatif.[146] Di sisi lain, seorang pemeluk agama yang mendukung toleransi yang tidak adil terhadap pemeluk agama lain dan mengagungkan akal secara ekstrim, mengabaikan kesucian agama atau

[145] BM, St. Aisyah, "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, 2(2019): 21-22.

[146] Maksum, Ali, and Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 90.

mengorbankan keyakinan dasar ajaran agama. Mereka sering disebut sebagai kaum liberal ekstrim.

C. Kenapa Harus Moderasi Agama?

Pertanyaan ini sering dilontarkan: Mengapa kita, khususnya orang Indonesia, membutuhkan cara pandang yang terukur tentang agama? Pada umumnya, keragaman di suatu negara atau wilayah tidak dapat ditolak atau diingkari, karena keragaman merupakan kumulasi dari norma dan nilai sosial. Sehingga perlu adanya moderasi, sebagai pondasi dasar menemukan titik temu persamaan, bukan sebaliknya, yaitu memperparah keadaan. Oleh karena itu, ada tiga alasan rasional kenapa moderasi agama harus diamalkan di Indonesia?.

Pertama, salah satu esensi dari keberadaan agama adalah untuk melindungi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk pelestarian kehidupan. Oleh karena itu, semua agama selalu memiliki misi batin perdamaian dan keselamatan. Namun untuk menggapai perdamaian tersebut, agama tampil sebagai ajaran yang seimbang pada semua bentuk kehidupan manusia. Agama mengajarkan lima komponen utama yakni menjaga jiwa, agama, harta, nasab dan akal.[147]

Kedua, moderasi agama dibutuhkan untuk menghancurkan orang-orang ekstrem sering terlibat dalam praktik keagamaan atas nama Tuhan hanya untuk mengesampingkan sisi manusia dan melindungi

[147] Nugraha, Dera, Uus Ruswandi, and M. Erihadiana, "Urgensi Pendidikan Multikultural Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan PKN* 1, 1(2016): 19.

Kekuasaan Tuhan. Meskipun berada di pusat ajaran agama, mereka dengan demikian siap untuk mempermalukan sesama manusia atas nama Tuhan. Beberapa orang untuk memuaskan kepentingan kelompok masing-masing. Ajaran agama sering digunakan dan tidak jarang untuk membenarkan keinginan politik. Dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah sebagai cara untuk mengembalikan praktik keagamaan pada esensinya, bahwa agama sebenarnya berfungsi untuk melindungi harkat dan martabat manusia, bukan sebaliknya.[148]

Ketiga, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi budaya untuk membina karakter Indonesia, khususnya dalam konteks Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat asing, para founding fathers telah berhasil mewarisi bentuk persatuan antar bangsa sejak awal. Dengan kata lain, Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya telah berhasil mempersatukan semua agama. Kelompok agama, suku, bahasa, dan budaya.[149] Ada kesepakatan bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang religius, tetapi agama tidak memisahkan Indonesia dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijunjung tinggi, dipadukan dengan kearifan lokal dan nilai-nilai adat, beberapa hukum agama yang ditetapkan oleh negara, dan ritual agama dan budaya terjalin secara harmonis dan damai.

Inilah jati diri Indonesia yang sebenarnya, negara yang sangat religius yang santun, toleran dan mampu

---

[148] Berger, P. L. *The limits of Social Cohesion: Conflict and Mediation in Pluralist Societies*. (New York, London: Routledge, 2018), 20-21.

[149] Zuli Qodir, "Perspektif Sosiologis tentang Radikalisasi Agama Kaum Muda". *MAARIF: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial, 8, 1*(2016): 45–66

berinteraksi dengan keberagaman. Radikalisme niscaya akan melukai sendi-sendi Indonesia kita jika dibiarkan berkembang. Oleh karena itu, moderasi beragama sangat penting sebagai sudut pandang. Dari ketiga karakteristik tersebut, menggambarkan bahwa moderasi agama pada konteks Indonesia berlandas pada nilai-nilai moralistik yang telah tercipta dari akar sejarah agama dan budaya. Semisal sifat kesederhanaan, tolong menolong, gotong royong merupakan gambaran karakter bangsa yang melambangkan moderasi agama.[150]

Moderat sering disalahpahami tentang agama Indonesia. Banyak orang berpendapat bahwa bersikap moderat dalam beragama berarti orang tersebut tidak dalam posisi teguh, tidak serius, atau tidak benar-benar mengamalkan ajaran agama. Moderat disalahartikan sebagai kompromi antara keyakinan agama dan teologi dengan pendukung agama lain.[151] Orang moderat tidak hidup dalam semua ajaran agama, tetapi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Sering dikatakan tidak sempurna dalam agama karena tidak mencontoh ajaran agama. Perilaku pemuka agama di dalam.

Umat beragama yang moderat seringkali tidak peka dan penyayang, misalnya ketika lambang agamanya tidak digunakan lagi, tampak tidak kooperatif. Ada banyak kekeliruan pemahaman yang terjadi di masyarakat luas, diantaranya adalah menilai kalau kehadiran moderasi

---

[150] A. Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 20, 1*(2018): 79–114.

[151] M. Thoyyib, "Radikalisme Islam Indonesia", *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam,* 1, 1(2020), 90–105.

agama dianggap sakte baru yang sesat dan menyesatkan, sehingga masyarakat merasa terdorong untuk menolak. Tentu ini menjadi kekeliruan yang digemborkan oleh penganut aliran ekstrem.[152]

Orang yang beragama moderat dianggap konservatif, berbeda dengan mereka yang menganut ajaran agama. Kesalahpahaman tentang makna makna emas dalam agama ini berdampak pada munculnya sikap antipati yang cenderung tidak dicap moderat atau bahkan disalahkan atas sikap moderat. Tetapi apakah pemahaman yang masuk akal seperti itu benar? Juga, benarkah bersikap moderat dalam beragama berarti menekan keyakinan agama kita untuk menghormati keyakinan pemeluk agama lain?Jawabannya tentu saja tidak. Moderasi beragama tidak pernah berarti mengorbankan prinsip-prinsip dasar atau ritual dasar suatu agama untuk menyenangkan orang lain yang memiliki keyakinan agama lain atau yang memiliki agama lain. Moderasi agama juga bukan alasan bagi mereka yang tidak menganggap serius ajaran agama. Di sisi lain, agama moderat berarti kepercayaan diri

D. Paralelistik Keragaman dan Moderasi

Agama memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ini adalah dasar dari Negara Pancasila di Indonesia. "Percaya pada satu Tuhan tertinggi." Beragam agama di Indonesia secara kolektif mempengaruhi politik, ekonomi dan budaya. UUD 1945 menyatakan bahwa "semua warga negara memiliki

[152] M. Schultz: K. Baddarni, "Reflections on Palliative Care from the Jewish and Islamic Tradition. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2012*, 8.

kebebasan untuk memilih dan menjalankan keyakinan mereka" dan "menjamin semua orang kebebasan untuk beribadah menurut agama atau kepercayaan apapun".[153] Namun, pemerintah secara resmi hanya mengakui enam agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan yang terakhir adalah Konghucu.[154]

Pluralisme agama di Indonesia kerapkali menimbulkan konflik sosial keagamaan yang keras bahkan mengarah pada tindakan kriminal. Selain itu, kepemimpinan politik Indonesia berperan penting dalam hubungan antarkelompok dan kelompok. Program migrasi secara tidak langsung telah menimbulkan banyak konflik di kawasan timur Indonesia. Peran Kantor Imigrasi menunjukkan bahwa imigrasi telah menjadi pendorong utama keragaman agama dan budaya negara, dengan imigrasi dari India, Cina, Portugal, Arab dan Belanda.[155]

Namun, hal ini telah berubah seiring dengan perkembangan tertentu yang dibuat sesuai dengan budaya Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keragaman mendasari praktik beragama di Indonesia, sehingga tidak ada penjelasan yang bagus bagi warga untuk berpikiran sempit tentang pluralisme. Agama Hindu dan Budha masuk ke Indonesia sekitar abad kedua dan keempat

[153] M. N. Yasin, "The Pluralism of Islamic Economic Law: Dialectic of Moslem and non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia", *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*,10, 1(2017): 113-138

[154] Akhmadi, Agus. 2019. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13 (2): 45–55.

[155] Almu'tasim, Amru. 2019. "Berkaca Nu Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia." *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8 (2): 199–212.

ketika para pedagang dari India membawa agama tersebut ke Sumatera, Jawa dan Sulawesi.

Agama Hindu mulai berkembang di Jawa pada abad kelima pada ajaran Brahmana yang dimuliakan Guru Siwa. Para pedagang terus menciptakan agama Buddha dalam ratusan tahun berikutnya, dengan berbagai pelajaran Buddha dan Hindu yang berdampak pada alam makmur seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Syailendra. Borobudur, tempat suci Buddha terbesar di dunia di Magelang, Jawa Tengah, digarap oleh kerajaan Shailendra. Bersamaan dengan itu, Candi Hindu Prambanan menjadi inheren Yogyakarta. Puncak keagungan Hindu dan Jawa, Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke seribu empat ratus sekaligus menandakan masa gemilang sejarah Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada seribu empat ratus tahun. Dimulai di Gujarat, India, Islam menyebar ke arah pantai barat Sumatera dan kemudian timur Jawa. Saat ini berdiri beberapa kerajaan Islam seperti Demak, Pajan, Mataram dan Banten. Menjelang akhir 100 tahun kelima belas, lebih dari 20 wilayah Islam telah ditata, mencerminkan pemerintahan Islam di Indonesia.[156]

Kekristenan Protestan pertama diperkenalkan oleh Belanda pada abad ke-16 M di bawah pengaruh ajaran Calvinis dan Lutheran. Daerah-daerah animisme di Indonesia bagian timur dan tempat-tempat lain seperti Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan dan tempat-tempat lain menjadi sasaran utama Belanda. Kekristenan kemudian meluas sampai ke pesisir pantai Kalimatan,

---

[156] Amin, Rauf. 2014. "Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisihukum Islam." *Al- Qalam* 20 (3): 23–32

Toraja dan Sulawesi. Begitupun wilayah sumatera yang diincar oleh missionaris saat itu, khususnya suku Batak yang kini banyak yang beragama Protestan. Pada masa Orde Baru juga terjadi perubahan agama yang signifikan. Pada tahun 1964-1965, ketegangan antara PKI dan pemerintah Indonesia Sukarno, di samping beberapa asosiasi, memicu perjuangan dan pembunuhan yang paling mengerikan selama dua puluh ratus tahun.[157]

Berdasarkan kasus tersebut, pemerintah orde baru mencoba menindak para pendukung PKI dengan memberlakukan kebijakan yang mewajibkan setiap orang untuk memilih agama karena sebagian besar pendukung PKI adalah ateis. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia wajib membawa KTP yang menyatakan agamanya. Kebijakan ini menyebabkan konversi besar, yang sebagian besar dikonversi ke Kristen Protestan dan Katolik. Konfusianisme bukanlah salah satu posisi agama tertentu, sehingga banyak orang Tionghoa juga masuk Kristen atau Buddha. Ketika Islam masuk dan menyebar di Indonesia, terdapat berbagai suku bangsa, organisasi pemerintahan, struktur ekonomi, dan sosial budaya. Suku bangsa Indonesia yang tinggal di daerah terpencil.[158]

Menurut perspektif antropologi, relatif sedikit negara dan masyarakat campuran dari luar seperti India, Persia, Arab, dan Eropa. Desain sosial, finansial dan sosialnya cukup statis kontras dengan klan yang memiliki wilayah

---

[157] Idik Saipul Bahri, "Konsep Mayoritas Ahlussunnah Wal Jamaah", *Jurnal NU* 159, 2(2019): 8.

[158] Darlis Dawing, "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural."*Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 13, 2 (2017): 225–255.

tepi pantai. Orang-orang yang tinggal di sepanjang pantai, khususnya di daerah perkotaan pelabuhan, menunjukkan kualitas fisik dan sosial-sosial yang lebih tercipta melalui pembauran dengan bangsa dan masyarakat yang berbeda. Penyebaran Islam Pada saat munculnya dan penyebaran Islam ke Indonesia, ada negara-negara dengan contoh Indonesia-Hindu. Sumatera memiliki Alam Sri Wijaya dan Alam Melayu.[159]

Di Jawa, di Majapahit; Sunda, Pajajaran; Kalimantan, Daha, Kutai, Islam yang masuk ke Indonesia mendapat perhatian khusus dari sebagian besar masyarakat yang memeluk agama Hindu. Orang-orang yang awalnya beragama Hindu berpikir lebih baik tentang Islam karena Islam tidak mengenal kasta dan tidak mengenal perbedaan kelas sosial.[160] Himbauan Islam kepada para saudagar di bawah kekuasaan raja Indonesia yang beragama Hindu tampaknya sudah ada di hati rakyat jelata. Islam memberinya kesamaan sebagai anggota komunitas Islam. Di sisi lain, menurut agama Hindu, dia hanyalah makhluk yang lebih rendah derajatnya dari kasta-kasta lainnya: dalam Islam, dengan orang-orang yang bukan Muslim, meskipun dia menempati posisi yang lebih rendah dalam struktur sosial. lebih baik dari itu.[161]

---

[159] Erawati, Desi. 2017. "Interpretasi Multikulturalisme Agama Dan Pendidikan." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 13 (1): 100–109.

[160] Faiqah, Nurul, And Toni Pransiska. 2018. "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17 (1): 33–60

[161] Gani, A. 2018. "Pendekatan Sufistik Dalam Pendidikan Islam Berwawasan Perdamaian." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 23 (2): 387–412.

Perjalanan Islamisasi di Indonesia diselesaikan dan dikerjakan dengan bantuan dua perkumpulan, Muslim asing yang menunjukkan Islam dan bangsa Indonesia yang mengakuinya. Di tengah gejolak politik, keuangan, dan sosial-sosial, Islam sebagai agama tidak diragukan lagi dapat menembus dan memenuhi mereka yang mencari gaya hidup. Cara khusus bagi Islam untuk menyebarkan Islam adalah dengan menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang ada. Dengan demikian, pertama-tama, Islamisasi dilakukan dengan saling memahami kebutuhan dan adaptasi dengan situasi masyarakat. Pembawa dan penyebar agama Islam awal adalah para pedagang, dan memang menjadikan perdagangan faktor ekonomi sebagai alasan utama untuk berkunjung ke Indonesia.

Hal ini seiring dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional antar negara di Asia Barat, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Dengan kedatangan pedagang Muslim, orang Indonesia sendiri berada di pusat Islam, seperti yang dilakukan dalam perdagangan sejak Samdera Pasai dan Malaka, pusat kerajaan Islam yang terkait erat dengan seluruh Indonesia. Seluruh kepulauan Indonesia. Proses Islamisasi oleh media profesional dapat dilakukan secara lisan dengan kontak langsung dengan penerima, atau secara perlahan dengan membentuk komunitas desa-desa Muslim. Berbagai daerah, termasuk manca negara.Pedagang berkumpul dan menetap di satu daerah sementara atau permanen, sehingga menghasilkan sebuah desa. dari para pedagang Islam.[162]

[162] Muchlish Hanafi, *Moderasi Islam*", (Ciputat: Pusat Studi Ilmu Al-Qur'an, 2019), 67.

Dalam hal ini, mereka yang ingin belajar Islam bisa datang dan berdakwah untuk mengajar masyarakat setempat. Selain itu, Islam menyebar luas melalui perkawinan para pedagang Muslim dan anak-anak pribumi, terutama keturunan bangsawan mereka. Pernikahan ini menjalin kekerabatan dengan keluarga Islam. Media Seni Media seni digunakan baik dalam arsitektur, patung, patung, tari, sastra, musik, dan media lainnya sebagai media atau sarana dalam proses Islamisasi. Berbagai peninggalan bangunan dan patung Islam yang berlaku mengungkapkan proses Islamisasi yang damai.[163] Apalagi dari segi psikologis dan taktis, melanjutkan tradisi pra-Islam dalam membangun dan memahat adalah alat yang sangat bijak untuk Islamisasi, dengan mudah merayu orang-orang non-Islam dan secara bertahap menjadi Islami, diterima sebagai gaya hidup.

Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok yang menjadi tuan rumah dapat menjadi pembawa atau pengiklan Islam kepada orang lain di luar kelompok atau wilayah tersebut. Kesinambungan antara penerima manfaat dan kelipatan tetap terjaga. Kemungkinan sebagai sistem untuk mempromosikan para pendidik masa depan ini.[164] Para santri terbaik yang telah lama mempelajari kompleksitas Islam di tempat yang biasa disebut pesantren, kemudian pulang ke daerahnya masing-masing untuk

---

[163] Junaedi, Edi. 2019. "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag." *Harmoni* 18 (2): 182–86.

[164] Jamaluddin, Jamaluddin. 2022. "Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia." *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 7 (1): 1– 13.

menyebarluaskan ilmu, bahkan ada yang mendirikan pesantren.[165]

Pesantren merupakan *fondasi* penting dalam penyebaran Islam. Islam juga membawa perubahan sosial-sosial dalam penyempurnaan dan peningkatan budaya Indonesia. Koordinasi antara adat dan syariah sering terjadi di berbagai kabupaten di Indonesia. Mungkin pada tahap awal menghadapi jalannya perdebatan di mata publik. Meskipun demikian, perjalanan Islamisasi di berbagai belahan Indonesia diselesaikan dengan cara yang baik untuk daerah sekitarnya, sehingga keberadaan daerah yang ketat pada umumnya di antara Islam dan keyakinan masa lalu. Ini adalah asimilasi. Ini diselesaikan oleh penginjil Islam Wali Songo.[166] Hal ini karena Indonesia memiliki banyak tahun agama (Hindu Budha) dan kepercayaan animisme.

Al-Qur'an mengatakan bahwa dia menciptakan orang-orang dari kelompok etnis yang berbeda sehingga mereka akan saling mengenal (Rita Araf). Keberagaman menumbuhkan persatuan. Keberagaman juga merupakan sarana untuk mengembangkan peradaban. Karena peradaban adalah salah satu yang kaya akan perspektif dan kecerdasan serta perbedaan banyak orang. Kita bisa belajar membangun peradaban dengan mengetahui perbedaan satu sama lain. Mengetahui perbedaan satu sama lain

[165] Nasution, Muhammad Syukri Albani, And Ali Akbar. 2021. "Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Moderasi Beragama Dan Preferensi Politik Warga Nahdliyin (Studi Empiris Terhadap Pilkada Serentak 2020)."

[166] Rohman, Dudung Abdul. *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia*. (Yogyakarta: Lekkas, 2021), 71.

membangun sikap saling menghormati dan menghargai dan memulai proses pembelajaran.[167] Kesalahpahaman sering muncul karena ketidaktahuan akan keragaman pihak lain.

Tapi interaksi saja tidak cukup untuk mengenal seseorang. Interaksi kedua belah pihak menciptakan empati sekaligus simpati. Ketika kita meminta orang lain untuk memahami kita, mereka meminta kita untuk melakukan hal yang sama. Langkah pertama adalah mengenal satu sama lain, seperti pesan Al-Qur'an. Selama berabad-abad nenek moyang orang nusantara telah menyatakan bahwa meskipun kita berbeda, kita tetap satu (Bhinneka Tunggal Ika). Pepatah ini dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma Emptanchuler, yang ditulis pada abad empat belas ratus tahun di Kerajaan Majapahit. Indonesia beruntung memiliki nalar Bhinneka Tunggal Ika ketika negara-negara Barat belum mulai fokus pada gagasan keragaman..[168]

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman. Warisan budaya dari zaman kerajaan Hindu, Budha dan Islam secara permanen mendarah daging di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, para pendiri negara sepakat untuk menggunakan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti 'berbeda-beda tapi tetap satu', sebagai semboyan nasional.Saya hidup dalam keragaman dan keragaman. Beda warna kulit, beda bahasa, beda

---

[167] Dede Rosyada, 2014. "Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional." *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 1 (1): 1–12.

[168] Shofa, Abd Mu'id Aris. 2016. "Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila." *Jpk (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 1 (1): 34–40.

adat, beda agama, dan masih banyak perbedaan lainnya. Perbedaan inilah yang dijadikan oleh nenek moyang kita sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar.

Sejarah melaporkan bahwa anak-anak dari semua bangsa dari berbagai suku dan agama berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semua orang memainkan peran mereka dalam pertempuran. Kerukunan NKRI yang telah berpuluh-puluh tahun diciptakan oleh sebuah instrumen yang disebut Pancasila, masih terus digerogoti oleh beberapa kelompok.[169] Untuk melegitimasi gerakannya, mereka bahkan mengibarkan bendera Islam, sehingga seolah mampu mengobarkan semangat juang individu.Presiden, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kerap menegaskan bahwa pola pikir intoleran yang inheren ada pada setiap manusia.[170]

Percikan sekecil apapun untuk meruntuhkan dasar negara untuk menciptakan paham anti Pancasila akan meledakkan sikap ini, menurut Gus Dur harus berdasarkan hukum. Pada titik ini mereka memiliki pemahaman simbolis tentang Islam, yang harus dipegang sebagai formalisasi agama dalam sistem negara. Padahal, Gus Dur (2012) sendiri mengatakan bahwa Islam tidak perlu berbendera. Dalam konteks negara Indonesia yang pluralistik, arogansi beberapa kelompok Islam yang mengklaim khilafah

---

[169] Sulaeman, Eman, Ahmad Asmuni, And Septi Gumandari. 2021. "Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sman 1 Rajagaluh Kabupaten Majalengka: Eman Sulaeman, Ahmad Asmuni, Dan Septi Gumandari." *My Campaign Journal* 2 (04).

[170] Ulya, Inayatul. 2016. "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia." *Fikrah* 4 (1): 20–35.

tentu saja akan menjatuhkan negara Indonesia. Apalagi, kelompok tersebut tidak segan-segan bertindak kasar dan mengambil nyawa jika tidak sependapat.

Namun, terorisme itu sendiri tidak memiliki agama. Dengan kata lain, tidak perlu dikatakan bahwa agama atau kepercayaan apa pun mengajarkan kekerasan atau membunuh sesama manusia. Fakta ini menunjukkan bahwa konsep negara belum disetujui di kalangan umat Islam. Paling tidak, umat Islam harus mengakui dan merepresentasikan agama Islam sebagai ruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, agama berusaha diformalkan ke dalam sistem nasional. Apalagi di negara yang pluralistik seperti Indonesia. Seperti yang kita pelajari dari Gus Dur, semua bangsa hanya membutuhkan empati yang tinggi untuk menciptakan persatuan untuk memperkuat bangsa.

Gus Dur (1991) memberikan gambaran signifikan tentang apa yang dilakukan Nahdlatul Ulama. Pertama, menurut Gus Dur, NU memiliki pilihan untuk menempatkan negara pada jalur yang wajar. Istilah identitas untuk situasi ini adalah pluralisme, keragaman dan kontras yang harus dipertahankan. Seperti yang diungkapkan Gus Dur, semakin berbeda kita, semakin baik kita mengetahui pentingnya solidaritas sebagai sebuah negara. Karena kecenderungan manusia di zaman sekarang, pandangan negara negara NU berpendapat bahwa bangsa ini harus menjadi salah satu dari keduanya. Jiwa menata negara Islam. Jelas, pandangan dunia ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan budaya Indonesia yang semakin hari ini.

Berkaitan dengan itu, penting untuk menjadi negara Indonesia yang dapat memodernisasi tradisi dan tradisionalisasinya. Prinsip NU adalah *al-muhafadzah alal qadimis sholih, wal akhdzu bil Jadidil ashlah* (menjaga tradisi lama yang baik, mengadopsi yang baru, mempertahankan yang lebih baik). Kedua, NU dapat mempertahankan agama dan terus mewarnai kehidupan masyarakat dan bangsanya.

Dengan kata lain, kehidupan beragama tetap menjadi pilar kerukunan bangsa karena agama mengajarkan apa yang secara inheren baik. Pada titik ini, penting bagi umat Islam untuk memposisikan Islam sebagai agama resmi dan agama yang dapat menjaga kerukunan dalam interaksi sosial anak-anak di tanah air. Alih-alih sebaliknya, itu menempatkan agama di menara gading, membiarkan mereka membutakan diri pada persatuan yang sebenarnya dapat dicapai oleh rekan-rekan seimannya karena kesamaan mereka sebagai anak-anak nasional mwafaka dan negara-bangsa.[171]

[171] Baidhawy, Zakiyuddin. "The problem of multiculturalism: radicalism mainstreaming through religious preaching in Surakarta." *Journal of Indonesian Islam* 4, 2 (2010): 268-286.

BAB IV
MODERASI AGAMA
DALAM KONTEKS INDONESIA

A. Kontekstualisasi Normatifitas Moderasi Agama

Konsep moderasi beragama memiliki akar normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Islam, norma-norma moderasi beragama telah membimbing seluruh umat manusia selama berabad-abad. Semua sikap dan tindakan seorang muslim harus berbanding lurus dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadist. Konsep praktik Islam moderasi beragama adalah penyajian nilai moderasi beragama (*wasathan*) dalam al-Qur'an. Moderasi dalam agama dengan demikian merupakan bentuk spesifikasi normatif yang mengontekstualisasikan.

Kontekstualisasi moderasi keagamaan mengikat ke dalam nilai-nilai yang dikembangkan dalam teks. Tidak tergantung pada gagasan orang tertentu berdasarkan akal atau budaya. Namun, konsep nilai moderasi beragama dalam al-Qur'an adalah normatif, bukan implementasi (`*Amaliyah*). Universalitas nilai-nilai moderasi beragama memperjelas bahwa nilai-nilai tersebut berlaku untuk semua kondisi, situasi dan aspek kehidupan manusia.[172] Di

[172] M. Quraish Shihab, *Membumikan Kalam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 891.

bawah ini adalah implikasi implementasi dari nilai-nilai moderasi beragama yang terkandung dalam Al-Qur'an.

فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا

Quraisy Shihab umumnya menyatakan bahwa Hari Pembalasan akan datang secara tidak terduga. Kehadirannya adalah semacam serangan bawah tanah yang tiba-tiba di tengah-tengah kelompok yang dikira kuat namun ternyata tercabik-cabik. Dalam ayat ini *awsathhum* dikatakan berarti kerabat menengah yang sangat lembut dan ramah di antara mereka. Mereka berkata: "Bukankah kamu mengatakan bahwa rencanamu tidak terpuji? Jika kamu harus, mengapa kamu tidak terus memuji Allah dan mengatakan Insya Allah?!" adalah bahwa pemilik kebun sadar pada saat itu. Itulah sebabnya mereka berkata: Maha Suci Allah Pemelihara kami. Sebenarnya, kami punya rencana buruk sebelumnya. Kita harus mensyukuri hasil panen sambil memberikan hak kepada fakir miskin dan yang membutuhkan, tetapi kita melakukan sebaliknya.[173]

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Konteks ayat ini adalah dialog tentang kafarat (denda karena pelanggaran) bagi mereka yang dengan sengaja melanggar sumpah. Kafarat adalah awal, sekali memberi makan sepuluh orang miskin. Mereka masing-masing menerima makanan yang biasanya dimakan keluarga mereka di rumah. Bukan makanan yang sangat sederhana yang biasanya dimakan dalam keadaan hidup yang sulit,

[173] M. Quraish Shihab, *Membumikan Kalam di Indonesia…* 812.

atau makanan yang sangat besar yang dimakan seseorang ketika tinggal di daerah yang luas, seperti pesta dan makanan lain yang biasanya disajikan untuk tamu.[174]

Arti *wasath* di sini adalah dimensi yang melambangkan makan yang benar dan secukupnya. Kata *awsath* atau tengah berarti makanan yang biasa dimakan, bukan hidangan khusus. Beberapa orang paling memahaminya. Kata ini mungkin berarti, tetapi komentar pertama lebih padat. Pertama-tama, salah satu ciri Islam adalah moderasi, dan kebajikan berada di antara dua ekstrem. Semacam kemurahan hati berada di antara pelit dan kemewahan. Keberanian berada di antara kekhawatiran dan kecerobohan.[175]

Quraisy Shihab menjelaskan arti dari *kalimat as-salatal-wustha* adalah jalan tengah. Sebagian orang memahami di tengah makna jumlah Lakas dalam ibadah Magrib. Karena tiga rakaat berada di antara shalat Ashar dan Isya (empat rakaat), dan shalat subuh dua rakaat. Beberapa mendominasi tengah dalam hal waktu mulai shalat yang diperlukan. Dalam cerita, salat dzuhur didahulukan, disusul Ashar, disusul Maghrib, Isya, dan Subuh. Jika demikian, shalat shalat yang berada di tengah-tengah adalah shalat Magrib. Dalam pemikiran Islam, ketika pusat diukur dengan ukuran hati, ukuran hati dimulai saat matahari terbenam, yaitu Magrib.[176]

---

[174] A. Musthofa Bisri, *Khittah dan Khidmah: Kumpulan Tulisan Majma' Buhuts An-Nahdiyyah*. (Pati: Roudloh Al-Thohiriah, 2018), 78

[175] Nurul Faiqah, "Radikalisme Islam VS Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, 1 (2019): 87.

[176] A. Nurchlosih, "Peran Tasawwuf dalam Merekonstruksi Krisis Spiritualitas Manusia Modern", *Jurnal Sosio-Religia* 6, 2(2019): 89.

۞سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمۡ عَن قِبۡلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيۡهَاۚ قُل لِّلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِۚ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ

Quraysh Shihab, seperti banyak orang sezamannya, adalah salah satu dari mereka yang secara konsisten menetapkan dan mengklaim prinsip *Wasatiya* sebagai karakteristik dan metode pemahaman teks al-Quran. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa secara linguistik, kata *Wasat* pada awalnya berarti sesuatu yang baik, tergantung pada materi pelajarannya. Orang bijak berkata, *Khair al-umûr al-wasth*', yang terbaik dari semuanya ada di tengah. Dengan kata lain, kebaikan berada di antara dua ekstrem. Keberanian berada di antara kecerobohan dan ketakutan.[177]

Kedermawanan adalah suatu tempat antara pemborosan dan kekikiran. Selain itu, seseorang yang menghadapi dua faksi yang bertikai harus menjadi mediator. Dengan kata lain, berada di posisi tengah dalam hal keadilan. Dari sini muncul arti ketiga wasath. ini adil. Terbaik, tengah dan adil adalah tiga arti umum dari kata Wasato. Kata syahid adalah bentuk jamak dari kata syahid. Kata ini berasal dari kata syahid. Sebuah kata yang terdiri dari huruf-huruf Sinhadar tidak jelas maknanya dari "keberadaan/kehadiran, pengetahuan dan pemberitahuan". Kadang kata pelindung syahid berarti benda, kadang benda, jadi syahid bisa berarti saksi atau

177 Ali Ridho; Thibburruhany, "Prinsip Toleransi Beragama Sebagai Pondasi Membangun Peradaban Islam di Era Modern", *Jurnal El-Afkar* 8,1 (2020): 1-16.

saksi. Artinya syahid adalah orang yang, dengan contoh, bersaksi, atau dibuat untuk bersaksi, kepada orang lain dan pada saat yang sama, dengan contoh, bersaksi tentang kebenaran dan/atau kepada mereka tentang pahala yang dijanjikan Allah.[178]

Nabi Muhammad adalah seorang syahid dan umatnya syahid dalam salah satu atau kedua pengertian di atas. Umat Islam adalah saksi, saksi yang memberi teladan bagi orang lain, dan sekaligus menjadikan Nabi Muhammad SAW. Sebagai patron, mereka tidak hanya meniru, tetapi juga menyaksikan legitimasi semua aktivitas mereka. Hal ini terjadi karena umat Islam adalah *Wasasan Ummatan* dan Nabi Muhammad adalah *wujud Wasatiyah*. Quraisy Shihab berpendapat bahwa akhlak Wasatiya membimbing dan membimbing manusia kepada akhlak dan perilaku yang adil dan patut dalam segala hal. Lebih lanjut ia mendefinisikan konsep *Wasatya* berdasarkan beberapa paradigma yang berbeda, yang kesemuanya bersifat komplementer.

Pertama, berada di posisi tengah membuat orang adil dan tidak memihak pada yang kiri ataupun kanan. Berada di posisi tengah memungkinkan setiap orang untuk melihat orang tersebut dari sudut yang berbeda dan pada titik ini dapat menjadi panutan bagi semua yang terlibat. Allah telah menempatkan umat Islam pada posisi tengah-tengah, sehingga mereka menjadi saksi atas perbuatan manusia, yaitu umat lain. Para syuhada adalah saksi dan saksi atas kebenaran sikap dan tindakan mereka.

[178] M. Subhi, "Desakralisasi dan Alenasi Manusia Dalam Peradaban Modern Persepektif Sayyed Hossein Nasr", *Jurnal Universitas Paramidana* 6, 1(2017): 23.

Dengan kata lain, jadilah panutan dalam segala hal yang kita lakukan.[179] Artinya secara luas dimaksudkan dengan melanjutkan agar Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan umatnya.

Kedua, sebagian orang mengambil pandangan rata-rata masyarakat *Wasasan* dalam pandangan mereka tentang Tuhan dan dunia. Ia tidak menyangkal keberadaan Tuhan, tetapi tidak percaya pada politeisme (banyak dewa). Pandangan Islam adalah bahwa Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan adalah satu. Di tengah juga merupakan pandangan Muslim tentang kehidupan di dunia ini. Jangan menyangkal atau menilainya sebagai ilusi. Juga, jangan berpikir bahwa kehidupan duniawi adalah segalanya. Pandangan Islam tentang kehidupan menyatakan bahwa selain dunia ada akhirat, dan keberhasilan di akhirat ditentukan oleh iman dan amal shaleh di dunia.

Seseorang seharusnya tidak tenggelam dalam materialisme atau spiritualisme. Kaki anda harus tetap di tanah ketika mata anda tertuju ke langit. Islam mengajarkan umatnya untuk mencapai materi dunia, tetapi dengan nilai ukhrawi. Quraish Shihab mendefinisikannya berdasarkan tiga prinsip dasar moderatisme Islam (wasathiyyah). Artinya, *wasathiyyah* pertama dalam kontemplasi Tuhan dan dunia. Dengan tidak menerima kemusyrikan (banyak dewa) daripada mengingkari keberadaan Tuhan.[180] Posisi tengah memungkinkan umat Islam memadukan mental

---

[179] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2018), 102.

[180] W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theologi* (Edinburg at the University Press, 1999), 89.

dan fisik, material dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas.

Posisi tengah membuat individu bisa melihat keseimbangan kiri dan kanan, sehingga Ia condong berbuat adil. Ia dapat berkolaborasi, berbagi, dan terbuka untuk semua pertemuan. Ketiga, posisi tengah membuat umat Islam memandang semua orang dari posisi yang berbeda dan menjadi contoh yang baik untuk mereka adalah pengamat dan contoh umat Islam, mendorong umat Islam untuk meniru Nabi Muhammad. Dalam kualitas yang dia didik dan terapkan. Quraish Sihab melihat ada poin-poin pendukung (wasathiyyah) yang sangat signifikan.[181]

Beberapa pengertian keadilan yang dikemukakan adalah: Pertama, adil dalam arti kesetaraan. Orang yang berjalan lurus selalu menggunakan takaran yang sama, bukan takaran ganda. Kesetaraan adalah apa yang membuat orang benar tidak memihak siapa pun yang menentang. Adil juga berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini mengarah pada kesetaraan, tetapi kuantitas tidak boleh sama dalam pengukuran. Keadilan adalah memberikan kepada pemilik haknya dengan cara yang sedekat mungkin. Itu tidak mengharuskan siapa pun untuk segera mengalihkan haknya kepada pihak lain. Keadilan juga berarti moderasi, "tidak mengecilkan atau melebih-lebihkan."

Kedua, pilar keseimbangan. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan dilacak dalam tandan dengan berbagai bagian yang mengarah pada tujuan tertentu, selama

---

[181] Djohan Efendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 21.

keadaan dan tingkat tertentu dipenuhi oleh setiap bagian. Dengan asumsi bahwa keadaan-keadaan ini terpenuhi, pihak tersebut dapat memenuhi syarat dan berlomba untuk memenuhi motivasi kehadirannya. Penyetelan tidak memerlukan bahan dan kondisi yang sama untuk menyetel semua bagian unit. Bagian bisa kecil atau besar, bergantung pada kegunaan yang diantisipasi. Dalam editorial Quraish Shihab, keseimbangan adalah aturan utama Wasathiyyah. Karena tidak ada ekuitas tanpa keseimbangan. Keseimbangan ciptaan, misalnya, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ditunjukkan oleh ukuran, jumlah, dan kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur kerangka yang sangat besar sehingga langit dan benda-benda penting tidak saling bertabrakan, sehingga masing-masing mengalir dengan cara yang wajar sesuai dengan tingkatannya.

Ketiga, pilar toleransi. Quraisy Shihab memaknai bahwa toleransi merupakan batas beragama yang membatasi ekspansi atau deduksi. Toleransi adalah penyimpangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu penyimpangan yang dapat dibenarkan. Kebutuhan akan keragaman dan kebutuhan akan persatuanlah yang mendorong orang untuk bersikap toleran. Perdamaian, kepentingan dan kemajuan tidak dapat dicapai tanpa toleransi. Salah satu toleransi paling awal dalam ajaran Islam adalah tidak memaksakan penerimaan Islam. Tuhan ingin semua orang merasakan kedamaian.[182]

[182] Muhammad Tholchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2000), 67.

Agamanya disebut Islam yang damai. Kedamaian tidak dapat dicapai jika jiwa tidak tenteram. Kami tidak memaksa siapapun untuk menganut keyakinan agama Islam, karena paksaan memiliki konsekuensi tidak menemukan kedamaian dalam jiwa siapapun. Siapapun tidak perlu memaksakan agama hanya karena itu jalan yang lurus.[183] Oleh karena itu, orang gila, orang yang belum dewasa, atau orang yang tidak mengetahui tuntunan agama tidak mengetahui jalan yang jelas dan tidak bersalah melanggar atau menaati tuntunan agama. Namun perlu diingat juga bahwa hal ini juga tidak benar, karena siapa saja yang mengetahui tetapi tidak mau mencari ilmu akan dituntut karena menyia-nyiakan potensinya.

Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya, jika seseorang memutuskan suatu keyakinan seperti Islam, ia otomatis terikat dengan pedoman dan wajib menjalankan perintah itu. Jika dia melanggar keputusannya, dia menghadapi sanksi. Dia tidak bisa mengatakan, "Allah telah memberi manusia kebebasan untuk berdoa atau tidak, berzina atau menikah."[184] Tentu saja, dalam konteks Indonesia, moderasi Islam harus diterapkan secara lebih luas, terutama kepada non-Muslim. Berbagai perbuatan baik bagi non-Muslim diperbolehkan selama tidak merugikan umat Islam. Namun, itu tidak termasuk Muslim yang sebenarnya, kecuali mereka yang jelas-jelas berperang dan mengobarkan perang untuk kepentingan

---

[183] Wiji Hidayati, *Ilmu Kalam : Pengertian, Sejarah, Dan Aliran-Alirannya* (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Yogyakarta, 2017), 78.

[184] Idri, *Epistemologi : Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis Dan Ilmu Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 19-20.

sekuler yang tidak terkait dengan agama. Jika mereka damai, Islam tidak peduli atau tidak mau terlibat dalam permusuhan.

B. Moderasi Agama dalam Konteks Nusantara

Gerakan mobilisasi massa untuk kepentingan politik tidak bisa dipungkiri. Salah satu landasan bangkitnya ide kebangkitan ekstremis mengatasnamakan Islam. Namun tujuan dan cara yang ditempuh tidak sesuai dengan ketentuan dan syariah yang ada. Salah satunya adalah paham fundamentalis dan liberal. Salah satunya adalah pemahaman fundamentalis dan liberal. Banyak fundamentalis yang kita amati dengan cermat dan lihat dalam gerakan radikal mereka. Ini adalah faktor buruknya citra Islam, karena diyakini mewakili doktrin kekerasan yang tidak memiliki kemanusiaan dalam nilai-nilai agama mana pun yang diterapkan Islam. Konteks keadaan dan kepentingan yang ada, terlepas dari hukum asli yang berlaku.[185]

Gambaran seperti ini tidak sesuai dengan realitas dan kondisi Indonesia sebagai bangsa multikultural. Tidak semua hukum Islam dengan ciri Khalifah dapat diterapkan di negara ini, terlepas dari konteks atau pemahaman hukum yang matang. Oleh karena itu, ahlu sunnah wal jemaah tidak hanya menerapkan hukum Islam dari Al-Qur'an dan hadits, tetapi juga mempersulit para ulama dan para mujtahid, memungkinkan hukum Islam dengan karakter Islami menjadi fleksibel dan dapat

---

[185] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: UMS Press, 2014), 10.

disesuaikan. Islam moderat merupakan solusi pilihan untuk menciptakan kondisi yang mendorong masyarakat dan bangsa Indonesia. Islam moderat berada di antara dua gagasan yang saling bertentangan: fundamentalis dan liberal. [186]

Pada dasarnya, wacana Islam moderat merupakan bentuk perlawanan terhadap dua pernyataan yang saling bertentangan yang muncul di Indonesia. Islam Nusantara adalah Islam yang damai, baik dan toleran yang lahir dan berkembang dalam tradisi dan budaya Indonesia. Abdurrahman Wahid menggambarkan Islam Nusantara sebagai ajaran normatif dari Tuhan dengan gagasan "Islam Pribumi" kemudian menjadi budaya yang datang dari masyarakat tanpa kehilangan identitasnya. Islam Nusantara berdiri di antara dua pandangan yang saling bertentangan: liberalisme dan fundamentalisme. Islam Nusantara memiliki lima kepribadian khas yang membedakannya dari Islam Arab dan Islam lainnya di dunia.[187]

Mempromosikan ajaran Islam dan memfasilitasi dialog dengan tradisi ideologis orang lain adalah ide yang melihat kemajuan zaman sebagai hal yang baik. Islam merupakan ajaran yang dapat menjawab permasalahan kehidupan masyarakat. Islam tidak membeda-bedakan orang. Secara bersama-sama, kelima karakteristik tersebut bertujuan untuk membentuk ajaran Islam moderat

---

[186] AlMaarif, "Islam Nusantara : Studi Epistemologis Dan Kritis." *Jurnal Analisis* 15, 2 (2015), 98.

[187] Afrizal Nur. "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an : Studi Konparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar at-Tafasir." *An-Nur* 4,2 (2015): 32.

yang lebih mementingkan perdamaian, kerukunan, dan toleransi umat beragama tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam.[188] Muslim moderat adalah ciri khas Islam di Indonesia, tidak seperti situasi Islam di Arab dan belahan dunia lainnya. Islam di Indonesia adalah Islam yang nyaman, damai dan sejahtera. Saya tidak memungkiri ada konflik yang berujung pada konflik, tetapi saya nyaman dalam arti tidak ada konflik yang mengkritisi agama dan stabilitas nasional.[189]

Keberadaan moderasi Islam perlu diteriakan kembali mengingat saat ini mainstream radikalisme merebak hampir di seluruh tatanan global. Paham ekstremisme yang sedemikiran dominan, menyebabkan kekhawatiran semua kalangan termasuk Indonesia. Pasalnya, pemikiran eksremis tersebut bisa membuat kerukunan sosial menjadi kacau. Walaupun sebenarnya, rasulullah pernah mengatakan bahwa umat manusia akan terpecah ke dalam 73 golongan namun hanya asa satu golongan yang selamat yaitu *ahlusunnah wa al-jamaah.* Hadist tersebut menyiratkan adanya sinyalement bahwa akan ada 73 golongan di dunia, termasuk golongan yang terjadi hari ini.[190]

Jika dilihat dari sejarahnya, ada dua aliran Islam yang kuat dari dulu sampai sekarang, yaitu mu'tazilah dan asy'ariyah. Sekte Mutazilah adalah sekolah sufi yang paling banyak dan tertua dalam sejarah Islam. Tren ini didirikan

---

[188] M. Imdadun Rahmad, *Islam Pribumi : Mendialogkan Agama Membaca Realitas* (Jakarta: Erlangga, 2017), 91.

[189] Akhmad Sahal; Munawar Aziz. *Islam Nusantara : Dari Ushul Fiqih Hingga Konsep Historis.* (Bandung: Mizan, 2015), 77.

[190] Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 55.

di Basrah pada awal penanggalan Islam pada abad ke-2 Masehi. Penamaan mu'tazilah bukan barasal dari kata mu'tazilah itu sendiri, melainkan dari kalangan lain yang bernama *azilah*. Azilah sendiri menyebut kelompok mereka "ahli keadilan dan persatuan" (*ahlu adli wa at-tauhid*).[191] Setelah pendiri sekolah, Vasiliy bin Ata, melepaskan penjelasan gurunya dan mendirikan yang baru, pendiri sekolah, Anas bin Atha, tidak setuju dengan gurunya, Hasan al-Basri. Ada juga alibi mengapa kelompok lain menyebut mereka sebagai kaum Mu'tazilah. Kemudian, Hasan al-Basri berkata, "Wasil telah meninggalkan kami," dan sejak itu Anas bin Atha diucapkan sebagai "Kelompok Mu'tazilah".[192]

Di sisi lain, mazhab Asy'ari lahir sebagai respon terhadap mazhab Mu'tazilah. Nama mazhab Asy'ari berasal dari nama pendirinya Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari yang lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah. Al-Ashali awalnya menganut konsep Mu'tazilah dan belajar di bawah seorang tokoh Mu'tazilah, ayah tirinya Abuhasim Arjubai. Al Ash'ari telah mempertahankan ideologi Mu'tazilah sejak ia membagi umat Islam menjadi tiga kelompok sampai ia berusia 40 tahun. Kubu Mu'tazilah, di tengah pemahaman keduanya bahwa mereka tidak berpihak pada Ali dan Mu'Awija, cenderung mempercayakan seluruh kasus kepada Allah. Karena

[191] Achmad Yusuf, "Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, Dan Tasawuf)", *Al-Murabbi* 3, 2 (2018): 12-16.

[192] Achmad Yusuf, "Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama" *Jurnal pemikiran keislaman dan Kemanusiaan* 1, 2 (2017): 166-180

itu, ia sering berpikir sendiri dan menyamakan gagasan Mu'tazilah dengan gagasannya sendiri.[193]

Tak lama kemudian, al-Ashali mengumumkan kepada sekte Mutazilah di Basra bahwa dia telah meninggalkan sekte Mutazilah dan mencatat kekurangannya. Perlu dicatat bahwa sekolah Ashari adalah sekolah di bawah Rasionalis. Al-Ashali, pendiri mazhab Ashari, berusaha menemukan jalan tengah di antara dua gagasan yang berlawanan ini. Al-Asy'ari menyadari bahwa kedua paham tersebut sangat berbahaya bagi stabilitas umat Islam saat itu dan dapat menghancurkannya jika tidak segera diakhiri. Ia sangat khawatir Al-Qur'an dan Hadits akan menjadi korban tulisan-tulisan Mutazilah, namun ia menolak karena Mutazilah mengatur Al-Qur'an dan Hadits berdasarkan rasionalitas. Berbeda dengan sekte Mutazilah, al-Ashiari juga sangat prihatin agar Al-Qur'an dan Hadits dipahami oleh kaum tekstualis yang memahaminya dengan sedikit pemikiran, sehingga membuat umat Islam buta.[194]

Al-Asy'ari mencoba berdiri di antara dua ide tersebut dan menciptakan sesuatu yang baru: Asy'ariyah. Bahkan pemahaman ini diterima oleh sebagian besar umat Islam di dunia, termasuk Indonesia. Islam Indonesia akan menjadi Islam yang berpegang teguh pada mazhab Asy'ariyah atau *Ahlusunnahwal Jama'ah*. Ada dua asosiasi Islam yang menggambarkan Islam Indonesia: Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua asosiasi Islam memiliki kualitas masing-masing. Sementara Nahdatul Ulama memiliki kualitas *Islamic Life Experience Schools* dan Ulama,

[193] Azyumardi Azra, Harmoni agama, Kebangsaan dan Pancasila, (Yogyakarta: UGM: 2019), 1.
[194] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam,* 55.

Muhammadiyah memiliki atribut unik sebagai landasan instruktif yang ahli dan telah melahirkan banyak peneliti Muslim..[195]

Baik Nahdatul Ulama maupun Muhammadiyah menganut paham Islam moderat. Nahdatul Ulama, dengan santri dan ulama pesantrennya, menjadi pertahanan yang kuat terhadap pemahaman dan kebebasan liberal. Muhammadiyah dengan basis intelektualnya dikatakan mampu membawa Indonesia maju dan sukses, namun meninggalkan kaum fundamentalis yang mengkritik tajam kemajuan negara karena berpikiran kerdil.

Islam Indonesia juga Islam yang ramah dan santun. Hal ini tercermin dari bagaimana umat Islam Indonesia terus hidup bersama dalam masyarakat, saling membantu, menghargai perbandingan (toleransi), dan menghormati Kyai dan Ulama yang tercermin dalam bentuk Santri Indonesia. Inilah fakta-fakta konkrit bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang damai, baik dan penuh hormat, yaitu Islam moderat.[196]

Epistemologi menempati tempat penting dalam keilmuan Islam. Yaitu menyelidiki sumber-sumber ajaran Islam, mengidentifikasi cara kerjanya, dari mana asalnya, dan apakah ajaran tersebut dibenarkan dan apakah ajaran Islam jelas dan dipertanyakan sebagai metode.[197]

---

[195] . Musthofa Bisri, *Khittah dan Khidmah: Kumpulan Tulisan Majma' Buhuts An-Nahdiyyah…* 98.

[196] Ali Ridho, "Memahamai Makna Jihad Dalam Serial Film Kartun Cisform: Jihad FiSabilillah (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk)", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi IAIN Curup*, 4,1 (2019), 79.

[197] Ali Ridho; Thibburruhany, "Prinsip Toleransi Beragama Sebagai Pondasi Membangun Peradaban Islam di Era Modern", *Jurnal El-Afkar* 8,1 (2020): 1-16

Aspek etika menjelaskan bahwa Islam Nusantara adalah ilmu yang lahir dari nilai-nilai Islam atau faktor moral yang tumbuh dalam diri warga negara Indonesia. Moralitas Islam bermula dari pengakuan tauhid dan Nabi Muhammad. Sebagai utusan, sebagai rasul. Masuknya Islam ke Indonesia tidak mengubah budaya di sekitarnya, tetapi mengubahnya menjadi budaya yang lebih Islami dan bermoral. Para penyebar Islam di Indonesia secara tidak langsung memanfaatkan ketiga metode penyebaran Islam di Indonesia ini. Artinya, mengambil budaya dan adat Indonesia yang tidak bergumul dengan jiwa Islam dan memusnahkan yang tidak sesuai dengan jiwa Islam (Tarim).[198]

Upaya Warisongo menyebarkan Islam sedikit berbeda dari pendahulunya. Walisongo menyebarkan Islam dengan ramah dan moderat dan membuat orang-orang menerima Islam. Upaya yang dilakukan Walisongo mampu menarik perhatian masyarakat Jawa dengan membudayakan budaya lokal dengan ajaran Islam seperti seni wayang, tari, mendongeng, dan ritual adat. Walisongo tidak menghapus budaya lokal, tetapi memodifikasinya menjadi lebih Islami.

Untuk ushul fiqh, kita dapat menginformasikan hukum melalui ijtihad, upaya para ulama untuk membuat hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau hadits. Ijtihad dapat dibedakan menjadi dua penafsiran. Awal dari Istinbathi ijtihad adalah ijtihad, yang bertujuan untuk melahirkan undang-undang baru. Tujuan Ijtihad

[198] . Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theologi* (Edinburg at the University Press, 1999), 90.

kedua adalah Ijutihad yang tujuannya untuk mengamalkan hukum, bukan untuk menciptakannya. Perbandingan lain dari kedua jenis ijtihad ini adalah pada proses pemeriksaannya.[199] Keefektifan uji ijtihad istinbathi dapat dilihat dari konsistensi 23 dalil yang digunakannya, namun ijtihad dapat mengenali keefektifannya melalui kemanfaatan atau aspek kemanfaatan dalam pelaksanaannya.[200]

Ijtihad *tathbiti* adalah tata cara penegakan hukum dengan mempertimbangkan keuntungan atau nilai keuntungan. Seorang mujtahid harus memahami bidang ilmu yang sangat luas. Memahami Al-Qur'an dan hadits saja tidak cukup, tetapi harus bisa membaca suasana hati dan situasi di lapangan. Mengingat konflik kekerasan dalam umat Islam saat ini, moderasi Islam adalah wacana kunci abad ini. Masalah yang dihadapi umat Islam saat ini sangat lingkungan dan meluas ke masalah sosial, budaya dan agama.

Isu sosial yang dihadapi umat Islam saat ini adalah tidak adanya pemahaman tentang kehidupan yang berpikiran terbuka. Muslim saat ini umumnya akan mengabaikan kehadiran orang lain seolah-olah mereka tidak membutuhkannya. Kegagalan filterasi budaya, sekali lagi, merupakan penyumbang masalah yang dihadapi umat Islam saat ini. Budaya Islam saat ini kurang memikat umat Islam, khususnya kaum muda. Mereka puas dengan budaya Barat, yang menangkap peluang dan radikalisme.

---

[199] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: UMS Press, 2014), 11.

[200] M. Imdadun Rahmad, *Islam Pribumi : Mendialogkan Agama Membaca Realitas* (Jakarta: Erlangga, 2017), 92.

Pemahaman seperti ini tentunya akan membahayakan umat Islam di masa depan.[201]

Dua masalah di atas pada akhirnya memunculkan masalah yang lebih besar: masalah agama. Isu agama Islam sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, sejak datangnya Sungai Karam. Sejak saat itu, isu agama berkembang hingga saat ini. Inti masalahnya adalah perbandingan dalam penguasaan teks Al-Qur'an dan hadits. Kedua objek, Al-Qur'an dan hadits, akhirnya menciptakan dua kelompok yang berlawanan. Kelompok pertama memiliki kontrol tekstual atas Quran dan hadits dengan deskripsi kecil. Dengan kata lain, sekelompok fundamentalis. Dua kelompok bebas belajar Al-Qur'an dan hadits untuk mengikuti perkembangan zaman.

Kelompok ini disebut kelompok liberal. Sementara kaum fundamentalis memahami bahwa mereka ingin mengambil tindakan radikal, kaum liberal ingin menciptakan tindakan yang bebas dan di luar norma hukum umum. Dengan dua penjelasan tersebut, moderasi Islam layak dipelajari dan dipelajari untuk aplikasi lebih lanjut dalam kehidupan sosial, budaya dan agama. c Islam dalam lingkungan sosial ditunjukkan dengan bersikap ramah, menyenangkan, dan lunak terhadap orang lain. Pelepasan Islam di bidang sosial ditunjukkan dengan demonstrasi penghargaan, bukan dengan memusnahkan atau melenyapkan masyarakat. Kemudian, pada titik itu, di bidang agama, keseimbangan Islam dapat ditunjukkan melalui kegiatan non-radikal dan liberal.

---

[201] Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia,* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 55.

Moderasi dalam Islam adalah salah satu atribut Islam yang tidak terlacak dalam agama yang berbeda. Keseimbangan Islam menyerukan dakwah Islam yang berpikiran terbuka terhadap semua jenis ide liberal dan revolusioner. Pembangkang dalam perasaan Islam memutuskan dengan alasan murni yang pada umumnya akan mencari norma-norma non-logis dan dukungan. kehidupan. Berkaitan dengan Indonesia, muncul istilah "Islam Nusantara". Ini adalah hasil dari moderasi Islam di Indonesia, yaitu Islam yang damai, baik dan hormat. Islam menganut Syariah dengan tetap menghormati tradisi dan budaya. Islam Nusantara adalah perwujudan dari Ramatan Islam Lil Aramin untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh umat di dunia.

Jika hal tersebut terus dijaga dan dilestarikan, bukan tidak mungkin Islam Nusantara menjadi kiblat baru peradaban Islam. Spiritualitas dan Islam Nusantara. Islam menyatakan bahwa Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah diharapkan dapat mengembangkan Islam dan berkeinginan membangun peradaban dan kemanusiaan. Dalam arti peradaban, ilmu keislaman tumbuh dan berkembang. Kemanusiaan berarti umat Islam memiliki etika dan moral. Hal ini karena pengetahuan saja tidak baik kecuali dibarengi dengan etika dan moral.

C. Moderasi Agama dalam Modernisme di Indonesia

Istilah moderasi berasal dari bahasa Latin moderasi dan lebih bermakna (tidak terlambat atau hilang). Moderasi dalam bahasa Arab dikenal dengan wasathiyah, yang merupakan kata yang sama dengan tawazun. Kementerian

Agama Indonesia mendefinisikan moderasi beragama sebagai metode perantara paham ekstrem. Kebalikan dari istilah ini adalah moderasi ekstrim. Dalam bahasa Inggris, istilah ekstrimisme berarti pemikiran politik atau agama yang ekstrim dan fanatik. Dalam bahasa Arab, istilah wasathiyah merupakan kebalikan dari tatharruf yang berarti radikal dan ekstrim.[202]

Perilaku ekstrem dalam beragama ini dapat ditunjukkan dengan mengesampingkan deskripsi tekstual dan gagasan tentang agama. Hal ini dapat dijelaskan dengan penjelasan yang tegas tentang membaca Alkitab dan mengabaikan konteksnya. Moderasi atau moderasi dalam pemikiran Islam adalah tindakan yang lebih mengutamakan toleransi daripada pertentangan. Jenis perbandingan ini dapat mencakup agama atau aliran pemikiran dalam agama.[203] Perbedaan yang ada bukanlah halangan untuk bekerja dengan kemanusiaan bermoral. Meyakini Islam sebagai agama yang paling benar bukan berarti wajib menghina agama lain.

Mencapai persaudaraan antar agama membutuhkan moderasi. Tindakan saudara kandung ini tentu sangat diperlukan untuk menghasilkan warga negara yang damai dan bebas dari segala konflik agama.Radikalisme, kebalikan dari moderatisme, merupakan hal negatif yang harus dihindari umat beragama. Kekerasan dan isu-

[202] Achmad Yusuf, "Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama" *Jurnal pemikiran keislaman dan Kemanusiaan* 1, 2 (2017): 166-180.

[203] Azyumardi Azra, Harmoni agama, Kebangsaan dan Pancasila, (Yogyakarta: UGM: 2019), 3.

isu terkait lainnya adalah bentuk ekstremisme.[204] Salah satu bentuk ekstremisme skala besar adalah dengan menerapkan teokrasi di negara demokratis, kata ISIS. Beberapa bentuk, seperti terorisme dan konflik, berakar pada penggambaran agama yang ketat.[205]

Kisah-kisah religi dapat menumbuhkan munculnya kekerasan atas nama agama. Ide-ide radikal terus menyebar secara online di era globalisasi ini, dan sulit untuk menghentikannya. Inilah posisi moderasi beragama sebagai penangkal ide-ide radikal. Pemikiran moderat cukup universal di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Institution Research Center, 82% Muslim di Amerika Serikat menentang bom bunuh diri. Satu survei lagi yang dipimpin oleh Seat Exploration Center juga menunjukkan bahwa 48% Muslim AS menerima bahwa para pemimpin Muslim tidak berbuat banyak untuk memerangi fanatisme.

Dalam istilah yang ketat, kontrol yang ketat memiliki pusat di antara progresivisme dan tradisionalisme. Dalam Islam, hal ini terjadi melalui campur tangan pemikiran-pemikiran yang memiliki pegangan ketat yang tidak dapat ditekuk, seperti fundamentalisme Islam dan radikalisme Islam. Tidak hanya itu, kontrol yang ketat juga menepis pemikiran liberal yang cenderung mengarah pada kemungkinan untuk menguraikan pelajaran yang ketat. Tujuan dari keseimbangan yang ketat adalah untuk

---

[204] Al-Rasyid, "Dakwah Islam Di Era Globalisasi: Revitalisasi Prinsip Moderasi Islam", *Al-Qalam*, 20, 3 (2019), 1–12.

[205] W. Hefni, W. (2020). "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 1–22.

jatuh di antara dua posisi yang keterlaluan ini. Dari satu perspektif, substansi pelajaran yang ketat ditekankan, dan sekali lagi, kontekstualisasi agama digarisbawahi.[206]

Globalisasi dimaknai dalam pemikiran universal sebagai kebangkitan teknologi pelemahan bukti diri dan budaya, kompleksitas material ekonomi, dan saling ketergantungan. Sederhananya, globalisasi adalah sebuah raksasa mekanis dan material yang mengganggu tekstur ontologis konvensional dan kontemporer yang mendorong budaya dan karakter sejauh mungkin. Hal ini kemudian, pada saat itu, mendorong munculnya perkembangan hambatan yang muncul dari gaya hidup dan diremehkan. Dengan globalisasi, semua jenis instrumen khusus seperti TV, radio, web, telepon, dan perangkat khusus lainnya membuka informasi manusia ke seluruh dunia. Pemikiran luar, misalnya, fanatisme juga efektif masuk ke Indonesia.[207]

Ada yang paham bahwa ekstremisme ini menyebar sangat cepat, seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi komunikasi. Globalisasi yang telah membuka pengetahuan manusia ke luar, juga telah membentuk gambaran manusia, jika banyak dibandingkan. Perbandingannya serupa dalam bidang agama, ras, bahasa dan suku. Penerimaan terhadap perbandingan ini merupakan isu penting di era globalisasi, dan sangat penting bagi karakter warga negara dan pembangunan

[206] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 120.

[207] F. M. Manshur, F. M; Husni, "Promoting Religious Moderation through Literary-based Learning: A Quasi-Experimental Study", *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29, 6(2020), 5849–5855

sosial. Toleransi merupakan salah satu perilaku dalam menanggapi perbandingan. Ada tindakan yang toleran, menghargai perbandingan yang ada, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Moderasi beragama adalah contoh bagaimana kita menyikapi proses globalisasi ini.

Moderasi agama membutuhkan menghindari keegoisan kelompok dan keegoisan sebanyak mungkin untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. [208] Hal ini dapat mencegah munculnya radikalisme. Ide-ide moderasi beragama ini sangat penting dalam upaya menciptakan warga negara yang sempurna di era globalisasi ini. Multikulturalisme dapat dipahami untuk mencerminkan kehidupan warganya yang beragam, baik secara budaya maupun etnis. Agama juga merupakan wilayah multikulturalisme, karena agama-agama pada umumnya seringkali terintegrasi dengan budaya tertentu.[209]

Masuknya pergerakan struktur masyarakat multikultural. Negara-negara Eropa saat ini adalah contoh multikulturalisme karena banyaknya jumlah pekerja dari luar Eropa seperti negara-negara Timur Tengah. Untuk situasi ini, jelas, para pemukim ini membumbui cara hidup dan agama mereka di negara baru mereka. Hal tersebut tentunya akan membentuk keragaman negara tujuan imigrasi. Seiring dengan berkembangnya multikulturalisme dan kemajemukannya yang khas dalam

---

[208] S., Louis, W. R. Wibisono; J. Jetten (2019). "A Multidimensional Analysis of Religious Extremism", *Frontiers in Psychology*, 10.

[209] Ahmad Agis Mubarok; Rustam Diaz Gandara, "Islam Nusantara: Moderasi Islam Di Indonesia", *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, 2 (2018): 153-168.

persoalan agama, tentunya juga perlu adanya sikap saling toleran terhadap perbandingan yang ada. Pendatang harus merangkul nilai-nilai warga negara yang sudah ada di negaranya tanpa menguras identitasnya. Misalnya, umat Islam yang tinggal di Eropa harus menerima nilai-nilai budaya orang Eropa.[210]

Tentu saja, masalah ini membutuhkan moderasi. Jika kita benar-benar ingin beradaptasi dengan negara baru, kita harus membuang pemahaman kita tentang ekstremisme. Masalah ini dimaksudkan untuk mengatasi konflik yang ada. Masyarakat Adat juga memiliki kewajiban untuk menerima budaya para pendatang tersebut, sepanjang agama atau budaya mereka tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai budaya mereka. Sampai saat itu, kita membutuhkan ikatan timbal balik yang baik. Perilaku relaksasi mengarah pada perilaku toleransi untuk menerima pertentangan pendapat.

Indonesia memiliki sejarah budaya yang panjang. Indonesia sekarang memiliki budaya yang dipengaruhi oleh orang-orang dari India, Cina, Timur Tengah dan Eropa. Orang-orang ini kemudian juga membawa agamanya, yang kemudian dianut oleh penduduk nusantara. Sampai hari ini, agama-agama ini terus tumbuh dan hidup berdampingan satu sama lain. Tapi tentu saja ada konflik antar agama di Indonesia, seperti konflik di Poso, Ambon, Trikala, dll. Perbandingan agama, budaya, suku, dan lain-lain memiliki potensi konflik yang besar. Moderasi beragama adalah jawaban untuk menghindari konflik

[210] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajarn, Sejarah, dan Pemikirannya,* (Jakarta: UI Press, 2019), 30.

semacam itu.[211] Moderasi agama membantu membangun keseimbangan agama.

Dalam konteks Indonesia yang sangat kompleks, kebhinekaan perlu disikapi dengan baik agar dapat menghasilkan perdamaian. Namun, jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, dapat menyebabkan konflik. Fasilitasi keagamaan dalam pencegahan konflik bertujuan untuk meningkatkan ciri-ciri pembangunan manusia dengan nilai-nilainya sendiri. Agama dengan statistik yang baik dapat menjadi aspek penting dalam membangkitkan statistik moderat bagi warga negara Indonesia, dapat berbagi landasan sosial dan etika.[212] Dengan berkembangnya teknologi data di era globalisasi ini, kita dapat mencoba mengkampanyekan nilai moderasi beragama melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan YouTube.

Media sosial ini berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Isu ini tentu bisa menjadi kebalikan dari penyebaran ajaran ekstremis agama yang bisa disebarkan secara bersama-sama melalui media sosial. Saat ini banyak orang yang memiliki akses internet, sehingga metode berkampanye melalui media sosial sudah dikenal luas. Di awal tahun 2019 saja, dilaporkan jumlah pengguna netizen mencapai 171 juta.[213] Disiplin yang besar

---

[211] David Taylor, *Politik Islam dan Islamisasi Pakistan‖ dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, Perkembangan Modern dalam Islam.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), 56.

[212] Abdul Aziz, Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. (Gema Insani Press, Jakarta, 2018), 100.

[213] Wijianti; Siti Aminah, "Kewarganegaraan (Citizenship)". (Jakarta: Piranti Darma Kalokatama, 2017), 79.

juga bisa menjadi sarana untuk meresapi nilai moderasi beragama.

Misalnya, Kementerian Agama telah memberikan pedoman kepada Perguruan Tinggi Agama Islam Nasional (PTKIN) tentang pembangunan dan perlengkapan rumah sederhana keagamaan. Nilai moderasi beragama dapat menjadi dasar perilaku yang baik. Akademi yang baik bisa menjadi tempat nilai-nilai yang lembut. Hal ini sesuai dengan pendirian PTKIN untuk studi agama yang komprehensif dan ilmiah. Mengajarkan nilai moderasi beragama di akademi-akademi besar juga dapat mencegah penyebaran paham ekstremis di kampus. Mahasiswa sendiri adalah tujuan untuk membentuk pemahaman yang luas tentang ekstremisme dan radikalisme.[214]

Banyak siswa saat ini memiliki penjelasan agama yang ketat, sering mencela kepercayaan orang lain. Penjelasan tegas ini adalah semacam penjelasan tentang kewajiban mendirikan negara Islam atau menegakkan Syariah. Ajaran Islam sendiri mencakup ajaran Wasatya, yang berarti keadilan, jalan tengah, dan tertinggi. Ketiga makna tersebut saling terkait dan mengarah pada perilaku yang adil. Wacana tentang wasatya dan makna emas agama seringkali dimaknai dengan tiga konsep dasar: makna emas dalam pemikiran, gerak, dan tindakan. Moderasi mengasumsikan bahwa agama tidak berpegang pada kitab suci dan memaksakan pembacaan ini terlepas dari konteksnya.[215] Oleh karena itu, perilaku orang moderat

[214] Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 66.

[215] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2019),

bukanlah teks. Gerakan moderat ditujukan untuk mengajak kebaikan dengan cara yang lembut, bukan dengan paksaan.

D. Moderasi Agama dalam Demokrasi Indonesia

Secara empiris, Islam dan demokrasi adalah dua aspek yang berbeda. Menurut Mahasin (1993) Islam lahir dari wahyu, dan demokrasi lahir dari perjuangan pemikiran manusia. Oleh karena itu, Islam memiliki dialektika tersendiri. Namun bagi Mahasin, tidak ada halangan untuk hidup berdampingan antara demokrasi dan Islam. Islam adalah agama, Sebagai agama, Islam diterima dan dipersepsikan sebagai sekumpulan kesepakatan (*aqidah wa al-syari'ah*) yang dimulai dari Allah SWT. Agama, dalam keseluruhan tampilannya, direncanakan menjadi pembantu bagi umat.[216]

Sebab agama jadi panduan untuk kehidupan manusia, berarti agama pula wajib jadi basis untuk seluruh ataupun totalitas sikap manusia, yang antara lain meliputi sikap politik, ekonomi, sosial serta seterusnya. Selaku kumpulan ajaran Allah Swt, Islam terkodifikasikan dalam al- Qur‗an. Al- Qur‗an inilah yang setelah itu jadi referensi sikap manusia. Namun karena ajaran Al-Qur'an membutuhkan penjelasan, maka keberadaan Nabi Muhammad SAW harus berfungsi sebagai penafsir Al-Qur'an. Saat itulah

89.

[216] Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 39.

Nabi Muhammad yang membagikan penjelasan praktis tentang ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an.[217]

Oleh karena itu, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah dijadikan sebagai acuan bagi sikap-sikap keislaman selanjutnya. Memandang Islam sebagai kumpulan ajaran yang diturunkan dari Allah SWT dan dilembagakan oleh Nabi Muhammad, maka Allah-lah yang memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur umat di sini. Dari sudut pandang ini, Tuhan memiliki kedaulatan atas manusia. Adalah Allah yang menjamin bahwa semua syarat dan ketentuan ciptaan-Nya yang tercantum di sana adalah manusia. Oleh karena itu, manusia wajib mentaati dan mentaati segala ketentuan dan peraturan Allah. Di sisi lain, syarat dan ketentuan dari Tuhan dianggap mutlak (ultimate). Dengan demikian, penilaian terhadap apa yang Islam upayakan terhadap perilaku manusia ditentukan secara tegas dan mutlak, apakah dilakukan dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah. [218]

al-Aqqad menyatakan prinsip-prinsip demokrasi yang ditumbuhkan dalam Islam. Mengingat prinsip-prinsip ini, didasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam (Al Quran dan Hadits) dan praktik negara yang muncul pada masa Nabi Muhammad. dan khulafa al-Rasyidin. Secara rinci prinsip-prinsip demokrasi adalah: tanggung jawab rakyat, persamaan dan hak-hak rakyat, musyawarah dan

---

[217] Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia (Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi)*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), 30.

[218] Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta, 2017), 25.

kesetiakawanan sosial.[219] Dari beberapa uraian demokrasi di atas, jelas dari mana tradisi demokrasi berasal, dan oleh karena itu deskripsi demokrasi menjadi religius tergantung pada konteksnya.

Oleh karena itu, masalah demokrasi yang sedang berlangsung di negara-negara Barat tidak dapat disamakan dengan yang ada di negara-negara Timur (Islam). Namun pada kenyataannya, demokrasi seringkali dipaksakan oleh negara-negara maju, dan meskipun berbeda lokasi dan kecepatannya, hal itu menunjukkan bahwa ia memiliki banyak cara dan prosedur yang ketat untuk menjalankan demokrasi seperti yang diinginkan. Beberapa menerimanya, beberapa menolaknya, dan beberapa memberikan penilaian yang tepat. Penjelasan untuk masalah ini adalah dengan merangkum kebangkitan ide-ide demokrasi di dunia Barat, beberapa tokoh Islam yang terkait dengan demokrasi, dan argumen yang dibentuk oleh masing-masing tokoh tersebut.Anda dapat melihat pengaruhnya terhadap Islam.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.[220]

Kata moderasi bertujuan untuk mengurangi kekerasan dan menghindari ekstrem. Oleh karena itu, moderasi beragama dipahami sebagai tindakan menghindari ekstremitas agama dengan selalu memenuhi kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama tertentu. Di sisi lain, moderasi merupakan posisi netral bagi Kementerian

---

[219] Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity", *Jurnal Diklat Keagamaan Surabaya* 13, 2,(2019), 77.

[220] Darlis, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarajat Muktikultural" *Jurnal Rausyan Fikr* 13, 2 (2013), 9.

Agama Republik Indonesia. Saat Anda menyebut moderasi sebagai moderator yang menengahi proses dialog, jangan mengomentari siapa pun. Bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam dialog. Moderasi dapat dikatakan sebagai “hal yang paling indah”. Moderasi beragama bukan berarti moderasi beragama.

Karena agama sendiri sudah memiliki prinsip moderasi, kebenaran bawaan, dan manusia memiliki pengetahuan yang terbatas untuk menguasai seluruh esensi kebenaran yang tak terukur dari pengetahuan Tuhan. Dan itu seperti laut. Keterbatasan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda ketika orang berusaha menguasai cara membaca ajaran agama. Karena kebenaran hakiki hanya miliknya, maka kebenaran interpretasi artifisial juga bersifat relatif. Pandangan dan tindakan moderat dalam beragama sangat masuk akal bagi warga negara multikultural dan multikultural seperti Indonesia.[221] Hanya dengan cara seperti itu kita dapat menangani keragaman secara bermakna dan mencapai toleransi dan keadilan.

Moderasi beragama bukan berarti bersikap mengalah, karena agama sudah memiliki prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Jika itu mengarah pada kehancuran, ketidakadilan, dan kemarahan di bumi, itu bukan agama. Agama tidak perlu lagi santai. Akan tetapi, metode keagamaan tersebut, bukannya dilebih-lebihkan, bisa menjadi ekstrem dan tidak adil, sehingga harus selalu tetap netral dan santai. Menjelaskan moderasi Islam masuk akal karena orang membutuhkannya dalam

[221] Jamaluddin, *Materi Penguatan Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan Bagi Penyuluh Agama Islam Tahun 2021* (Bandung: Bidang Penais Zawa Kemenag Jabar, 2021), 34.

interaksi negara dan negara.[222] Karena Allah menghadirkan perbandingan dan keragaman sebagai pendidikan, dan Islam menghadirkan sebagai *Ramatan Lil Aramin*.

Islam moderat lahir sebagai terobosan dari Islam anti mainstream. Islam anti-mainstream akhir-akhir ini mengancam keyakinan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia dan menjadi semakin waspada. Las Lula melihat. Dikatakannya, umat Islam sedang dalam proses pemekaran menjadi 73 kelompok dan ingin memastikan bahwa hanya ada satu, Ahlusunnah wal jama`ah. Turkim, yang melahirkan denominasi, Hawali, Syiah, dan Murgia. Tiga denominasi Islam dibahas dalam penelitian akademis, atau "Ilmu Kalam".[223]

Umat Islam yang terbagi dalam kelompok, denominasi, atau kelompok yang berbeda memiliki kemampuan untuk menjadi kelompok radikal. Kaum fundamentalis yang kita amati dan lihat dalam gerakan radikal mereka banyak faktor yang berkontribusi terhadap buruknya citra Islam. Karena Islam diyakini menyebarkan doktrin kekerasan tanpa rasa kemanusiaan dalam nilai-nilai agama yang berlaku. Liberalisme, di sisi lain, bersama dengan pemahaman sekulernya, membimbing pengikut pemahaman ini untuk menafsirkan hukum secara bebas dan keras dalam konteks

---

[222] S. Schwartz, *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme Dalam Wacana*
Global, (Jakarta: Belantika, 2019), 99

[223] L.H. Gerstein, S.L. Moeschberger, "Building Culture of Peace: An Urgent Task for Counseling Professionals", *Journal of Counseling and Development* 81 (1): 115-119

keadaan dan kepentingan yang ada, terlepas dari hukum asli yang berlaku.[224]

Memaksa kelompok lain untuk menjelaskan melanggar salah satu nilai demokrasi kebebasan berekspresi dan berserikat. Karena perbedaan warna yang ada di Indonesia, budaya, suku, dan kepercayaan etnis berbeda, sehingga negara dan masyarakat Indonesia perlu memahami, merenungkan, dan menyetujui untuk membuat perbandingan sebagai kehendak Tuhan (taqdir) yang ada. Dengan mempelajari dan membiasakan perilaku yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, perilaku sadar yang dapat mengontrol dan menerima perbandingan kehidupan berbangsa adalah wajib. [225]

Oleh karena itu, jika dikorelasikan dengan gerakan mahar Islam, bisa menjadi pintu gerbang implementasi nilai-nilai demokrasi bagi generasi muda yang ingin terus memimpin di masa depan. Salah satu cendekiawan Muslim, seperti Azyumardi Azura (Guru Besar Sejarah Islam), mengatakan bahwa moderasi beragama sangat menonjol di Indonesia. Kemudian, penafsiran moderasi beragama dalam konteks umat Islam disebut *Wasatya* Islam. Keunikan moderatisme Islam Indonesia adalah sebagian besar umat Islam beragama Islam.[226]

---

[224] Achmad, "Pluralisme Dalam Problema'. Jurnal Sosial Humaniora 7, 2 (2014): 189–204.

[225] Khaled Abou El-Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*. (Jakarta: Serambi, 2005), 90.

[226] Fatonah Dzaki. 'Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama Di Indonesia' 9, no. 1 (2014): 79–94.

Tentu saja sulit untuk mendefinisikan makna moderat dalam konteks Islam. Kata "moderat" muncul setelah munculnya paham radikalisme dan radikalisme. Pengertian moderasi yang sangat dekat dengan istilah Al-Qur'an adalah Wasatya. Indonesia harus bangga dengan founding father-nya yang bisa memperkenalkan nuansa Islam ke negaranya tanpa menyinggung non-Muslim. Penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta merupakan fakta nyata bahwa demokrasi telah diterapkan sejak republik ini didirikan, dan bahwa demokrasi telah membawa negara pada persatuan dan kesatuan. [227]

Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia, menulis dalam memoarnya tahun 1957 "Masyarakat Islam Demokrasi dan Damai"

"Bahwa orang-orang Indonesia yang religius menyelaraskan sebagian besar Muslim sebagai warga negara yang demokratis. Saya mengatakan bahwa saya dapat hidup. Mereka yang menganut ajaran Islam, agama dan ilmu pengetahuan. Islam, seperti agama apa pun, berfungsi sebagai kekuatan pendorong penting bagi demokrasi. Karena Islam membimbing orang-orang beriman untuk berbuat baik dan adil. Akibatnya, semangat moral yang kuat merasuki warga negara Indonesia yang demokratis". Dengan kata lain, agama-agama berbagi semangat moralitas demokrasi.[228]

---

[227] Husaini Adian, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 20.

[228] Nor Jamaniah Zakaria, "The Wasatiyyah (Moderation) Concept: Its Implementation In Malaysia'", *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, 4 (2015): 66–72. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s2 p66.

Dunia Islam memahami gagasan pemikiran sebagai upaya untuk menangani suatu masalah atau memilih berdasarkan evaluasi bersama untuk mengukur yang besar dan yang buruk. Ide ini sebagai aturan tidak langsung memutuskan semua pilihan. Ini karena bahannya tidak sepenuhnya mengeras (yang memberikan manfaat terbaik) dan bukan yang paling dipilih. Dengan demikian, gagasan pertimbangan dalam Islam sebenarnya tidak sama dengan mayoritas aturan pemerintahan sejauh arahnya. Di dunia Islam maju, banyak yang berkomentar bahwa mayoritas aturan pemerintah tidak sepenuhnya memenuhi pedoman kerangka politik Islam.[229]

Ayatullah Khomeini, dan Ali Shariati menekankan bahwa dalam Islam Muslim hanya merasakan kekuasaan Tuhan dan bahwa orang-orang melakukan tujuan utama mereka sebagai khalifah atau agen Tuhan di planet ini. Dengan cara ini, otoritas publik bukanlah kekuasaan individu, namun otoritas publik dibuat untuk mengikuti kekuasaan Tuhan dan diawasi sesuai dengan pengaturan Tuhan dalam Syariah..

Konsep ini telah lama mendesak seluruh dunia Islam untuk merenungkan dikotomi Islam dan demokrasi yang tidak sejalan. Negara-negara Islam di Timur Tengah, seperti Libya, Aljazair, Mesir, Sudan, Irak, Iran dan Arab Saudi, tidak terbiasa dengan demokrasi.[230]

---

[229] Mukhlis Lubis, "Konsep Wasathiyah Dalam Alquran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir)", *An-Nur* 4, 2 (2015): 22.

[230] Lutfi Juwaini, *Pendekatan Wasatiyyah Bagi Menangani Ikhtilaf Fiqh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Nusantara*, (Pattani Thailand: UM Research Repository, 2015), 147.

Mereka tidak selalu berpaham "hijau", tetapi mereka telah lama mempertahankan pemerintahan satu warna. Akibatnya, muncul gerakan revolusioner Islam yang menentang demokrasi dan mempromosikan kekhalifahan. Di Indonesia, keharmonisan antara Islam dan demokrasi dipertanyakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Di Indonesia, umat Islam dapat membangun perdamaian dengan sistem demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya ormas-ormas keagamaan besar yang diakui di Indonesia, seperti Nahdatul Ulama (NU). Konsep moderasi Islam, yang memberi pemahaman pada deskripsi ketiga ormas Islam, memastikan bahwa Islam secara inheren fleksibel dan tidak anti-budaya maupun anti-demokrasi.

Gagasan ini juga menegaskan bahwa menjadi Muslim tidak berarti harus mengatur gaya hidup dan gaya hidup orang Timur Tengah secara lugas. Kami hidup sebagai orang Indonesia dan meninggalkan agama kami. Kita harus mengambil bagian dalam pergantian peristiwa dan kemajuan Indonesia tanpa menerima gagasan ini bahwa Muslim Indonesia adalah orang Indonesia yang Muslim, bukan Muslim yang tinggal di Indonesia. Indonesia telah menang dalam hal mengurangi jumlah perselisihan ketat menjadi di bawah 10%. Perspektif yang berbeda tentang kehidupan dapat ditumbuhkan di sini, termasuk perkembangan Islam yang berbeda yang juga memvariasikan kehidupan politik Indonesia, kecuali sosialisme, penampakan sejarah.

Bachtiar Effendi, dalam bukunya Theology of Islamic Politics: The Linkage of Religion, Country, and Democracy (2001), berpendapat bahwa umat Islam Indonesia sendiri

tidak menginginkan aktivitas politik yang bebas di dalam negeri, dan politik Indonesia telah menjadi Islami. itu tidak dapat dipisahkan dari. Empat ormas Islam dan kerakyatan di Indonesia, yaitu NU (Naudhatul Ulama), NW (Nahdlatul Wathan), Muhammadiyah, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), dan Gerakan Tarbiyah (GT), telah menunjukkan kontribusinya terhadap demokrasi dan pembangunan. Kelima asosiasi ini selama ini telah menunjukkan cara umat Islam Indonesia dapat terus-menerus bekerja pada nalar Islam mereka dan menyesuaikannya dengan standar berbasis popularitas..[231]

Nurkoris Majid-lah yang mendorong umat Islam Indonesia pada masa Orde Baru untuk melihat agama dan negara dalam iklim politik Indonesia saat itu. Menurutnya, Islam harus dinilai tidak hanya dari sudut pandang simbolis, tetapi juga dari semangat nilai-nilai yang dianutnya. Hal ini karena penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk pada masa Nabi Muhammad juga bersifat egaliter dan partisipatif. Umat Islam yang bergabung dengan organisasi-organisasi Islam ini kemudian menunjukkan tempatnya dalam politik dan kehidupan demokrasi yang lebih luas selama Reformasi. Mereka tidak hanya mengambil bagian dalam kerangka berpikir itu dalam pertemuan yang mereka dirikan, mereka mencoba membuat etika politik Islam yang mulia dan mendesak warga untuk mengambil bagian dalam administrasi aturan mayoritas yang diatur. Ringkasnya, gagasan Islam tentang moderasi dan nilai-nilai demokrasi memungkinkan secara harmonis

[231] Ruslan Idrus, "Etika Islam Dan Semangat Pluralisme Agama Di Era Global", *Al-Adyan* 5, 1 (2010): 7.

memperkuat dan menghubungkan keragaman komparatif yang berbeda yang terkandung dalam keragaman negara Indonesia dengan model demokrasi Pancasila-nya.

E. Moderasi Agama dalam Sistem Kemajemukan di Indonesia

Konsep moderasi agama lebih dulu dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang, bebas menjalankan pemahaman agama sendiri sekaligus menghormati pengalaman agama orang lain. Posisi toleransi atau perantara dalam penerapan agama, tentunya kita ingin menahan diri dari tindakan ekstrim, fanatisme dan tindakan revolusioner dalam beragama. Seperti yang telah kami tunjukkan, moderasi beragama adalah solusi atas keberadaan dua kutub ekstrem dalam agama. Yang satu ultra-konservatif atau sayap kanan dan yang lainnya liberal atau sayap kiri.[232]

Oleh karena itu, esensi moderasi beragama adalah keadilan dan keseimbangan dalam memberi, tanggapan dan pengamalan semua konsep di atas. Arti dari "adil" adalah: 1) adil/adil. 2) Berdiri di sisi kebenaran. 3) Tidak memihak. Kata "wasit", mengacu pada orang yang bertanggung jawab atas permainan, dapat diartikan dalam interpretasi ini sebagai seseorang yang berdiri di sisi kebenaran, tidak memihak. Prinsip kedua adalah keseimbangan, adalah istilah yang menggambarkan sudut pandang, aktivitas, dan kewajiban untuk terus menjaga kesetaraan, kemanusiaan, dan keseragaman.

[232] Nur Said, "Nalar Pluralisme John Hick Dalam Keberagaman Global", *Fikrah: Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3, 2 (2015): 22.

Kecenderungan untuk menyesuaikan bukan berarti tidak berkomentar.[233]

Orang-orang yang bertindak secara seimbang itu tegas tetapi tidak keras karena mereka selalu berada di sisi kebenaran dalam mendefinisikan sebanyak mungkin dimensi, batasan, dan penanda untuk menentukan apakah suatu perspektif, perilaku, atau sikap keagamaan tertentu tergolong moderat atau sebaliknya. Namun, sebagai kajian awal yang menugaskan Badan Litbang dan Diklat pada masa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, indikator moderasi beragama sudah diwujudkan pada tahap awal, yakni keterlibatan nasional.[234]

Toleransi, anti kekerasan, adaptasi budaya lokal (local wisdom). Keempat indikator tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seberapa kuat dan rentannya seseorang di Indonesia. Kerentanan ini perlu diidentifikasi sehingga langkah-langkah yang tepat dapat dibuat atau diidentifikasi dan diterapkan untuk meningkatkan moderasi beragama. Tentu saja keempat hal ini tidak tetap, tetapi dapat mengalami pengembangan atau pengurangan di kemudian hari, dan/atau perubahan tergantung pada penelitian, penelitian, dan hasil penelitian. Namun, keempat penanda tersebut masih relevan dengan pengalaman kami saat ini yang digunakan sebagai dimensi.

Komitmen nasional merupakan indikator yang sangat kuat bahwa perspektif individu, perilaku dan aplikasi

---

[233] Umi Sumbulah, *Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 45.

[234] Abd. Malik Usman, "Islam Rahmah Dan Wasathiyah (Paradigma Keberislaman Inklusif, Toleran Dan Damai)", *Humanika* 15, 1 (2015): 1–12.

keagamaan membawa kesetiaan pada konsensus nasionalis. Teori kehidupan yang tidak sesuai dengan pancasila dan nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen nasionalnya, ia mengakui prinsip-prinsip negara yang terkandung dalam UUD 1945 dan aturan yang mendasarinya. Seperti yang sering dijelaskan oleh Menteri Agama Luqman Hakim Sifdin, dalam hal moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama sama dengan memenuhi kewajiban sebagai warga negara.Komitmen harus dijadikan tanda moderasi beragama.

Memenuhi kewajiban nasional kita adalah menjalankan ajaran kita. Toleransi adalah suatu tindakan yang tidak mengganggu hak orang lain untuk percaya, menyatakan keyakinan, dan berbicara. Oleh karena itu, toleransi mengacu pada perilaku terbuka, berpikiran terbuka, spontan, dan lembut dalam menerima perbandingan. Toleransi terkait erat dengan perilaku hormat, menerima orang lain sebagai bagian dari diri sendiri, dan berpikir positif. Toleransi sebagai aksi komparatif adalah dasar dari demokrasi.[235] Karena demokrasi hanya berfungsi jika semua orang mendukung pendapat mereka dan menerima apa yang dikatakan orang lain. Oleh karena itu, kedewasaan demokrasi dalam suatu bangsa dapat diukur, antara lain, dengan toleransi bangsa tersebut. Negara-negara cenderung mempertahankan demokrasi, karena mereka terus sangat toleran terhadap perbandingan, dan sebaliknya.

---

[235] Firdaus M Yunus, "Agama Dan Pluralisme". *Jurnal Ilmiah Futura* 13, 2 (2014): 213–19. https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.72

Faktanya, bagian dari ketahanan dapat mengacu pada keyakinan yang ketat, namun juga dapat dikaitkan dengan ras, korelasi orientasi, pemeriksaan arah yang nyaman, identitas, budaya, dll. Ketahanan yang ketat di bawah tekanan adalah antara resistensi yang ketat. Terkait dengan resistensi sosial dan politik. Ini tidak berarti bahwa resiliensi tidak signifikan di luar isu-isu yang ketat, namun aliran ini adalah tentang resistensi yang ketat dan hanya menyoroti aliran-aliran keagamaan yang keras. Harmonisasi sosial, dan berinteraksi dengan pendukung agama yang berbeda.

Kemudian lagi, ketahanan pemahaman keagamaan dapat dimanfaatkan untuk menyasar kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari agama Agama Islam. Radikalisme atau kebrutalan dalam pengendalian yang ekstrem, sekali lagi, dipersepsikan sebagai gaya hidup (motivasi atau pemikiran) dan memanfaatkan cara-cara biadab/keterlaluan untuk mempengaruhi kerangka sosial dan politik demi agama. Untuk menggantikan. Baik verbal maupun fisik dan kebiadaban sosial.[236]

Radikalisme dapat terjadi karena kesadaran akan persaingan beragama atau ancaman yang dirasakan oleh individu atau kelompok individu. Asumsi penipuan dan perasaan terancam tidak serta merta mengarah pada radikalisme. Itu lahir ketika diperlakukan secara ideologis dan menghasut kebencian terhadap kelompok yang diyakini sebagai pencipta konflik keagamaan dan mereka yang mengkritik identitas mereka.Kecurangan mencakup

[236] Mukhlis Lubis, "Konsep Wasathiyah Dalam Alquran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir)", *An-Nur* 4, 2 (2015): 21.

penipuan sosial, penipuan keuangan, Ada berbagai aspek, termasuk ketidakadilan politik. Perasaan penipuan dan ancaman bisa hidup berdampingan, tetapi mereka juga bisa ada secara terpisah. Asumsi ketidakadilan dan ancaman ini dapat mengarah pada dukungan terhadap radikalisme, khususnya terorisme, terlepas dari ketidakpastian kesiapan seseorang untuk tindakan radikal dan teroris.

Di sisi lain, praktik dan mentalitas beragama yang sesuai dengan budaya lingkungan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan untuk mengakui praktik ketat yang sesuai dengan budaya dan adat setempat. Masyarakat moderat cenderung lebih menerima tradisi dan budaya lokal dalam sikap keagamaannya, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip utama agamanya. , tentu saja, aplikasinya sebaliknya. Bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Di sisi lain, praktik tradisi dan budaya dalam suatu agama dipandang sebagai tindakan yang mencemarkan kemurnian agama, dan beberapa kelompok memusuhi tradisi dan budaya. Namun, aplikasi keagamaan ini tidak selalu bisa menjelaskan moderasi pelaku. Pertanyaan ini hanya bisa digunakan untuk melihat tren universal saja.

Gagasan bahwa mereka yang terus menyesuaikan diri dengan tradisi lokal ingin tetap moderat dalam agamanya belum terbukti dalam praktik. Ada korelasi positif antara perilaku moderat dalam beragama dan sesuai dengan tradisi lokal, mungkin tidak. Keanekaragaman budaya, agama, suku, dan bahasa ditunjukkan sebagai salah satu negara dengan warga multikultural. Keanekaragaman itu unik dan kuat karena memberikan manfaat tertentu bila

dikelola dengan baik, tetapi keragaman tersebut dapat menjadi tantangan. Perbandingan budaya yang paling beragam ada di satu tempat. Keanekaragaman budaya adalah kejadian alami karena bersatu berarti bahwa semua orang dan kelompok etnis yang berbagi setiap sikap budaya menghadapi cara hidup yang unik.[237]

Konsep multikulturalisme berbeda dengan konsep interkulturalisme. Karena budaya yang berbeda ada dan berkumpul di satu negara, pengalaman orang Amerika beragam. Dalam konsep multikultural, membandingkan orang mencakup berbagai makna, sedangkan dalam konsep antarbudaya, fokusnya adalah membandingkan kelompok etnis. Secara linguistik, multikulturalisme dapat dipahami dengan memahami banyak budaya. Kebudayaan, dalam interpretasinya sebagai ideologi dan sebagai alat, mengarah pada kemanusiaan yang terbesar. Ini berarti mempertimbangkan budaya secara fungsional dan operasional dalam lembaga-lembaga sosial.[238]

Dikenal sebagai multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif merupakan realitas sosial yang mencerminkan adanya pluralisme. Multikulturalisme normatif, di sisi lain, didasarkan pada landasan moral, yaitu adanya jaringan moral dari masyarakat dalam kerangka negara/negara untuk mempraktikkan kebiasaan umum dan multikulturalisme normatif serupa. di Indonesia tempat ia dibesarkan.

---

[237] Khaled Abou El-Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*. (Jakarta: Serambi, 2005), 89.

[238] S. Schwartz, *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme Dalam Wacana*
Global, (Jakarta: Belantika, 2019), 101.

Muzhar dalam Darlis (2017) mengemukakan bahwa multikulturalisme melibatkan gagasan, cara pandang, dan kebijakan warga negara yang beragam dalam hal suku, budaya, agama, dll, tetapi bercita-cita untuk memperkuat semangat nasionalisme yang kuat.

Dan Indonesia adalah negara pluralistik yang menganut dua modalitas esensial yang membentuk karakter multikulturalnya: demokrasi dan kearifan lokal sebagai nilai-nilai yang diyakini dan dipahami untuk menjaga kerukunan umat beragama. Di antara keragaman masyarakat Indonesia, Islam secara historis dan sosial diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tetapi jika dilihat di tingkat lokal atau regional, misalnya Kabupaten/Kota, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu adalah rentang utama. Fakta dan informasi tentang keberagaman agama di Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman agama ini merupakan mozaik yang memperkaya khazanah kehidupan beragama di Indonesia, sedangkan persatuan bangsa terancam oleh di sini, semua warga negara harus ikut serta dalam berdamai. Menumbuhkan kesadaran akan multikulturalisme bukanlah tugas yang mudah, apalagi meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa keragaman adalah kebutuhan sejarah.

Sikap terhadap keragaman seringkali diselaraskan dengan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan politik, sehingga lebih sulit untuk mengkomunikasikan perilaku yang adil ketika berhadapan dengan keragaman. Sebagai negara multikultural dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan keragaman suku, budaya, bahasa

dan agama, Indonesia menghadirkan tantangan dalam mencapai kerukunan dan perdamaian umat beragama. Pendidik agama juga harus mempertimbangkan untuk berbagi data tentang multikulturalisme dengan berbagai instansi, komisi dan organisasi masyarakat untuk bersama-sama membangun pemahaman multikultural. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, perilaku keagamaan ekslusif yang secara sepihak mengakui kebenaran dan keamanan memang dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok agama. Banyak konflik agama yang terjadi di Indonesia biasanya disebabkan oleh perilaku keagamaan yang ekslusif, dan konflik antar umat beragama dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari mereka yang tidak dilandasi oleh perilaku toleran. Oleh karena itu, amanat negara kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, adalah menjaga kerukunan umat beragama. Memang benar bahwa tugas pokok dan tujuan Kementerian Agama tidak hanya itu, tetapi banyak aspek kehidupan yang bersentuhan langsung dengan agama itu sendiri. Di bawah ini merupakan korelasi antara program pemerintah dengan konsep moderasi agama.

Gambar 1

Hubungan moderasi agama dengan program pemerintah

Moderasi beragama dapat diukur secara universal dengan indikator, komitmen nasional. Toleransi; anti kekerasan; adaptasi budaya lokal (local wisdom). Mark melakukan ujian dalam berbagai program, menginternalisasikan nilai intrinsik pendidikan agama, memperkuat keterlibatan negara, meningkatkan toleransi, dan segala bentuk kekerasan atas nama agama dan program lainnya. Tindakan membentuk keseimbangan keagamaan antara suasana sederhana, perilaku atau praktik agama seseorang (eksklusif) dan penghormatan terhadap praktik keagamaan orang lain yang berbeda keyakinan (komprehensif). .. Keseimbangan atau titik tengah dalam penerapan agama, karena seseorang secara alami ingin menahan diri dari perilaku ekstrem, fanatik, dan revolusioner dalam agama. Untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan moderasi beragama ini, dapat dicoba melalui paradigma teoritis sistem: [239]

Gambar 2
Konsep moderasi agama di masyarkat
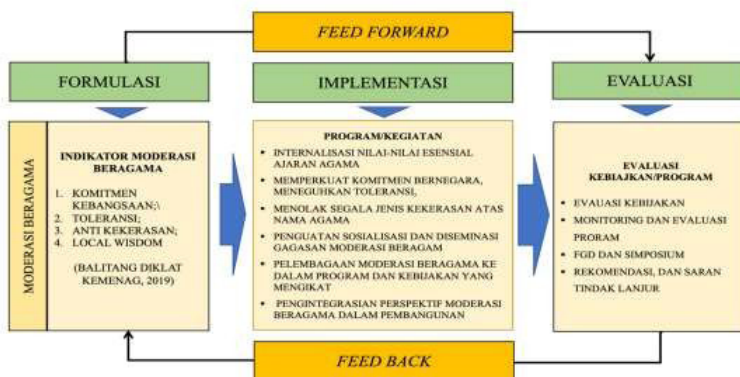
[239] Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta, 2017), 20.

Jika upaya dan implementasi kebijakan ini diupayakan, menghalangi perilaku adil dan merata, apalagi menampilkan, dalam mengelola dan memaknai pemikiran, pola perilaku, dan sikap keagamaan kita di lingkungan sosial kita, diperkirakan akan mungkin terjadi. . Amanat khusus Kemendikbud, penguatan moderasi, harus diuji tidak hanya secara eksternal, tetapi juga antardepartemen dan antardepartemen, dalam implementasinya di berbagai bidang dan program, antardepartemen dan antarlembaga, dan beda I have link. komponen. Hal ini sejalan dengan kewajiban RPJMN2020-2024. Singkatnya, peningkatan ini ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3

Upaya Penguatan Moderasi Agama

Faktor konflik sosial dan disharmoni sipil yang ada di masa lalu berasal dari sayap kanan dan sayap kanan. Namun kini ancaman disharmoni dan ancaman bangsa bisa datang dari islamisme global. Inilah yang Yudi (2014) menyebut realitas demikian merupakan dua akar kepentingan fundamentalis yakni agama dan pasar. Pada

aspek fundamentalisme, pasar dan agama menolak harmoni dan menumbuhkan perpecahan. Perilaku keagamaan yang terbuka, yang disebut dengan metode Islam moderat atau inklusif, atau perilaku mitigasi keagamaan. Moderasi berarti moderasi yang sangat berlawanan, atau reaksi berlebihan terhadap perbandingan atau keragaman. Kata sedang dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasathiyah. Juga dikatakan dalam hadits bahwa yang terbaik adalah yang berada di tengah. Islam moderat mencari pendekatan kompromi dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan kasus, dan berada di antara keduanya ketika menanggapi perbandingan agama dan aliran pemikiran. Islam moderat mengutamakan tindakan toleransi, saling menghormati melalui keyakinan yang konstan. Kebenaran setiap keyakinan, agama, sekte.[240]

Ini memungkinkan semua keputusan dibuat dengan kepala jernih, tanpa terlibat dalam perilaku kacau. Oleh karena itu, moderasi beragama terletak di tengah keragaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya nusantara, yang erat kaitannya dan tidak saling meniadakan agama atau kearifan lokal. Jangan bertentangan dengan diri sendiri. Tapi cari solusi yang memaafkan. Agama, terkait dengan perolehan bacaan agama, cenderung mempolarisasi pemeluk agama ke dalam dua kutub ekstrem selama periode ini. Paul suka membaca, terlepas dari kemampuannya untuk berpikir atau berdebat. Membaca teks keagamaan dipahami

[240] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 120.

dan diamalkan tanpa menguasai konteksnya. Beberapa kelompok menyebut kutub ini konservatif.

Di sisi lain, ekstrem lainnya, yang sering dikutip oleh kaum liberal, sangat mengidolakan konsep pikiran sehingga mengabaikan pemahaman keagamaan sendiri. Oleh karena itu, bersikap sangat liberal juga ekstrem dalam hal penguasaan nilai ajaran agama. Sebagai perbandingan, pemikiran Islam moderat mempromosikan perilaku toleran. Keterbukaan untuk merangkul keragaman (*inclusiveness*). Keduanya memiliki denominasi dan agama yang berbeda. Perbandingannya tidak sebatas bekerja sama dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Keyakinan yang sangat benar dalam Islam tidak berarti bahwa menghina agama orang lain adalah wajib. Semoga terjalin persaudaraan dan persatuan antar agama, sebagaimana yang telah terjalin di Madinah di bawah komando Nabi Muhammad SAW.

Moderasi adalah lengkap bahwa semua warga negara, tanpa memandang ras, suku, budaya, agama, atau pilihan politik, ingin belajar mengamati satu sama lain, melatih keterampilan manajemen, dan mengatasi perbandingan antara satu sama lain, perlu dipahami dan dikembangkan sebagai komitmen bersama. untuk menjaga keseimbangan. Anda. Untuk mencapai moderasi, kita perlu menghindari perilaku inklusif. Bagi Shihab (1999), konsep Islam inklusif tidak hanya merupakan komitmen terhadap banyak warga negara, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam realitas ini. Tindakan inklusivitas agama sebagaimana dipahami dalam pemikiran Islam

adalah untuk berbagi ruang bagi keragaman pemikiran, deskripsi, dan persepsi Islam.[241]

Dalam hal ini, kebenaran tidak hanya ada di satu kelompok, tetapi di kelompok lain, termasuk kelompok agama. Penjelasan ini menyimpang dari keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama menyampaikan ajaran keselamatan. Syariah adalah satu-satunya perbandingan agama berdasarkan nabi-nabi yang berurutan. Oleh karena itu, jelas bahwa moderasi beragama erat kaitannya dengan saling melindungi dengan berperilaku "toleran". Ini adalah warisan leluhur yang mengarahkan kita untuk mengendalikan orang lain yang berbeda dengan kita. Ajakan untuk tetap rendah hati dan mencari kompromi melalui perkataan dan perbuatan adalah komunitas pendidik agama dan Kementerian Agama.

Berbagai konflik dan ketegangan antar umat dengan latar belakang agama, etnis, dan ideologi yang beragam telah mendorong lahirnya keputusan internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendeklarasikan tahun 2019 sebagai "Tahun Moderasi Internasional". Mempromosikan moderasi. Selain itu, program wajib Depdiknas tahun 2022 dicanangkan sebagai Tahun Toleransi Umat Beragama. Agama adalah way of life, jalan tengah (middle way) solusi yang hanya membahas masalah kehidupan dan masyarakat. Mulai sekarang,

[241] Khalil Nurul Islam, "Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an Khalil Nurul Islam", *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 13, 1(2020), 38–59.

pikiran dan pikiran, hubungan dan norma, cita-cita dan kenyataan, manusia dan penghuninya.[242]

Sehubungan dengan tujuan diturunkannya agama-agama dunia ini sebagai pedoman hidup, maka agama-agama di muka bumi ini untuk menjawab berbagai permasalahan dunia, mikro dan makro, keluarga (swasta) atau nasional (publik). Memandang bermacam dinamika yang tumbuh, hingga tantangan pada masa disrupsi ini kita dihadapkan pada bermacam tantangan dalam moderasi beragama ini. Paling tidak mempunyai tiga tantangan besar ialah, *pertama*, menguatnya Radikalisme Agama: tekstual, simbolik, klaim kebenaran tunggal, penolakan atas perbandingan, serta bukti diri; Kedua, Indonesia merupakan negeri dengan bermacam- macam agama serta keyakinan, pula madzhab serta aliran serta Ketiga, Posisi kelompok lemah dalam suatu kedekatan jadi terus menjadi riskan, baik kedekatan antara minoritas serta kebanyakan, ataupun kedekatan pria serta wanita (tidak moderat).[243]

Oleh sebab tantangan ini terus menjadi kebiasaan sosial, hingga dalam mengimplementsikan moderasi beragama ini di tengah warga bukan cuma diinternal Departemen Agama serta Departemen yang lain, tetapi pula wajib memaksimalkan organisasi keagamaan, paling utama ormas yang sudah secara nyata serta teruji mempunyai rasa komitmen terhadap kemeredekaan negara Indonesia.[244]

---

[242] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 122.

[243] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajarn, Sejarah, dan Pemikirannya,* (Jakarta: UI Press, 2019), 30.

[244] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2019),

Kedua, Muhammadiyah. Ideologi Pancasila adalah hasil kesepakatan rakyat (*dar al-`ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*dar al-syahadah*) untuk menjadi bangsa yang nyaman dan damai (*dar al-salam*). Pancasila merupakan pandangan hidup bernegara yang mempersatukan seluruh dan sebagian negara. Pancasila bukanlah agama, tetapi entitasnya memiliki nilai-nilai ajaran Islam dan sesuai dengannya. Ini menjadi standar ideologis kehidupan nasional yang pluralistik. Ketiga, Majelis Ulama Indonesia menetapkan nilai moderasi Islam yaitu *tawassuth* (berjalan di tengah), *tawazun* (seimbang), *i`tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egalitarianisme), *syura* (pertimbangan), ishlah (reformasi), alawiyah (prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif), *tahadhdhur* (peradaban).[245]

F. Moderasi Agama dalam Konteks Pluralisme

Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan masyarakat, atau yang sering disebut sebagai negara pluralistik. Mayoritas ini berdiri terpisah di antara orang-orang Indonesia yang heterogen ini. Isu ini dapat mendorong pemahaman tentang pluralisme yang dimunculkan oleh masyarakat (pluralisme), dan salah satu jenis pluralisme tersebut adalah Bhineka Tunggal Ika. Meskipun demikian, pluralisme ini diabaikan dan sering disalahartikan.

Ditinjau dari pengertian pluralisme, pluralisme berasal dari bahasa Inggris: pluralism, yang terdiri dari dua kata

---

89.

[245] Abdul Aziz, Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. (Gema Insani Press, Jakarta, 2018), 81.

jamak yang berarti berbagai hal, dan ism yang berarti pemahaman, dipadatkan untuk memberikan berbagai implikasi atau penjelasan berbagai pemahaman. Istilah pluralisme mengandung istilah-istilah yang ambigu dan memiliki banyak penafsiran ahli. Franzz Magnis-Suseno memahami pluralisme sebagai penjelasan kondisi sosial, tetapi menolaknya sebagai tindakan teologis.

Masalah ini hampir sama dengan ide Moh Schoffan melaporkan bahwa pluralisme adalah upaya membangun pemahaman sosial sekaligus teologi. Pluralisme sendiri juga dimaksudkan untuk secara luas disebut sebagai pemikiran, pemikiran, tindakan dan sikap yang dimiliki seseorang terhadap berbagai realitas dan realitas perbandingannya.[246]

Sebagaimana dicatat oleh Abdul Aziz dalam bukunya *Pluralisme Perspektif Agama*, pluralisme membutuhkan tatanan yang baik dalam masyarakat, dan istilah pluralisme sangat banyak digunakan untuk menggambarkan tatanan dunia baru yang membutuhkan perbandingan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai dengan kata-kata sederhana.

Orang-orang di negeri itu dipanggil untuk hidup damai dalam perbandingan dan keragaman. Pada hakikatnya, pluralisme tidak serta merta merujuk hanya pada agama, tetapi juga pada gagasan yang mencerminkan keragaman kewarganegaraan atau pluralisme dalam hal adat, suku, budaya, dan lain-lain. Misalnya keragaman yang terdapat di Sumatera Barat, di beberapa daerah terdapat

[246] Wijianti; Siti Aminah, "Kewarganegaraan (Citizenship)". (Jakarta: Piranti Darma Kalokatama, 2017), 76.

keragaman adat, suku dan agama masing-masing daerah. Suku-suku yang terdapat di Sumatera Barat memiliki satu suku induk, dahulu suku Minangkabau, dan sejak itu terpecah menjadi empat suku besar, antara lain Koto dan Pilian, serta Bodhi dan Kaniago, yang dibawa oleh Datuak Katumanguangan.[247] Dan setelah lahirnya empat suku utama tersebut, muncul pula keragaman suku bangsa yang lain sehingga menimbulkan pluralisme di kalangan masyarakat Sumatera Barat, antara lain Guti, Pisan, dan lain-lain. Namun, kelipatan tidak berarti membingungkan segalanya, tetapi menunjukkan perbandingan yang mencolok antara yang satu dengan yang lainnya. Padahal, jika semua agama di Indonesia sama, maka pluralisme tidak berlaku sama. Pada tahun 2005, Fatwa MUI membantah penafsiran pluralistik bahwa semua agama adalah sama dan kebenaran agama itu relatif. 11 Komentar MUI ini menimbulkan kontradiksi karena maksud pluralisme bukanlah apa yang MUI katakan untuk menyetarakan semua agama. Oleh karena itu, banyak media massa yang tidak menyukai fatwa MUI dan karenanya menyajikan topik.[248]

Sementara itu, Abdurrahman Wahid (Gudur), yang dikenal sebagai tokoh pluralis, mengatakan bahwa pluralisme adalah pikiran terbuka untuk menciptakan kebenaran. Pernyataan Gus Dur mengisyaratkan bahwa warga negara harus terbuka terhadap pluralisme Indonesia dalam segala aspek, termasuk pluralisme agama. Toleransi

[247] Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta, 2017), 229.

[248] Muhammad Tholchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2000), 69.

untuk menerima perbandingan tersebut menciptakan toleransi dan perdamaian di Indonesia. Bagi Nucholis Majid, pluralisme agama adalah perintah Tuhan yang tak terbantahkan, dan komentar ini sependapat dengan pernyataan Djohan Effendi. Baginya, agama, terutama yang bersumber dari wahyu, dianggap sebagai sesuatu yang sakral.[249]

Agama memiliki nilai mutlak. Namun, ketika manusia memahami agama, mereka sendiri adalah relatif, dan kebenaran agama yang mereka bicarakan juga relatif. Dari pernyataan Johann di atas, jelaslah bahwa Islam adalah agama yang benar secara khusus, yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun bagi Syamsuddin Arif, pluralisme agama secara khusus adalah gagasan, pemikiran dan keyakinan bahwa agama-agama yang beragam dan berbeda ini memiliki kesamaan ontologi dan epistemologi. Untuk menegaskan gagasan ini, diagram pluralisme mencoba menarik kesimpulan dari ayat-ayat al-Quran yang merujuk padanya. Sehari setelah mereka benar-benar percaya kepada Tuhan dan melakukan perbuatan benar, mereka akan diberi pahala oleh Tuhan, dan tidak akan ada kesedihan atau kesedihan.[250]

Bagi Syed Akiel Shirazi, ayat ini berbagi manifestasi keragaman agama dalam teks. Pluralisme menafsirkan kedua ayat ini sebagai pengikut Yudaisme, Kristen dan

---

[249] M. Subhi, "Desakralisasi dan Alenasi Manusia Dalam Peradaban Modern Persepektif Sayyed Hossein Nasr", *Jurnal Universitas Paramidana* 6, 1(2017): 28.

[250] Wiji Hidayati, *Ilmu Kalam : Pengertian, Sejarah, Dan Aliran-Alirannya* (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Yogyakarta, 2017), 78.

percaya pada pengikut Allah. Dan jika percaya pada hari berikutnya dan melakukan amal saleh, semua akan diselamatkan. Selain itu, pengikut semua agama menemukan keselamatan dalam hidup. Namun dalam pemahaman Buya Hamka, ayat ini menyatakan janji yang adil dari Tuhan untuk semua. Apapun agama yang dianutnya, masing-masing ingin mencari pahala di sisi Tuhan yang sebanding dengan keimanan dan amal kebaikannya.[251]

Namun, lanjut Hamka, yang menyatakan bahwa ayat 85 Q.S. Ali Imran diterjemahkan dengan petunjuk untuk lebih memahami ayat bahwa Islam adalah agama yang sangat benar. Ada juga faktor yang menyebabkan pluralisme agama ini, seperti dilansir Fatonah Dzakie dan lain-lain. Yang pertama di dalam keyakinan mutlak dan lengkap pada apa yang diyakini dan anggap normal. Perilaku absolutisme agama tidak menantangnya sampai teori relativisme agama muncul. Pemikiran relativistik ini merupakan sikap multidimensi terhadap agama.

Kemudian, pada titik itu, lebih jauh, dari luar muncul perenungan tentang subjek progresivisme, yang mengungkapkan peluang, ketahanan, kesetaraan, dan pluralisme. Radikalisme ini adalah awal dari pluralisme ini. Karena istilah pluralisme pada dasarnya berasal dari dunia Barat yang umum dan liberal. Bagi mereka, bagi orang Barat, realitas yang berkaitan dengan agama adalah relatif. Sudut ketiga adalah dominasi eksplorasi logis kontemporer tentang agama-agama dunia, atau yang

---

[251] AlMaarif, "Islam Nusantara : Studi Epistemologis Dan Kritis." *Jurnal Analisis* 15, 2 (2015), 99.

dalam banyak kasus disebut agama serupa. Sebagian dari pengalaman dan tujuan penting yang didapat adalah bahwa agama-agama dunia hanyalah berbagai artikulasi atau artikulasi. Alasan wahyu ini adalah bahwa tidak ada agama yang tidak dapat dipisahkan dari sejumlah besar individu yang hidup di planet ini.Apalagi di era demokrasi terbuka sekalipun, keyakinan dan gagasan individu dan kelompok tetap berwarna. Pluralisme agama menjadi perdebatan hangat di Indonesia.[252] Beberapa kelompok mendukung pluralisme agama, sementara yang lain menentang pluralisme agama.

Pasalnya, mereka yang menentang pluralisme agama meyakini bahwa pluralisme agama cenderung liberal dan sekuler, karena berakar dari dua paham tersebut. Selanjutnya, kelompok oposisi juga beranggapan bahwa pluralisme dapat mengacaukan satu agama dengan agama lainnya. Dan bagi kelompok yang mendukung pluralisme agama, mereka percaya bahwa pluralisme agama membantu kerukunan antar bangsa. Pluralisme tidak ada sangkut pautnya dengan adat, budaya dan suku yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Adat suatu daerah, sebut saja Sumatera Barat, tidak bisa sama dengan adat daerah Jawa Tengah. Namun, istilah pluralisme cocok dengan pengertian di atas dan hanya relevan dalam kaitannya dengan agama. Jika agama memiliki kesamaan baik secara ontologi maupun epistemologi, hal itu sesuai dengan komentar Syamsuddin Arif.[253]

[252] Ahmada Hanafi, *Theology Islam* (Jakarta: Cv. Bulan Bintang, 1982), 56.

[253] S. Harahap, S. (2018). *Konflik Etnis dan Agama di Indonesia. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1(2), 1–19.

Ada juga kesamaan tertentu yang dimiliki oleh agama-agama yang berbasis di Indonesia di antara para dewa. Semua agama percaya bahwa ada materi yang menciptakan dunia ini dan ada sesuatu yang perlu disembah. Kesamaan kedua, kemudian, adalah bahwa keduanya memiliki kitab suci dan tempat ibadah. Tujuan memiliki kitab suci bagi setiap umat beragama adalah sebagai pedoman dalam mengendalikan proses kehidupan manusia, yang terkadang berbeda dengan apa yang tertulis di masing-masing kitab. Tidak hanya itu, agama memiliki tempat ibadah, dan sebagaimana Islam berdoa berjamaah, ibadah membutuhkan masjid dan mushola.[254]

Majid dan Johan percaya bahwa pluralisme agama ini tampaknya sejalan dengan Islam. Islam adalah agama yang membawa berkah dan kedamaian bagi planet ini. Islam, agama mayoritas di Indonesia, justru membawa berkah bagi agama minoritas. Buktinya dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Islam selalu mengizinkan minoritas untuk melakukan ibadah sehari-hari, seperti perayaan Natal dan perayaan Besac. Di balik toleransi yang ditunjukkan Islam dalam kehidupan ini, tidak ada waktu untuk memaksa orang menerima Islam itu sendiri.[255]

Disampaikan oleh Ibn Abbas, dia mengatakan tentang wahyu dari bagian ini: Ayat ini diturunkan sehubungan dengan salah seorang Ansar (sahabat para Nabi Madinah)

---

[254] W. Hefni, W. (2020). "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 1–22.

[255] Abdul Aziz, Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. (Gema Insani Press, Jakarta, 2018),66.

dari Bani Salim bin Auf. Al-Hushaini berkata: Teman ini memiliki dua putra yang beragama Nasrani dan dia seorang Muslim. Kemudian dia berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihiwa sallam, Karena mereka menolak agama apapun selain Nasrani, bolehkah saya memaksa mereka untuk melakukan keduanya?

Dari realitas di atas, jelas Islam adalah agama yang tidak mewajibkan manusia untuk memaksakan atau membatasi pelajarannya. Selain Islam, Indonesia memiliki agama yang berbeda seperti Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu, dan digambarkan dengan pengakuan berbagai agama. Islam menawarkan beberapa ide yang diharapkan dapat bekerja pada kualitas seseorang dalam kehidupan yang ketat. Pokok pemikirannya adalah tasam (perlawanan) yang sesuai dengan karakter Islam moderat yang disebutkan di atas, dan orang Indonesia antara daerah yang ketat percaya dalam menjaga antara keteguhan yang ketat dan menjaga antara keselarasan yang ketat. bertepatan dan bersikap lunak.

Gagasan kedua yang ditawarkan Islam untuk eksistensi pluralisme yang tegas adalah gagasan Syura (mengarahkan). Jika terjadi perdebatan atau pertanyaan di antara pertemuan-pertemuan yang ketat, lebih baik diselesaikan melalui musyawarah non-pertempuran. Gagasan Syura juga dimanfaatkan dalam kehidupan pluralistik ini untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin muncul mulai sekarang. Ide terakhir yang kemudian diarahkan oleh Islam adalah Musawah (libertarianisme). Ini berarti tidak mengorbankan orang lain karena keyakinan, kebiasaan, atau permulaan

yang sama dari seseorang. Ide-ide sebelumnya ini sebenarnya bisa memperkuat hubungan antara jaringan yang ketat, meskipun mereka memiliki keyakinan yang berbeda.

BAB V
KONTEKSTUALISASI MODERASI AGAMA DI PESANTREN

A. Kurikulum Moderasi Beragama di Pesantren Klasik

Dalam pandangan Dhofier, semua pesantren berproses dengan cara yang berbeda. Dalam perkembanganya, Dhofier membagi pesantren ke dalam dua corak; salaf dan modern.[256] Sementara Abdullah Syukri Zarkasyi berpendapat berbeda, Ia membagi corak pesantren menjadi tiga corak, yaitu tradisional, semi tradisional dan modern. Berdasarkan survei Kementerian Agama, jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai 14.656. Dari jumlah tersebut, terdapat 9.105 ponpes tradisional, 1.172 ponpes modern, dan 4.370 ponpes terpadu. Bagian ini menjelaskan model moderasi keagamaan di Pesantren tradisional dan modern.

Jika dirunut dari aspek sejarah perkembangan, perbedaan bentuk atau corak pesantren didasarkan pada kebutuhan masyarkat, lingkungan sekitar dan pemikiran pembaruan pendidikan Islam. Namun sekalipun memiliki corak demikian, pesantren tetaplah memiliki ciri khas yakni kajian keagamaan mendalam berupa sumber-

[256] Mutawali, Mutawali. "Moderate Islam in Lombok: The dialectic between Islam and local culture." Journal of Indonesian Islam 10, no. 2 (2016): 309-334

sumber kitab klasik hasil karya para ulama. Penekanan pesantren dari semua bentuk adalah kitab kuning, bahasa arab dan akhlak. Krakteristik demikian tidak dapat dirubah, tapi hanya ditambah dengan pelajaran-pelajaran umum sebagai respon terhadap perkembangan keilmuan modern.

Fremis ini dirancang untuk membentuk cara berpikir yang sederhana dalam masyarakat. Sebagaimana para cendekiawan mengakui pemahaman agama mereka di masyarakat, siswa diajarkan bagaimana memahami dan mengamalkan teks-teks agama yang dicirikan oleh beberapa karakterisasi. 1) Memahami realitas (*fiqh alwaqi`*); 2) Memahami fiqh utama (*fiqh alauwlawiyyat*) 3) Memahami konsep Sunatullah dalam penciptaan makhluk (*fiqh al-alam*); 4) Memahami teks-teks agama (*fiqh al- maqashid*). Pemahaman ini merupakan prasyarat untuk menyikapi budaya, karakter masyarakat, tujuan syariah, dan kondisi eksternal masyarakat.[257]

Di pesantren, seperti santri di beberapa pesantren mengirim mereka ke daerah tertinggal, terutama daerah yang tidak memiliki pengalamalan agama yang kuat. Ketika berinteraksi dengan masyarakat luas, santri dilarang menimbulkan kebingungan di masyarakat, menjadi lebih kompleks, dan berdampak pada hukum yang tidak jelas. Santri tidak hanya menyangkal iman orang lain dan melarang mereka untuk bekerja atau beraktivitas di kehidupan, tetapi mereka juga memperkuat iman mereka pada penduduk setempat, mempraktekkan ibadah, dan

[257] Zulfani Sesmiarni, "Membendung Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan Melalui Pendekatan Brain Based Learning," *KALAM* 9, 2 (2017): 233.

memiliki hubungan dengan Tuhan. Inilah identitas doktrin Islam moderat dalam pendidikan pesantren sebagai poros sentral gerakan Islam moderat di antara dua kubu yang berbeda: gerakan Islam modern yang lebih dermawan dan gerakan Islam yang lebih radikal dan konservatif.

Pesantren klasik memiliki tujuan penting untuk melahirkan kondisi masyarakat yang harmonis, menjadikan anak didik atau generasi penerus peradaban menjadi berakhlak, tujuan tersebut adalah 1) mengembangkan masyarakat yang rahmat li al-alamin melalui pendidikan; 2) menciptakan keharmonisan, keseimbangan antara individu dan kelompok masyarakat baik di internal penganut agama Islam maupun non muslim; 3) memastikan bahwa anak didik memahami dan menerapkan konsep moderasi agama dengan tetap berjalan pada garis *tsawabit;* 4) menyebarluaskan perdamaian di seluruh bumi dan manusia sampai akhir zaman. tujuan inilah yang menjadi latar belakang kenapa pendidikan pesantren perlu dibangun sebagai pondasi dasar peradaban manusia yang berlandas pada *rahmat.* [258]

B. Kurikulum Moderasi Agama di Pesantren Modern

Beberapa pesantren modern menerapkan moderasi agama di lembaga mereka, berbeda dengan model yang digunakan di pesantren tradisional. Pesantren modern fokus pada perbaikan kurikulum, sistem pembelajaran, guru dan santri itu sendiri, dan dari perspektif kurikulum,

---

[258] Hardi Tambunan, "The Effectiveness of the Problem Solving Strategy and the Scientific Approach to Students' Mathematical Capabilities in High Order Thinking Skills," *International Electronic Journal of Mathematics Education* 14, 2 (2019): 292.

fokus pada pembelajaran agama tanpa mengabaikan pelajaran umum lainnya. Pesantren jenis ini memadukan antara pesantren tradisional dengan model pendidikan formal dengan mendirikan satuan pendidikan seperti SD/MI, SMP/MT, SMA/SMK/MA, bahkan perguruan tinggi.

Standar kurikulum yang digunakan adalah pesantren salaf, yang sesuai dengan kurikulum Islam yang disepakati oleh Kementerian Agama. Kurikulum Pesantren khusus dapat ditetapkan dengan muatan. Penjelasan lain dari kurikulum adalah pembagian waktu belajar. Dengan kata lain, mempelajari ilmu pengetahuan sesuai dengan kurikulum pendidikan tinggi (madrasah) pada saat perkuliahan. Sisa waktu dihabiskan di kelas dari pagi hingga malam untuk belajar ilmu-ilmu keislaman khas Pesantren (studi kitab klasik).[259]

Silabus yang digunakan adalah silabus Pesantren Salaf, yang sesuai dengan silabus Islam yang disponsori oleh Kementerian Agama (Kemenag) sekolah tersebut. Kurikulum Pesantren khusus dapat ditetapkan dengan muatan lokal atau diterapkan atas kebijaksanaan Anda sendiri. Penjelasan lain dari kurikulum adalah pembagian waktu belajar. Dengan kata lain, Anda akan mempelajari ilmu pengetahuan sesuai dengan kurikulum pendidikan tinggi (madrasah) pada saat perkuliahan. Sisa waktu dihabiskan di kelas tambahan dari pagi hingga malam

[259] Muhammad Saleh and Ahmad Edwar, "Redefinisi Peran Guru Menuju Pendidikan Islam Bermutu," *Alim: Journal of Islamic Education* 3, no. 1 (2021): 76–78.

untuk belajar ilmu-ilmu keislaman khas pesantren (studi kitab klasik).[260]

Dalam sikap toleran, siswa umumnya memiliki mentalitas sadar, mengakui orang lain sebagai ciri kita dan berpikir jernih. Dalam melaksanakannya dalam pembelajaran, guru berupaya untuk mengkonsolidasikan materi pembelajaran dengan nilai-nilai atau pesan-pesan moral yang berkaitan dengan dakwah. Mata pelajaran utama adalah rencana pendidikan yang menggabungkan informasi umum untuk semua siswa sebagai peluang pertumbuhan. Substansi atau materi pembelajaran diharapkan dapat membingkai karakter yang khas bagi siswa. Ini dengan tegas ditunjukkan di semua sumber yang mengatur pengaturan langsung karakter santri. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan program pendidikan swasta. Secara keseluruhan, guru adalah contoh yang baik, jadi guru harus memulai terlebih dahulu. Artinya, guru harus senantiasa menjadi contoh yang baik dalam pembinaan karakter dan persekolahan. Kebajikan.

Moderasi beragama untuk materi sebagai bahan ajar yang dikoordinasikan ke dalam sekolah multikultural. Artinya, sebagaimana ditunjukkan oleh Ainurrafiq Dawam, keragaman sosial, etnis, etnis, dan suku. Sejalan dengan itu, pesantren dapat membantu mengintegrasikan informasi yang membumi tentang keseimbangan yang ketat ke dalam program pendidikan, dan setiap ulama mendapatkan referensi nilai yang jelas. Hal ini penting dilakukan dengan alasan bahwa mereka memiliki mentalitas yang sederhana

[260] Muhammad Ahsan Jauhari, "Perilaku Sosial Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri Setelah Mengikuti Pengajian Kitab Al-Hikam," *Spiritualita* 1, no. 1 (2018)

terhadap santri dengan alasan bahwa risiko radikalisme harus dibatasi sehingga berdampak buruk pada sekolah-sekolah Islam.[261]

Pemaparan materi akidah Islam sampai saat ini telah diberikan dengan baik, khususnya para siswa yang menggarisbawahi pemahaman teks keagamaan, namun mereka juga dihimbau untuk memiliki pilihan untuk menyesuaikan pemahaman mereka dengan keadaan sosial yang dapat diverifikasi Islam dan dikoreksi. di Indonesia karena menciptakan lulusan. Sekolah Islam semua inklusif memiliki wajah moral dan memiliki sudut pandang moderat. Meski demikian, belakangan ini masih ada beberapa pesantren yang dalam pendidikannya tidak fokus pada eksistensi umat Islam yang sebenarnya di Indonesia, sehingga alumninya umumnya akan revolusioner mengingat pemahamannya yang menyeluruh. Maka dari itu, penting untuk memupuk program pendidikan pesantren, khususnya tentang pembelajaran akhlak Islam dari atas ke bawah karena memiliki pilihan untuk menangkap sisi positif dari keseimbangan akhlak Islam. Dalam hipotesis peningkatan program pendidikan, masih terdapat beberapa macam pendekatan, salah satunya adalah pendekatan bidang studi dan pendekatan rekonstruksionisme..[262]

---

[261] Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), 31-33.

[262] R. Amin, "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam," *Al-Qalam* 20, 3 (2014), 21.

Bidang pendekatan studi berpusat di sekitar mata pelajaran penting dari asosiasi program pendidikan, dengan berfokus pada kekuatan ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Sementara pendekatan rekonstruksionisme atau pendekatan normatif sosial juga dianggap berfokus pada isu-isu persahabatan yang terjadi secara lokal untuk diperbaiki, misalnya terkait dengan pemanfaatan kesetaraan, kebebasan bersama, isu dan harmoni, dll, kemudian dalam pembelajaran, ia berfokus pada pemanfaatan pemikiran kritis. Langkah-langkah menuju pembinaan rencana pendidikan akhlak Islami dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

1) Mengarahkan evaluasi kebutuhan. Rencana pendidikan yang akan dibuat terkait dengan pemanfaatan akhlak Islami.[263] Agar anak didik memahami aspek-aspek lain seperti aqidah (iman) dan syariah (ibadah), diperlukan pemahaman etika yang mendalam untuk memahami realitas masyarakat Islam. Sangat memahami Indonesia sehingga dapat menyesuaikan pandangannya dengan wajah Islam Indonesia. Selama ini Islam radikal cenderung memaksakan keyakinan dan penerapan syariat agama sesuai dengan pemahamannya, terlepas dari situasi sejarah sosial masyarakat yang ada, sehingga mengakibatkan konflik antar golongan dan kerukunan umat beragama, seringkali runtuh. Di sini penting untuk menggali lebih dalam etika Islam agar kita dapat memahami nilai moderasi yang terkandung

[263] M. Hasbullah and M. A. Abdullah, *Wasatiyyah Pemacu Peradaban Negara*. (Negeri Sembilan: Institut Wasatiyyah Malaysia, 2013), 32.

di dalamnya, yang sesuai dengan wajah Islam di Indonesia.

2) Merumuskan mata pelajaran yang akan berupa ajaran moral Islam biasanya dipartisi menjadi mata pelajaran moral. Di sini, sekolah pengalaman hidup Islam harus memiliki pilihan untuk memilih dan mengelompokkan buku-buku moral yang membimbing siswa untuk pemahaman yang masuk akal tentang moral Islam. Beberapa penelitian yang ada telah menunjukkan pemahaman moral tentang bagaimana meradikalisasi siswa. Materi akhlaq Islam harus diberikan seperti yang ditunjukkan di pesantren moderat seperti *Taysir Alkhalaq, Wasaya, Alhidayah Sosial dan Ihya 'Ulum Aldin*. Pemahaman yang mendalam tentang moral Islam dalam referensi di atas akan membantu kita memahami konstruksi umum moral Islam dan perspektif moderatnya.

3) Menumbuhkan sasaran pembelajaran untuk memperluas materi akhlak Islami melalui buku-buku di atas adalah agar para siswa memiliki pemahaman akhlak Islam yang mendalam dan utuh serta memanfaatkan pemahaman yang ketat untuk menyesuaikan diri dengan sejarah sosial. .. Kondisi untuk berpikir dan menindaklanjuti area lokal saat ini. Dari situ akan muncul mahasiswa-mahasiswa cerdas moderat yang memiliki sifat manusiawi, berpikiran terbuka dan berwawasan luas yang sesuai dengan esensi Islam Indonesia, rahmat lilal'alamin. Kemudian, 4) menentukan sistem pengajaran dan Metodologi pembelajaran yang digunakan dapat mengambil

struktur yang berbeda dari sekolah pengalaman hidup Islam.[264]

Sistem musyawarah juga penting untuk dapat menyelidiki persoalan besar, menunjukkan masalah yang muncul di masyarakat, dan memberikan solusi yang mempertimbangkan situasi masyarakat saat ini. Sistem ini juga membutuhkan keterampilan di bidang lain seperti tata bahasa Arab dan Ushul Fiqh untuk menentukan hukum. Beberapa sistem pembelajaran di atas memberikan interaksi yang seimbang antara guru dan siswa.[265]

Dari sistem ini muncul aspek pendidikan yang demokratis, toleran, fleksibel, dan dinamis, sehingga tidak ada unsur pemaksaan yang mengarah pada pemahaman yang kaku. Pada dasarnya, misi pesantren adalah untuk membawa perubahan sosial dan berbagi pengetahuan yang membantu meningkatkan kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah yang terdepan dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakat secara umum, serta terus dilakukannya penetrasi nilai-nilai moral sebagai penopang menghadapi persaingan kehidupan yang semakin kompleks dan lengkap.

C. Moderasi Agama pada Pesantren Klasik

Pesantren klasik memiliki dua makna; pesantren lama yang sudah ada sejak lama dan pesantren baru yang menerapkan ciri khas pesantren lama. Pesantren klasik mengajarkan metode pembelajaran klasik dengan

[264] S. Sudarji, "Moderasi Islam: Untuk Peradaban dan Kemanusiaan," *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1, 1, (2020): 32.

[265] P. L. Berger, *Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, (New York: Anchor Press, 2011), 101.

menggunakan metode ceramah dan menjelaskan kitab-kitab turats. Santri fokus mempelajari semua ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik, baik Sy*afiiyah, Hanafiyah, Malikiyah* dan *Hanabilah*. [266]

Kerangka kerja ini dirancang untuk membentuk pola pikir masyarakat yang moderat. Di sisi lain, ada juga upaya "al-Ghuluw" untuk memeluk Islam. Di sana, Kyai terus-menerus mengingatkan santrinya untuk menghindari sifat fanatis terhadap suatu sudut pandang, sikap yang bias terhadap pelaksanaan ajaran Islam, dan menghindari menyalahkan pemeluk agama lain. Untuk menghindari bahkan ketidakpercayaan terhadap pendapat lain. Al-Ghulu ini sering dikutip setiap pagi kegiatan membaca dan belajar kitab.[267]

Sebagai ulama pemahaman agama yang diakui di masyarakat, Santri diajarkan bagaimana memahami dan mengamalkan teks-teks keagamaan yang bercirikan beberapa ciri. 1) pemahaman tentang realitas (*fiqh al-waqi`*); 2) pemahaman tentang fiqh tertinggi (*fiqh al-auwlawiyyat*). 3) Memahami konsep sunnah dalam penciptaan makhluk hidup (*fiqhal-alam*). 4) Pemahaman yang komprehensif terhadap teks-teks keagamaan (*fiqhal-maqashid*).[268] Cara memahami hal tersebut adalah syarat utama untuk

---

[266] Ali Akbar dan Hidayatullah, "Metode Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, 1 (2017), 24.

[267] Ahmad Saifuddin, *Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan,* Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 03 No. 01 2005, hlm. 208-234.

[268] Ahmad Syamsu Rizal, *Transformasi Corak Edukasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren, dari Pola Tradisi ke Pola Modern,* Jurnal Pendidikan Agama Islam, 09 2 (2011). 98.

mendominasi budaya, karakter sosial, tujuan hukum Islam.

Menurut Kurniawan (2014), pesantren klasik jauh lebih menantang daripada gempuran radikalisme saat ini. Pada tahun 2011, Kurniawan melakukan survei terhadap upaya mahasiswa memerangi radikalisme di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur. Menurut temuannya, ide-ide radikal meresapi ideologi Timur Tengah yang dibawa ke Indonesia oleh mahasiswa Indonesia. Mereka berinteraksi dengan masyarakat, tokoh agama, politisi dan pengusaha.

Dalam posisi ini, Santri berkewajiban untuk terlibat dalam semua aspek masyarakat dan mengambil alih otoritas. Dengan kata lain, segalanya menjadi lebih rumit. Pesantren cenderung mengakar, sehingga dibanjiri ide-ide radikal. Konflik sering muncul antara siswa dengan elemen lainnya. Dalam posisi ini, siswa tidak dapat bergerak sendiri, tetapi membutuhkan bantuan siswa lain, karena lingkungan dan lokasi Dower dikuasai oleh masyarakat yang fanatik. Menurut beberapa penelitian, tidak jarang pesantren menghadapi konflik masyarakat. [269]

Istilah pesantren klasik memiliki dua pengertian. Pesantren lama yang sudah ada sejak lama adalah pesantren yang metode pembelajarannya menggunakan metode klasikal. Pesantren klasik mengikuti metode pembelajaran Turat dan menggunakan sistem ceramah. Santri memfokuskan kajiannya pada semua kajian

[269] Asep Kurniawan, "Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren dalam Menjawb Krisis Sosial", *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*, 9 2 (2016), 09.

agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik Syafiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah. [270]

Dikembangkan oleh pondok pesantren klasik di Indonesia, konsep "al-wasathiyah" adalah aqidah (keyakinan), kultus (penegakan hukum dan upacara keagamaan), dakwah (simbol agama), dan moralitas (etika). Keempat premis ini biasanya diajarkan dan diturunkan melalui kegiatan intra dan bacaan umum sebagai bentuk tanggung jawab akademik. Kerangka ini dimaksudkan untuk membentuk pemikiran masyarakat moderat.

Di sisi lain, ada upaya *ghuluw* untuk menerima Islam. Oleh karena itu Kiai menghimbau Santri untuk menghindari fanatisme yang berlebihan terhadap suatu pandangan, sikap yang bisa terhadap pengamalan ajaran Islam, dan selalu berhati-hati untuk tidak mengkritik pemeluk agama lain, bahkan tidak mempercayai pendapat lain. *al-Ghulu* sering dikutip setiap pagi saat membaca atau belajar.[271]

Sebagai seorang sarjana pemahaman agama yang diakui oleh masyarakat, diajarkan untuk memahami dan mengamalkan teks-teks agama yang menampilkan beberapa karakteristik. 1) Memahami realitas (*fiqh al-waqi`*); 2) Memahami fiqh primer (*fiqh al-auwlawiyyat*). 3) Memahami konsep sunnah dalam penciptaan makhluk hidup (*fiqhal-alam*). 4) Pemahaman yang komprehensif terhadap teks-teks agama (*fiqhal-maqashid*). Pemahaman ini

[270] Ibid., 12.

[271] Mujamil Qomar, *Pesantren : Dari Tranformasi Motodologi menuju Demokratisasi Institusi,* (Jakarta: Erlangga, 2013), 78.

merupakan prasyarat untuk menerima budaya, karakter sosial, tujuan syariah, dan kondisi eksternal sosial. [272]

Menurut Kurniawan (2014), Pesantren klasik jauh lebih menantang daripada gempuran radikalis saat ini. Pada tahun 2011, Kurniawan melakukan survei terhadap upaya mahasiswa memerangi radikalisme di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur. Menurut temuannya, ide-ide radikal merasuki ideologi Timur Tengah yang dibawa ke Indonesia oleh mahasiswa Indonesia. Mereka berinteraksi dengan masyarakat umum, tokoh agama, politisi, dan pengusaha.[273]

Dalam kapasitas ini, Santri berkomitmen untuk terlibat dalam semua aspek masyarakat dan mengambil peran di masyarakat sebagai kewajiban. Dengan Java, segalanya menjadi lebih rumit. Psantren cenderung mengakar, sehingga penuh dengan ide-ide radikal. Konflik sering muncul antara siswa dengan elemen lainnya. Dalam posisi ini, siswa tidak dapat bergerak sendiri dan akan membutuhkan bantuan siswa lain, karena lingkungan dan lokasi sekolah dikendalikan oleh komunitas siswa yang antusias.[274] Menurut beberapa penelitian, tidak jarang pesantren menghadapi konflik di tengah masyarakat. Ia harus dilindungi dan dihormati menurut prinsip menerima orang lain (*qabûl al-akhar*).

---

[272] Muhammad Heriyudanta, *Modernisasi Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra,* Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 1 2016, hlm. 145-172.

[273] Ibid., 170.

[274] Ibid., 169.

D. Model Moderasi Agama pada Pesantren Modern

Beberapa pesantren modern telah mengadopsi praktik moderasi keagamaan di lembaga mereka yang berbeda dari model tradisional penerapan pesantren. Pesantren modern fokus pada perbaikan kurikulum, guru dan santri itu sendiri, dan santri diajarkan mata pelajaran umum seperti bahasa Inggris, biologi dan sains oleh penganut non-Muslim.

Dari segi kurikulum, materi yang fokus pada pembelajaran agama tidak mengabaikan mata pelajaran populer lainnya, Pesantren Al Hikmah Benda Silampog. Pendidikan di pondok pesantren ini terbagi dua di seluruh dunia untuk mencapai tujuan menjadi sehat secara mental dan stabil secara intelektual. Domain sekolah resmi adalah dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Santri harus mengikuti kurikulum nasional atau sekolah standar Cambridge (ICSP) dengan ciri pesantren yang harus menjaga kemitraan.[275]

Memang, proporsi pembelajaran di kelas pagi didominasi oleh pembelajaran umum dengan mengutamakan penyampaian dan proses pembelajaran dalam bahasa Inggris, khususnya di kelas Cambridge atau ICSP. Hal ini dibantu oleh kemampuan guru berbicara bahasa Inggris rata-rata yang cukup baik, memungkinkan siswa untuk berbicara bahasa Inggris setidaknya secara lisan. Di Pondok Pesantren Bumisharawat Sidoarjo, kita perlu meningkatkan kemampuan bahasa muda untuk mendukung pembentukan intelektual muda. Khusus bahasa Inggris, sekolah ini berada di bawah

[275] Abdul Khalim, *Model Pendidikan Islam Anti Radikalisme di Pesantren al-Hikmah 2 Benda Sirampong Kabupataen Brebes Jawa Tengah,* Tesis UIN Walisongo Semarang, 2017, 108.

naungan Yayasan Pesantren bekerjasama dengan AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales).[276]

Siswa diajarkan untuk menghindari pentingnya toleransi dan sikap tegas dengan mengetahui dan memahami budaya dan adat istiadat penutur asli orang asing di luar negeri, khususnya penutur asli non-Islam. Pesantren berusaha mendidik santrinya untuk bersikap moderat.[277] Bahkan, Japan Foundation memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan AIESEC di tingkat bilateral, karena diawasi secara ketat oleh Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya dan Kedutaan Besar Jakarta. Kehadiran native speaker Nippon Foundation berulang kali menarik perhatian KJRI Jepang atas tanggapan positifnya terhadap kegiatan, para guru dan santri Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat.

Sebagian besar penutur asli dari Jepang ini tidak menganut agama apapun, namun hal ini tidak menghalangi sikap moderat semua ulama di sekolah tersebut. Ternyata ini adalah umpan balik yang baik dari penduduk asli Jepang. Selain itu, ada ITCC (Indonesian Overseas Chinese Cultural Center). Ini adalah mitra sekolah untuk kerjasama seminar dan study tour, pertukaran pelajar, beasiswa atau keberangkatan bagi siswa yang melanjutkan studi mandiri di China dan Taiwan.

---

[276] https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4703601/ponpes-bumi-sholawat-santri-harus-berhati-mekah-berotak-habibie diakses tanggal 24 Oktober 2019.

[277] https://sekolahprogresif.sch.id/smp/sistem-pendidikan/ diakses tanggal 24 Oktober 2019.

Bahkan penetapan lulusan SMA Progresif Bumi-shalawat tidak memerlukan gelar sarjana Islam. Dengan mendorong siswa lulusan sekolah menengah untuk belajar di Cina-Taiwan, Mesir, atau Jerman, Agoes Ali Masyhuri memberi mereka kebebasan untuk belajar di universitas negeri atau swasta pilihan mereka, di mana mereka ingin belajar, dan untuk melawan ekstremis dan ekstremis. memberi kita kebebasan untuk menyadari dampak dari Rombongan biasanya hadir di masjid kampus.

Dari banyak arahan yang diulang-ulang oleh beliau dan seluruh putra-putrinya yang juga berperan aktif dalam pembelajaran di sekolah dan pesantren di berbagai kondisi masyarakat, penulis merekomendasikan Pondok Pesantren Bumi Shalawat, dengan mengikuti etika dan moral Nabi yang mengikuti Muhammad, hindari menjadi penanam dan penyebar virus Islamophobia. Kita harus bisa berperan dalam memberantas virus di masyarakat.

Oleh karena itu, sekolah ini memiliki gambaran yang harus diterapkan oleh para ulama, khususnya pendidik di dalam kelas. Siswa harus dibimbing untuk memperoleh kekuatan mental, salah satunya adalah kemampuan untuk melatih pengendalian diri. Hal ini terlihat dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nama 'Muhammad' telah diurai oleh Yayasan Pesantren menjadi kualitas untuk diajarkan kepada siswa di SMA Progresif Bumi Shalawat.

BAB VI
IMPELEMTASI MODERASI AGAMA DI ERA PENDIDIKAN DIGITAL

A. Moderasi Agama dalam Pendidikan

Institusi pendidikan, bersama dengan isu ketimpangan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum, disebut-sebut sebagai salah satu penyebab berkembangnya paham intoleran.[278] Institusi bermunculan dengan pandangan intoleran baik dari pendidikan tinggi maupun menengah. Di lingkungan perguruan tinggi, muncul paham intoleran, termasuk yang berasal dari kelompok penelitian idealisme agama tertentu, sedangkan di sekolah menengah, paham intoleran akibat kegiatan keagamaan yang melibatkan orang di luar institusi.

Lembaga pendidikan agama seperti yang disebut pesantren juga bertujuan untuk menjadi tempat penanaman pemahaman intoleran. Selain itu, kemajuan teknologi informasi, media sosial, dan percetakan mendorong berkembangnya pemahaman lintas batas yang dapat diakses oleh siswa dan tidak toleran. Belakangan ini, siaran media komunikasi digital banyak menampilkan

[278] Zamimah, I. (2018). "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M.Quraish Shihab). " *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir (Institute Ilmu Al-Quran (Iiq)) 1, No. 1: 75-90.*

siaran yang tidak menganut paham moderasi beragama. Banyak unggahan yang memutarbalikkan fakta dan hanya melacak berita, pidato atas nama agama, ujaran kebencian, bullying memenuhi berbagai media sosial dan dikonsumsi telanjang oleh anak-anak usia belajar.[279]

Kemajuan teknologi juga telah membantu menciptakan sikap eksklusif terhadap siswa, menjauhkan banyak anak muda dari lingkungan mereka. Mereka terobsesi dengan ponsel dan jarang berkomunikasi dengan teman sebayanya. Ada juga anak muda yang mudah mengakses dan terpengaruh oleh ideologi HAM radikal dalam banyak hal. Ini seperti memakan buah Simalakama, literasi digital yang lemah di masyarakat.

Hal ini berdampak pada permintaan pembelajaran jarak jauh (online) dan kualitas pendidikan yang buruk karena pilihan pembelajaran yang pahit selama pandemi. Data menunjukkan bahwa siswa memiliki literasi digital yang rendah dan kualitas pembentukan karakter yang buruk selama pandemi.[280] Hanya sekitar 15% siswa SD dan SMP yang menikmati pembelajaran online. Anak muda lainnya hanya bisa menggunakan media digital sebagai media hiburan, bukan sebagai alat untuk melakukan kegiatan kreatif dan produktif.

Menurut Thomas F. Green, Toricism, pakar pendidikan Amerika, pendidikan dalam konteks kolektif (baca: sekolah) berorientasi pada; *pertama,* pengembangan

---

[279] Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang Berlari: Dromologi, Implosi, Fantasmagoria* (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017), 159.

[280] Hefni, W. (2020). "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital : Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri". *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1–22.

kewarganegaraan termasuk sosialisasi, transmisi budaya, dan pengembangan identitas individu. *Kedua,* pendidikan kewarganegaraan nasional menawarkan pengakuan yang diperlukan (sertifikat) untuk manajemen publik. Harus ada refleksi bahasa berorientasi keagamaan untuk berkontribusi pada manfaat dari bangunan karakter warga manusia Indonesia (kewarganegaraan). Untuk alasan ini, pendidikan pengembangan ditujukan pada pendidikan nasional, yaitu, pembentukan karakter manusia Indonesia. Menurut Thomas Leckona, tidak hanya individu, tetapi juga upaya kesadaran untuk mewujudkan kebajikan wilayah regional, yaitu sandera superior.[281]

Depdiknas telah mengakui 18 kualitas dalam pengembangan pendidikan karakter. Namun, pada tahun 2016 dirangkum menjadi 5 keunggulan utama pendidikan karakter, yaitu agama, cinta tanah air, kebebasan, partisipasi bersama dan kejujuran. Orang moderat akan meresapi dan membumbui lima nilai orang. Orang moderat yang dikemukakan oleh Menteri Agama (2019) dalam gagasan toleransi beragama mencakup empat kualitas, yaitu kualitas khusus yang terkait dengan hubungan antara agama dan negara (tanggung jawab publik). antara hubungan yang ketat (ketahanan).), artikulasi pergaulan yang ketat (kedamaian), ketat dan hubungan sosial (memahami budaya lingkungan). Sifat-sifat ini bagaimanapun dapat

---

[281] Qasim, Muhammad. (2020). Membangun Moderasi Beragama Umat melalui Integrasi Keilmuan. Alauddin University Press; Rizqa Ahmadi, "Kontestasi Atas Otoritas Teks Suci Islam di Era Disrupsi: Bagaimana Kelas Menengah Muslim Indonesia Memperlakukan Hadis Melalui Media Baru", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,* Vol. 15, No. 1 (2019), 25.

diciptakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memikirkan kemampuan agama sebagai rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil alamin)..

Dalam kerangka hubungan agama dan negara, pantangan agama membutuhkan pemahaman fungsional agama dengan pengertian bangsa. Pendidikan pantangan agama dalam konteks ini bertujuan untuk mengembangkan rasa cinta tanah air, rasa bangga pada negara, keterikatan dan pengabdian kepada negara peserta didik. Saat ini, pendidikan pantang agama menghadapi masalah yang sulit: masih ada beberapa anak muda yang ingin mengubah sistem pemerintahan, mengubah dasar negara, dan membiarkan perpecahan solidaritas Indonesia mendukung separatisme dan apatis terhadap nasib negara. Untuk mengatasi masalah ini, latihan keseimbangan yang ketat harus lebih ditujukan pada pemahaman konstitusi, pentingnya menjaga ekspresi, kebenaran berbudaya (multikulturalisme), dan bagaimana mengelolanya, menggerakkan negara.[282]

Dalam konteks hubungan sosial beragama, moderasi beragama menuntut siswa untuk menerima banyak negara dalam hal suku, agama, bahasa dan adat.[283] Penerimaan ganda dalam masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, dan gotong royong. Pendidikan moderasi keagamaan kini dihadapkan pada lahirnya

---

[282] A. R. M Amin,. (2014). Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisihukum Islam. *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya (Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama 32*

[283] A. Faiz; B. Soleh, Kurniawaty; Purwati, "Tinjauan Analisis Kritis Terhadap Faktor Penghambat Pendidikan Karakter Di Indonesia", *Jurnal Basicedu*, *Volume* 5, 4(2020): 1766–1777

pola pikir yang mementingkan diri sendiri, perasaan benar sendiri, rasa berpikir yang ekstrim, dan terkadang perilaku bermusuhan dengan pihak yang menentangnya. Untuk mengatasi masalah ini, selain keinginan untuk kerukunan antar umat beragama, perlu dan didorong untuk dibiasakan dengan nilai-nilai gotong royong. Saat ini aspek kerjasama merupakan aspek terlemah dari gotong royong siswa, namun kerjasama membutuhkan komunikasi dan kerjasama. Dalam konteks ekspresi keagamaan, moderasi beragama menuntut pembinaan kehidupan beragama yang baik, santun, terbuka dan menghindari kekerasan (non-kekerasan) atas nama agama. Ungkapan keagamaan yang bersahabat ini kemudian dirusak oleh citra-citra agama yang penuh kekerasan. Menurut Ambon (1999), konflik sosial bernuansa agama antara lain perusakan tempat ibadah, aksi terorisme atas nama agama (2002 Bom Bali 2002, Bom Marriott 2003, 2004), Termasuk Bom Kedutaan Besar Australia, perilaku intoleran, dan cercaan. Hiasi media sosial atas nama agama. Pendidikan disiplin agama berfungsi menurunkan perilaku umat beragama kepada nilai-nilai luhur (santunan dan kebaikan) bangsa Indonesia, membentuk akhlak mulia, menghargai perbedaan, serta santun dan ramah terhadap sesama. Kelas moderasi keagamaan bertujuan untuk mengembangkan praktik sosial siswa berdasarkan nilai-nilai, seperti mengatasnamakan agama. Utamakan persahabatan, nilailah orang lain dengan jujur, dan jangan memaksakan kehendak.[284]

[284] M. T. Huda, "Pengarusutamaan Moderasi Beragama ; Strategi Tantangan Dan Peluang FKUB Jawa Timur", *Tribakti* 3 2 (2021): 283–300

Untuk bekerja secara efektif, lembaga pendidikan, keluarga, pemimpin agama, masyarakat. Untuk proses pendidikan pelatihan terintegrasi, dll. diperlukan proses pendidikan. Pemimpin/ Penyelenggara Institusi Pendidikan menentukan siswa dan karakteristik siswa berdasarkan kebijakan lembaga-lembaga pendidikan. Pendidik memengaruhi dampak interaksi tinggi dengan siswa dan menggunakan hal yang efektif. Keluarga adalah filter awal dan karakter. Pemimpin komunitas adalah contoh mode konstelasi yang tinggal di tengah-tengah komunitas.[285] Komunitas ini adalah pembentukan, penyelia, dan penerima efek akhir dari perilaku menengah siswa.

Pendidikan akhlak agama harus berpedoman pada mekanisme perencanaan pendidikan yang terukur. Hal ini diperlukan agar program pendidikan moderasi beragama tidak terjebak pada kegiatan normatif dan semboyan seperti: Untuk itu, pendidikan moderasi keagamaan hendaknya memperhatikan pendekatan saintifik (teknokratis) 5, suatu pendekatan yang mensyaratkan pencapaian indikator-indikator saintifik (ilmiah) seperti: Tolak ukur keberhasilan. Pendekatan ilmiah dalam merencanakan pendidikan agama layak mendapat alternatif dari dua model utama pemrograman: perencanaan top-down dan bottom-up. Pendekatan fasilitasi top-down untuk perencanaan pendidikan cenderung hanya mengikuti contoh program yang dipesan oleh Pusat dalam bentuk kegiatan yang

[285] Busro, "Moderasi Islam (*Wasatiyyah*) di Tengah Pluralisme Agama di Indonesia", *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan,* Vol. 3, No. 1 (2019), 10.

sering diulang seperti: B. Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan orientasi sepihak.[286]

Rencana bottom-up untuk pendidikan agama, di sisi lain, condong ke arah kegiatan ritual populis, seperti pertemuan para pemimpin lintas agama. Perencanaan keilmuan, selain menjamin nilai manfaat, juga menjamin tercapainya angka kualitatif dan produktivitas pendidikan pantang agama.

Oleh karena itu, pendidikan moderasi agama membutuhkan mekanisme yang terukur dalam hal tingkat pendidikan, termasuk proses, hasil, hasil, dan manfaat. 1) Pengukuran proses, yaitu mengukur aspek kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan moderasi keagamaan. Pengukuran ini didasarkan pada metode untuk mengevaluasi pengajaran agama dalam pelajaran. 2) Ukuran pencapaian (output), yaitu ukuran kinerja karakter siswa yang sedang. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan survei kepribadian moderat siswa. 3) Pengukuran dampak, yaitu mengukur indikator kinerja dari dampak pelaksanaan pendidikan pantang agama. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan produk-produk yang dihasilkan dari dakwah agama. 4) Utilitas, yaitu nilai utilitas dari kegiatan promosi keagamaan.[287]

---

[286] David Harvey, *The Condition of Postmodernity: An Inquiry into The Origins of Cultural Change* (Cambridge: Blackwell Publisher, 1990), 240.

[287] Mohammad Hasyim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasathiyah* (Oxford: Oxford University Press, 2015), 31

B. Moderasi Agama di Era Disrupsi Digital

Di Indonesia, istilah disrupsi telah banyak diperdebatkan sejak Lenard Kasari mempopulerkannya dalam sebuah buku berjudul "Gangguan: Tidak Ada yang Bisa Berubah Sebelum Dihadapi, Motivasi Tidak Cukup". Sebagai langkah historis, menurut Kasari, kerancuan ditandai dengan empat indikator: lebih sederhana (lebih mudah), lebih murah (lebih murah), dapat diakses (lebih murah), lebih cepat (lebih cepat). Keempat indikator inilah yang paling diinginkan dan dicari oleh generasi sekarang. Jika ada sesuatu yang mudah, murah, cepat, dan dapat dicapai, sesuatu itu pasti menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Salah satu pendukung utama era yang bergejolak ini adalah kaum milenial.[288]

Generasi ini bereaksi paling agresif terhadap serangan teknologi informasi yang meningkat pesat. Dan yang pasti, maraknya situs-situs dakwah baik dalam bentuk youtube maupun website dengan judul seperti portal Islami dan akun media sosial menjadi salah satu alternatif di saat orang-orang sibuk dengan pekerjaannya. Realitas ini seolah menjadikan akses Internet sebagai jalan tol untuk memperdalam "pemahaman agama".[289] Dalam posisi ini, era destruktif menancapkan taringnya ke dalam ajaran Islam. Dikontekstualisasikan dalam terang ajaran Islam, Internet tak pelak lagi merupakan sumber belajar utama untuk memperdalam pengetahuan agama. Bahkan, banyak pengkhotbah saat ini menggunakan internet sebagai media untuk berdakwah.

---

[288] Akhmadi, A. (2019). "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia", *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55

[289] A. Azra, *Moderasi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2020), 77-78.

Di sisi lain, banyak ormas dan kelompok Islam akhir-akhir ini mulai fokus pada kaum milenial. Organisasi Islam yang masih menggunakan istilah sumber daya manusia (SDM) untuk mendefinisikan masalah SDM diliputi oleh kaum milenial. Di sisi lain, ormas Islam yang memperhatikan ledakan Gen Z sebagai human capital dapat memperoleh pengaruh yang besar dan dijadikan modal untuk menentukan masa depan kelompok atau organisasi tersebut.[290] Untuk menekankan pentingnya istilah perusakan, Kasari membuat penyederhanaan bahwa perusakan adalah perubahan yang membawa masa depan ke masa kini. Menurut Kasari, perubahan tersebut setidaknya memiliki tiga ciri utama. *Pertama*, produk atau jasa yang dihasilkan dari perubahan itu harus lebih unggul dari produk atau jasa sebelumnya. *Kedua,* harga suatu produk atau jasa akibat gejolak harus lebih rendah dari sebelumnya. *Ketiga,* produk atau layanan yang dihasilkan oleh proses interupsi juga harus lebih mudah diakses oleh pengguna.

Jika ketiga ciri tersebut diwujudkan dalam pendalaman Islam, maka akan berdampak cukup negatif. Ketika generasi dan masyarakat terpengaruh oleh gempuran super-peradaban ini, terjadi dalam praktik untuk mempelajari nilai intrinsik ajaran Islam, tetapi dianggap lebih baik, lebih murah, serta produk dan layanan. Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi konsep Muslim moderat yang menjadi ciri khas Islam di Nusantara. Jika seseorang ingin berpikir bahwa satu pemahaman Islam lebih baik dari

[290] I. K. A. Irawan, Merajut Nilai-nilai Kemanusiaan melalui Moderasi Beragama. Prosiding STHD Klaten Jawa Tengah, 1, (2020): 82–89

yang lain, umumnya dianggap bahwa "yang lain" adalah pelakunya. Oleh karena itu, mudah sekali muncul sebagai bidat, bidat, musyrik, Togut, antek-antek Yahudi atau Kristen, penindas Islam, dan kata-kata kasar lainnya.[291]

Padahal, pola seperti ini banyak ditemukan di website digital, terutama media sosial. Dan akses internet, infrastruktur utama di masa gejolak, merupakan media alternatif karena murah (murah) dan mudah (dapat diakses), dan banyak orang menggunakan smartphone daripada melantunkan Al-Qur'an. Pergi jauh belajar Islam dengan ruh, atau langsung ke pesantren mahal di Pesantren (talaqqi). Itu dianggap tidak efektif dan akan bertahan lama. Milenial cenderung mengonsumsi barang-barang out-of-the-box, tidak diproses, dan membutuhkan pemikiran eksponensial, sehingga tantangan bagi Muslim moderat sangat besar. Kecerdasan yang menghasilkan apa yang dikenal sebagai benda. Tanpa akses internet, generasi sekarang seolah-olah tidak bisa berpikir atau bernalar. Pikirannya tiba-tiba kosong saat dijauhkan dari smartphone mereka.

Posisi ini menciptakan budaya destruktif, pemikiran destruktif, dan pemasaran destruktif. Gejolak itu akhirnya menciptakan dunia baru, pasar digital. Pasar virtual yang menawarkan tidak hanya produk dan layanan, tetapi juga ideologi yang dicap sesuai perkembangan zaman. Ideologi yang mengusung semangat radikalisme tidak terkecuali, dan tersebar luas di media online, khususnya media sosial. Saat ini, anak muda hidup di dunia lain, dunia maya yang

[291] N. M. Hasyim, "Tasawuf dan Internalisasi Moderasi Beragama dalam Menghadapi Problematika Bangsa". *Jurnal Analisis*, 3, 2(2018). 1–6.

tidak terlihat, sehingga ideologi harus bersaing ketat untuk memenangkan dan membangun opini kaum milenial.[292]

C. Menghadapi Moderasi dan Kesatuan di Era Disabilitas

Sekali lagi, konsep "moderasi" dan "kesatuan" sebenarnya bukanlah hal baru dalam hidup kita. Kedua istilah ini telah lama digunakan secara normatif oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Lantas mengapa belakangan ini tampak mahal untuk hidup berdampingan secara moderat dan damai, terutama jika berbicara tentang kehidupan beragama di Indonesia? Apalagi ketika berhadapan dengan isu agama di media sosial? Mengapa semacam "kepercayaan" pada berita palsu (hoax) tenggelam dalam nilai moderasi dan persatuan? Salah satu jawabannya mungkin kita sekarang memasuki era keterbukaan yang hampir tak terbatas.

Gejolak politik yang menimbulkan gejolak di sana-sini, selain era keterbukaan dan ketidakterbatasan akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi. Selama ini, cara orang memperoleh pengetahuan agama telah berubah secara radikal. Saat ini, pengetahuan agama tidak selalu diperoleh melalui proses panjang mempelajari sumber-sumber primer, atau dengan mengikuti pandangan guru dengan nilai-nilai moral dan pengetahuan yang mendalam, tetapi semuanya bersifat sesaat, hitam putih, dan sering. dapat diperoleh melalui jalan pintas yang hanya menyediakan satu. Persoalannya, perubahan yang cepat ini tidak sejalan dengan kemauan para otoritas agama

---

[292] Kementerian Agama RI. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (1st ed.). (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 21.

untuk menyediakan konten yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Beberapa pemuka agama dan cendekiawan di bidang agama tergagap dan kaget dengan cepatnya perubahan tendensi keagamaan. Tidak ada jembatan yang bisa menghubungkan kekayaan pengetahuan mereka dengan kebutuhan kaum milenial. Ini sangat cepat dan dinamis.[293]

Dari keadaan ini muncul era kehancuran, keadaan perubahan yang sangat cepat dan mendasar yang dibawa oleh lahirnya era digital. Era ini membawa efek domino yang sangat besar yang mengubah perilaku manusia dalam segala hal, termasuk ranah agama. Efek domino di era bencana di bidang agama inilah yang akan dilihat Kementerian Agama melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) pada akhir Desember 2018 antara tokoh agama, budayawan, ulama, milenial, dan praktisi media. saya mulai. Terlibat dalam dialog bersama untuk menemukan solusi untuk melindungi lingkungan, kohesi manusia. [294]

Syukurlah, dialog ini menghasilkan apa yang sekarang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Untuk lebih jelasnya, kami meminta mereka menggunakannya sebagai semangat untuk mengembangkan program Kementerian Agama di tahun 2019. Ide-ide Piagam Jakarta berikut tidak dibahas di sini. Jawaban saya untuk ini adalah bahwa kedua dokumen

---

[293] P L. U., Pelu, "Implementasi Pendidikan Moderat Terhadap Pemahaman Guru dalam Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 4 Maluku Tengah", *Uniqbu Journal of Social Sciences*, 1, 3(2020): 13–25.

[294] Novita Sari; Yudi, "Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti". (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), 56.

tersebut tersedia secara terpisah sebagai lampiran. Saya ingin memberikan sedikit latar belakang mengapa Risalah Jakarta itu penting dan mengapa dijadikan acuan dalam Rakernas Kemenag 2019. Ini adalah agama untuk menjaga persatuan. komitmen untuk lebih mempromosikan moderasi.[295]

Bahkan, pada awal November 2018, Kementerian Agama juga menggelar konferensi agama dan budaya di Yogyakarta, yang kemudian diterjemahkan oleh puluhan intelektual ke dalam RisalahYogyakarta. Program Unggulan 2019 ditetapkan pada Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan di Sentul pada 57 Desember 2018. Beberapa model agama Islam di dunia maya dapat dibedakan menjadi dua jenis.[296]

Pertama, memahami Islam menurut bahasa teks ajaran Islam (Al-Qur'an dan hadits) tanpa membuka celah dalam penafsiran model keagamaan tekstual, yakni erat kaitannya dengan ruh Islam. Mereka menggunakan pendekatan ini untuk mengatasi masalah nyata (sekuler) tanpa membedakan antara ibadah dan muamalat. Kelompok kedua adalah mereka yang cenderung menjauhi teks, mengendurkan agamanya, dan mengikuti tindakan dan gagasan budaya dan peradaban lain, terutama yang sedang memimpin dunia, bangsa Barat. Kelompok seperti ini biasa disebut sebagai Muslim liberal.

[295] A. Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13, 2(2020): 45–55.

[296] A. Faiz, I. Kurniawaty; Purwati, "Eksistensi Nilai Kearifan Lokal Kaulinan Dan Kakawihan Barudak Sebagai Upaya Penanaman Nilai Jatidiri Bangsa", *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8, 4(2020): 27–30.

Kecenderungan mereka untuk memaknai teks-teks agama dengan cara yang terlalu longgar menyebabkan kontekstualisasi yang berlebihan (menyesuaikan dengan situasi saat ini). Oleh karena itu, salah satu situs online di grup ini sangat membela hak-hak kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan jauh dari memaknai puisi tentang sejarah sodomi. Qur'an. Menurut penulis, dua tren di atas tidak akan menguntungkan umat Islam. Tren pertama tampaknya membuat umat Islam sangat eksklusif dan hidup sendiri di era digital yang tidak mengisolasi dunia. Kecenderungan kedua menyebabkan Islam kehilangan identitasnya karena melebur ke dalam budaya dan peradaban lain.[297] Oleh karena itu, mengingat kedua tren di atas tidak hanya muncul belakangan, tetapi muncul sebagai fenomena yang berulang sepanjang sejarah Islam, hadits-hadits tersebut di atas cenderung dibaca ulang di era digital ini.

D. Implementasi Moderasi Agama pada Pendidikan di Indonesia

Indikator pemahaman moderat dalam beragama digambarkan melalui kemampuan untuk menyeimbangkan antara teks dan konteks. Ide kaku yang tidak hanya bergantung pada realitas teks yang kaku, namun memaksa faktor-faktor dan setting baru yang nyata pada realitas teks, namun dapat semakin mengasosiasikan keduanya. Pada akhirnya, keseimbangan ide Islam ini berada pada posisi non-sastra, namun terlalu unik dan mengabaikan

[297] Fauziah, N. (2021). "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif 18, No. 1 : 59-70.*

kekacauan..[298] Garis keturunan intelektual ulama nusantara sangat jelas mewarisi tradisi intelektual sederhana ini.

Hal ini didasarkan pada pemahaman ahlussunnah waljamaah yang dikembangkan berdasarkan tradisi Nafdatur Ulama (NU) yang menganut salah satu dari empat madzhab di bidang hukum (Hanafi, Malikiya, Syafiya, Hanbali) dirumuskan. Dengan keimanan menurut Abu Hasanal Asy`ari dan Abu Mansural Maturidi; dalam bidang tasawuf menurut Al Ghazali dan Junaidal Baghdadi.[299] Akhlak adalah ulama yang berwibawa, yang pendapatnya menjadi dasar berpikir dan bertindak.

Perjalanan penyebaran Islam yang tenang membentuk kepribadian masyarakat umum yang tawasuth (moderat), tawazun (menyesuaikan diri), dan tasamuh (open minded). Karakter-karakter ini pada akhirnya menyusun perspektif dan akting yang berfokus pada konkordansi dan tidak keterlaluan dalam menjawab berbagai perubahan sosial. Masalah identitas yang berduri dapat diselesaikan tanpa menanduk. Individu Indonesia dapat melakukannya tanpa mentalitas keterlaluan (tatharruf) yang biasanya sulit ditawar dalam menangani masalah. Karakter keterlaluan hanya tahu "kalah" dan "menang". Arbitrase memprioritaskan solusi menang-menang, tetapi semua orang percaya bahwa mereka telah menang. Sikap ini

---

[298] M. Masykuri; K. Qodriyah, "Pendidikan Islam Multikultural Berwawasan Wasathiyah: Penguatan Karakter Wasathiyah Santri Patriot Panji Pelopor", *Jurnal Islam Nusantara*, 4, 2(2021): 246–257.

[299] W. Hefni, "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital : Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Religious Moderation In The Digital Space : Case Study Of Mainstreaming Religious Moderation Among Islamic Higher Education Institut", *Bimas Islam*, *13, 1*(2020): 1–22.

terekam dalam kearifan orang Jawa sebagai kemenangan tanpa rebutan, kemenangan tanpa memfitnah orang lain. Rukun kedua adalah amar maruf nahi munkar berdasarkan prinsip moderasi (haraka) gerak dan perbaikan berdasarkan semangat asal, tetapi harus dilakukan dengan baik.[300]

Dalam proses Islamisasi Indonesia, gerakan wajib militer tidak dilakukan melalui cara-cara kekerasan, melainkan melalui prioritas kasih sayang (bil the wisest wal mauidhatil hasanah). Seruan kebaikan (alamru bil maruf) harus dilakukan dengan cara yang baik dan pencegahan kemunkaran (annahyu anil munkar) harus dilakukan dengan cara yang tidak mendatangkan kejahatan baru (bigairil munkar). Inilah kunci perkembangan Islam di Indonesia yang selama ini telah diterima oleh 87,3% penduduk Indonesia.

Praktik keagamaan ini kemudian menjadi tradisi keagamaan masyarakat Indonesia. Penegakan Moderasi Beragama di Indonesia Setidaknya ada tiga kerangka penerapan moderasi beragama di Indonesia. Pertama, moderasi terkait kewajiban pemerintah. Keterlibatan negara merupakan indikator yang sangat penting sejauh loyalitas terhadap konsensus dasar nasional terutama terkait dengan ideologi negara terhadap Pancasila dan penerimaannya sebagai tantangan idealis terhadap sikapnya terhadap Pancasila. Komitmen kepada Negara meliputi persetujuan terhadap Asas-asas Nasional yang termuat dalam Konstitusi dan peraturan-peraturan yang menjadi landasannya. Jika seseorang kehilangan

[300] K. H. Primayana; P. Y. A. Dewi, "Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital", *Tampung Penyang,* 19, 1(2021): 45-59.

komitmennya terhadap kesepakatan nasional, mereka dapat dianggap telah kehilangan kepribadiannya yang sederhana.[301]

Kedua, memperkuat toleransi sosial, politik dan agama. Toleransi adalah sikap yang menciptakan ruang dan tidak mengganggu keyakinan, keyakinan, dan pendapat orang lain, meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini. Oleh karena itu, toleransi mengacu pada sikap terbuka, terbuka, spontan, dan tenang dalam menerima perbedaan. Ketidaksepakatan (*agree with difference*) dengan rasa hormat (*respect*), penerimaan (*acceptance*) sikap orang yang berbeda sebagai bagian dari kita, dan kemampuan berpikir dan percaya (positif dan dapat dipercaya) secara positif terhadap orang yang berbeda Nilai-nilai penting dari mereka yang dalam kisaran yang diizinkan untuk disetujui. Toleransi merupakan landasan terpenting demokrasi sebagai sikap menghadapi perbedaan. Karena demokrasi bekerja hanya jika seseorang dapat mengungkapkan pendapatnya dan menerima pendapat orang lain.

Oleh karena itu, perkembangan mayoritas suatu negara dapat diperkirakan dari tingkat ketahanan negara tersebut. Semakin tinggi kapasitas untuk menanggung ketidaksamaan, semakin adil negara secara umum, begitu juga sebaliknya. Bagian dari resiliensi memang terkait dengan keyakinan yang tegas, namun bisa juga terkait dengan perbedaan ras, orientasi, penyimpangan arah seksual, identitas, budaya, dll. Ketiga, memusuhi radikalisme. Radikalisme di sini dipandang sebagai sebuah

---

[301] Samsul Ar. (2020). Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama. *" Al-Irfan 3, No. 1. Hal.37- 51*

filosofi dan pemahaman yang perlu melakukan perubahan dalam kerangka sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara yang keji. Intisari radikalisme adalah cara berperilaku dan aktivitas individu atau perkumpulan yang selektif yang memanfaatkan cara-cara kasar untuk mencapai perubahan yang ideal.

Pertemuan-pertemuan revolusioner biasanya membutuhkan kemajuan-kemajuan ini dalam kerangka waktu yang singkat dan secara radikal dan bertentangan dengan kerangka sosial umum. Dalam hal ini, komitmen terhadap negara dapat ditempatkan atas nama agama sebagai kekuatan abadi yang mampu melawan ancaman intoleransi dan radikalisme. Jika seseorang memiliki daya tahan yang kuat, mereka cenderung menolak efek intoleransi dan radikalisme. Meningkatnya angka melek agama di Indonesia.[302] Di sisi lain, masyarakat dengan sedikit komitmen terhadap negara rentan terhadap intoleransi dan radikalisme. Di sini, penting untuk memperkuat keterlibatan nasional dengan memperkuat konsensus nasional seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendampingan agama menyatakan bahwa mengamalkan ajaran agama merupakan bagian integral dari kewajiban melindungi Indonesia, seperti halnya memenuhi kewajiban kewarganegaraan merupakan perwujudan dari pengamalan ajaran agama, kita harus memiliki misi untuk menyatukan persepsi umat beragama. Upaya ini tidak mudah, karena memerlukan persetujuan dan pengakuan

[302] T. A. Siregar, T. A. *Millenial Berperan Penting Sebagai Agen Moderasi Beragama*. (Jakarta: Kemenkopmk, 2021), 23.

bersama terhadap gagasan moderasi keagamaan, pertama oleh otoritas negara, kemudian oleh masyarakat.

BAB VII
PERAN PEREMPUAN MENCEGAH RADIKALISME DAN UPAYA KONTEKSTUALISASI MODERASI AGAMA

A. Memahami Radikalisme dan Moderasi

Isu moderasi keberagamaan menjadi agenda utama Kementerian Agama RI dalam beberapa tahun belakangan. Tentu saja hal itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa adanya sebab tertentu. Maraknya tindakan terorisme mayoritas berawal dari pemahaman keberagamaan yang radikal, semakin hari perkembangannya semakin membahayakan, utamanya bagi keamanan, ketertiban, serta kesatuan NKRI. Demonstrasi kebrutalan saat ini sering terjadi di mana-mana, baik berupa penyerangan terhadap orang atau perkumpulan tertentu, perusakan, kerusuhan daerah, huru hara mahasiswa, konflik dan hujatan mahasiswa, pembunuhan, bahkan bom. Semua ini mempengaruhi materi, tetapi juga kekurangan keberadaan manusia.

Diskursus Islam radikal sering kali dihadapkan dengan Islam inklusif, dimana gerakan golongan ini mayoritas memiliki agenda untuk mengislamkan Negara dengan penduduk mayoritas muslim. Perbedaan perspektif antara Islam literal dan Islam inklusif akan memiliki dampak besar pada arah dan hasil dari Perang Melawan Teror yang

berkepanjangan. Sangat penting bahwa kemajuan diskursif Islam literal dilawan dengan memperkuat struktur dan institusi demokratis dan menangani sosiopolitik setempat. Dalam jangka panjang, pandangan dunia Islam liberal yang inklusif dan fleksibel berdasarkan ijtihad dan humanisme universal cenderung terbukti lebih efektif daripada mengandalkan langkah-langkah berorientasi keamanan kejam dalam Perang Melawan Teror yang berkepanjangan.[303]

Radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme adalah salah satu wujud neofundamentalisme. Neofundamentalisme Islam yang militeristik adalah ideologi modern dan pada dasarnya keras. Sebagai ideologi, itu tidak bisa dibunuh, tetapi sebaliknya harus digantikan. Tujuan strategis untuk mengalahkan ideologi berbeda dari, dan kadang-kadang bertentangan dengan, tujuan taktis memerangi teroris. Mengelola ketegangan ini mengharuskan perang melawan terorisme dipahami secara esensial dalam hal politik, yang pada gilirannya membutuhkan penyesuaian kebijakan keamanan.[304] Setidaknya, hal itu yang telah terjadi di beberapa Negara dengan populasi penduduk Islam yang besar.[305]

[303] Lily Zubaidah Rahim, "Discursive Contest between Liberal and Literal Islam in Southeast Asia," *Policy and Society* 25, no. 4 (2006): 77–98, https://doi.org/10.1016/S1449-4035(06)70091-1. Di dalam artikel ini, Islam liberal diidentikkan dengan Islam inklusif yang sering ditemui di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia.

[304] David A. Westbrook, "Strategic Consequences of Radical Islamic Neofundamentalism," *Orbis* 51, no. 3 (2007): 461–77, https://doi.org/10.1016/j.orbis.2007.04.007.

[305] Radikalisme bukan konsep yang baru. Namun perlu digarisbawahi bahwa gerakan radikal seringkali dikaitkan dengan mobilisasi sekelompok massa yang sarat akan kepentingan politik ataupun

Tragisnya, militansi dilakukan tidak hanya oleh kalangan bawah, tetapi juga oleh kelompok elit, orang-orang dari segala usia, dan perempuan serta laki-laki. Mereka sangat dilematis karena seolah-olah tidak memahami tujuan utama Islam yaitu berbelas kasih kepada seluruh alam. Pendidikan yang tidak ekstrim dan tidak berlebihan, cinta damai, selalu bersikap wajar, serta selalu berdiri pada posisi netral untuk mencari solusi. Namun, memiliki sikap dan pemahaman yang radikal tidak serta merta berarti Anda akan terjerumus ke dalam paham atau aksi teroris.

Ada banyak arti yang berbeda ketika mendefinisikan terorisme. Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli dan ulama, serta definisi yang mendasari negara, setidaknya mencakup tiga hal.[306] Tujuan kedua adalah korban sipil yang tidak disengaja, dan tujuan ketiga adalah menyebarkan ketakutan dan membawa perubahan sosial-politik. Namun demikian, mayoritas tindakan kekerasan yang dilakukan dalam aksi-aksi terorisme memang dilatar belakangi adanya pemahaman radikal dalam keberagamaan mereka.

Generasi penerus bangsa mendapatkan tantangan hidup yang luar biasa berat, terutama apabila dikaitkan dengan pemahaman keberagamaan yang cenderung radikal. Hal ini juga dilatarbelakangi adanya setting sosial yang memang berkembang sangat pesat seiring berjalannya

---

mengatasnamakan agama. Baca: Quintan Wiktorowicz, *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus* (Jakarta: Gading Publishing, 2012).

[306] Harvey W. Kushner, *Encyclopedia of Terrorism* (London: Sage Publication, 2003), xxiii.

era global hari ini. Namun demikian, pendidikan dianggap mampu mengarahkan pola pikir generasi penerus bangsa.

Hal ini sejalan dengan Ketentuan Pendidikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi keagamaan, kekuatan spiritual, dan pengembangan pribadi yang didefinisikan sebagai kesadaran dan kesengajaan. upaya untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 (1) UU Nomor 20 tahun 2003.

Pemahaman ini memiliki beberapa implikasi. Potensi manusia secara umum diklasifikasikan menjadi tiga kategori: potensi intelektual, potensi moral atau kepribadian, dan kemampuan atletik. Artinya, pendidikan tidak dapat dibenarkan dengan menghasilkan intelektual yang hanya mengingkari keterampilan moral dan atletik. Kedua, tujuan pendidikan adalah untuk memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, budi pekerti, serta kecerdasan, moral, dan kemampuan yang diperlukan bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara.[307] Berbeda dengan metode Dakwah Kiayi dalam menertib-kan ekstremisme di desa Kandan Semankong, Pathirang Ramongan memiliki metode *dakwah bi al-hal*, "Metode Gerakan Magrib Mengaji. Metode dakwah ceramah melalui

[307] M. Saekan Muchith, "Radikalisme dalam Dunia Pendidikan," *Addin: Ilmu Sosial dan Keagamaan* 10, no. 1 (2016): 167–68.

khutbah jumat dan metode mujahadah ke masyarakat melalui kader ideologis Aswaja.[308]

Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin berbicara tentang energi kerja sama antara intimidasi kontra-ilegal dan radikalisme. Peperangan psikologis dan radikalisme membuat rapuhnya berbagai aspek kehidupan individu. Perkembangan ketakutan yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 memerlukan dukungan sinergis, semuanya setara, baik otoritas publik sebagai organisasi yang disetujui untuk memerangi penindasan psikologis.

Penanggulangan dan pemusnahan pelanggaran pendanaan perang psikologis. Tugas Badan Publik melalui BNPT (Pemerintah memberikan Ketetapan No. 46 Tahun 2010 tentang Pendirian Badan Nasional Penanggulangan Penindasan Psikologis (BNPT), yang diubah pada tahun 2012 dengan Pernyataan Resmi No. 12 Tahun 2012 tentang yayasan) dan Peraturan no. 20 Tahun 2003 Dalam Sistem Persekolahan Umum, diperlukan kerja yang berfungsi bagi daerah untuk meredam radikalisme yang memicu serangan-serangan aksi teroris ketakutan, dan mengambil bagian yang berfungsi melalui penataan karakter-karakter positif.[309]

---

[308] Muslihun, "Dakwah dan Radikalisme (Studi pada Kiai di Desa Kandang Semangkon Paciran Lamongan)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[309] Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin, "Sinergi Terhaadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme," *Prosiding Seminar Nasional*

Masnur Alam melakukan penelitian tentang implementasi pendidikan Islam moderat untuk mencegah ancaman radikalisme di Jambi. Kajian ini, dengan mengamalkan pendidikan Islam moderat/wasathhiyyah, berargumen bahwa jihad bukanlah perang atau kekerasan atas nama agama, melainkan jihad menuntut ilmu dan rajin menafkahi keluarga, dan jihad pluralisme, inklusi, dan toleransi. itu adalah penerimaan pluralisme dalam arti menghormati. dan perilaku yang wajar. Aplikasi semacam itu dapat mencegah atau menangkal ekstremisme, perilaku ekstrem, dan konflik. Dengan demikian tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan, kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat.[310]

Mahmuddin melakukan penelitian tentang Dakwah Kontemporer dan Radikalisme Agama di Bulukumba. Penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa para dai di sana telah mengusung tema-tema kontemporer. Materi dakwah memang tidak terlepas dari konsep-konsep tradisional yang sarat akan nilai moderat. Kontekstualisasi dari isi dakwahnya pun tergolong telah menunjukkan bagaimana seorang dai seharusnya merespon perkembangan persoalan di Indonesia ini. Sayangnya penggunaan media sosial belum begitu termanfaatkan, karena dakwah di sana masih menggunakan media elektronik dan media cetak saja.[311]

Hukum Universitas Negeri Semarang 3, no. 1 (2017): 73–90.

[310] Alam, "Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi."

[311] Mahmudin, "Dakwah Kontemporer dan Radikalisme Agama di Bulukumba," *Al-Ulum* 16, no. 2 (2016): 454–73.

Dengan mencermati fokus dari masing-masing penelitian yang telah disebutkan, maka buku ini memiliki signifikansi yang spesifik yaitu mengkaji peran tim dakwah PC Muslimat NU Kabupaten Kediri dalam menangkal radikalisme melalui pendekatan sosiologi dan komunikasi. Untuk mendalami hal tersebut, penulis menggunakan corak interdisipliner melalui analisis-filosofis dengan pendekatan sosiologi dan komunikasi dengan harapan nantinya akan didapatkan sintesa keilmuan yang lebih komprehensif dan representatif.

B. Pendidikan Moderat sebagai Esensi Deradikalisasi

Radikalisme berasal dari bahasa latin radix yang berarti akar. Dalam pengertian lain, radikal sering diartikan sebagai dasar. Kalau soal radikalisme dalam agama, sama saja dengan fundamentalisme agama. Definisi lain yang identik dengan kata radikalisme adalah fanatisme, radikalisme, radikalisme, dan sebagainya. Kata radikal identik dengan kata-kata seperti liberal, reaksi, dan progresif.[312]

Fenomena kekerasan yang mengatasnamakan agama, yang sering disebut radikalisme agama, semakin mengemuka. Pemahaman mendasar inilah yang melatarbelakangi terorisme yang selalu dibayang-bayangi yang menjadi masalah yang dihadapi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Banyak istilah lain yang juga biasa digunakan untuk menyebut radikalisme, antara lain fundamentalisme, revivalisme, ekstremisme, perang,

[312] Hasyim Muhammad, "Diskursus Deradikalisasi Agama: Pola Resistensi Pesantren terhadap Gerakan Radikal," *Jurnal Walisongo* 23, no. 1 (2015): 197.

dan garis keras.[313] Terlebih lagi untuk negara yang luas secara geografis serta memiliki beragam suku dan budaya di dalamnya. Tentu tantangan ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional suatu negara tersebut.

Radikalisme agama sebagian besar didorong oleh kepentingan beragama yang kuat, sensasi ketegangan, otoritas, kelemahan psikososial, dan bentuk buruk di sekitar dan di seluruh dunia..[314] Berbagai faktor tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena kesemuanya memang sangat berpotensi menimbulkan pemikiran keagamaan yang ekstrim pada diri seseorang. Gerakan radikalis memperoleh banyak pengikut dari kalangan generasi muda Islam yang tumbuh di bawah sistem pemerintahan nasionalis-sekuler.[315]

Hal ini mungkin disebabkan adanya berbagai faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, yang kemudian berhasil mengambil alih rasionalitas keagamaan yang seharusnya bersifat harmoni. Artinya adalah, generasi muda memang sangat rentan mengikuti gerakan radikalisme agama karena mereka belum begitu mendalami makna agama itu sendiri.[316] Anggapan seperti ini memang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh ajaran Islam, dimana seorang muslim harus senantiasa bersifat inklusif.

---

[313] Khamami Zada, *Islam Radikal: Pengumulan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), 13–16.

[314] Wawan H. Purwanto, *Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme hingga ke Akar-akarnya, Memungkinkah?* (Jakarta: CMB Press, 2007), 15.

[315] Mark Jurgensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama* (Yogyakarta: Terawang Press, 2003), 16.

[316] Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 224.

Islam secara normatif-doktrinal, dengan tegas menyangkal dan menolak kekerasan. Bagaimanapun, Islam telah menawarkan pengaturan yang lebih masuk akal, masuk akal, bermanfaat dan membantu untuk menumbuhkan lingkungan ketahanan, kasih sayang, dan perlawanan antara satu pertemuan dan pertemuan lainnya..[317] Inilah yang kemudian dapat dijadikan rujukan untuk membangun suatu komunitas muslim madani sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah di era pasca hijrahnya beliau. Ide ini pula yang berhasil mengantarkan Islam mencapai puncak peradabannya di masa lampau.[318]

Dari penjelasan tersebut kiranya dapat dipahami bahwa radikalisme agama merupakan suatu pemahaman keberagamaan yang bersifat eksklusif dan cenderung fanatis terhadap salah satu bentuk keyakinan tertentu sehingga cenderung mengarahkan pengikutnya untuk meyakini bahwa ideologi mereka adalah yang paling benar di antara yang lainnya.

Tidak dapat disangkal bahwa ideologi ekstremis yang dapat dengan mudah mengarah pada terorisme telah mengacaukan kehidupan masyarakat dalam banyak hal. Gerakan teroris yang dikerahkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menimbulkan kerusakan sistemik. Oleh karena itu, diperlukan peran serta yang sinergis dari semua elemen, bahkan bagi pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kekuatan untuk

[317] M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural Pemetaan Atas Wacana Keinlaman Kontemporer* (Bandung: Mizan, 2010), 75.

[318] Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia* (Yogyakarta: Institute Pluralism and Multikulturalism Studies (Impulse) dan Kanisius, 2007), 13.

memberantas terorisme melalui amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Negara Republik Indonesia Tahun 2013. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan pendanaan terorisme. Peran Pemerintah melalui BNPT (Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang diubah pada tahun 2012 dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang pembentukannya) dan UU No. 20 Tahun 2003 Dalam Sistem Pendidikan Nasional, diperlukan peran aktif masyarakat untuk menekan radikalisme yang mengarah pada serangan teroris, dan berperan aktif melalui pembentukan karakter positif.[319]

Masnur Alam melakukan penelitian tentang implementasi pendidikan Islam moderat untuk mencegah ancaman radikalisme di kota Sungai Penuh, Jambi. Kajian ini, dengan mengamalkan pendidikan Islam moderat/ wasathhiyyah, berargumen bahwa jihad bukanlah perang atau kekerasan atas nama agama, melainkan jihad menuntut ilmu dan rajin menafkahi keluarga, dan jihad pluralisme, inklusi, dan toleransi. itu adalah penerimaan pluralisme dalam arti menghormati. Aplikasi semacam itu dapat mencegah atau menangkal ekstremisme, perilaku ekstrem, dan konflik. Inilah cara kami menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan, kerukunan, dan kedamaian dalam komunitas kami.[320]

---

[319] Aspihanto dan Muin, "Sinergi Terhaadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme."

[320] Alam, "Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi."

Selama ini pendidikan Islam sebagai garda depan dalam menetralisir radikalisme seolah-olah hanya bertugas mengedepankan hubungan vertikal bersifat *ubudiyah* dibandingkan dengan hubungan horizontal yang bersifat *mualamalah.* Kepada sesama manusia dan lingkungan dalam arti pertimbangan lingkungan sosial dan ekologi diabaikan. Hubungan antar manusia tidak intim, tidak membentuk persahabatan yang erat, bahkan menjadi musuh, dan tidak memiliki empati dan empati terhadap sesama manusia.

Pendidikan Islam moderat diharapkan dapat disosialisasikan, diinternalisasikan dan dipraktikkan secara optimal dalam suatu masyarakat sehingga menjadi sikap mental (kepribadian) terhadap sesama dan istiqamah, dapat Anda terapkan dan menjadi karakter yang tak tergoyahkan.[321] Upaya ini akan didukung oleh tokoh agama, masyarakat dan adat untuk membendung segala bentuk radikalisme dan ekstremisme serta menjadi pelopor yang mewakili Islam Indonesia yang ramah dan maju, harus menjadi kekuatan moral yang harus dilawan.

C. Eksistensi Muslimat NU Kabupaten Kediri

Muslimat NU adalah salah satu organisasi perempuan dari banyak organisasi di Indonesia. Muslimat NU adalah organisasi komunitas dan merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama yang tugasnya membantu untuk mengimplementasikan kebijakan tentang anggota perempuan. Jelas bahwa Muslimat NU harus bisa

[321] Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 179.

memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan bangunan pondasi negara yang diharapkan. Muslimat dan Fatayat NU dapat bersinergi menumbuhkan sikap keagamaan yang moderat dan toleran bagi perempuan dan anak-anak khususnya, dan bagi umat Islam pada umumnya.[322]

NU memantapkan diri sebagai penjaga tradisi dengan menjunjung tinggi paham Ahlussunnah wal Jama'ah. Tentu saja, kodrat utamanya sebagai seorang wanita adalah menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya. Bagi sebagian besar perempuan Kediri, bergabung dengan organisasi merupakan hal yang sulit dan tidak nyaman karena mereka disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Peran wanita muslimah dalam organisasi merupakan wujud nyata dari peran ganda sebagai ibu dan partisipasi dalam organisasi. Muslimat ada di Kediri pada tahun 1950-an dan Muslimat Kabupaten Kediri merupakan perpanjangan tangan dari Muslimat Pimpinan Daerah Jawa Timur.

Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Muslim Mat NU ini adalah survei rutin yang dilakukan secara bergiliran di rumah-rumah warga. Susunan organisasinya terdiri dari Pimpinan Pusat Ibukota Jakarta, Pimpinan Daerah Ibukota Provinsi, Pimpinan Cabang tiap Kota, dan Pimpinan Cabang tiap Kecamatan. Organisasi NU Muslimat terdiri dari organisasi administratif. Pada tahun 1960-an, Muslim Matt Cabang Kediri dipimpin oleh Ibu Dimyati sebagai Presiden I, Ibu Ali Mashar sebagai Presiden

[322] Sudarto Murtaufiq, "The NU Concept of Islam Nusantara in Dealing with Radicalism and Terrorism," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2019): 71.

II, dan Ibu Fauzan sebagai Presiden III. Anggota yang aktif pada tahun 1960-an adalah Ibu Maratus Sholihah (Bu Tipe Dandangan), Ibu Rokhillah, dan Ibu Zulin. Pada tahun 1960-an, tidak ada pembatasan untuk melayani sebagai presiden cabang. Saat itu, ada aturan besi bahwa "Jika kepemimpinan ketua baik, manajemen akan berlanjut untuk waktu yang lama." Awalnya, peran perempuan Muslim adalah untuk menyediakan manajemen tingkat cabang di setiap kecamatan.

Struktur Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Kediri terdiri atas beberapa divisi. Dewan Penasehat terdiri atas tiga orang, yaitu Prof. Dr.Istibsyaroh, S.H, M.A; Hj, Sofiyah Rozi; dan Hj. Mufidah Baidlowi. Hj. Noer Chalidah Badrus, M.HI sebagai Dewan Expert. Dra. Hj. Mudawamah, M.HI sebagai Ketua, yang dibantu oleh Hj. Roihana Faqih; Dr. Muawanah, M.Pd; dan Hj. Nurul Aini. Sekretaris diisi oleh Hj. Nurul Hanani, dibantu Hj. Anisah Mahrus, M.Pd.I dan Dianika Wisnu Wardani. Bendahara diisi oleh Hj. Elok Azizah, S.PdI dengan dibantu Hj. Mariyatul Kibtiyah dan Hj. Umi Jamilah. Selain itu juga terdapat beberapa divisi yang lebih spesifik.

Seksi Organisasi dan Keanggotaan dikoordinatori oleh Dra. Hj. Rifkiawati Zahara, M.Pd.I; Dra. Siti Aisyah Thoha; dan Ny. Atika Mubasyir. Seksi Pendidikan dan Regenerasi beranggotakan Ny. Mahmudah Ahmad; Dra. Siti Rufiah; dan Aslihah, S.Pd. Seksi kewarganegaraan dan lingkungan beranggotakan Ny. Hj. Binti Umayah; Hj. Umu Salamah; dan Siti Nafiah. Seksi Kesehatan beranggotakan Ny. Asma; Siti Zulaikha Spd, MM; dan Umi Nadhiroh. Seksi Dakwah beranggotakan Ny. Hj. Mutmainah Sholihin;

Ny. Hj. Maslihah; dan Halimatus Sa'diyah. Seksi Ekonomi, Kerjasama dan Agrobisnis beranggotakan Hj. Fauziah Anwar; Hj. Mufadiyah; dan Lis Farida. Seksi Angkatan Kerja beranggotakan Hj. Mashudah; Salamah, S.Kom; dan Ny. Jaziroh. Seksi Hukum dan Advokasi beranggotakan Hj. Bunyanah; Hartatik Hudzaifah, S.Ag; dan Anis Syuriah.[323]

Eksistensi Tim Dakwah PC Muslimat NU Kabupaten Kediri terlihat dari peranan mereka dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Muslimat NU menunjukkan eksistensinya dengan berbagai kegiatan. Pada tahun 1975, TK / RA / PAUD diprakarsai oleh Ibu Hj Andarzuni Ghozali. Dia sekarang menjadi penasihat Muslimat NU di Kota Kediri. Pada tahun 1986 Muslimat dari Kabupaten Kediri mendirikan Darul Aitam Muslimat Yayasan NU Budi Mulia. Yayasan ini terbentuk pada masa Indonesia Hj Zainuri. Yayasan ini menampung kegiatan pendidikan dan sosial seperti panti asuhan dan pesantren.Yayasan Darul Aitam pertama kali didirikan di PAC Gurah pada tahun 1987. Panti asuhan adalah salah satunya lembaga yang berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak anak.

Panti Asuhan Darul Aitam terdiri dari dua bagian, yaitu anak-anak tinggal di rumah dan anak-anak yang tidak tinggal di panti asuhan. Anak-anak yang tidak memiliki panduan hidup dan belajar sebulan sekali. Panti Asuhan Darul Aitam diprioritaskan untuk anak yatim, dan penduduk miskin masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Siti Rufiah, bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mampu mengikuti tuntutan

[323] "Profil Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Kediri," 2018.

pengembangan perlu dirumuskan sistem manajemen kualitas pendidikan guru yang tepat. Sebagai jembatan, lembaga pendidikan harus mengikuti paradigma baru pendidikan, yaitu memprioritaskan layanan berkualitas dengan membuka aplikasi prinsip otonomi pendidikan, siap melaksanakan akuntabilitas publik, siap terakreditasi dan bahkan menjalankannya, dan dari waktu ke waktu lakukan evaluasi diri untuk perubahan yang lebih baik untuk menghasilkan suatu institusi dan lulusan berkualitas.[324]

Muslim NU juga berperan dalam politik. Meskipun Musrimato NU bukanlah organisasi politik, namun banyak orang dan anggota Musrimato NU yang memenuhi syarat untuk mewakili masyarakat yang berperspektif gender. Pengalaman Pemilu 2009 menjadi pelajaran penting bagi jalannya demokrasi Indonesia, dimana banyak terjadi pelanggaran dan masih adanya regulator dan pengelola yang tidak profesional. Kecurangan terstruktur ini terlihat pada pemilihan umum dan pemilihan presiden. Untuk itu, Khofifah mengajak seluruh warga tanah air, khususnya umat Islam NU, untuk menggunakan hak pilihnya dan berpartisipasi dalam pemantauan dan pemungutan suara pemilu.

Pada pemilihan parlemen 2009, NU Muslim mengambil posisi netral. Namun, organisasi swakelola NU ini mendorong para eksekutifnya untuk mencalonkan diri di parlemen untuk memperebutkan kursi di parlemen. Tahun ini menjadi tahun paling sial bagi kader Muslim NU. Hanya ada lima kader Muslim NU di parlemen

[324] Siti Rufiah, Paradigma Baru Pendidikan, 16 Februari 2019.

sejak pemilu 1955. Dari tahun 2004 hingga 2009, jumlah ini sebagian besar tidak berubah, hanya 6 di DPR RI dan 4 di DPD RI. Akibatnya, di DPR RI 2009, hanya ada satu eksekutif Muslim NU dan tiga di DPD.[325]

Selain dalam aspek simpan pinjam, Koperasi ini sering mengadakan kegiatan yang berisi materi-materi kecakapan dan keterampilan untuk para ibu rumah tangga, seperti keterampilan merajut, menjahit, dan memasak. Tentu hal ini sangat positif bagi peningkatan perekonomian keluarga mereka. Sementara itu, Muslim Mat NU telah bekerja sama dengan BKKBN di bidang sosial sejak tahun 1990 untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bertema KB. Program Keluarga Berencana Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta. Sebagai bagian dari organisasi NU, NU Muslim sangat aktif dalam melaksanakan program tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran umat Islam NU yang telah menghimpun jutaan ibu-ibu dan tersebar luas di kampung. Oleh karena itu, Muslim Matt NU sangat ingin mendukung pemerintah untuk menyebarkan program KB kepada masyarakat luas.[326]

Penulis memahami bahwa PC Muslimat NU Kabupaten Kediri memang telah lama eksis di tengah kehidupan keseharian masyarakat Kediri. Hal itu terbukti dengan berbagai sinergi yang telah dilakukan di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam artikel ini,

[325] Ayu Munawaroh, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Peran Perempuan di Lembaga Legislatif Tahun 2009-2014)," *At-Tabligh* 1, no. 1 (2016): 40–50.

[326] Roihana Faqih, Eksistensi PC Muslimat NU di Kabupaten Kediri, 14 Februari 2019.

pembahasan berikutnya akan lebih focus kepada upaya tim dakwah PC Muslimat NU Kabupaten Kediri dalam menangkal isu radikalisme.

D. Keberagamaan Masyarakat dalam Konteks Radikalisme

Radikalisme lebih banyak dikaitkan dengan ranah keagamaan. Radikalisme dekat dengan pemahaman keagamaan yang ekslusif sehingga memunculkan tindakan-tindakan kekerasan.[327] Radikalisme memang konsep yang luas, sehingga dimungkinkan akan muncul berbagai perspektif tentang istilah tersebut. Pemaknaan radikalisme di kalangan masyarakat Kediri juga beragam. Penulis menggali beberapa pemaknaan radikalisme menurut beberapa informan. Mudawamah, Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Kediri menyampaikan bahwa radikalisme ialah sebagai bentuk paham yang menghalalkan kekerasan dalam mencapai tujuannya, dengan berdasar pada agama yang ia imani.

Mereka tak lagi menggunakan cara yang baik saja agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya, akan tetapi cara yang buruk pun mereka gunakan untuk mencapai tujuannya. Yang lebih bermasalah lagi jika radikalisme itu ditempelkan pada Islam. Ketika seseorang berbicara akan radikalisme, maka stigma yang muncul ialah orang yang beragama Islam. Padahal tidak semua mereka yang berpaham radikal beragama Islam.[328] Artinya, radikalisme berakar dari pemahaman fundamentalis yang mayoritas

[327] Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012): 161.

[328] Mudawamah, Radikalisme dan Kekerasan, 29 Januari 2019.

mengarahkan individu kepada tindak kekerasan kepada pihak lain.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, penulis menangkap indikasi radikalisme di Kabupaten Kediri. Bentuk radikalisme di sini ada yang sembunyi-bunyi dan ada yang terang-terangan. Upaya untuk menangkal pemahaman ekslusif ini dilakukan dengan mencari akarnya, bukan serta merta menuduh setiap orang yang berbusana kearab-araban selalu bersikap radikal. Efek-efek radikalisme kepada masyarakat dalam bentuk aliran keagamaan yang keras dan itu sudah terjadi lama di Kediri. Satu tahun yang lalu, ormas muslimat fatayat dikumpulkan oleh Mujahid di Joyoboyo untuk menerima soialisasi mengenai bahaya radikalisme dan kondisi radikalisme di Kediri. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga digunakan sebagai sarana untuk menangkal dan meminimalisir paham radikal.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, di wilayah Katang terdapat seorang penduduk yang terindikasi masuk dalam kelompok radikalis. Ia seorang perempuan alumni ITS, jurusan kimia. Menurut masyarakat setempat, butuh waktu bertahun-tahun untuk mengenali pola pemahaman orang tersebut. Bahkan diketahui dia sempat merakit bom untuk membersihkan kemunkaran di tempat-tempat maksiat. Namun belakangan terungkap bahwa hal ini telah teratasi berkat kesigapan Polres Kediri dalam mengamankan ancaman potensi ledakan bom tersebut. Selama dalam masa tahanan, komunikasi intensif dan pembimbingan rutin yang dilakukan oleh tim dakwah PC Muslimat NU secara personal dengan yang bersangkutan

terus diupayakan untuk menjinakkan paham radikal yang dia miliki.

Wilayah lain yang cukup rentan terserang paham radikal yaitu area Pare, lebih tepatnya Kampung Inggris dan sekitarnya. Keadaan sosio-kultural di sana sangat beragam karena semakin banyaknya orang yang datang dari berbagai kota lain untuk belajar ke sana. Setidaknya, latar belakang yang beragam ini tentu saja sangat mungkin mengandung pemahaman radikal, baik sedikit atau banyak. Apalagi para pemuda yang sangat rentan terjangkit paham-paham radikal yang mengatasnamakan dirirnya *ahlussunnah wal jama'ah*.

Menurut Fathurrohman, radikalisme di wilayah Kampung Inggris terlihat dari dinamika perkembangan diskusi-diskusi keagamaan yang dilakukan para pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Diskusi ini biasanya dilakukan di sela-sela kegiatan kursus bahasa inggris yang mereka ambil. Tidak hanya itu, grup media sosial seperti Whatsapp dan Line turut menjadi media dalam mendiskusikan tema-tema keagamaan yang mengarah kepada sikap-sikap radikal. Namun menurut pantauan penulis, kemunculan fenomena seperti ini masih dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat pribumi Kampung Inggris masih memegang teguh prinsip keislaman moderat yang sangat khas dengan nilai-nilai *ahlussunnah wal jama'ah*.[329]

Fenomena lain yang tentu semua orang masih mengingat dengan jelas adalah aksi penyelamatan anak teroris yang dilakukan oleh Roni Faisal, yang sekarang

---

[329] Fathurrohman, Radikalisme di Kampung Inggris, 12 Februari 2019.

diangkat menjadi Kapolres Kediri. Kesenjangan sosial antara anak dengan orang tua menjadi salah satu celah masuknya pemahaman keagamaan yang radikal. Menurut Achmad Sutrisno, isu-isu radikalisme yang berkembang saat ini harus dihadapi dengan sikap waspada. Generasi muda harus membentengi diri dari radikalism, apalagi yang mengarah kepada tindakan terorisme. Menurutnya, di wilayah Gurah pernah terindikasi muncul isu radikalisme. Namun isu tersebut hanya terdengar sepintas, dan untuk berkembang rasanya sulit. Hal ini dikarenakan pondok-pondok pesantren dan ormas-ormas khususnya tim dakwah PC Muslimat NU sigap dalam menghadapi dan memberantas radikalisme itu sendiri. Upaya nyata yang dilakukan dalam mengendalikan pemahaman moderasi keislaman masyarakat di sana adalah melalui berbagai pengajian dan kegiatan rutin yang bernafaskan semangat moderasi Islam.

Sementara itu menurut Timotius Kabul, seorang Pendeta Gereja Getsemani Kediri menyebutkan bahwa radikalisme itu kaitan erat dengan misi. Akan tetapi kadang-kadang iman yang hanya melihat keberadaan sendiri dan memusuhi orang yang diluar keimanannya. Iman itu harus fanatik, tapi dalam mengimplementasikan iman dalam kristen itu tidak diperintahkan untuk memusuhi orang lain, dan tidak saling menganiaya. Teror termasuk salah satu penganiayaaan. Memang setiap agama ada yang radikal, akan tetapi perlu ditinjau ulang mengenai apakah yang radikal ini individunya atau ajaran

agamanya. Jadi menurutnya, radikalisme sangat dekat dengan kepentingan ideologis yang bersifat eksklusif.[330]

Menurut Ellis Nur Aini menyebutkan bahwa munculnya aliran-aliran Islamis fundamentalis yang bercorak kearab-araban telah lama ada di Kabupaten Kediri, terutama di wilayah perbatasan Kabupaten Kediri dan Nganjuk. Aliran-aliran yang dikenal dengan istilah *jahula* tersebut dikawal secara bertahap oleh pemerintah dan bekerja sama dengan tim dakwah PC Muslimat NU Kabupaten Kediri. Pemahaman radikal di sana hanya seputar akidah keislaman tradisionalis yang cenderung identik dengan ide-ide wahabi. Namun sekali lagi, jumlah fenomena seperti itu tidak sampai meluas dan hanya bersifat lokal karena hanya terbatas pada wilayah-wilayah terluar Kabupaten Kediri.[331]

Banyak orang bersikap fanatik terhadap agamanya, merasa paling benar dan cenderung menyalahkan orang lain. Dalam diri sesama muslim saja ada yang saling mengelompokkan ke dalam golongan-golongan radikal tertentu. Pengelompokan seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan perintah agama yang berorientasi kepada kedamaian dan konsep Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.[332]

Radikal tidak diajarkan oleh agama, namun tuduhan yang menempel pada pembahasan radikal selalu dikaitkan dengan agama. Inilah yang belakangan menjadi bumerang bagi eksistensi pondok pesantren dan berbagai perguruan tinggi yang dituduh menjadi tempat yang subur dalam hal

---

[330] Timotius Kabul, Fanatisme dan Radikalisme, 10 Februari 2019.
[331] Ellis Nur Aini, Kelompok Jahula di Wilayah Kediri, 21 Februari 2019.
[332] A Faiz Yunus, "Radikalisme,Liberalisme, dan Terorisme," *Studi Al-Qur'an* 13, no. 1 (2017): 20.

kaderisasi kelompok radikal. Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan bagi kalangan remaja yang menuju arah kedewasaan, sehingga proses pembelajarannya lebih sering menuntut kesiapan individual.[333] Artinya, andragogi lebih banyak diterapkan daripada sekedar pedagogi. Oleh karena itu, hasil pembelajaran di perguruan tinggi sebenarnya juga sangat bergantung pada pribadi masing-masing.

Perlu disadari bersama bahwa fanatisme beragama dapat diwujudkan dalam arti positif, misalnya dengan meningkatkan ibadah, saling bertukar pikiran, berdiskusi seputar pemahaman keagamaan yang moderat, dan hal positif lainnya. Dengan begitu, pikiran mereka yang fanatik akan cenderung kembali ke jalan yang benar. Sebagai umat muslim yang taat, kita harus menjaga hubungan vertikal dengan Allah Swt. Sebagai masyarakat yang hidup berbangsa dan bernegara, kita harus selalu mempererat hubungan sesama manusia agar tidak saling menumbuhhkan kebencian. Penulis sangat meyakini bahwa berbagai kegiatan keagamaan, silaturahmi, dan sosialisasi moderasi Islam dapat meminimalisir munculnya radikalisme dalam tubuh masyarakat.

Dari berbagai fenomena yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pemahaman keberagamaan masyarakat Kabupaten Kediri dalam konteks radikalisme cukup terjaga. Walaupun ditemukan adanya indikasi fenomena radikalisme, namun kemunculannya masih dalam batas kewajaran dan relatif dapat dikendalikan sehingga tidak

[333] Sufirmansyah, "Actualization of Andragogical Learning Strategies for Higher Education in Disruption Era," *Didaktika Religia* 6, no. 2 (2018): 351–70, https://doi.org/10.30762/didaktika.v6i2.1111.

sampai meruncing menjadi konflik yang berujung pada kekerasan. Umumnya pemahaman masyarakat Kabupaten Kediri lebih banyak didominasi pemahaman keberagamaan moderat khas *ahlussunnah wal jama'ah* sebagai hasil dari internalisasi nilai-nilai keislaman yang inklusif di tengah kehidupan masyarakat yang multikultural.

E. Upaya Muslimat NU Menangkal Radikalisme untuk Moderasi Agama

Organisasi kemasyarakatan (ormas) perempuan pada umumnya dipandang sebelah mata.[334] Begitu pula dengan keberadaan tim dakwah PC Muslimat NU Kabupaten Kediri dalam menangkal bahaya radikalisme di wilayahnya. Salah satu cara ampuh untuk menangkal radikalisme adalah melalui pendidikan. Muslimat NU, di sisi lain, telah bekerja sama dengan BKKBN di bidang sosial sejak tahun 1990, melakukan sosialisasi di masyarakat tentang keluarga berencana. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran NUMuslimat yang tersebar di desa-desa yang menarik jutaan ibu-ibu. Oleh karena itu Muslimat NU termotivasi untuk mendukung pemerintah dalam menyebarkan program KB kepada masyarakat luas.[335]

Radikalisme yang berkembang saat ini mayoritas bersinggungan dengan agama, khususnya Islam.

---

[334] Umma Farida, "Peran Organisasi Massa Perempuan Dalam Pembangunan Perdamaian (Studi Kasus Muslimat NU Jawa Tengah)," *Palastren* 11, no. 1 (2019): 51–72, https://doi.org/10.21043/palastren.v11i1.3092.

[335] Sufirmansyah, "Aplikasi Visi Islam Moderat: Eklektisisme Pembelajaran Bermakna dan Pendidikan Berbasis Nilai sebagai Antitesis Radikalisme Keberagamaan," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 1, no. 1 (2018): 95–112.

Radikalisme identik dengan Islam garis keras, sehingga hal ini tentu sangat merugikan umat Islam. Padahal Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kelahiran dan penyebaran Islam ribuan tahun silam bahkan tidak diwarnai dengan pedang, melainkan melalui pesan-pesan perdamaian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Radikalisme di era informasi saat ini juga tmemanfaatkan media internet dalam menyebarkan idenya. Muslimat NU, di sisi lain, telah bekerja sama dengan BKKBN di bidang sosial sejak tahun 1990, melakukan sosialisasi di masyarakat tentang keluarga berencana. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran NUMuslimat yang tersebar di desa-desa yang menarik jutaan ibu-ibu. Oleh karena itu Muslimat NU berupaya membantu pemerintah dengan media internet. Media internet berperan besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas, khususnya tentang paham radikal.[336]

Parahnya lagi, perekrutan anak muda ke dalam organisasi radikal kebanyakan dilakukan melalui internet. Fakta bahwa organisasi teroris dan afiliasinya mengadopsi teknik yang memudahkan penyebaran propaganda melalui Internet dan merekrut anggota potensial sangat menyedihkan tentang kemajuan media massa itu sendiri. Bahkan jika Indonesia adalah Negara Islam moderat, sulit untuk mengembangkan ekstremisme di negara itu. Bukan berarti Indonesia luput menjadi tujuan mereka, terutama generasi muda.

[336] Eko Nopriansyah, "Tela'ah Pemikiran Alwi Shihab Tentang Toleransi Beragama Dalam Buku Islam Inklusif," *Nurani* 17, no. 2 (2017): 133–52, https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1841.

Apapun itu, media massa memiliki tanggung jawab moral dan sosial kepada publik, namun pemberitaan tersebut di satu sisi menguntungkan gerakan-gerakan tersebut dalam bentuk publisitas gratis, tetapi masyarakat itu sendiri. lingkungan dari segala sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa hanya mengandalkan pemerintah. Internet adalah salah satu media yang paling banyak digunakan untuk memandu keinginan demokrasi ini. Sementara itu, banyak ekstremis Islam menggunakan momen dan media ini untuk menyebarkan ideologi jihad. Untuk itu, media massa berperan penting dalam memerangi isu ekstremisme, menginformasikan publik, dan mengambil tindakan untuk mencegah berkembangnya gerakan ekstremis di komunitas mereka. Mensosialisasikan program KB kepada masyarakat luas.[337]

Tim dakwah PC Muslimat NU tentu saja tidak hanya berdiam diri dan hanya mengandalkan peran media massa dalam menangkal bahaya radikalisme yang sangat nyata. Upaya utama yang dilakukan oleh tim dakwah PC Muslimat NU dalam menangkal isu radikalisme di Kabupaten Kediri yaitu rutin mengadakan *majelis ta'lim* bermuatan ajaran keagamaan Islam yang inklusif, toleran, dan moderat di berbagai titik vital di Kabupaten Kediri.

Tim Dakwah PC Muslimat NU melakukan sosialisasi berupa agenda *majelis ta'lim* di berbagai titik vital di Kabupaten Kediri. Setiap Ahad Wage, pengajian diadakan di 4 kecamatan, yaitu Semen, Kandangan, Ngancar, dan

[337] Leni Winarni, "Media Massa dan Isu Radikalisme Islam," *Jurnal Komunikasi Massa* 7, no. 2 (2014): 159–66.

Wates. Setiap Ahad Pon, pengajian dilakukan di empat kecamatan, yaitu Banyakan, Ringinrejo, Badas, dan Purwoasri. Setiap Ahad Pahing, pengajian diselenggarakan di empat kecamatan, yaitu Pagu, Ngaduluwih, Papar, dan Kras. Setiap Ahad Legi, pengajian diadakan di 3 kecamatan, yaitu Ngasem, Pare, dan Tarokan. Setiap Ahad Kliwon, pengajian dilaksanakan di dua kecamatan, yaitu Plosoklaten dan Kayen Kidul.

Mubaligh yang dihadirkan dalam pengajian ini merupakan seorang yang menganut paham *ahlussunnah wal jama'ah an-Nahdhiyah*. Tim dakwah PC Muslimat NU menerapkan kebijakan bahwa tidak boleh sembarang orang bisa masuk tanpa ada pengetahuan sosok yang jelas. Dalam sosialisasi sekaligus pengajian mingguan ini, Tim Dakwah PC Muslimat NU melalui mubaligh tadi memberikan materi-materi dakwah yang berisi materi keagamaan Islam moderat, beberapa fenomena sosial-keagamaan, isu radikalisme dan cara penanggulangannya, serta penguatan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sejatinya selaras dengan nilai-nilai Islam moderat. Karena itulah, penguatan rasa cinta tanah air juga turut disampaikan.[338]

Tim Dakwah PC Muslimat NU juga berperan aktif dalam mengawal moderasi pemahaman keberagamaan masyarakat Kabupaten Kediri dengan mengadakan berbagai kegiatan keagamaan seperti *shalawat diba'* dan rutinan jamaah yasin. Kegiatan seperti itu sering dilaksanakan hamper di seluruh titik di wilayah

---

[338] Mahmudah Ahmad, Pengajian an-Nahdhiyah sebagai Penangkal Radikalisme, 19 Februari 2019.

Kabupaten Kediri. Dengan seringnya pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa seperti itulah, kemunculan pemahaman radikal dapat diminimalisir.

Selain itu, upaya lain yang terus dilakukan oleh tim dakwah PC Muslimat NU adalah menjaga kebersamaan antara tokoh masyarakat dan pemerintah tentunya dalam menghadapi radikalisme. Kalangan yang sangat mudah untuk dipengaruhi adalah anak muda yang berada jauh dari orang tua. Mereka menyebarkan pemahaman radikal dengan bahasa-bahasa yang logis dan menarik. Wilayah Kampung Inggris Pare menjadi salah satu perhatian khusus tim dakwah PC Muslimat NU, karena di sana banyak pelajar yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Karenanya, tim dakwah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengadakan sosialisasi keagamaan Islam moderat sebagai penangkal isu radikalisme yang berpotensi besar muncul dan berkembang di sana.

Wilayah terluar Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk juga turut menjadi perhatian khusus. Di Desa Kalipang yang terletak di area perbukitan sering kali didatangi sekelompok *jahula* yang tampil kearab-araban dan selalu mendakwahkan Islam skriptual-tekstual. Di sana terdapat komunitas masyarakat yang berbeda agama, dimana umat hindu, Kristen, dan Islam hidup berdampingan. Namun, mayoritas umat Islam di sana masih sangat awam karena dulunya nenek moyang mereka memang beragama hindu. Untuk mengawal pemahaman masyarakat di sana, Tim Dakwah PC Muslimat NU bekerja sama dengan jajaran pemerintahan

setempat untuk mengadakan pengajian rutin serta kegiatan keagamaan secara intensif. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang cenderung awam dapat dijaga pemahamannya dari bahaya isu radikalisme.[339]

Tim dakwah PC Muslimat NU juga bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang ada di karesidenan Kediri untuk terus mengawal pemahaman keagamaan mahasiswa. Kerja sama ini diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi bermuatan Islam moderat yang selaras dengan ideologi Pancasila. Organisasi-organisasi yang telah ada di kalangan mahasiswa khususnya yang berhaluan *Aswaja* harus terus bersama-sama menangkal radikalisme dan membentengi masyarakat dan siapapun agar terhindar dari radikalisme ini. Dengan begitu kelompok radikalis tidak akan dapat menyusup ke dalam dinamika pemikiran mahasiswa yang serba kritis dan logis. Bagaimanapun juga, mahasiswa harus mampu membentengi pemahaman keislaman mereka dari bahaya *brain-washing* seputar isu radikalisme.[340]

Kaum radikalis tidak hanya menargetkan kalangan muda, tetapi juga seringkali masuk ke area pondok pesantren. Penyebaran pemahaman radikal tidak lagi menggunakan pendekatan politik, akan tetapi menggunakan perbedaan madzhab yang ada dalam tubuh umat Islam sebagai senjata agar mereka lebih cepat terpecah belah. Mereka mengajak kembali kepada al-Qur'an dan Hadis, karena menurut mereka Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber

[339] Anisah Mahrus, Masyarakat Awam Kabupaten Kediri harus Dikawal Pemahaman Keislamannya, 4 Maret 2019.

[340] Muawanah, Mahasiswa harus Berani Menolak Radikalisme, 25 Februari 2019.

hukum yang paling utama. Tim dakwah PC Muslimat NU senantiasa bekerja sama dengan seluruh pondok pesantren di wilayah Kediri untuk mensosialisasikan bahaya radikalisme yang dapat menyusup ke pondok pesantren secara diam-diam. Di sela-sela kegiatan pesantren selalu diselipkan pemahaman keagamaan Islam yang moderat, toleran, dan inklusif agar para santri memahami bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Persatuan NKRI menjadi suatu keniscayaan agar bangsa ini dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang besar. Yang harus diketahui adalah bahwa dunia luar banyak hal yang para santri belum ketahui dan harus diberitahukan melalui proses belajar para santri di pesantren. Dengan demikian, nantinya para santri akan mempunyai bekal keagamaan yang memadai agar tidak terkejut dalam menghadapi dunia luar yang keras.[341] Pondok Pesantren harus memberikan pemahaman keagamaan Islam yang kokoh bagi para santrinya agar dapat membentengi diri dari bahaya laten yang ditimbulkan oleh radikalisme. Karenanya, perlu dilakukan reaktualisasi kurikulum pondok pesantren sesegera mungkin sebagai langkah preventif atas maraknya isu radikalisme..[342]

Apabila dicermati dalam konteks sosiologi dan komunikasi, upaya yang dilakukan oleh tim dakwah PC Muslimat NU selalu berakar pada kegiatan-kegiatan

---

[341] Nur Kholidah, Bahaya Radikalisme Mengintai Pesantren, 2 Maret 2019.

[342] Sufirmansyah, "Reaktualisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Integratif (Telaah Kritis Komparatif di Pesantren, Sekolah, dan Madrasah)," *Realita* 16, no. 2 (2018): 157–68, https://doi.org/10.30762/realita.v16i2.1037.

berbasis masyarakat. Tim dakwah PC Muslimat NU menginternalisasikan nilai-nilai keislaman yang moderat kepada masyarakat secara komunikatif dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kediri. Islam Nusantara sebagai manifestasi moderasi pemahaman keagamaan Islam menjadi semangat utama Tim Dakwah PC Muslimat NU dalam mengawal pemahaman keagamaan masyarakat Kabupaten Kediri.

Tim dakwah PC Muslimat NU selalu bersinergi dengan Polres Kediri dan BNN untuk mengkomunikasikan seluruh potensi munculnya radikalisme di Kabupaten Kediri. Pergerakan kelompok teroris beraliran radikal dalam menyebarkan pahamnya ini sangat tertutup (model gerilya). Karena itulah Tim dakwah PC Muslimat NU juga belum bisa memastikan bahwa Kabupaten Kediri aman dari bahaya terorisme dan radikalisme. Komunikasi juga terus dijalin antara tim dakwah PC Muslimat NU dengan seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintahan, serta berbagai institusi pendidikan yang ada, termasuk dengan perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren. Upaya tersebut terbukti efektif untuk mengawal pemahaman keberagamaan masyarakat Kabupaten Kediri agar tetap berada pada moderasi keberagamaan Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Eksistensi Tim Dakwah PC Muslimat NU Kabupaten Kediri terbentuk secara sinergis dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Kediri. Mereka mampu bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kediri dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, serta agama. Pemahaman keberagamaan masyarakat Kabupaten

Kediri dalam konteks radikalisme juga cukup terjaga. Walaupun di beberapa wilayah sempat terindikasi muncul isu-isu radikalisme, tetapi semuanya dapat diredam dan dikawal dengan baik oleh tim dakwah PC Muslimat NU bersama dengan seluruh elemen masyarakat. Secara umum, masyarakat Kabupaten Kediri memiliki pemahaman keberagamaan moderat khas *ahlussunnah wal jama'ah*.

Upaya yang dilakukan oleh tim dakwah PC Muslimat NU dalam menangkal isu radikalisme di Kabupaten Kediri yaitu rutin mengadakan *majelis ta'lim* bermuatan ajaran keagamaan Islam yang inklusif, toleran, dan moderat di berbagai titik vital di Kabupaten Kediri. Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam mengawal moderasi pemahaman keberagamaan masyarakat Kabupaten Kediri dengan mengadakan berbagai kegiatan keagamaan seperti *shalawat diba'* dan rutinan jamaah *yasin*. Apabila dicermati dalam konteks sosiologi dan komunikasi, upaya yang dilakukan oleh tim dakwah PC Muslimat NU selalu berakar pada kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat. Tim dakwah PC Muslimat NU menginternalisasikan nilai-nilai keislaman yang moderat kepada masyarakat secara komunikatif dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kediri. Tim dakwah PC Muslimat NU selalu bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, dengan jajaran pemerintahan seperti TNI dan Polri, serta dengan berbagai institusi pendidikan yang ada, termasuk dengan pondok-pondok pesantren. Upaya tersebut terbukti efektif untuk mengawal pemahaman keberagamaan masyarakat Kabupaten Kediri agar tetap berada pada moderasi

keberagamaan Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

BAB VIII
POTRET MODERASI AGAMA PADA MASYARAKAT MUSLIM-TIONGHOA

A. Eksistensi Umat Muslim dan Tionghoa di Kota Kediri

Secara historis, umat Tionghoa memiliki rentetan kebudayaan yang begitu panjang, sampai kemudian menetap di Kota Kediri sebagai komunitas minoritas yang diakui eksistensinya. Pada awalnya komunitas Tionghoa berangkat dari kehidupan mereka yang agro-bisnis. Jauh sebelum Indonesia mereka, menurut Chouw (2008), peradaban Tionghoa yang berasal dari Tiongkok sudah hidup sejak 43 sebelum Masehi. Terdapat bukti arkeologi yang menunjukan bahwa komunitas Tionghoa telah menginjak nusantara sekitar tahun 1400 SM.[343]

[343] Pernyataan Chouw ini didasarkan pada bukti sejarah berupa bahasa Tionghoa yang telah ada pada bebatuan dan pohon-pohon kelapa. Selain itu pula, terdapat jejak-jejak dangan Tionghoa pada masa kerajaan Demak. Hal ini menurut logika sejarah, umat Tionghoa telah dating ke nusantara bahkan sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Peradaban Tionghoa lebih banyak pada perhelatan dagang sayur mayor dan rempah-rempah. Chouw mengatakan "*Ethnic Chinese came to Indonesia only to trade, because Indonesia is a vast country rich in natural potential but has not been able to trade internationally. The arrival of the Chinese, although they were religious but not fanatical, besides introducing trading methods, they also built an established trading model. Because at that time, Indonesia was still using the classic trading method, which occurred economic activity in small markets. Therefore, the ethnic Chinese, came to build a good archipelago*

Komunitas Tionghoa telah menetap lama di Kota Kediri. Pada umumnya, etnis Tionghoa yang berinteraksi dengan masyarakat adalah etnis Khek atau Hakka yang berasal dari pripinsi Kwangtun China. Dalam artian, etnis Tionghoa yang hidup di Kota Kediri merupakan komunias Tionghoa asli tanpa berjapur dengan etnis lain seprti Hai Nan dan Kong Hu. Walaupun secara budaya, semua etnis Tionghoa memiliki kesamaan. Hanya pada aspek ritual keagamaan yang sedikit berbeda.[344]

Awal mula etnis Tionghoa menjalin komunikasi dengan umat Islam di Kediri dapat ditelusuri dari ketika mereka melakukan kontak untuk kepentingan diplomasi politik, dagang maupun kekerabatan. Walaupun pada hakikatnya, interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Jawa telah terjadi ratusan tahun silam. Hal ini terjadi saat migrasi besar-besaran etnis Tionghoa ke

---

economic system, as well as trade for their own welfare. Until now, the activities of the Chinese ethnic group are the same, namely trading and doing business. Therefore, none of their sections broadcast both Christianity and Confucianism in the archipelago. Even in several studies, the existence of ethnic Chinese who are known is not their religion but their way of doing business and advanced knowledge". Disampaikan oleh Chouw, dikutip oleh A. Dahana, *Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia*, Bandung: PT Wacana, 2000, 83.

[344] Kedatangan komunitas Tionghoa ke Indonesia hanya untuk berdagang, sebab menurut pemahaman mereka Indonesia (saat itu masih Hindia-Belanda) kaya akan rempah, sehingga mereka tertarik untuk barter. Namun tanpa disadari, hubungan perdadangan berpengaruh pada pola keagamaan. Sedikit banyak, cara mereka beragama dapat mengantarkan pada pergulatan agama dengan masyarakat pribumi. Namun bukan berarti, komunitas Tionghoa bermaksud menyebarkan agama mereka. "Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia" diakses tanggal 5 September 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/01/18/12220121/menelusuri-sejarah-awal-masuknya-masyarakat-tionghoa-di-indonesia?page=all

Kediri sebagai akibat dorongan Kolonial belanda pada tahun 1600'an. Dorongan tersebut semata-mata hanya karena alasan bisnis (bukan ekspansi agama atau Kong Hu Chu), saat itulah masyarakat etnis Tionghoa secara massal memadati Kediri. [345]

Keberadaan etnis Tionghoa di Kota Kediri, hidup berinteraksi layaknya masyarakat pribumi yang kehidupannya bergelut dengan dunia bisnis, temasuk yang paling terkenal adalah olahan pabrik Tahu. Namun pada perkembangannya, terjadilalh suatu jaringan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Kediri tanpa memandang muatan agama yang dibawanya. Selain kepentingan bisnis, interaksi sosial keduanya berjalan seperti saudara seiman dan seagama. Mereka saling menjaga, membantu dan mengayomi satu sama lain.

Coppel (1994) menyebutkan :

> "Banyak pendatang maupun masyarakat pribumi sendiri yang menilai bahwa etnis Tionghoa sebagai komunitas kota yang paling menonjul. Bahkan keberadaan Tionghoa mampu mengaburkan mana asli pribumi dan mana yang terdiri dari etnis Tionghoa, dari saking akrab daan berbaurnya. Bukan hanya secara bisnis dan sosial, etnis Tionghoa benar-benar menyatu dengan budaya dan pola kehidupan beragama masyarakat Kediri. Sejak kedatangannya ke bumi pertiwi, hal yang menjadi tujuan mereka hanyalah berdagang, tidak ada *embel-embel*

[345] Hal ini juga tidak lepas dari kelicikan Kolonial Belanda, yang menerapkan politik dagang melibatkan etnis Tionghua, Jawa dan Batavia (yang sekarang disebut Jakarta). Politik dagang di Kediri diistimewakan oleh Kolonial Belanda, etnis Tionghua diposisikan sebagai distributor dan produsen , sehingga keberadaan mereka begitu diperhitungkan bagi kehidupan masyarakat Kediri. "Etnis Tionghoa di Indonesia: Identitas dan Sejarah Kebencian", diakses tanggal 1 September 2020, https://www.matamatapolitik.com/etnis-tionghoa-di-indonesia-identitas-dan-sejarah-kebencian-historical/

> doktrinasi keagamaan. Bahkan tidak jarang kita mendapati mereka hidup rukun berdampingan dalam urusan ibadah, satu sama lain tidak saling mengganggu."[346]

Pemilihan kota sebagai pusat interaksi sosial sekaligus markas utama etnis Tionghoa bukan tanpa alasan. Pusat kota menjadi alasan pengembangan bisnis yang paling strategis, masyarakat kota memiliki pikiran terbuka, inklusif dan beragam. Berbeda dengan masyarakat pinggiran atau pedesaan, yang secara bisnis tertatih-tatih dan tidak menutup kemungkinan sensitifitas keagamaan sangat tinggi. Hal demikian menurut asumsi mereka, tidak menguntungkan dan bahkan dapat menimbulkan ketidakamanan. [347]

> Kami telah terbiasa tinggal bersama penganut Islam mayoritas. Mereka telah lama hidup bertahun-tahun lamanya, sampai dengan kini tampak harmonis dan rukun. Tidak pernah terpercik konflik sosial keagamaan, maupun motif yang lain. Hal ini dikarenakan, sikap toleran masyarakat muslim sendiri dan orientasi bisnis. Toleransi adalah ciri khas utama muslim di Kediri, selain karena Kediri memang kota yang plural dan toleran, terbuka terhadap agama manapun selagi tidak beraliran radikal.

---

[346] Charles A. Coppel, *Tionghoa dalam Pusaran Politik.* Jakarta: Eklasa, 2003, 27-28.

[347] Terdapat filosofi kenapa etnis Tionghua sejak dulu memilih bermukim di pusat-pusat kota termasuk Bandung dan Bali, alasannya adalah 1) filosofi nenek moyang mereka yang pernah tinggal di Bantaran Sungai Kuning, menurut mereka sungai Kuning terletak di pusat kota, berkat sungai itulalh dapat mengalir keberuntungan yang membawa mereka pada kesuksesan berbisnis. Selain itu sungan Kuning merupakan lambang keemasan dengan nilai emas karat, sebagai symbol kekayaan dan penghormati pada orang lain. 2) factor eksternal, yaitu adanya kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang mengatur etnis Tionghua yang terorganisir di pusat nusantara. Chang yau Hoon, *Identitas Tionghoa: Pasca Soeharto Buda, Politik dan Media.* Jakarta: Media LP3S, 2012, 13-19.

Sementara hal demikian didukung oleh filosofi etnis Tionghoa yaitu "bekerja tanpa doktirinasi keagamaan, menghormati nusantara dan keragaman".[348]

Eksistensi etnis Tionghoa diakui dan dihormati di Indonesia. Dalam satu satu lembar sejarah mencatat, bahwa penduduk etnis Tionghoa ikut berperan dalam penyebaran Islam di nusantara. Benarkah hal demikian? Konon etnis Tionghoa di nusantara dapat perlakuan dari Kolonial Belanda, namun seiring berberapa waktu berjalan, kolonial belanda mulai menjajah etnis Tionghoa, sehingga banyak bisnis mereka yang gagal. Kemudian etnis Tionghoa bersama dengan penduduk pribumi melakukan perlawanan. Saat itulah, hubungan dengan umat Islam sangat harmonis. Keeratan inilah yang membuat etnis Tionghoa ikut menyebarkan agama Islam, sehingga tidak ayal, banyak juga etnis Tionghoa yang memeluk Islam yang dikenal dengan sebutan "muslim Tionghoa".[349]

Agama atau keyakian kepada Tuhan dan kitab suci adalah keharusan. Sebab agama berfungsi sebagai pedoman bagi manusia, agama memiliki kekuatan supranatural untuk menolong manusia, termasuk dalam bisnis. Yakin bahwa ada dzat yang maha tinggi, dipercaya sebagai penolong manusia. Kehidupan interaksi sosial tidak akan lepas dari

---

[348] *Wawancara,* Muji Armunis, Tokoh Agama Konghucu (Kediri, 21 Agustus 2020)

[349] Model penyebaran Islam oleh etnis Tionghoa tidak seperti pada umumnya orang berdakwah. Mereka mengajak masyarakat pribumi dan penjajah Belanda untuk memeluk agama Islam melalui komunikasi dalam perdagangan yang tidak massif. Namun demikian, banyak masyarakat Tionghoa yang memeluk Islam sehingga dikenal dengan sebutan muslim Tionghoa. Listyo Yuwanto, *Etnis Tionghoa (juga) Penyebar Agama Islam di Indonesia,* dalam https://www.ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/105/Etnis-Tionghoa--juga--Penyebar-gama-Islam-di-Indonesia.html

problem dan masalah, pada kondisi tertentu, tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka ditulah peran agama dapat menyelesaikan.[350]

Oleh sebab itu, filosofi beragama menurut etnis Tionghoa adalah; *pertama,* fungsi penyelamatan. Beragama berarti menyandar diri pada Tuhan, berbakti dan mengabdi.[351] Manusia memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, keterbatasan dan kerendahan, maka untuk itu manusia membutuhkan pertolongan yang bersifat vertikal, terlepas dari horizontal. Pasalnya, mereka meyakini juga kalau ada kehidupan setelah mati, maka disitulah Tuhan dapat menyelematkan mereka.

Kedua, fungsi perdamaian. Agama dipercaya oleh mereka dapat menentramkan kondisi batin melalui tuntutan agama. Manusia tidak bisa lepas dari dosa dan salah, oleh karena itu, agama berfungsi untuk menebus dosa dengan cara taubat. Sehingga, memunculan keyakinan bahwa agama memiliki tujuan menciptakan pedamaian, baik perdamaian yang muncul dari hati ataupun hasip interaksi dengan masyarakat. Maka tidak ayal, kedamaian wajib diciptakan tanpa melihat agama dan keturunan.

David Smock pernah menyampaikan:

Every true religion teaches peace, whereas everyone who is truly religious always wants to achieve a serene mood, calm and live a peaceful life. Being truly religious means wanting to be saved

[350] *Wawancara,* Hernyo Rinekso, Tokoh Agama Konghuchu (Kediri, 23 Agustus 2020)

[351] Konsep demikian juga lah yang melatar-belakangi lahirnya konsep teokrasi dalam beragama, dimana penganut agama mengisi aktifitas se hari-hari dengan berdzikir dan bertapa, teologi ini kemudian melahirkan aliran-aliran atau sampan berupa *tariqah,* yang khusus menempuh jalan kepada Tuhan. Lihat Ishomuddin, *Sosiologi Agama.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, 54.

by being part of the whole peaceful life. When religion inspires its adherents to create the opposite, dragging its adherents into social upheaval, riots or bloodshed (war), then something must be wrong in understanding the meaning of religion. This is because religion was revealed to achieve various benefits and to prevent servants from any adversity. Humans who are properly religious must achieve a belief that benefit, virtue or anything that is beneficial must be obtained and should not be ignored, while anything that is mafsadah (damaging), evil, evil or anything harmful must be avoided and must not be approached. It seems that more intelligence is needed in living together in that diversity because the religious human mind is required to be able to distinguish which parts are mashlahat (good, useful) from the opposite, namely mafsadah (damage, evil, and whatever is useless). The continuity of the substance of religious teachings depends on the achievement of general goals, such as maintaining and obeying the rules of human life collectively, gaining virtue, avoiding any damage, fighting for equality and upholding justice among humans. The continuity of religious teachings is also very dependent on the achievement of specific goals such as realizing a family, a valid marriage contract mechanism is needed and to avoid prolonged danger in a family it is enforced and allowed to take the step of divorce. So, all of it is nothing but to realize a life of peace and tranquility.[352]

[352] Maka apa yang dituturkan oleh Smock ini menggambarkan bahwa manusia yang beragama secara benar, harus mencapai suatu keyakinan bahwa kemaslahatan atau kebaikan umat serta dapat bermenfaat harud dapat dirasakan dan dimiliki. Tugas manisia yang sebenarnya adalah memakmurkan bumi, memeliharan hidup rukun dan bersama-sama. Melaksanakan amah seperti kemaslahatan bersama, penegakan keadilan, istiqamah, cerdas akal dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Setiap agama yang benar akan mengajarkan kedamaian, sedangkan setiap orang yang benar-benar beragama selalui ingin meraih suasana hati yang terntram, damai dan tenang. Beragama yang benar dalam artian dapat menjadi bagian dari hidup yang damai. Agama mengilhami penganutnya untuk bersifat baik dan damai kepada semua manusia, jika ada agama yang melarang demikian, berarti agama tersebut buatan manusia. Lihat dalam C. Salhani, *Religious Contributions to Peacemaking*. Wanghington DC: Middle East Times, 2008, 80-90.

Ketiga, agama sebagai pengendali sosial. Dalam kehidupan sosial, terdapat banyak norma yang hidup; moral, sosial dan agama. Pada posisi sebagai norma agama inilah, ajaran agama dianggap sebagai norma yang mengitari kehidupan sosial, mengawasi dan membatasi gerak liar penganutnya. Sehingga ada istilah "semua agama mengajarkan kebaikan", kebaikan yang dimaksud adalah aturan yang membatasi pikiran liar manusia yang dapat mengantarkan pada konflik.[353] Seperti yang diungkap oleh salah satu penanut Islam disana :

> Agama itu kan anugerah dari Tuhan ya untuk diterapkan pada masyarakat sosial yang nyata. Masak agama dijadikan alasan untuk berbuat konflik, seharusnya agama menuntut kodnisi sosial yang ada. Bukan malah sebalinya, agama diturunkan untuk memperbaiki manusia, bukan malah menghancurkan. Maka sosial dan agama adalah sesuatu yang penting, mengingat untuk menjalin hubungan sosial diperlukan patokan agama agar tidak salah bergaul.[354]

Agama memiliki hubungan erat dengan sosial. Melalui agama dosa-dosa norma sosial dapat disucikan dengan nilai-nilai agama yang bersifat ritualistik. Maka dalam hal ini, agama membantu mengendalikan patologi sosial sekaligus dapat mencegah sifat egoisme dan fanatisme keagamaan yang menjadi bagian dari sifat liar manusia. Oleh karena itu, hubungan sosial merupakan tujuan dan

[353] Menurut Nur Syam (2005) agama memiliki hubungan erat dengan perkembangan social. Bahkan perubahan dan perkembangan agama yang bersifat radikal dan ekslusif saat ini, dipengaruhi oleh latar social. Seperti gerakan keagamaan, yang bertupu pada subyektifitas dan filsafat fenomenologi yang digaas oleh Hussserl. Periksa lebih jelas dalam Nur Syam, *Bukan Duni Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam.* Surabaya: Eureka, 2005, 1-2.

[354] *Wawancara,* Galuh Aji, Tokoh Agama Hindu (Kediri, 25 Agustus 2020)

cara pandang etnis Tionghoa dalam berinteraksi, sehingga hubungan sosial dapat terwujud melalui pemaknaan keagamaan.

Keempat, pemupuk solidaritas. Agama memiliki ruh yang dapat menyentuh psikologis, penyentuhan ini berfungsi untuk menggaet sifat kesamaan dan toleransi, sebagai bagian dari karakter tolerantif.[355] Agama bagi etnis Tionghoa bukan hanya ritual keagamaan, namun secara *imani* membawa rasa sadar bahwa dirinya tunduk pada sang Tuhan. Ketundukan inilah inti dari agama, bukan untuk membuat manusia meronta sampai menimbulkan konfik. Melainkan mempererat hubungan sosial yang solid.

Bukan hanya pada aspek memahami agama sebagai pedoman hidup, eksistensi etnis Tionghoa juga menyisir pendidikan keragaman yakni suatu model pendidikan yang dipoles untuk mencatak generasi anti kekerasan dalam memahami agama, pendidikan penting karena di tengah pluralisme agama diperlukan ajaran deradikalisasi yang harus dipupuk. Etnis Tionghoa memiliki lembaga pendidikan bernama "Majelis Taklim", yang memiliki tiga prinsip pengajaran; *pertama,* berorientasi pada keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan. *kedua,* bersifat terbuka

[355] Penganut agama tidak semua memiliki komitmen dan kedalaman agama yang diyakini, ada yang setengah-setengah, dangkal. Hal ini dipengaruhi oleh cara memahami agama yang bersifat *taklidi,* atau mengikuti saja tanpa memahami. Sehingga mereka mudah terpengaruh pada ajran lain yang diangapnya logis. Pada posisi demikian, maka keagamaan melahirkan umat yang mudah terpengaruh. Maka disinilah peran agama pada psikologi umat, yang kadang menciptakan solidaritas social, kadang sebaliknya. Lihat dalam Hendro Puspito D. *Sosiologi Agama.* Yogyakarta: Kanisius, 2000, 56.

dan pengacu pada nilai-nilai kedamaian spiriritual dan sosial. *Ketiga,* dilakukan di tempat-tempat umum.[356]

Sementara jika dikaitkan umat Islam, eksistensi etnis Tionghoa benar-benar dijaga agar tidak terjadi penyesatan ideologi. Melalui beberapa kebijakan, pendidikan agama islam PITI Kota Kediri menerapkan beberapa kebijakan kepada etnis Tionghoa, yaitu; *pertama,* melakukan pengajaran berupa bimbingan dan pendampingan terhadap etnis Tionghoa tentang ajaran Islam; *kedua,* melakukan dialog besama organisasi keagamaan; *ketiga,* memberikan pemahaman konstruktif kepada etnis Tionghoa dan generasinya tentang Islam. Hal ini bertujuan untuk meluruskan bibit-bibit pemahaman yang keliru tentang Islam, seperti yang mutakhir menggema seperti *takfiri, jihad* dan *bid'ah.*[357]

Di pusat Kota Kediri, eksistensi umat Islam berjumlah terbanyak atau mayoritas, sedangkan sisanya penganut Kong Hu Chu atau didominasi oleh etnis Tionghoa. Sebagai

[356] Lembaga pendidikan etnis Tionghoa mengikuti pola kurikulum pendidikan nasional dan aturan regulasi otonomi daerah sesuai yang diatur oleh perundang-undangan. Keberadaan lembaga pendidikan komunitas Tionghoa. Hanya saja, yang menjadi pembeda adalah nama dan kedaerahan pada kategori kearifan lokal. Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik.* Jakarta: Trans Media Pustaka, 2008, 187.

[357] Beberapa acatatan Leo Suryadinata (1978) menggambarkan bahwa etnis Tionghoa tidak suka pada konflik agama seperti yang kerap muncul di media, bahkan mereka tidak mengenal istilah radikalisme. Oleh karena itu, setiap generasi ditekankan untuk benar-benar menjaga hubungan baik dengan masyarakat pribumi. Surdinata bahkan mensinyalir bahwa etnis Tionghoa sejak dulu kala hanya ingin berdagang dan mengikuti kultur masyarakat pribumi, ditegaskan kepada semua generasi agar bersikap baik. Lihat dalam hasil penelitian Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa.* Jakarta: Pustaka LP3ES, 1978, 218-219.

pusat perkotaan, tentu interaksi sosial keagamaan tidak begitu diperhatikan, karena tercurah pada dunia bisnis dan industri. Dominasi umat Islam dan etnis Tionghoa telah terjadi lama semenjak Indonesia masih dijajah oleh Belanda.[358] Tapi hingga kini, konflik keagamaan di pusat Kota Kediri tidak pernah terjadi. Semua penganut agama menyadari arti damai dan rukun, kendati cara interaksi sosial antara keduanya tidak sampai pada capaian keharmonisan sejati.

> Alasan kami (etnis Tionghoa) menolak penjajah Belanda termasuk melakukan transaksi perdagangan adalah 1) Belanda menginginkan bimi Indonesia untuk dijajah, hal ini tidak menguntungkan bagi etnis Tionghoa; 2) Belanda menggunakan cara-cara paksa dalam interaksi dan transaksi, sehingga banyak etnis Tionghoa yang terugikan akibat eksploitasi yang dilancarkan oleh penjajah Belanda; 3) Belanda terkenal dengan perawakan licik dan menguasai, apapun yang mulanya bersifat adil, luntur seketika akibat kerakusan Belanda.[359]

Dalam artian, karena bangunan tempat tinggal etnis Tionghoa berkelompok-kelompok satu komunitas, tidak berbaur dengan dengan umat Islam langsung, maka interaksi sosial hanya terjadi pada aspek kebutuhan bisnis.[360] Namun bukan berarti tidak ada interaksi apapun.

[358] Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*..., 220.

[359] *Wawancara,* Galuh Aji, Tokoh Agama Hindu (Kediri, 25 Agustus 2020)

[360] Di Kediri sendiri, etnis Tionghoa lebih dikenal sebagai pebisnis handal, mulai dari usaha tahu, konstruksi, alat-alat berat dan sebagainya. Mereka tidak dikenal sebagai umat beragama yang getol menyebarkan paham agamanya. Secara historis, sejak kedatangan mereka bertujuan untuk berdagang. Selebihnya, agama yang mereka anut bersifat internal. Kendati mereka dikenal sebagai penganut agama yang taat, namun agama yang mereka yakini tidak dihubungkan dengan bisnis dan social mereka. Leo Suryadinata,

Pada kesempatan tertentu, seperti perayaan hari raya *nyepi,* peringatan hari lahir Nabi Muhammad, Idul Fitri dan kegiatan keagamaan lain, mereka saling membantu. Memang tidak semua etnis Tionghoa yang membantu langsung, hanya sebagian yakni yang telah kenal. Begitu juga dengan umat Islam, sebagian kecil yang terlibat aktif saat etnis Tionghoa mempunyai hajat.

B. Manifestasi Moderasi Agama Muslim-Tionghoa

Tempat tinggal umat muslim dengan etnis Tionghoa di pusat Kota Kediri memang tidak berdempetan secara langsung. Umat muslim memiliki wilayan tersendiri yang khusus penganut Islam, begitu juga etnis Tionghoa yang memiliki markas komunitas sendiri.[361] Namun hal demikian, bukan berarti sama sekali tidak berinteraksi. Hubungan kekeluargaan, persaudaraan, saling membantu satu sama lain terjalin dengan intens. Interaksi antara keduanya terjadi pada semua aspek, mulai dari sosial, keagamaan, ekonomi dan pendidikan. Namun hebatnya, mereka mampu menjaga kerukunan dengan waktu yang

---

Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3eS Indonesia, 2002, 77-79.

[361] Etnis Tionghoa lebih suka hidup berkelompok sesame etnis, dengan tujuan menjaga soliditas internal. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ada sebagian etnis mereka yang bertetangga dengan umat muslim. Kehidupan berkelompok etnis Tionghoa bukan bertujuan untuk doktrinasi agama mereka, melainkan telah menjadi kebiasaan orang China bergaya hidup demikian. Pola tempat tinggal yang berkelompok tersebut tidak berlaku di pusat Kota yang memang antar tempat tinggal saling berdempetan. Umat muslim dengan etnis Tionghoa menjalin interaksi social yang sangat erat. Periksa dalam Khaerul Umam, "Konstruksi Nilai Inklusif Tokoh Agama dalam memandang Pluralitas Agama di Kediri"…, 45-47.

telah lama. Pola kerukunan umat Islam dengan Tionghoa termanifestasi oleh beberapa hal.

Pertama, manifestasi kerukunan sosial keagamaan. Kehidupan masyarakat beda agama tersebut terjalin aktif dalam kegiatan sosial keagamaan apapun. Bahkan mereka sama-sama dikenal sebagai masyarakat yang aktif beribadah, yang muslim memakmurkan shalat berjemaah dan kegiatan pengajian setiap subuh, dan yang etnis Tionghoa (non muslim) juga aktif beribadah sesuai keyakinan dan ajarannya. Satu sama lain tidak saling mengganggu, bahkan mereka saling mengingatkan untuk beribadah. Semisal jika adzan menggema, maka umat Tionghoa mengingatkan umat muslim untuk segera beribadah.[362]

> Kami memang sering mengingatkan. Jika adzan berkumandang, kami ingatkan agar umat Islam segera berhenti beraktifitas untuk menjalankan ibadahnya. Begitu juga kami, sering diingatkan untuk beribadah pada hari Minggu. Kalau ditanya tidak saling ganggu, itu sudah tau jawabannya. Kami saling mengingatkan, otomatis kami

---

[362] Pola social keagamaan di pusat Kota Kediri didukung oleh warganya yang ramah, penuh toleransi dan sopan. Sehingga, semua masyarakat bersikap halus untuk menciptakan suasana kota yang damai, tentram dan aman. Hal ini tidak lepas dari jangkaun historis panjang, dimana sejak masih didominasi oleh kerajaan-kerajaan, dimana kota Kediri memang berbda dengan kota-kota di Jawa Timur. Kota Kediri memiliki urban paternailstik, dimana masyarakat perkotaan masih mengikuti ucapan dan tindakan yang terlontar dari figure yang ditokohkan. Dengan model social ekagamaan yang dicipta untuk damai, masyarakat Kota Kediri mendirikan dua organisasi langsung untuk mengawal keberagamaal FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan PAUB-PK (Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan). Lihat lebih lengkap, Irawan Hadi Wiranata; Marzuki, "Kerjukunan Antarumat Beragama Sebagai Dasar *City Branding* Harmoni Kediri *The Service City*", *JIPPK,* 3(1) 2018, 64-73.

> tidak saling mengganggu. Bagi kami, menjadi umat yang taat harus saling bekerjasama untuk mengingatkan, tanpa harus melihat agamanya. [363]

Bahkan, bukan hanya sebatas saling mengingatkan untuk menjadi penganut agama yang taat, mereka juga saling bekerjasama dan bergotong royong membangun tempat peribadatan seperti masjid atau mushalla, gereja, pura dan wihara. Bangunan peribadahan di pusat Kota Kediri terlihat bermacam-macam, dari Gereja, Masjid, Pura dan sebagainya. Bangunan ibadah tersebut atas kerjasama semua penganut agamaa, bukan hanya tenaga namun juga dana. Ini tentu capaian kerukunan tingkat tinggi, terlihat bahwa pola interaksi yang terbangun bersifat *cooperation religius*.[364]

Cooperation religius dalam konsep kerukunan dalam pluralitas merupakan model tertinggi cita teologi perdamaian. Pada tingkat ini, perbedaan agama merupakan suatu hikmah sosial, sebab agama bersifat komprehensif. Ada tiga sikap pandangan tentang tingkatan toleransi; 1) pandangan yang membolehkan orang lain untuk menganut

---

[363] *Wawancara,* Slamet Sugianto, Tokoh Agama Kristen (Kediri, 25 Agustus 2020)

[364] Dalam teologi kerukunan, aspek kerjasama antar umat beragama merupakan tingkatan paling ujung pada kategori toleransi beragama, baik kerjasama social maupun berhubungan dengan keagamaan. Syahrin mengatakan dalam penelitiannya beberapa hal penting terkait denga pola kerjasama antar umat beragama; 1) kerjasama sifatnya tuntutan social, kaau tidak berpartipasi akan jadi buah bibir masyarakat, maka ikut partisipasi semata karena paksaan sosia; 2) kerjasama untuk pendidikan dan ekonomi, semisal membangun usaha bisnis bersama, melakukan transaksi akat kerjasama dan sebagainya; 3) kerjasama terkait dengan tempat peribadahan. Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan.* Jakarta: Prenada Group, 2011, 77-79.

agama berbeda; 2) pandangan yang membolehkan orang lain bebas merubah dan mengganti agamanya; 3) pandangan yang membolehkan orang lain melakukan ritual agamanya; 4) menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama karena perintah agamanya; 5) menerima kebenaran agama lain; 6) membantu dan merasa punya rasa sosial terhadap sesama tanpa memandang agama dan lainnya.[365]

Kedua, aspek sosial pendidikan. Bukan hanya tempat-tempat ibadah, sekolah dan tempat belajar masing-masing agama itu juga getol bahu membahu. Umat Islam yang memerlukan madrasah ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah, antar umat ini saling membantu ketika membangun gedung, bahkan etnis Tionghoa tidak segan-segan membantu swadaya dan mencarikan dana bila kurang. Ada lembaga Taman Pendidikan al-Quran, madrasah Diniyah yang ditempatkan di masjid-masjid. Sedangkan bagi agama lain, seperti Kristen, Katholik dan agamanya etnis Tionghoa, mengadakan ritual peribadaan pada hari munggu.[366]

> Kami semua berkeluarga, walaupun tidak seagama. Jika ada umat muslim atau etnis kami yang membutuhkan

[365] H. Nurrohman, "Model Toleransi dan Kerukunan dalam Pluralitas Kehidupan Beragama (Interaksi Sosial Keagamaan antar Umat Islam dan Kristiani di Desa Sindang Jaya Kecamatan Ciranjang, Cianjur)", *Jurnal al-Tsaqafa,* 14(1) 2017, 5-6.

[366] Bagi etnis Tionghoa, pendidikan secara garis besar dibagi dua sub; sekolah yang dibangun oleh internal komunitas sesndiri dan lembaga pendidikan Islam maupun umum. Antar lembaga pendidikan terkoneksi dengan menggunakan kurikulum nasional, metode rincinya sesuai dengan kearifan dan keadaan dari sekolah tersebut. Lihat Adeng Muchat Ghazali, *Antropolgi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama.* Bandung: Alfabeta, 2011, 22-24.

> uluran tangan atau dana, maka kami sumbangan dengan rata atau sesuai kemampuan. Bahkan bantuan yang bersifat keagamaan-pun seperti membangun masjid, Gereja, Pura dan sebagainya, maka kami tidak sungkan-sungkan untuk saling membantu. Tali erat sosial itu lebih penting daripada menganggap perbedaaan. Semua gama tentu mengajarkan kebaikann ke sesama tanpa terkecuali.[367]

Ketiga, aspek sosial. Konsep yang dibangun adalah hierarkitas, yakni hubungan sosial diarahkan atau berkiblat kepada filosofi bahwa "setiap manusia di muka bumi adalah sama, sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Esa dalam keadaan fitrah, suci dan tanpa dosa, oleh karena itu, tidak ada alasan untuk membuat ketimpangan paham baru yang kontradiktif".[368] Dari bangunan teologis ini, maka selanjutnya yang banyak berperan memang kesamaan. Dalam hal ini, aspek sosial yang dimaksud adalah setiap elemen masyarakat saling bertatap muka, sapa menyapa, kenal mengenal, tolong menolong sampai saling berinteraksi.

Ketiga aspek ini, merupakan bentuk pemahaman beragama yang didasarkan pada sikap sadar akan kerukunan dan toleransi. Maka dalam proses menciptakan

---

[367] *Wawancara,* Moh. Chotib, Tokoh Agama Islam (Kediri, 25 Agustus 2020)

[368] Masyarakat Indonesia pada era dulu, lebih mementingkan kegiatan keagamaan seperti menyembah Tuhan dan melakukan meditasi. Namun pada perkembangan selanjutnya, totalitas keapda Tuhan bergeser pada ranah yang pragmatisme. Berbeda dengan kepercayaan etnis Tionghoa, dari dulu hingga kini memang menjadikan pemujaan kepada Tuhan adalah yang utama, sebab keganderungan mereka pada bisnis hanya dapat sukses bila direstui oleh Tuhan. Walaupun sepintas terlihat pragmatis, namun peran Tuhan dalam keagamaan Tionghoa sangat besar. Agus Bustanuddin, *Agama dalam Kehidupan Manusia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 12-13.

kerukunan beragama, terdapat proses yang berlangsung; 1) proses penyadaran, dalam hal ini berupa pengajaran, pengenalan dan pendidikan tentang arti kerukunan semenjak di lingkungan keluarga, contoh sosial dan di lembaga pendidikan formal maupun non formal; 2) sikap toleransi, proses berikutnya setelah memahami dan sadar arti kerukunan, diajakran dan dicontohkan cara bersikap toleransi pada umat lain. Toleransi yang dimaksud adalah menerima kondisi berbeda dari penganut agama lain dengan penuh kesadaran, tapa mencemburui, mengritik apalagi menghujat. 3) adanya kerjasama, kerukunan buah toleransi dapat terwujud dengan baik jika terjadi kerjasama apapun bentuknya, baik dari lingkungan muslim maupun non muslim, sebab kerjasama adalah tingkatan tertinggi dari sebuah kerukunan.[369]

> Kerukunan yang dibangun semenjak nenek moyang kami berlandas pada pemahaman bahwa, "ketika berinteraksi sosial, hal-hal mistis keagamaan, profanisme keagamaan dan egoisme doktrinal disingkirkan secara total", sehingga tanpak hanya ada bangunan interaksi sosial tanpa menjadikan agama sebagai penghalang. Hal demikian terbukti dari beberapa kegiatan masyarakat Kota Kediri

[369] Oleh Reni Fidiyani, dalam hasil penelitiannya dikuatkan bahwa 1) upaya penyadaran akan keragaman tidak akan tercipta jika bertentangan dengan budaya dan kearifan lokal; 2) budaya toleransi antar umat beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya yang mengitari, karena toleransi merupakan kata lain dari *welas asih* yang dibungkus melalui pluralisme; 3) kerjasama antar umat beragama diwujudkan oleh kearifan lokal seperti kebiasaan bergotong royong, cinta damai dan tidak diskriminasi. Maka ketiga tahapan diatas, dapat terwujud bila ada budaya atau kultur yang mendukung. Rini Fidiyani, "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)", *Jurnal Dinamika Hukum,* 13(3) 2013, 480-481.

yang -seperti- melupakan perbedaan dalam interaksi sosial.[370]

Beberapa kegiatan yang dijadikan bukti adalah; 1) kegiatan arisan bersama antar tingkat RT yang diadakan sebulan sekali dan arisan tingkat RW yang diadakan setiap tanggal 20. Kegiatan arisan ini murni interaksi sosial yang mengandung pengeratan tali emosi dan menghapus sekat konflik yang kerap muncul; 2) melakukan kerja bakti terkait kebersihan lingkungan sekitar. Tanpa dikomando oleh pemerintah setempat, umat Islam dan Tionghoa menyadari bahwa lingkungan mereka tinggal adalah kekayaan alam dan kebersihan diutamakan, selain alasan kebersihan juga dapat menciptakan kondisi sosial yang erat; 3) membangun tempat ibadah, yakni baik pembangunan maupun renovasi, dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat perbedaan agama; 4) membangun tempat pendidikan, bagi etnis Tionghoa yang muslim, mereka bersekolalh di lembaga formal punya umat Islam, namun bagi yang non muslim ada lembaga pendidikan sendiri yang mengajarkan tenang toleransi; 5) kegiatan pentas seni dan budaya; 6) jalan-jalan sehat; 7) halal bi halal, kegiatan ini bagi mereka bukan hanya milik umat muslim, tapi milik bersama yang dikonstruk dari fenomena sosial.[371] Sehingga

[370] *Wawancara,* Moh. Chotib, Tokoh Agama Islam (Kediri, 25 Agustus 2020)

[371] Kegiatan dalam kehidupan beragama dibagi dua; 1) kegiaan murni social, yakni kegiatan kemasyarakatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama, baik pada sumber maupun eksistensinya; 2) kegiatan social keagamaan, yakni kegiaan social yang berhaluan keagamaaan. Kedua kegiatan ini disatukan oleh budaya yang hidup, sehingga tidak tampak bahwa kegiatan agama si A begini. Masyarakat menjadikan kegiatan social keagamaan,

dalam praktiknya, kegiatan halal bi halal merupakan ajang silaturrahmi antar semua umat beragama, untuk saling bermaafan dan makan-makan.

> Selain itu, terdapat hari raya-hari raya besar yang dianggap milik bersama, dirayakan bersama dan dinikmati bersama semua umat beragama. Ada lima hari istimewa yang dikonstruk menjadi milik bersama, yaitu: hari raya Idul Fitri, Idul Ad'ha, Natal, Paskah, Nyepi dan Waisak. Walaupun hari raya Nyepi dilakukan di dalam rumah, namun tidak menutup aral mereka tetap menghormati. Semua hari besar ini, dirayakan bersama-sama. Ketika Idul Fitri, masakan yang dibolehkan dimakan menurut agamanya masing-masing dinikmati bersama, saling silaturrahim ke rumah-rumah dan membantu menyiapkan, seperti membersihkan masjid bersama, membersihkan *pura* dan *wihana,* mengecat Gereja dan semacamnya.[372]

Gambaran pola kerukunan demikian, mengingatkan kita pada suatu teori pluralisme agama yang digagas oleh Nurcholis Madjid yang kemudian dikuatkan oleh Abdurrahman Wahid, bahwa agama pada hakikatnya bersifat komprehensif, memiliki tujuan sama dan menciptakan kerukunan kepada semua manusia, bukan hanya pengant agama tertentu. Sebab agama itu berasal dari Tuhan yang esa dan tunggal. Maka tidak mungkin menurunkan agama secara bertentangan. Maka jelas, bahwa aktivitas ritual-pun merupakan media yang berbeda dengan tujuan yang sama. Oleh karnea itulah, merasa memiliki terhadap ritual agama lain merupakan bagian dari agama.

---

sebagai kegiatan budaya. Chang Yau Hoon, *Identitas Tionghoa: Pasca Soeharto.* Jakarta: Media Group, 2012, 346.

[372] *Wawancara,* Muji Armunis, Tokoh Agama Katolik (Kediri, 28 Agustus 2020)

> Bahkan, kerjasama sosial keagamaan ini bersifat refleksitas tanpa menunggu komando dari tokoh agama maupun tokoh adat. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara suka rela, ketika komunitas Tionghoa merayakan tahun baru Imlek, maka umat Islam membantu mulai dari persiapan sampai selesai, begitu pula saat umat muslim merayakan hari raya Idul Fitri maka etnis Tionghoa juga bahu membahu mulai dari mempersiapkan tempat-tempat ibadah, bahkan bagi etnis Tionghoa yang beragama Kristen, dibantu membuat patung *Yesus Kristus* yang disalib, begitulah rasa kerukunan mereka.[373]

Akan tetapi, prinsip kerukunan dan toleran antar umat beragama tetap mengutamakan konteks keimanan pribadi, menjadi penganut agama yang taat. Dalam artian, tolong menolong dan kerja sama antar umat terlaksana di luar konteks atau kultus keagamaan internal, yaitu apabila telah waktunya umat Islam beribadah maka tolong menolong dihentikan dulu. Semisal, adzan berkumandang untuk menunaikan salat berjemaah, maka saat membantu umat lain dihentikan. Begitu juga dengan umat-umat agama lain. Hebatnya, model kerukunan di pusat Kota Kediri ini bukan hanya tolong menolong dan bekerjasama, melainkan juga saling mengingatkan agar menjadi umat yang taat pada agamanya. Sehingga, model keberagamaan mereka terbuka, inklusif dan dimiliki bersama.[374]

---

[373] *Wawancara,* Endo Kristato, Tokoh Agama Katolik (Kediri, 28 Agustus 2020)

[374] Dalam perspektif global, kerukunan dan keharmonisan bukan sebatas menjaga internal kekagamaannya dari pengaruh agama lain, melaikan membantu umat lain untuk menjadi hamba yang taat juga bagian bentuk toleransi. Menurut Nasrul Hamdani (2013), toleransi dalam kerukunan umat beragama memiliki banyak tingkatan, diantarany adalah; 1) tingkatan tidak saling menyakiti, dalam artian megnakui keberadaan agama lain tapi tidak pernah

Pemaknaan cara beragama yang ditampilkan oleh masing-masing individu ini bersifat *fleksibel* dan *teo-sentris,* yakni terkesan memisahkan agama dengan sosial, namun sebenarnya tidak demikian adanya, melainkan mereka (umat Islam dan komunitas Tionghoa) mampu menempatkan agama dan sosial pada tempat yang tepat. Kapan agama dipriotaskan, dan kapan waktunya untuk bersosial. Memang sudah semestinya, agama tidak dipertentangkan dengan sosial, atau perbedaan agama bukan malah mengempesi interaksi sosial, tidak berpengaruh sedemikian rupa.

Kami beranggapan dan telah mengkristal, bahwa tempat agama telah dipahami bersama. Ketika di luar ritual keagamaan, maka yang ditonjolkan adalah ruang lingkup sosial kemasyarakatan, yakni memisahkan hal-hal yang bersifat agama ataupun kesakralan yang melingkupinya ke dalam suatu skup yang profan. Bahkan, membawa agama pada ranah publik keberagaman adalah hal telah biasa, seperti melakukan doa bersama dalam acara *slametan,* doa yang dipanjatkan bergilir semua agama, semua umat Islam maupun Tionghoa mengamini sesuaia keyakinan masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan membawa agama

melakukan kerjasama, interaksi social seadanya, terkesan seperti kaku; 2) tingkatan berinteraksi social, namun dalam interaksi tidak menyinggung sama sekali tentang agama; 3) tingkatan eklektik agama dan social, yakni menjadikan agama sebagai bagian dari interaksi social dalam kehidupan. Lihat lebih lengkap dalam Nasrul Hamdani, *Komunitas Cina di Medan dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960.* Jakarta: LIPI Press, 2013, 41-44.

pada kerukunan, bukan seba-liknya yang kerap digunakan untuk menguatkan sifat radikal.[375]

Kebiasaan kerukunan umat begini telah dilakukan secara genetikal, turun temurun di setiap generasi, dimana interaksi sosial lebih mengedepankan sikap rasa toleransi daripada doktrin dan fanatisme.[376] Keragaman yang telah terjalin lama antar golongan, tak memandang stratifikasi sosial maupun ekonomi, mulai dari kelas bawah, menengah maupun elit. Mereka disatukan oleh tradisi yang disepakati bersama, semisal tradisi kesenian *jaranan* dan perkumpula *reog ponorogo,* dimana mereka semua melestarikan tradisi tersebut tanpa melihat darimana dan milik agama mana tradisi tersebut.

Model pemaknaan agama yang mereka aktualisasikan adalah baik umat Islam maupun Tionghoa, mereka menganggap agamanya benar (bukan paling benar),

---

[375] *Wawancara,* Hernyo Rinekso, Tokoh Agama Kristen (Kediri, 28 Agustus 2020)

[376] Kota Kediri memang terkenal dengan sikap ramah tamahnya yang sangat kuat. Budaya adab adat dan kearifan lokal sangat kentara dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, sehingga dari saking kental, perbedaan agama tidak begitu kelihatan dan dianggap tabu. Kearifan lokal lebih dominan dijadikan koreksi social oleh masyarakat, daripada hal-hal lain apalagi yang berpotensi konflik. Penelitian Ita Kurnia (2018) mengungkap bahwa 1) kearifan lokal merupakan aturan tidak tertulis yang hidup pada masyarakat Kediri, sehingga sangat dijaga dan dipupuk oleh semua kalangan tanpa melihat perbedaan agama maupun etnis; 2) kearifan lokal menjadi cara penyelesesai masalah masyarakat, baik masalah keluarga maupun social; 3) untuk menguatkan kearifan lokal, setiap bulan sekali dan setiap tahun sekali diadakan pentas kearifan lokal untuk mengeratkan kesatuan masyarakat. Lihat dalam Ita Kurnia, "Mengungkap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kediri sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa Indonesia", *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar,* 11(1) 2018, 56-57.

namun bukan berarti agama yang lain salah. Semua agama memiki nilai kebenaran dan perbedaan tidak dapat dihindari menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga, agama adalah suatu pilihan hidup.[377] Dengan pemikiran ini, maka perbedaan agama diniscayakan untuk tidak saling mengganggu atau mengusik agama lain. Maka masyarakat kedua agama ini, memiliki melestarikan kerukunan dibandingkan konflik yang dapat menciderai agama mereka. Oleh karena itu, muncullah upaya-upaya untuk menciptakan kerukunan dan harmonisasi yang tinggi, tanpa konflik kecil sekalipun yaitu:

a. Upaya saling menyadari tentang *political will,* yaitu menyadari bahwa dalam kehidupan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kesadaran untuk saling bergotong royong ketika mendirikan tempat-tempat peribadahan tanpa mempermasalahkan perbedaan agama masing-masing, mengalahkan sifat fanatisme dan egoisme agama. Komunikasi yang dibangun sama sekali tidak menyindir masalah perbedaan agama atau membenarkan agamanya masing-masing, baik pada tetangga yang berlainan agama maupun orang

[377] Pada satu sisi, sikap umat beragama di Kota Kediri berhaluan sikap keberagamaan inklusif, namun di sisi lain bersikap paralelisme. Inklusif adalah cara bersikap terbuka dan menerima keberadaan agama lain tanpa mengganggap agama lain itu salah, seangkan paralelisme suatu sikap keberagamaan yang menganggap agama lain juga merupakan wahyu Tuhan sehingga antara agama yang dianut dengan agama lain dipahami sejajar. Namun yang paling penting dari cara beragama masyarakat Kota Kediri adalah cara pandang keagamaan yang dijadikan penopang atas terjalinnya hubungan rukun semua agama, termasuk umat Muslim dan etnis Tionghoa. Reinhold Niebuhr, *The Tolerance and Intolerance in Early Judiasm and Christianty.* Cambridge-Cambridge University Press, 1998, 76,

lain. Dalam berkomunikasi, mereka tidak saling menyinggung perasaan, meskipun ajaran-ajaran mereka berbeda.[378]

b. Upaya sadar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, antar semua agama tanpa terkecuali. Dalam kehidupan sosial, mereka saling menyapa bila berpapasan, menerima apa adanya, bersilaturrahim ke semua tetangga dan saling menjaga etika, tanpa memandang agama yang dianut. Bahkan setiap umat beragama diwajibkan oleh pemerintah setempat untuk saling menghormati setiap hak dan pendapat masing-masing, baik dalam forum maupun relasi individual. Setiap elemen masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak dipilah-pilih karena perbedaan agama.[379]

---

[378] Jalinan komunikasi yang dibangun, menggunakan pendekatan persuasive, dimana semua masyarakat lebih suka berkomunikasi intens sehari-hari daripada berkomunikasi sebutuhnya saja. Hal ini tidak lepas dari budaya santun dan beradab yang telah dijunjung sejak dahulu kala, terwariskan turun temurun. Lihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Makhmudah, "Upaya Masyarakat dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama,* 4(2) 2016, 70-73.

[379] Pemerintah Desa, RT dan RW serta tokoh adat dan agama, mengharuskan semua masyarakat tanpa memandang agama dan etnis, untuk saling menghormati dan menghargai setiap hak dan penapat tanpa melihat perbedaan dan jenis kelamin. Kewajiban tersebut tertuang dalam adat mereka kemudian diformalkan menjadi Peraturan Desa yang dirancang bersama. Karena tokoh agama setempat menimbang, bahwa mengenai etika social merupakan nilai yang dapat memupuk harmoni. Khaerul Umam, "Konstruksi Nilai Inklusif Tokoh Agama dalam Memandang Pluralitas Agama di Kediri", *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama,* 9(1) 2019, 44-76.

c. Upaya untuk bersikap *equal social,* yakni cara bersikap dan bersosial antara sesama umat se agama dengan agama lainnya, diperlakukan sama. Sama-sama saling mengenal, bersilaturrahim dan berakhlak; menhormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Antar masyarakat saling mengunjungi jika ada *hajatan* atau keperluan, tidak dibolehkan meralang karena alasan berbeda agama, semua masyarakat bebas untuk menjalin hubungan sosial.

   Seperti yang diutarakan I. Svensson bahwa sikap kesamaan sosial sebenarnya telah diatur dalam konvensi internasional, seperti lahirnua *declation human right* (HAM) dan penghormatan traktat tentang status keagamaan yang harus dihormati oleh kerajaan. Svensson mengungkap bahwa:

> *Equality of rights between individuals even though different cultures, countries and religions are recognized by the international community to get legal protection from the state, get the right to life from the state, get the right to education, the right to religion, the right to prosperity, the right to marry, the right to freedom, the right to express opinions and rights another. The difference between religion and state does not then eliminate their rights, but must be fulfilled and implemented. Because religion and state guarantee the rights of every human being. In the field of law, for example, all people who are Christians, Catholics, Hindus, Budah, Islam and so on must receive the same justice. Not differentiated or one party oppressed. This equal rights stance has become a global opportunity protected by the United Nations.*[380]

---

[380] Periksa dalam I. Svensson, "Fighting with Faith: Religion and Conflict Resolution in Civil Wars." *Journal of Conflict Resolutin,* 51(6) 930949.

d. Berparitisipasi pada acara-acara sosial keagamaan, dalam artian berbuat baik dengan cara membantu dan merayakan hari-hari besar keagamaan umat Islam maupun komunitas Tionghoa. Jadi misalkan bila ada anggota masyarakat sedang merayakan hari raya atau hari besar lainnya, maka umat lain yang berbeda agama turut ikut andil, mendoakan, mengucapkan selamat dan ikut dalam perayaan tersebut.

> Hari-hari besar itu adalah pesta kami semua agama disini, tanpa terkecuali. Ketika hari raya idul fitri atau idul adha, kami semua bersama dengan orang Islam merayakan dengan bersilaturrahim ke rumah-rumah, menyembelih hewan dan berpesta. Begitu juga ketika kami merayakan hari raya waisak, maka kami mengundang semua masyarakat tanpa melihat agama. Karena agama mereka tentu tidak berbeda dengan agama kami.[381]

e. Membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Dalam artian, jika ada anggota masyarakat yang tertimpa musibah seprti kecelakaan ataupun kematian dan musibah lainnya, maka anggota masyarakat yang lain menjenguk, merawat dan menjaganya sampai sembuh. Kecuali musibah kematian, maka umat lain membantu pemakaman sesuai dengan cara-cara agama si mayyit. Mulai dari awal sampai akhir acara, ikut mendoakan dan mengucapkan bela sungkawa.
f. Bersikap dan berpikir terbuka dalam segala hal. Iklim sosial yang dibangun bernuansa kultural dan dialogis. Dalam artian, anggota masyarakat membiasakan untuk sering-sering bertukar pikiran dan berdiskusi sesama umat beragama dalam segala hal, apalagi

[381] *Wawancara,* Hernyo Rinekso, Tokoh Agama Kristen (Kediri, 28 Agustus 2020)

yang bersifat kepentingan publik. Tujuannya adalah setiap masyarakat agar sama-sama mengerti dan memahami apa yang terkandung pada masing-masing agama. Berdiskusi seputar ajaran-ajaran setiap agama, telah biasa dilakukan. Satu penganut agama dapat memahami agama yang lain, sebagai pengetahuan dan hikmah. Namun diskusi dan dialog yang terjalin, bukan mencari doktrinasi atau mempengaruhi agama lain, dan juga mengedepankan etika berbicara, yang terpenting adalah tidak menyinggung ajaran agama lain dan perasaan para penganutnya. Hal ini dilakukan secara kultural saja, seperti saat sedang beronda, kumpul-kumpul ketika ada perayaan hari besa, membajak sawah, bertani, berdagang dan sebagainya.

Dalam penelitian D. Smok (2006) terhadap agama Kristen, Islam dan Jawi ditemukan bahwa kerukunan mereka dilandasi oleh komitmen keberagamaan yang sangat kuat. Keagamaan mereka diikat oleh budaya yang juga kental. Menurut mereka, tenggang rasa kepada sesama manusia lebih penting daripada berkonflik karena dalih agamanya paling benar. Smok mengungkap :

All religions actually teach the value of kindness and peace. It's just that the shallowness of understanding religious advice often creates a narrow understanding. All religions certainly teach about helping each other, helping fellow humans or reminding if there are mistakes. This is a religious teaching, so why conflict. Which religion to follow. So the right religious character is to have an open

nature and accept teaching from other people even though they are of different religions.[382]

g. Berupaya aktif dalam kegiatan kolektif. Masyarakat di pusat Kota Kediri memiliki RT dan RW sebagai aparat desa untuk menjaga kerukunan antar warga. Kegiatan arisan antar RT dan RW yang diadakan setiap bulan, halal bi halal setiap tahun sekali, karena kegiatan tersebut bukan internal agama tertentu, maka semua anggota masyarakat tanpa melihat agama apapun, harus terlibat aktif. Ada juga kegiatan Jalan-Jalan Sehat, pawai setiap datangnya bulan Ramadan dan HUT RI setiap bulan Agustus, dirayakan dengan penuh khidmat untuk mengikat tali persaudaraan. Segala kegiatan ini mengajak semua masyarakt untuk guyup rukun dalam membangun bangsa dan kerukunan umat beragama.[383]

---

[382] Lihat dalam David Smock, *Religions Perpspektives on War: Christian Muslim and Jewish Attitudes Toward Force.* Washington DC: USIP Press, 2002, 34-35.

[383] Manifestasi strategi kerukunan umat beragama ini merupakan hasil penelitian mendalam yang melibatkan aspek psikologi, sosiologi dan keagamaan. Sikap tertinggi yang sangat dijunjung oleh masyarakat adalah *etika social keagamaan,* dimana seluruh gerak-gerik, cara berinteraksi dan beragama didasarkan pada nilai etika atau moral social. Karena menurut padnangan mereka, semua agama agama mengajarkan nilai etika, hanya mereka yang tidak beragama yang tidak diajari nilai etika. Maka posisi etika social keagamaan disini satu sisi sebagai nilai seluruh elemen sikap keberagamaan, dan disisi lain sebagai pedoman dalam bersikap. Dari etika kemudian melahirkan sikap kolektif yang memiliki sanksi social bila dilanggar. Lihat lebih detail dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti makhmudah, "Upaya Masyarakat dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri",…, 70-76.

Dari implementasi kerukunan umat beragama di pusat Kota Kediri antara umat Islam dan komunitas Tionghoa, dapat refleksikan secara tunggal, bahwa kerukunan umat beragama membutuhkan upaya kongkrit baik dari masyarakat, pemerintah desa/kota setempat. Dari aspek masyarakat, kesadaran mengenai fakta keragaman, saling menghormati dan kerjasama, memaknai agama secara mendalam dan mampu bersosial dengan baik adalah hal yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk menciptakan kerukunan.

BAB IX
IMPLIKASI MODERASI AGAMA DALAM KONTEKS SOSIAL-KEAGAMAAN MASYARAKAT MUSLIM-TIONGHOA

A. Membaca Keragaman di Indonesia: Teropong Sosiologis

Agama, secara hitung-hitungan pragmatisme sering dimaknai dengan arti terminologis, yakni ajaran yang dapat dipedomani oleh manusia, menyelematkan dari penderitaan dan mengantarkan pada kehidupan yang kekal.[384] Pemaknaan terminologis ini pada hakikatnya bersifat subyektif, tergantung bagaimana memaknai dari sudut mata mana yang digunakan. Sebagai pedoman, ajaran agama telah final pada dataran teks, semua agama

[384] Thales, seorang ahli filsafat berpendapat bahwa "*Religion is different from personal belief, religion is "something real social". Religion is an integrated system consisting of beliefs and practices related to sacred things. Belief systems and practices that conform to these beliefs. It can also: religion is a rule about how to live and live physically and mentally. Religion, among its adherents is believed to be able to bring a sense of security, serenity and peace in life; because for them religion contains the most adequate life guidelines for humans. Religion is a reference for life in its various aspects, including aspects of life together or social life. Apart from the foregoing, religion is a basic human nature. Without religion, man will lose his nature, and will not find fulfillment of his spiritual needs. This proves that religion is needed by humans. Thus, religion exists to provide peace and tranquility to the human mind*." Dengan argumen ini agama bersifat teologis, dimana seluruh system kepercayaan dan peribadatan hakikatnya diabdikan kepada Tuhan. Lihat lebih jelas dalam Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thale sampai James.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, 7-8.

memiliki kitab yang dipedomani untuk dijalankan.[385] Terkait demikian, maka posisi teks keagamaan pada konteks pemaknaannya bergantung pada *reader* atau penganut yang membaca dan menafsirkannya. Argumen tersebut disadur dari pemikiran Khaled M. Aboe El-Fadl (2004) yakni teks ketuhanan adalah teks saja, pemaknaan dan otoritas memahami tergantung pada para pembaca (*readers*).[386]

Perbedaan pemaknaan terhadap teks tersebut, pada gilirannya melahirkan beragam pandangan yang mengerucut pada keyakinan beragama. Secara tidak langsung, keragaman sebetulnya dibentuk oleh cara memaknai teks pada agama manapun. Sementara faktor lain, seperti geneologis, lingkungan sosial dan warisan leluhur adalah sisi sekunder. Bukan hanya melahirkan perbedaan agama, bahkan dalam satu agama, bila terjadi perbedaan signifikan dalam memaknai teks keagamaan, berimbas pada muncul-lahirnya aliran baru, *sempalan,* atau gerakan

---

[385] Syarat suatu agama diakui di Indonesia adalah memiliki kitab sebagai pedoman untuk beribadah kepada Tuhan dan tatacara bermuamalah dengan masyarakat. Seluruh kitab telah final dan tidak dapat diotak-atik oleh penganutnya. Lihat lebih dalam Himyari Yusuf, "Eksistensi Tuhan dan Agama dalam Perspektif Masyarakat Kontemporer", *Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam,* 27(2) 2012, 269.

[386] Semisal dalam menafsirkan ayat al-Quran surat al-Mudassir : 31 *"wa maa ya'lamu junuda robbika illa huwa…* dalam teori Hermeniutic Khaled, ayat ini mengilustrasikan kepada pembaca sekaligus membuat ragu bahw apakah pembaca tidak boleh menyelidiki tentang tentara Tuhan,. Sehingga persoalan ini menjadi serius menyangkut hubungan antara *reader, teks* dan *author.* Lihat dalam Khaled M. Aboe el Fadll, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif.* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004, 10-11.

keagamaan dalam tubuh internal agama.[387] Hal demikian membuktikan, bahwa teks berpengaruh besar terhadap ideologi seseorang.

Begitupun dengan Indonesia, memiliki keragaman agama dan budaya yang begitu kompleks disertai dengan aliran-aliran internal keagamaan di setiap agama. M. Amin Abdullah mengatakan bahwa keanekaragaman agama di Indonesia merupakan kenyataan historis yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Amin Abdullah mengatakan bahwa:

> *Religion cannot be separated from reality, religion must blend with reality. However, the confluence of religion and reality often causes tensions between religious believers and religious entities and the problems in them. The tension between religions can be caused by confusion and narrow understanding of religion. Religion needs to distinguish between normative and historical religious teachings. Normatively religion is sacred and cannot be challenged, while religion has a historical meaning meaning a contextual reality that is profane so that by understanding the two views, diversity becomes broad and intact. Since long time ago, the reality of religion in Indonesia is commonplace, because Indonesia is a kingdom. Many religions have come and developed to form communities. From a series of ideological formulations, to*

---

[387] Menurut studi Kementerian Agama tahun 2020, mengatakan bahwa munculnya gerakan agama di Indonesia satu sisi memberikan nilai positif sebagai salah indikasi kebebasan beragama dan disi lain bernilai negative karena ditengari menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Penelitian juga mengungkap bahwa factor perkembangan gerakan keagamaan dilatari oleh factor internal dan eksternal. Factor internal yang dimaksud adalah adanya perbedaan paradigm ideology yang digunakan dalam menafsirkan teks keagamaan, perbedaan memahami pokok-pokok ajaran agama dan ketidak puasan terhadap meanstream pemikiran keagamaan. Sedangkan factor eksternalnya adalah adanya pengaruh pemikiran dari luar seperti perkembangan pemikiran keagamaan social masyarakat dan kehidupan social keagamaan. Lihat dalam Litbang Kementerian Agama RI, *Studi Kemenag Soal Gerakan Keagamaan di Indonesia,* "dikses tanggal 19 September 2020".

the basis of the state, to matters that help establish independence into a state, the involvement of followers of religions cannot be denied.[388]

Sebagai keniscayaan, ragam agama tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia bersifat plural, majemukterdiri berbagai suku dan agama, karena hal demikian justri menggambarkan suatu hal yang fragmantatif. Keragaman agama juga tidak dapat dimaknai dengan sekadar *negative good,* karena dapat melahirkan fanatisme sepihak. Akan tetapi, keragaman agama harus dipahami sebagai ikatan erat di bawah komando kebhinnekaan yang berkeadaban (*genuine engagement of diversities within the bound of civility*).[389]

Keragaman agama di Indonesia, tentu tidak luput dari historis penyebaran agama ke nusantara, baik Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu maupun Konghucu sama-sama menjejekkan kakinya sejak Indonesia belum merdeka.[390] Sikap keterbukaan terhadap semua agama,

---

[388] M. Amin Abdullah, "an Analytical Perspective in the Study of Religious Diversity: Searching for a New Model of thhe Philosophy of the Study of Religions", dalam *Religious Harmony.* Germany: Chritoper Schneider, 2006, 51-53.

[389] Dalam penelitian Syamsul, ditemukan suatu konstruksi keberagamaan di Indonesia, yakni satu hal saja kunci untuk menciptakan keragaman dan keharmonisan, yaitu menyatukan nilai-nilai kebhinekaan dengan norma agama. Kebhinekaan merupakan prinsip ideology Negara yang dipayungi oleh undang-undang, dan hal ini penting karena agama dan penganutnya dilindungi secara hokum. Sedangkan norma agama, hakikatnya berhubungan dengan ketuhanan, yang bersifat larangan dan perintah. Keduanya harus bertemua untuk menentukan keragaman dalam keberagamaan yang sejati. Lihat Syamsul Arifin, "Konstruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia", *Jurnal HUMANITY,* V(1) 2009, 80-92.

[390] Data statistic tahun 2010 merilis –sebagaimana diungkap oleh Badan Pusat Statistik- terdapat 87,21% penganut agama Islam,

telah lahir jauh sebelum kemerdekaan. Sehingga, agama yang dianut dapat terus berkembang dan dipercayai oleh masyarakat secara terus menerus. Hal demikian dikuatkan oleh tokoh pluralisme agama, Nur Cholis Madjid bahwa penyebaran agama-agama di Indonesia yang menimbulkan keragaman, dipengaruhi oleh adanya kaum religius yang menyebarkan kepada masyarakat.

Menyadari keragaman ini, secara sosiologis, masyarakat diberi pilihan untuk memilih dan menjalankan ibadah yang terangkum pada makna kebebasan beragama. Meskipun berbeda agama, mereka tetap dilindungi oleh negara, memiliki hak dan kewajiban. Hak masyarakat terjamin penuh oleh undang-undang, baik global maupun nasional. Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan dalam relasi keagamaan, menghargai dan ber-sikap toleransi kepada sesama umat beragama.

Komaruddin Hidayat(2018), menyebut sikap atau tipologi cara beragama di Indonesia, penyimpulan tipologi beragama antara lain adalah:[391] *pertama,* eksklusivisme.

Kristen sebanyak 6,96%, Katolik 2,91%, Hindu sebanyak 1,69, kemudian Budha 0,72 dan terakhir Konghucu berjumlah 0,05 dan ada kategori agama lain sekitar 0,05%. Sedangkan di Kota Kediri sendiri, mayoritas penganut agama Islam dan 15% etnis Tionghoa, namun karena kehidupan mereka terjadi pada pola interaksi satu rumah, menjadi menarik sikap harmonis yang mereka peragakan. Ahmad Subakir; Ahmad Khoirul Mustamir, "Gerakan Moderasi Islam dalam Perspektif Deteksi Dini; Studi Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri", *Jurnal Tribakti,* 31(2) 2013, 187-201.

[391] Penyimpulan tipologi ini tidak bersifat final maupun tidak permanen, melainkan didasarkan kecenderungannya pada sikap yang menonjol, mengingat setiap agama memiliki cara keberagamaan yang senantiasa memiliki potensi untuk bersikap sesuai dengan kondisi daerah dan pemahamannya. Periksa dalam

Yaitu sikap keberagamaan (baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha maupun Konghucu) yang memandang bahwa ajaran agamanya-lah yang paling benar sendiri, sedangkan agama lain adalah sesat dan penganutnya dikikis.[392] Hingga kini sikap ekslusivisme masih mengecambah di Indonesia, terwariskan dari setiap generasi. Jika ada pernyataan terkait agama brelawanan, maka dianggap tidak benar.

Semisal, bagi agama Kristen letak eksklusivisme terpotret dari pandangan keagamaan bahwa Yesus adalah satu-satunya jaan yang sah untuk keselamatan manusia. *Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku* (Yohanes, 14: 6) dan banyak lagi pemahaman teks keagamaaan yang melambangkan sikap eksklusivisme.[393] Namun perlu

---

Casram, "Membangun Sikap Toelransi Beragama dalam Masyarakat Plural", *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya,* 1(2) 2016, 187-198.

[392] Sikap ekslusif dalam beragama cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup beragama. Bahkan keberadannya, berpotensi menimbulkan bibit radikalisme. Penilaian terhadap agama lain yang dianggap salah, melahirkan dua reaksi; 1) rekasi halus, yaitu mereka yang berpikir ekslusif namun diam saja; 2) reaksi keras, yaitu bersikap dan berpikir ekslusif namun disertai dengan gerakan-gerakan menghentikan ibadah umat lain, bias saja dianggap mengganggu ataupun dianggap agama kafir. Qamarudin Hidayat, *Menafsirkan Kehandak Tuhan.* Bandung: Mizan Pustaka, 2003, 89.

[393] Banyak teks keagamaan baik dalam al-Quran, Bibel, dan kitab agama lainnya yang secara pemahaman tekstual, seolah menganggap agama sendiri adalah benar. Namun sebenarnya, pemahaman parsialistik demikian tidak dapat dijadikan landasan mengingat banyak juga teks keagamaan yang mengatakan bahwa semua gama itu tidak berbeda. Dengan demikian, sikap ekslusif bergantung pada pemaknaan pembaca atau cara menangkap pemahaman yang disampaikan oleh penafsir. Budi Munawar Rahman, dikutip Alwi Shihab, *Islam Inklusif.* Jakarta: Taraju Press, 2005.

dicatat, bahwa semua teks keagamaan bersifat fleksibel, tergantung cara memahami. Begitupun dengan agama Islam, banyak penafsir dan pemaham teks al-Quran dan Hadist yang mengarah pada cara pandang ekslusivisme. Seperti *barangsiapa menerima agama selain Islam maka tidaklah akan diterima dan pada hari akhirat ia termasuk golongan yang rugi* (ali Imran, 3:85). Teks keagamaan ini kerapkali dijarikan pijakan untuk bersikap ekslusivis.

Mircea Eliade (1950) seorang ahli ilmu perbandingan agama dari Marburg menyatakan bahwa model tradisi keagamaan di Barat berpola ekslusif, mereka menganggap agamanya sendiri yang paling benar dan mutlak.[394] Namun perlu dipertegas bahwa sikap eksklusif ini sama sekali tidak tergantung pada teks, teks hanyalah bacaan yang kebenarannya tergantung pada tingkat keilmuan yang memahami. Akan tetapi, sikap ekslusif disebabkan oleh faktor minimnya pengetahuan agama dan pengaruh lingkungan sosial dalam menjalankan agama.

Kedua, inklusivisme. Cara pandang keagamaan berbalik dengan sikap ekslusivisme, yakni selain agama yang dianut juga ada agama yang memiliki kebenaran, sekalipun tidak sesesmpurna agama sendiri. Sehingga, sikap kongkrit yang muncul adalah toleransi dan hormat pada agama lain. Nurchalis Madjid memandang bahwa sikap inklusif memandang bahwa agama lain sebagai

[394] Hanya saja, penelitian Miecea (1950) mengungkapkan, bahwa sikap ekslusif orang Barat berbeda dengan orang Timur. Orang Barat bersifat ekslusi, namun pada koridor halus, dalam artian tidak melancarkan aksi anarkis kepada umat lain. Sikap ekslusif yang hanya mendiamkan dan seakan melupakan, tapi kegiatan lain seperti ekonomi, politik dan social berjalan seperti biasanya. Mircea Eliade, *The Sacred and The Profan.* New York: 1950, 76.

bentuk implisit dari inti agama yang dianut. Atau dengan kata lain, semisal, bagi umat Kristiani menganggap bahwa agama lain mengacu pada Kristus; bagi umat Islam, segala nilai kebaikan setiap agama adalah Islam dan sebagainya. Dengan arti sederhana, pemahaman inklusif berarti meng-inklud-kan penganut agama lain bagian dari ajaran agama sendiri.[395]

Sikapa inklusif menjadi bagian dari cara beragama masyarakat Indonesia, baik menerima secara penuh kebenaran agama lain mapun hanya sedikit. Umumnya, alilran inklusif ini tergambar dari muslim moderat yang toleran, Kristiani tengah dan sebagainya. Dalam praktik-nya pandangan eksklusif menitikberarkan pada hubungan sosial yang damai. Identik dengan sikap terbuka kepada semua umat dan tidak memandang remeh agama lain.

Ketiga, pluralisme. Gavin Flood (2013), menyatakan bahwa arti sederhana pluralisme adalah memandang bahwa agama-agama lain merupakan jalan yang sah untuk menggapai kebenaran yang sama. Agama lain beritual secara berbeda, namun memiliki tujuan yang sama.[396] Atau sederhananya, pemahaman dan sikap ini percaya

[395] Beberapa teolog yang menganut aliran ini adalah Karl MRehner dengan karyanya *the Theological Investigation,* Ia mengatakan bahwa penganut agama lain akan selamat sejauh mereka hidup dalam ketulusan terhadap Tuhan, karena karya Tuhanpun ada pada mereka walaupun penah mendengar kabar baik. Ibid., 89.

[396] Pluralism merupakan paham yang mengakui dan menyadari bahwa di suatu Negara atau daerah memiliki banyak agama yang dianut. Kesadaran ini kemudian diamalkan dengan benar tanpa merugikan agama lain. Karena suatu keniscayaan, maka penganut sikap pluralism bukan hanya mengakui, melainkan juga menjaga penganut agama dengan penjagaan yang konstituonal, tersistem dan terkonsep. Seperti lahirnya FKUB, KUB dan sebagainya yang bertugas mengawal pluralism agama. Gavin Flood, *Beyond*

bahwa setiap agama memiliki jalan sendiri-sendiri menuju keselamatan. Sehingga menepis anggapan sebagian umat mengganggap satu-satu-nya agama paling benar (eksklusif) atau kebenaran dengan jalan lain (inklusif). Aliran ini memandang bahwa antar semua agama sejajar (*paralel*).

Secara langsung Frithjof Schoun mengatakan:

> *Pluralism has the accompanying attributes; First, major the truth is plural, as opposed to dualism which expresses that there are two central real factors and monism expresses that there is just a single key reality. Second; The numerous levels of things in discrete universes are unchangeable and are themselves free. Third; The universe is generally vague in structure and has no essential solidarity or agreeable progression, no key sound and levelheaded request. Strict pluralism is an idea that has a wide significance, connecting with the acknowledgment of various religions and being utilized in various ways.*[397]

Sikap pluralisme lebih banyak dimiliki masyarakat Indonesia, dibandingkan eksklusif dan inklusif. Pasalnya, pluralisme identik dengan pengakuan terhadap eksistensi agama lain sebagai agama dari Tuhan. Sikap pluralisme menitikberatkan pada toleransi tingkat tinggi, yakni adanya kerjasama sosial dengan umat agama lain, saling membantu dan menolong merupakan ciri pemehaman pluralis. Adagium yang kerap dimunculkan adalah semua

---

Phenomenology: Rethingking The Study of Religion. London: Blomsbury Academic, 2013, 45.

[397] Dengan pemahaman ini, mengilustrasikan bahwa pluralism satu sisi merupakan realitas social yang terbentuk berdasar ilmu keagamaan dan masyarakat, sedangkan di sisi lain, pluralism merupakan sifat alam yang menghendaki adanya perbedaan agama secara majemuk, atau bisa juga dikatakan sebagaai *sunnatullah.* Lihat dalam Frithjof Schuon, *The Preneal of Philosophi Muslim.* Bandung: Mizan, 1993, 777-778.

agama sama, sama-sama mengandung kebaikan dan kebenaran dan berasal dari Tuhan.[398]

Keempat, eklektisisme. Suatu sikap beragama yang berupaya mempertemukan berbagai aspek ajaran agama karena memandang ajaran agama yang dipeluknya kurang begitu yakin. Sikap keberagam-aan semacam ini lahir akibat ketidakpahaman secara mendalam pada agama sendiri dan melihat ajaran agama lain. Kelompok ini biasanya memandang sinis pada para tokoh agamanya yang dianggap tidak memenuhi janji dan mementingkan agamanya sendiri, padahal di sisi lain agamanya tidak mampu menyelesaikan persolaan hidup masyarakat.

Sebagaimana diutarakan oleh V.N.D Dean bahwa sebagian pemeluk agama masih setengah-tengah dalam memahami agamanya. Dalam artian, mereka memahami

---

[398] Menurut Abdullah Saeed upaya menggabungkan berbagai agama bertujuan untuk menguji relevansi agama dengan realitas dan futuritas. Karena agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terkadang tidak realistic. Abdullah merumuskan bahwa "*Eclecticism is an attitude to sort out what is approved and what is not approved so that it can be in harmony with all religious values. This is done in order to get useful and acceptable values. From there an integrated system was created. Religious observers with this attitude limit their thinking efforts by examining the intellectual work of others, making compilation of truths without serious effort in religion. Eclecticism leads to syncretism, and in combining existing ideas, it does not see the context and validity of the idea. Historians view this kind of effort as the best way to use all the valuable theories and this is applied in many areas of life. This understanding has developed a lot in the global mainland, including the most enthusiastic countries with Muslim populations. For them, studying other religions is to bring together harmony and understanding about religions, because religion has indeed been born since before Islam came, but the arrival of Islam is to perfect it according to the context of the people. As for the orientalist, studying all religions to embody one of the religions he hates*." Lihat Abdullah Saeed; Hassan Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy an Islam.* Ashgate, 2006, 3.

agama tidak sempurna atau kaffah. Corak pemahaman agama seperti ini, umumnya mudah terpengaruh oleh doktrin agama lain, bahkan yang bertentangan-pun bisa merasupi dengan total. Dalam Mustafa Kamal Pasha, Dean mengatakan :

> *Religion is sometimes integrated as part of social, but also political. A person's religious understanding is strongly influenced by the program of understanding religious texts, but for those who do not understand religious texts, they tend to follow the opinions and ways of religion of people who are considered to understand religion. In the first category, this type of person is said to be a religious figure who has more knowledge. Meanwhile, the second type of religious adherents are ordinary people who follow the opinion of religious leaders or are said to be imitators. This cannot be denied, because human reason is created with different levels of intelligence and learning enthusiasm. There are many influences surrounding it. So the most tolerant attitude is to understand the level of understanding of human religion in a balanced proportion.*[399]

Kelompok ini sering kita temui di era global saat ini, biasanya mecari ajaran dari berbagai agama untuk disatukan pada satu wadah yang akhirnya nanti menciptakan suatu agama baru yang berbeda dengan agama sebelumnya (seperti agama lokal).[400] Sehingga

---

[399] Musthafa Kamal Pasha, *Akidah Islam.* Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, 4-5.

[400] Agama lokal yang dimaksud disini bukan agama baru selaina gama resmi Negara Indonesia. Dalam penelitian Kiki Muhammad Hakiki dijelaskan bahwa pemeluk agama di dunia meyakini bahwa fungsi utama agama atau kepercayaan adalah untuk menuntun kehidupan manusia agar mendapat keselamatan di duni dan setelah kematian. Karena tujuan agama juga merambat pada sisi kehidupan setelah mati atau futuristic, maka lahirlah agama kebatinan sebagai perkembangan dari agama yang dianutnya. Agama kebatinan ini disebut juga dengan agama lokal, karena tumbuh dan berkembang di daerah-daerah tertentu. Lahirnya agama lokal disebbakan oleh

kelompok ini lemah dalam memahami agamanya sendiri dan menganggap agama tidak jauh berbeda dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Agama juga dipandang benar dan salahnya, dari sudut pandang ilmu pengetahuan semata.

Kelima, universalisme. Secara umum, sikap keberagamaan ini memandang bahwa semua agama asalah sama dan satu kesatuan. Namun karena faktor sejaran dan antropologis, lalu agama muncul dengan wajah dan eksistensi yang berbeda, sehingga dikatakan plural. Cara pandang demikian, seringkali sampai pada pemahaman liberal dengan menjadikan agama lain sebagai acuan dalam

---

beberapa hal; 1) identitas agama lokal yang kerap menampilkan ajaran-ajaran bahkan perilaku penganutnya yang unk dan kovensional. 2) identitas lokal dipercaya menjadi bagian penunjang dan representative dari spiritual agama yang dipeluknya. Menurut David Barret dan Todd Johnson, penganut agama lokal bukan hanya di Negara mayoritas muslim yang memiliki agama lokal, seluruh dunia memiliki agama lokal dari berbagai agama. Barret mengatakan "*Adherents of local religions in the world in the 2003 report alone amounted to 237,386,000 people.4 This number in 2018 was estimated to be only 3.78% of the world's total population, which now amounts to nearly 6.3 billion people. Compared to conditions in Indonesia, the adherents of local religions are only about 1% of the total population of Indonesia. Most of them live in Papua, Sumba, the interior of Sumatra, the interior of Kalimantan and the interior of Sulawesi, and some areas of the island of Java. This figure can be in the form of observing religious behavior in Indonesian society, the quantity of adherents of local religions will far exceed the statistical data above. In fact, these local religious beliefs and practices are still adhered to and believed and practiced by those who are even statistically registered as adherents of the world's official religions. Actors of official religions sometimes also simultaneously believe in local beliefs without realizing it or practicing syncretism of religions. And this happens not only for adherents of Islam, but also for adherents of non-Islamic religions in Indonesia.*" Lihat dalam David Barret; Todd Johnson, "Annual Statistical Table on Global Mission: 2003 dalam *International Bulletin of Missionary Research.* 27 (1), 2003, 25.

menafsirkan suatu teks agamanya sendiri. Di Indonesia, sikap keberagamaan ini diadopsi oleh kaum-kaum liberal dan rasional, yang sering menganggap bahwa agama adalah rahmat untuk semua alam.[401]

Demikian sikap keberagamaan atas fenomena keragaman pada masyarakat Indonesia. Namun sikap tersebut bersifat hipotesis yang dikuatkan oleh argumentasi logis. Sebab untuk menilai sikap penganut agama tidak dapat dibulatkan, pasalnya sifat seseorang bercorak parsialistik yang dibatasi oleh keilmuan, pilihan dan mantab tidaknya komitmen keimanan yang dimiliki. Ada juga sikap yang fleksibel, berubah-ubah dipengaruhi oleh lingkungan dan keilmuan. Namun pada intinya, keragaman agama harus disikapi dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus menghambat kelompok agama lain.

[401] Lima tipe sikap reaksi atas keragaman ini, dimbil dari beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia yang melahirkan tiga bahkan lebih sikaf keagamaan, diantaranya adalah; 1) aliran radikal, suatu gerakan keagamaan yang tekstual dan bertujuan membasmi penganut lain yang dianggap salah bahkan sekalipun terjadi pada satu tubuh internal agamanya sendiri; 2) moderat, yaitu pemahaman yang tidak keras dan juga tidak terlalu lembut, selalu mengabil jalan tengah dalam setiap permasalahan, ideology dan aliran tauhid, fiqh dan sebagainya. Pemahaman ini yang mendominasi cara berpikir masyakat Indoensia; 3) aliran halus, yakni pemahaman yang paling bebas memahami agama sesuai akal dan pikirannya tanpa ada kekerasan sedikitpun. Tiga tipe ini disampaikan oleh Mar C. Taylor, *Critical Term of Religious Study. iChicago: Chicaho University Press, 2010*, 45-47. Bias juga diperiksa dalam Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", 191-196.

B. Telaah Praktik Moderasi Agama: *Sosiological Religious* Kota Kediri

Sifat keragaman agama di Indonesia, ditopang oleh eksistensi multikultural budaya, etnis, bahasa dan suku dalam satu wadah NKRI menjadikan Indonesia harus *getol* membuat kebijakan dan terobosan brilian guna mencegah konflik sosial keagamaan.[402] Hal ini perlu digagas mengingat pola keberagamaan di Indonesia, kerapkali menimbulkan konflik berkepanjangan, berlarut-larut. Karakter, budaya, etnis, suku pada perkembagannya mempengaruhi terhadap cara beragama dalam keragaman. Oleh karena itu, sebagai negara hukum dan meniscayakan perbedaan agama, perlu diperas nilai-nilai kerukunan sebagai standart bersama dalam berinteraksi.

Pada tahun 2006, setelah lahirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah mengeluarkan trilogi kerukunan lewat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 Nomor 8 tahun 2006, yang berbunyi; 1) kerukunan pada internal umat beragama; 2) kerukunan antar umat beragama; 3) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.[403]

---

[402] Indonesia telah banyak mengeluarkan perlindungan terhadap penganut agama di Indonesia berupa perlindungan hokum yaitu; 1) UUD 1945 Pasal 28 dan 29; 2) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3) UU Nomor 10 tahun 2004. Serta banyak aturan yang bersifat kewilayahan diterbitkan oleh daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi daerahnya sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Lihat lebih ulas dalam Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum (Studi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Dilihat dari Segi Hukum islam).* Bogor: Kencana, 2003, 128-132.

[403] Perumusan trilogi kerukunan umat beragama didasarkan pada landasan-landasan hukum penting negara, yaitu: 1) Pancasila, sila pertama yang berbunyi "ketuhanan yang maha esa" merupakan dasar falsafay terukur atas munculnya prilekau kerukunan umat

Trilogi ini pada satu sisi merupakan target yang harus dicapai dalam upaya kerukunan umat beragama, di sisi lain, sebagai nilai fundamental dari setiap gerakan kerukunan umat.

Dalam kajian terminologis, istilah trilogi kerukunan disebut juga *trikerukunan,* yang berarti tiga ikatan kerukunan.[404] Dicetuskannya prinsip trilogi ini tak lepas dari beberapa hal penting; 1) kemajemukan negara Indonesia dari segi budaya, suku, etnis dan agama. Keragaman

---

beragama. Dengan ini pula, Indonesia tidak mengenal istilah "negara agama" atau "agama negara" secara nilai dan prinsip Pancasila telah menempatkan tempat yang sama antar semua agama; 2) UUD 1945, Pasal 28E ayat (1) berbunyi "setia orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya", disusul pada ayat (2) "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pendapat dan sikap sesuai hati nuraninya". Dengan landasan ini, maka kebebesan beragama sebagai landasan kerukunan, memiliki perlindungan dalam undang-undang tertinggi; 3) kemudian, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 22 mengatakan "setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing". Dari tiga landasan ini, di masyarakat beragama masih muncul konflik agama dengan latar dan motif yang sama, kerukunan tak kunjung tiba dengan waktu yang lama. Akhirnya, dibuatlah standar niali yang dimaksud dengan kerukunan, yaitu trilogi kerukunan. Yonatan Alex Arifianto; Joseph Christ Santo, "Angelion: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen", 1(1) 2020, 1-14.

[404] Sebelum diundangkan, penggodokan trilogi kerukunan umat beragama mengalami penamaan-penamaan yang berbeda, mulai dari *trikerukunan, trilogi keragaman, trikeragaman* dan semancamnya, pada akhirnya diputuskan *trilogi kerukunan,* pelekatan arti kata *logos* atau *logi* dimaknai dengan "ilmu pengetahuan" atau "penggalian" atau juga "pencarian kebenaran" maka jika dimaknai secara harfiyah adalah "ilmu yang menjadi pedoman dan standar nilai kerukunan umat beragama", sebagai ilmu maka membutuhkan konsep, disinilah letak perlunya fenomena sosial yang melambangkan trilogi kerukunan. Jaja Sudarno, "Tri Kerukunan Umat Bergama", diakses tanggal 7 September 2020. https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42737-tri-kerukunan-umat-beragama

ini saling berkaitan, sehingga memerlukan konsep trilogi sekaligus. 2) adanya pihak-pihak disparatis yang menginginkan Indonesia runtuh dengan memakar konflik agama. Sehingga wajar jika ada konflik kecil tapi kerap diatasnamakan dengan agama. 3) asumsi jangka panjang, kerukunan umat beragama tentu diharap terus berlangung sebagai negara, oleh karena itu memerlukan ukuran dan konsep yang mapan, maka trilogi inilah memiliki jangkauan konsep ke depan.[405]

Jauh sebelum trilogi kerukunan ini tersusun, pemerintah telah melakukan banyak hal. Menyadari resistensi konflik antar agama sangat besar, berbagai kebijakan diterbitkan untuk menemukan jamu manjur menciptakan kerukunan dan harmonisasi. Sejauh penelusuran yang didapat, pada cita skala besar, rambu peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah untuk meminimalisir konflik kepentingan antar umat beagama, didasarkan pada empat problem keragaman, yaitu: 1) Mengenai pendirian tempat ibadah; 2) Mengenai dakwah agama; 3) Mengeni bantuan keagamaan dari luar negeri, dan; 4) tenaga asing bidang keagamaan.[406]

---

[405] Aturan memang tidak bisa lepas dari fenomena sosial, bahkan keberadaan aturan-pun merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh kerena itu, konsep kerukunan yang telah dicari sejak masa sebelum kemerdekaan, perlu disejajarkan antara kebutuhan sosial dan fakta sejarah. Agama, budaya dan kerukunan adalah tiga hal yang kerap bunting ketika tidak dikonsep sedemikian rupa untuk menciptakan harmoni. Maka untuk itu, pertautan antara ketiganya harus berpedoman pada satu titik yang dinamakan dengan “trilogi kerukunan”. Lihat lebih lengkap dalam Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya dan Tradisi Sosial.* Jakarta: Prenadamedia, 2018, 120-129.

[406] Johan Effendi, *Merayakan Kebebasan Beragama.* Jakarta: Indonesian Conference on Region and Peace, 2009, 19-20.

Keempat problem inilah yang kerap menjadi ujung pangkal konflik agama.

Trilogi kerukunan ini, sejak ditetapkan, menjadi pedoman bagi penegak kerukunan umat beragama di Indonesia, mulai dari FKUB, LSM maupun penegak hukum. Pasalnya, konsep nilai ini dirumuskan dengan mengambil ruh seluruh atuan dan fenomena di masyarakat tentang konsep ideal kerukunan yang cocok diterapkan pada masyarakat Indonesia. Nilai keragaman ini juga dibuat dengan teliti dan mempertimbangkan hak-hak manusia dalam menjalanan kewajiban bernegara dari ajaran agamanya.

Penyusunan trilogi kerukunan ini dilandasi oleh beberapa hal; 1) norma-norma agama yang hidup di masyarakat, norma agama merupakan manifestasi nilai keberagamaan yang tercipta (*living religions*); 2) norma sosial, secara sosial masyarakat Indonesia memiliki karakter dan sistem yang telah terbentuk dari budaya dan kebiasaan ritual nenek moyang; 3) hak-hak dasar manusia, sebagaimana diamahi oleh undang-undang tentang HAM. [407]

[407] Secara global, semua negara memiliki cara tersendiri untuk menyusun perundang-undangannya, namun terlepas dari hal itu, terdapat patokan general yang dijadikan kiblat dari penyusunan aturan. Selain norma-norma sosial, agama, moral, terdapat ruh umum yang dijadikan patokan dalam menyusun aturan. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena seluruh norma, sosial sampai pada kehidupan masyarakat, bersifat dinamis, berubah-rubah tergantung pada kondisi. Sifat berubah-ubah ini tidak baik bagi undang-undang yang harus mengalami perubah secara berkala. Oleh karena itu, menurut S.J. Fockeme Anfreae, ada beberapa prinsip general yaitu pertama, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua,

Secara timbal balik, trilogi kerukunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah mencakup *trilogical multicultural*, yakni; 1) konsepsi keberagamaan yang saling terhubung. Dalam keberagamaan, terdiri dari penganut agama yang bermacam-macam, maka hal yang perlu dirukunkan terlebih dahulu adalah menjaga stabilitas internal agama masing-masing. Sebagaimanan pernah diungkap oleh Michael Banton (1983):

> *Understanding religious teachings and correcting religious communities internally is an integral part of multicultural education. One of the roles of religion in a pluralistic society is as a social glue. A theory put forward by Emile Durkheim in his book The Elementary Forms of Religious Life. With the element of solidarity, religion has a social function. Religion is not an illusion, but rather an identifiable social fact that has social importance. Therefore, religion does not actually contain belief in spirits or gods, but rather a separation between the sacred and the profane.*[408]

Penganut agama Islam, menjaga internal penganut Islam; penganut agama Kristen, menjaga keharmonisan penganut agama Kriten; umat Konghucu juga demikian, menjaga ideologi dan kerukunan internal sendiri dan seterusnya. 2) konsepsi saling hierarkis antar elemen. Setalah menguasai

---

segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

[408] Dengan landasan berpikir seperti ini, maka menjaga internal agama untuk menjaga pemeluk agama dari paham-paham luar yang keluar dari ajaran teks keagamaan sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan beragama. Oleh karena itu, menjaga keragaman agama dari tingkat internal adalah bagian dari *hufdz ad-din* dalam ilmu *maqasid syariah* agama Islam. Mengapa demikian, karena beberapa hal; 1) agama mengajarkan nilai-nilai yang benar dan baik bagi umatnya. 2) agama mengajarkan cara untuk memperoleh tempat yang layak di akhirat. 3) agama berfokus pada cinta. Lihat lebih jelas dalam Michael Banton, *Racial and Ethnic Competition.* New York: Cambridge Universitas Press, 1983, 109-110.

internal agama masing-masing, beralih ke kerukunan eksternal masing-masing agama. Hal ini dapat terjalin, jika kedua penganut agama –yang umumnya- saling paham. 3) konsepsi melalui intervensi pemerintah. Untuk menjaga kerukunan antar umat, baik secara internal agama maupun eksternal, perlu campur tangan pemerintah.[409]

Ketiga konsepsi tersebut, adalah nilai yang perlu diwujudkan melalui faktar kerukunan umat beragama yang nyata, tanpa itu, trilogi kerukunan hanya menjadi nilai konseptual. Pada dataran fenomena sosial keagamaan, nilai konseptual berwujud lain namun tetap satu tujuan. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana nilai konsepsi tersebut dimanifestasikan dalam kehidupan nyata. Dibawah ini akan dianalisis fakta kerukunan umat beragama antara umat muslim dengan etnis Tionghoa di pusat Kota Kediri dalam kajian trilogi kerukunan.

1. Moderasi intern umat beragama

Konflik dalam tubuh internal agama tertentu, tidak asing atas fenomena keragaman agama di Indonesia, terutama umat Islam sebagai agama mayoritas. Konflik inter-religius antara Sunni-Syiah di Sampang Madura pada tanggal 26 Agustus 2012 cukup menjadi tamparan keras bagi kelangsungan intern umat Islam di Nusantara.[410] Belum lagi agama Islam, Kristen,

[409] *Wawancara,* Slamet Sugianto, Tokoh Agama Kristen (Kediri, 25 Agustus 2020)

[410] Tahun 2011-2012 merupakan konflik intern umat muslim yang begitu parah terjadi di Sampang, antara ideologi Syiah dengan Sunni, menurut para peneliti beranggapan bahwa konflik tersebut dilatari oleh faktor teologis semata, itu artinya tedapat pola sistem ideologi keagamaan yang berbeda. Menurut Masdar Hilmy, konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura ini bukan hanya faktor teologis semata,

Budha dan Hindu yang terpecah menjadi banyak *sempalan* karena perbedaan ideologi, berpotensi menyulut konflik yang besar.[411] Pasalnya, konflik yang paling ditakuti adalah konflik antar intern agama, karena dapat berimbas pada semua penganut lain dan terpecah-pecah.

Fakta berbicara, bahwa konflik intern agama di Indonesia terpotret dari dua aspek; a) disparitas mazhab, yaitu perbedaan dalam memahami komponen beragama, semisal teologis (*tauhid*), ritual peribadatan (*syariah*) dan sebagainya. Sehingga melahirkan banyak mazhab dalam satu tubuh intern agama; b) disparitas sosial keagamaan, yaitu *sempalan* keagamaan yang terkooptasi dalam suatu gerakan sosial keagamaan, seprti NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah, LDII dalam agama Islam. Walaupun satu aqidah pada tubuh intern agama, namun pendekatan yang digunakan untuk memahami teks agamanya, cara penafsiran

---

tapi yang terpenting adalah unsur politis dan ekonomi, sedangan teologi hanya digunakan alat untuk menguatkan asumsi. Lebih jelas lihat Masdar Hilmy, "*The Political Economy of Sunni-Shi'ah Conflict in Sampang Madura*", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies,* 53(1) 2015, 27-51.

[411] Aliran-aliran minoritas yang tumbuh di tengah kelompok Sunni saja di Indonesia, menurut data mutakhir yang terpotret sebagai aliran sesat lebih dari 250 aliran dan 50 diantranya berkembang di Jawa. Ini masih dari pecahan Sunni, belum Syiah dan yang lainnya. Gerakan sosial keagamaan level nasional mencapai angka fantastis, yang dapat diteropong seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al0Ittihadiyah. Semua gerakan sosial keagamaan, sempalan dan aliran di Indonesia tidak dapat dihitung dengan data statistik. Lihat Ramli Abdul Wahid, "Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies,* 1 (2) 2017, 141-144.

yang berbeda, perspektif yang digunakan beragam, dapat menimbulkan gerakan keagamaan yang berbeda pula.[412] Maka tidak ayal, perbedaan ini berpotensi menuai konflik keagamaan dan mengancam kerukunan umat beragama.

Maka posisi trilogi kerukunan pertama, adalah menyelesaikan fakta atau fenomena keragaman pada intern masing-masing agama dengan cara merukunkan semua mazhab, semua *sempalan* gerakan sosial keagamaan dan menciptakan keharmonisan seperti halnya mengurai dan mendamaikan Sunni-Syiah di Sampang Madura.

Pengaruh ekonomi terhadap ketaatan beragama sangat besar, bahkan beberapa konflik agama berlatar ekonomi tercatat masif. Sebagaimana diungkap oleh Rachel McClearly (2011) bahwa :

> *The study of human economic behavior is worship of God. Economic wealth is a means of fulfilling one's life and satisfaction in order to increase its ability to serve God better. Seeking and drawing wealth or a better income to enjoy it is not cursed by God as long as it is recognized as a gift and a mandate from God. As for what is cursed, if that wealth is made into the main worship in his life. Faith and piety to God give a character to the economic world in all its aspects.*

[412] Perbedaan pemahaman keagamaan memang telah terjadi semenjak masa para sahabat, ketika rasulullah wafat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal; 1) cara menafsirkan teks keagamaan yang didasarkan pada pemakaian pendekatan serta metodologi yang digunakan; 2) guru atau sanad keilmuan yang mendasari cara memahami teks dan ajaran agama; 3) pengaruh politik keagamaan, yang menempatkan agama sebagai bagian tertinggi untuk manjadi penguasa negara; 4) pengaruh pemahaman dari luar. Zakaria Syafei,"Tracing Maqasid al-Shari'ahin the Fatwas of Indonesian Council of Ulama", *orunal of Indonesian Islam,* 11(2) 2017, 78-82.

This style presents the direction and model of development that unites economic development with religious development as a source of value (central / core value). Thus, economic activities such as production, distribution and consumption must use religious value considerations and not by other economic mechanistic determinisms such as capitalism and marxism.[413]

Untuk itu diperlukan strategi afektif agar semua aliran atau *sempalan* dapat menjalin hubungan sosial tanpa percikan konflik, model fenomenologis yang dapat menggambarkan kerukunan sesuai nilai trilogi kerukunan yang pertama. Untuk itu, model kerukunan yang tercipta di pusat Kota Kediri antara umat muslim-Tionghoa layak dijadikan gambaran rekomendatif.

Model trilogi kerukunan pada point pertama, digambarkan oleh muslim dan etnis Tionghoa di Kediri menghadirkan model kerukunan intern umat beragama yang menarik. Mereka memiliki langkah-langkah brilian untuk menciptakan kerukunan pada intern agamanya masing-masing yang dikonstruk oleh kesepakatan sosial. Penggambaran model ini,

[413] Beberapa motif beragama memang didominasi oleh sisi normative dan pragmatis. Secara normative, beragama bertujuan untuk mendapatkan tempat yang layak di kehidupan setalah mati dan murni karena agama dapat menuntut pada jalan kehidupan yang damai dan rukun. Secara pragmmatis, tujuan beragama hanya untuk mendapat dukungan politik, kelandaran berbisnis ataupun untuk mendapatkan suatu kehormatan. Motif seperti dilandasi oleh ekonomi sebagai bagian dari pragmatism beragama. Oleh sebab itu, ekonomi bisa juga berperan sebagai penguat beragama seprti membantu masyarakat dan Negara. Lebih jelas hubungan ekonomi dengan agama dapat dilihat dalam artikel yang ditulis oleh Rachel McClearly, "Religion and Economy", *Journal of Economic Perspective,* 20(2) 2011, 49-72.

merupakan langkah paling dominan dan menentukan bagi tergapainya kerukunan intern umat beragama. Baik umat muslim maupun etnis Tionghoa, sama-sama mentaati cara menyatukan intern agamanya masing-masing. Upaya tersebut adalah:

Pertama, membentuk komunitas para tokoh agama. Legitimasi elit agama dalam teori Strukturasi Anttony Giddent diistilahkan dengan "agen struktural" yang memiliki kekuasaan penuh dalam memegang kendali perkembangan keagamaan.[414] Agama Islam maupun etnis Tionghoa memiliki figur yang bisa ditokohkan, dianggap paling berkarisma dan berpengaruh. Dalam realitanya, perkumpulan para tokoh agama dihadiri oleh setidaknya lima sampai enam orang, kemudian juga dihadiri oleh ketua RT dan RW setempat. Peran mereka adalah menjaga dan memastikan tidak ada jarum dalam tubuh intern agama dan menyelesaikan konflik jika terdapat problem.

Tokoh agama mengadakan pertemuan jika terdapat hal yang perlu dimusyawarahkan terkait dengan perkembangan agama. Tidak ada jadwal pertemuan rutin, melainkan

[414] Menurut Giddens, peran tokoh agama ada tiga hal sebagai edukasi, pencerahan dan membangun sistem, *Religious leaders have an important role as agents of social change or development. There are three important roles that can be played by religious leaders, namely; first, the role of education that covers all dimensions of humanity and builds the character of the nation. Second, the role of giving enlightenment to society in times of uncertain situation. And third, the role of building a system, a tradition, a culture that reflects glory. Therefore, religious leaders are required to continue to explore and re-establish the ethics of a religious and dignified life in the midst of the challenges of global life*. Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Strukturation,* terj. Maufur dan Daryanto, *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 31.

kondisional. Mereka menjadi penyambung lidah bagi aspirasi masyarakatnya, selain itu juga bertanggungjawab terhadap kebergamaan setiap agama. keberadaan tokoh agama sangat sentral, karena berada pada garda depan kerukunan. Seperti layaknya wilayah kekuasaan, peran tokoh agama sebagai penjaga kerukunan pada ruang intern agama masing-masing. Dalam teori sosiologi, elit agama memiliki fungsi *legitimed* sebagai peran ganda; kontrol dan regulator.[415]

Kemelut ideologi pada intra agama kerap muncul, oleh sebab itu setiap tokoh agama membantuk perkumpulan yang memiliki ketua dan peserta untuk menanggulangi persoalan kemelut ideologi. Disinilah peran tokoh agama dan anggotanya terlihat mengesankan, bagaimana tidak, setiap kali terbesit bibit pemikiran agama yang berpotensi memecah integrasi, sebegitu juga persoalan diselesaikan dengan musyawarah dan pembinaan. Tokoh agama benar-benar mengontrol setiap ada gejala fenomena terkait agama. Pada posisi ini, elite agama di Kota Kediri diistilah sebagai *resolver* yang mengontrol perkembangan sosial.[416] Tidak jarang bagi umat Islam maupun

[415] *Wawancara,* Slamet Sugianto, Tokoh Agama Kristen (Kediri, 25 Agustus 2020)

[416] Sebagaimana yang diebutkan oleh Peter, bahwa pemuka agama mengontrol jalannya perkembangan social. "*The role of religious leaders by applying norms in accordance with the position of religious figures is like when other religious holidays are held in the village, according to the community, a religious figure is tasked with giving permission or space for people to interact with each other and for religions that celebrate holidays. can use the time and space needed. By giving permission and providing space for people to interact with each other, it provides a norm of rules that are carried out by the community because those who make the rules are people who have an important position or position in society. Role as a concept of what individuals do in society as an organization The nature of*

etnis Tionghoa, masing-masing mengadakan kajian keagamaan, dengan tujuan menambah wawasan pengetahuan yang bermuara pada hubungan harmonis antar semua manusia.

Setiap generasi ke generasi, pasti ada figur yang ditokohkan untuk memimpin sisi agama, figur tersebut disebut tokoh agama. Suatu gambaran pelimpahan *value of trust* yang terjalins secara struktural.[417] Tugas utama para tokoh agama adalah menjaga kerukunan antar intern agamanya masing-masing. Bahkan wewenang tokoh agama melebihi kewenangan aparatur desa. Selain itu, untuk mengatur kerukunan, tidak *segan-segan* menjatuhkan sanksi sosial bagi yang melanggar norma agama, seperti mencela penganut agama lain, berbuat jahat pada penganut agama lain dan sebagainya.

---

honest and responsible religious figures makes claim that the chosen religious figure has carried out his duties properly. The elected religious leaders have also carried out their duties to initiate any religious activity and are fully responsible for the celebrations carried out by their various followers. The main task of the Catholic religious figure is carried out properly and makes him accountable for his position properly. The behavior of a person that is expected and important in society." Peter Beiharz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*, terj. Sigit Jatmiko, *Teori-Teori Sosial Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 192.

[417] Dalam teropong ilmu sosiologi, figur yang berpengaruh memiliki refleksi terhadap turunan atau *santri* yang dipercaya menggantikan posisi sosialnya. Dalam beberapa penelitian, seperti yang diteliti oleh George Ritzer, warisan karisme melalui peralihan kefiguran terjadi secara otomatis dari satu tokoh ke calon tokoh yang lain. Pasalnya, tokoh agama ditentukan oleh empati dan kepercayaan, bukan melalui pemilihan resmi. Ritzer menyimpulkan bahwa kekuatan pengaruh tokoh agama lebih diikuti oleh tokoh pemerintah. Lihat George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014, 150-152.

Jadi untuk menjaga kerukunan intern agama, tokoh agama membuat beberapa kebijakan; 1) menyusun aturan tertulis dan tidak tertulis yang telah turun temurun; 2) menindak sanksi sosial bagi pemeluk agama yang melanggar; 3) melakukan komunikasi aktif dengan sesama tokoh agama dan tokoh agama lain; 4) memberikan pembinaan bagi penganut yang terindikasi jeratan radikal; 5) melaksanakan kegiatan dialog.

Kedua, filterasi gerakan sosial keagamaan baik internal atau eksternal. Sejauh hasil penelitian, gerakan sosial keagamaan yang berada di pusat Kota Kediri bagi umat muslim, terdiri dari gerakan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Sementara ada juga *toriqah* yang terkenal yaitu *thoriqoh Qodiriyah wa Naqsyabandiyah.* Selain itu, tokoh agama menganjurkan kepada umat muslim untuk tidak men-dirikan gerakan keagamaan maupun *sempalan* yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keagamaan yang telah berjalan harmonis satu sama lain. Secara perkembangan realitas, gerakan keagamaan ini saling bermitra dalam menjaga kerukunan dan juga pendidikan. Kebijakan tokoh agama ini, sebagai pola *filterasi religion* yang menurut banyak ahli disebut *religion protective.*[418]

---

[418] Proteksi pembatasan lahir gerakan sosial keagamaan beserta *sempalan*-nya bukan membatasi kebebasan beragama dan bertentangan degnan undang-undang, dalam ilmu sosiologi kontemporer kebijakan ini lumrah terjadi untuk menekan peran gerakan keagamaan dan memuluskan peran tokoh agama sebagai *agent of religions.* Argumen ini dipriotaskan dalam kajian sosial, sebagai satu-satunya pencipta kerukunan. Max Weber, *on Charisme*

Secara eksternal, ideologi diluar yang telah terpartri difilter se demikian rupa, tidak dibolehkan masuk tanpa seizin tokoh agama atau pemerintah. Hal ini bertujuan, agar pemahaman keagamaan yang telah terjalin, bebas dari pengaruh pemahaman lain, apalagi yang bersifat keras dan radikal.[419] Bahkan filterasi tersebut bukan hanya melalui pengaruh yang datang dari luar berupa seruan dakwah, melainkan juga memfilter dari "bawah tanah", yaitu mengerahkan peran orang tua dalam keluarga untuk melindungi anak-cicitnya dari pengaruh media tekhnologi yang mendangung konten dakwah radikal.

Begitu juga dengan umat Tionghoa atau agama selain Islam, membatasi sisi internal dan eksternal gerakan agamaan maupun *sempalan*. Sekalipun makna "pembatasan" ini tidak serta merta mengambil hak bebas untuk beragama, namun hanya memfilter ideologi yang masuk ke Kota Kediri bukan ideologi yang dapat memecah belah kerukunan. Tidak seperti di daerah lain yang kadang tidak mengizinkan pembangunan Gereja umat Kristiani.

---

and Institution Building. Chicago: The Univ of Chicago Press, 1968, 29-31.

[419] Penelitian internasional banyak mengatakan bahwa jebolnya pemahaman ideologi radikal terjadi pada penganut agama yang dangkal atau berada pada posisi terdesak baik secara ekonomi maupun politik. Konsep deradikalisasi membuat pemetaan baru yang mencegah pemahaman radikal semenjak dini, baik di sekolah-sekolah formal tingkat dasar maupun di pesantren-pesantren dengan pola jejaring antara tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri. Mereka harus saling menyokong untuk membendung masuknya paham radikal. Donatella Dela Porta, "Guest Editorial: Processes of Radicalization and Radicalization", *International Journal of Conflict and Violence,* 6(1) 2011, 4-10.

Ketiga, memastikan kondisi ekonomi cukup. Masdar Hilmi (2015) mengungkap dalam penelitiannya, yaitu politik ekonomi merupakan faktor utama terjadinya konflik agama.[420] Dalam artian, antar sesama umat beragama saling bantu membantu bila ada saudara seagama yang membutuhkan uluran tangan. Karena memang di pusat Kota Kediri merupakan markaz sirkulasi perdagangan terpusat, maka masyarakat miskin dapat dihitung dengan jari. Namun sebagai tokoh agama, berkewajiban memenuhi kebutuhan primer bagi masyarakat miskin, tua renta, lansia dan kepala keluarga yang belum bekerja.

Beberapa program untuk memastikan kecukupan ekonomi masyarakat sesama agama adalah; 1) program *lelang kepedulian,* yaitu suatu transfer jasa maupun modal dari pihak si kaya kepada si miskin. Program ini bisa berupa bantuan modal usaha, sadaqah dan jenis komsumtif. 2) kerjasama, yaitu antara pemilik modal membangun usaha dan yang menjalankan adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dengan sistem akad yang disepakati. 3) melalui mekanisme manajemen zakat dan wakaf, yaitu menghimpun

[420] Politik dan ekonomi merupakan faktor utama, sedangkan teologi hanya sebagai justifikasi saja. Seperti komunitas Syia di Sampang yang dianggap sebagai ancaman bagi dominasi Sunni pada struktur sosio politik di daerah sana. Konflik tersebut hanyalah sarana elit lokal untuk mempertahankan struktur dominasi sistem ekonomi. Lihat dalam penelitian lebih jelas dalam Masdar Hilmy, "The Political Economy of Sunni-Shi'ah Conflict in Sampang Madura"..., 27-51.

dana dari para *muzakki* untuk kemudian dikelola dan diperuntukan untuk masyarakat yang membutuhkan.[421]

Program-program ini penting dilaksanakan, karena faktor ekonomi dapat menimbulkan konflik, baik konflik sosial maupun keagamaan, yang sejatinya berangkat dari permasalahan kecil. Ekonomi kerap menjadi api dalam bara, yang membakar pada semua aspek kehidupan manusia. Sentimentil keagamaan yang terjadi juga dipengaruhi kondisi miskin, lalu apa hubungan agama dengan ekonomi? Kondisi kemiskinan adalah yang paling dekat menimbulkan pengingkaran. Bisa jadi, pengingkaran tersebut bersumber dari pemaknaan agama yang menyimpulkan bahwa agama yang dipeluknya tidak menjamn dirinya kaya, sehingga berpotensi mencari agama yang dapat mensejahterakan.

2. Moderasi antar Umat Beragama

Dalam beberapa diskursus mutakhir tentang keragaman, baik diamati oleh peneliti maupun pemerintah, edisi kerukunan agama mengarah pada

---

[421] Agus Safingin dalam penelitian mutakhirnya (2020) menemukan bahwa yang berperan dalam kerukunan umat bergama di Kediri ada tiga skala pendekatan besar; 1) politik ekonomi yang mapan, karena pusat Kota merupakan sirkulasi perdagangan ekonomi terbanyak, maka masalah ekonomi merupakan hal yang utama dan sensitif; 2) melalui lembaga filantropi Islam mampu mengatur ketimpangan ekonomi umat dengan baik, karena dilembagakan dengan maksimal; 3) kerjasama secara ekonomi dan agama. lihat dalam penelitiannya, Agus Safingin; Putu Bagus Suka Arjawa dkk., "Kerukunan Umat Beragama di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmiah,* 3(2) 2020, 1-14.

harmonisasi antar dua, tiga atau lebih penganut agama. Pasalnya, konflik paling kentara dan meresahkan rasa aman masyarakat banyak melibatkan hubungan antar umat beragama. Tentu ini sangat menghawatirkan, mengingat negara kita penganut fanatis Pancasila sebagai ideologi bangsa.[422] begitu juga dengan UUD 1945, dengan tegas dan final menyatakan bahwa hak beribada penganut agama terjamin jelas tanpa ada penafsiran. Namun dalam praktiknya, tetap saja menyembul aksi anarkisme berdalih agama.

Realita berbicara, konflik antar agama diciptakan oleh konflik yang ditimbulkan dari perbedaan keyakinan tanpa didemai saling menghormati dan memahami keragaman. Beberapa bukti lembaran kelam konflik agama berada dalam angka, sebutlah konflik Ambon antara Islam-Nasrani, konflik Toliara Islam-Nasrani, konflik Aceh antara Islam-Kristen, konflik Lampung Selatan antara Budha-Islam dan banyak konflik yang serupa.[423] Semua konflik disebabkan oleh rasa saling

---

[422] Penghapusan tujuh kata pada Piagam Jakarta dimaksudkan untuk menjamin kebebasan beribadah bagi umat beragama, karena disadari bersama bahwa sejak lahir, negara Indonesia telah besifat majemuk dan beragam agama, etnis, budaya dan bahasa. Melalui sila pertama Pancasila, memahamkan dengan sangat jelas kalau pemeluk agama apapun di negara ini dilindungi oleh undang-undang, mereka berhak untuk membangun tempat ibadah, beribadah dan melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam UUD 1945 juga demikian, kebebasan memilih agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing terlontar jelas tanpa amandemen. Namun kenapa konflik agama masih saja terjadi? Hal inilah yang perlu dipertegas tentang makna keragaman.

[423] Konflik Ambon terjadi pada tahun 1999, suatu konflik berdarah antara umat Islam dengan Nasrani. Menurut data yang berkembang, konflik tersebut mulanya dipicu oleh peristiwa pemalakan dua

curiga, tuding menuding, sensitifitas dan unsur balas dendam.

Konflik antar penganut agama yang terus bermunculan, tanpa disadari, konflik tersebut memicu ketegangan pada sektor lain seprti pendidikan, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Oleh karena itu, konsep trilogi kerukunan adalah konsep nilai yang dirumuskan oleh pemerintah untuk merekatkan perbedaan. Konflik antar penganut agama kerap ditengarai olah aksi secara berkelompok. Nyaris tidak terdata, ada konflik antar agama yang hanya melibatkan individu dengan individu. Oleh karena itu, akar konflik agama adalah prinsip kelompok beragama yang mengacu pada tokoh agama sebagai panglima setiap agama.

Menyadari hal demikian, kerukunan antar beragama sebagai prinsip nilai kedua dari trilogi kerukunan, mengarah pada aspek kolektifitas keagamaan yang dipengaruhi oleh budaya dan adat keagamaan. Terdapat elemen berpengaruh struktural dari setiap agama yang dapat membakar dan meredam konflik. Secara tidak langsung, suasana konflik dan resolusinya bergantung pada tiga elemen; figur agama, budaya

---

umat muslim terhadap warga nasrani, akhirnya peristiwa tersebut menyebar dengan cepat dengan nuansa yang dipoles akhirnya membakar amarah dan terjadilah konflik. Di Aceh, peristiwa di daerah Singkil tahun 2015 kemaren konflik diawali demonstrasi umat muslim kepada pemerintah untuk membongkar beberapa gereja umat Kristiani, yang ditentang oleh umat Kristen, akhirnya terjadi konflik. Hampir semua latar belakang konflik dimulai dari saling curiga dan kurang menyadari bahwa Indonesia memiliki banyak agama. "Puput Purwanti, 7 Contoh Konflik Antar Agama yang Pernah Terjadi di Indonesia", diakses tanggal 1 September 2020. https://hukamnas.com/contoh-konflik-antar-agama

dan pemerintah.[424] Oleh karena itu, ketiga elemen ini merupakan pengejewantahan konsep kerukunan antar umat beragama sebagai tahap kedua pada trilogi kerukunan.

Karena pada dasarnya, maksud dari elemen nilai kedua ini adalah memperkokoh persaudaraan antara penganut agama yang satu dengan penganut agama lainnya. Persaudaraan antar penganut agama, pada hakikatnya merupakan tujuan semua agama yang terbentang dan eksis di dunia. Karena salah satu fungsi agama adalah memanusiakan manusia atau menyelematkan manusia dari tipu daya dan penindasan. Sebagaimana yang diungkap oleh Mircea Eliade (1961), yakni:

> *At least there are several factors that underlie the fraternal relationship between religions, including first, the normative basis of religion leads to the element of peace. Relations between religions are structured in such a way as to create social order. Second, the purpose of having a state and being social is for community harmony. Third, science is the same way, its existence is to understand and establish close relationships between human beings. So thus, adherents of*

[424] Pendapat ini didasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan leh Arifuddin Ismail ke tiga daerah rawan konflik dan berhasil diselesaikan, yaitu Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan Barat. Hasil penelitiannya menghasilkan bahwa ketiga elemen masyarakat berpengaruh terhadap tumbuhnya konflik pada satu sisi, disisi lain dapat mencerahkan konflik. Elemen tokoh agama berperan untuk menciptakan ruang-ruang dialogis persuasif dengan menjadikan budaya sebagai unsur paksaan kehendak, pada kesempatan lain pemerintah memberikan pengayoman terhadap umat beragama. Maka peran ketiganya dapat menyeimbangkan sistem sosial, baik menjaga maupun menyelesaikan konflik. Arifuddin Ismail, "Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama", *Jurnal Analisa,* XVII (2) 2010, 175-184.

one religion to another, if they are able to practice religion and fully understand it, they will be able to live a life of harmony and peace among religious followers.[425]

Tentu, nilai konseptual dari trilogi kerukunan tidak dapat dipahami dengan betul jika belum ada fakta lapangan yang menguraikan manifestasinya. Maka pada bahasan ini, kerukunan umat muslim dan Tionghoa di pusat Kota Kediri menjadi bahan fenomenologis yang dapat dianalisis. Tanpa adanya penggambaran nilai dari fakta sosial di masyarakat, akan kesulitan memahami aktualisasi nilai trilogi.

Manifestasi trilogi kerukunan di pusat Kota Kediri pada aspek kedua ini, dimulai dari prinsip atau pondasi keberagamaan, kemudian model implementasi berserta implikasinya. Diketahui bersama, bahwa Kota Kediri mampu mempertahankan kerukunan umat beragama dengan sangat mapan, terjaga sejak masa sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Pergelutan sosial antara umt muslim dengan etnis Tionghoa yang rata-rata beragama Konghucu dan Kristen, juga mampu

[425] Lihat dalam Mircea Elliade, *The Sacred and the Profane: the Nature of Religion.* New York: Harper, 1961, 204; dalam literature lain ketiga aspek tersebut ditambahkan dua aspek yang berhubungan, yaitu; 1) aspek sejarah, sejarah agama-agama dibentuk untuk menyelematkan umat dari kesengsaraan dan kenistaan dengan menyembah sesuatu yang memiliki kekuatan supratural. 2) aspek humanistic, pada dasarnya manusia memiliki sifat tidak suka konflik atau condong pada kedamaian. Maka dengan sifat dasar inilah, kerukunan dengan umat lain atas nama kemanusiaan dapat diterapkan. Sajjad H. Rizvi, "A Primordial e Pluribus unum? Exegeses Q. 2:213 and Contemporary Muslim Discourses on Religious Pluralism", *Journal of Qur'anic Studies,* 6(1) 2004, 21-23.

berdiri di tengah terpaan ideologi radikal, bahkan teknologi sekalipun.

Ada beberapa prinsip yang melatarbelakangi kerukunan umat tersebut, prinsip yang dibangun bersama-sama dan dilakukan secara kolektif pula, sampai mengkristal. *Prinsip pertama, equality be for the habited*.[426] Yaitu suatu persamaan hak dan kewajiban dalam sosial yang telah dibiasakan sampai menjadi aturan tidak tertulis. Persamaan yang dimaksud adalah prinsip sama antara satu umat dengan umat yang lain. Kesamaan itu termanifestasi dari cara pengayoman pemimpin yang bersikap sama kepada semua umat beragama tanpa membedaa-bedakan, kesamaan mendapatkan hak pada tatanan sosial tanpa terkecuali dan kesamaan mendapatkan keadilan.

> Kami menganggap bahwa samua masyarakat seperti saudara. Bahkan jika-pun mereka difitnah sedemikian rupa, tali persaudaraan tetap mereka pegang teguh. Sedangkan secara sosial, tokoh agama maupun pemerintah memperlakukan sama dalam segi apapun, semisal hak mendapat bantuan sosial, hak berpolitik,

---

[426] Prinsip kesamaan pemberian hak yang telah terbiasakan sebenarnya merupakan pengembangan pemikiran dari konsep keadilan yang dikembangkan oleh agama Islam, yaitu memberikan porsi yang sama antar semua elemen masyarakat yang dipandang sebagai makhluk. Hanya saja dalam prinsip ini ditambah dengan "keterbiasaan" sosial terhadap cara pandang dan tindakan. Menurut A. Mursid (1999) kesamaan hak antar umat beragama merupakan kewajiban negara yang dikejawantahkan pada pemerintah sebagai pelaksana. Sementara cara membiasakan, merupakan produk budaya. Dengan demikian, prinsip ini menggabungkan antara nilai budaya dan hukum. Lihat dan periksa dalam A. Mursid, *Pluralitas Sosial dan Hubungan angar Agma Bingkai Kultural dan Treologi, Kerukunan Hidup Umat Beragama.* Jakarta: Badan Peneliti Pengembangan Agama Depag RI, 68-69.

hak untuk berpendapat, hak berorganisasi dan sebagainya. Prinsip kesamaan (berbeda lagi dengan kebersamaan) posisi dan peran, telah menjadi kebiasaan atau mentradisi.[427]

Prinsip kedua, keterbukaan pendapat (*open opinion*).[428] Pengertian *open opinion* dengan keterbukaan berbeda makna, *open opinion* lebih mengarah pada keterbukaan asumsi dan prasangka, baik tentang sosial maupun keagamaan. Selama ini, konflik antar agama kerap ditengarai oleh aspek disparasi psikologi,[429] sehingga

[427] *Wawancara,* Muji Armunis, Tokoh Agama Katolik (Kediri, 28 Agustus 2020)

[428] Dalam kajian sosiologi, *open opinion* memiliki beberapa bentuk; 1) penganut agama sering melakukan keterbukaan pemahaman agama kepada realitas apapun. Antar sesama masyarakat saling tukar informasi keagamaan. karena dengan keterbukaan ini akan ditemukan banyak titik temu sebagai modal kebersamaan; 2) semua penganut agama harus menyampaikan perasaan atau dugaan keagamaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Perasaan kurang baik disampaikan dengan koridor etika adat masyarakat. Dengan pola manajemen keterbukaan ini, dapat mengurangi potensi konflik. Lihat dalam Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Agama.* Surabaya: Bina Ilmu, 1979, 291.

[429] Banyak pengamat yang melupakan unsur psikologi sebagai penyebab konflik agama, Welter Houton Clark (168) seorang ahli psikologi kebangsaan New York mengatakan bahwa unsur manusia yang belum matang secara beragama (*mature religion*) mudah tersulut rasa dendam dan fanatisme. Clark mengartikan *mature religion* dengan perjumpaan batin pemeluk agama dengan Tuhan yang berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku dalam dunia nyata. Sehingga, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk melihat kematagan seorang penganut aama ada dua indikasi; 1) cara beragama mengedepankan sifat kritis, otonom dalam beragama dan kreatif; 2) melihat agama lain sebagai pengetahuan; 3) cara pandang keagamaannya tiak puas hanya dengan rutinitas dan verbal keagamaan. lihat Walter Houston Clark, *The Psychology of Religion: an Introduction to Religious and Behavior.* New York: The McMillan Company, 1968, 242-244.

jika terdapat variabel fisik kecil saja, dapat menyulut konflik besar. Seperti saling curiga, kedengkian pada agama lain, rasa ingin menguasai yang berpuncak pada *true claim*. Guncangan psikologi dimana salah satu penganut agama "merasa" ingin dianggap agama paling benar, pada prosesnya menjadi candu keregangan sosial.[430]

Oleh karena itu, prinsip *open opinion* sebagai bagian elemen psikologi manusia sengaja diciptakan untuk menghidari konflik batin. Konsep yang dibangun, adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh tokoh agama setempat kepada masyarakat seagama yang *notabene* lebih dekat dan akrab. Peran tokoh agama sangat sentralistik sebagai garda penyanggah arus konflik. Pada ruang *open opinion* inilah banyak patologi psikologi terungkap dan mati sebelum berkembang. Masyarakat wajib terbuka kepada tokoh agama, karena ikhtiar kerukunan telah disepakati bersama.

Prinsip ketiga, ketaatan pada pemimpin. Tokoh agama dan pemerintah telah berkolaborasi untuk

---

[430] Pengangapan benar dalam beragama merupakan guncangan psikologis yang didorong oleh kedangkalan beragama, sehingga memandang agama lain keliru. Dalam bukunya William James (1958) menguraian dengan jelas alasan mengapa umat beragama kerap menganggap agagamnya yang paling benar perspektif psikologi, yaitu; 1) keterputusan sambungan dengan eksistensi Tuhan, sehingga yang dipikir adalah dirinya sendiri. Padahal eksistensi Tuhan sangat menyayangi makhluk, lalu kenapa perbedaan agama menjadi halangan. 2) kurang menyerahkan dirinya pada kekuasaan Tuhan. Akibatnya, pikiran dan sikapnya bergantung pada pengaruh orang lain. 3) melahirkan rasa tidak bahagia, karena dorongan penyerahan yang tidak maksimal, akhirnya memandang sesuatu hanya dari aspek materistik. William James, *The Varieties of Religious Experience: a Study in Human Nature.* New York: Modern Library, 59.

menciptakan kerukunan.[431] Seluruh masyarakat tanpa dikomando memiliki kepercayaan penu pada para pemimpin elite agama, baik pada persolan problem sosial maupun agama, diselesaikan melalui peran tokoh agama. Ucapan dan tindakannya menjadi hukum etis untuk dilaksanakan dan dicontoh. Prinsip tersebut berjalan otomatis dan telah terbiasa. Entah karena dorongan sumber normatif keagamaan, maupun karya sosial.

Sifat *taklid* kepada elite agama merupakan bentuk penyerahan total cara memahami agama.[432] Tokoh agama dipandang memiliki kapasitas lebih dibanding masyarakat lain, sehingga mengkiblat pada cara beragama tokoh agama adalah bentuk *reingkarnasi*

[431] Dalam banyak konflik agama di Indonesia, peran pemimpin sangat strategis baik pemimpin agama, formal maupun adat. Octavian Hedra Priyanto dan Anjar Mukti Wibowo (2018) menulis hubungan erat antara pemimpin, perilaku pemimpindan lingkungan masyarakat membentuk jejeraring interaktif dalam melakukan wujud kerukunan. Pemimpin berposisi sebagai pengaru sirkulasi sosial yang dapat mengongrol, merubah dan menggeser konflik menjadi kerukunan, kesenggangan menjari keharmonisan dan sebagainya. Lihat dalam penelitiannya, Octavian Hendra Priyatno dan Anjar Mukti Wibowo, "Pola Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Umat Beragama (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)", *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan,* 3(2) 2014, 1-17.

[432] Seperti halnya ketika Clifford Geertz meneliti tentang klasifikasi kelas sosial pada masyarakat Jawa dan Madura, menyimpulkan bahwa kelas *priyayi* atau dalam bahasa Madura disebut "kiai/kiaji", yang dipercaya menegakkan panji keagamaan di daerah pedesaan, menjadi ulama yang diminai fatwa dan pendapat dalam masalah apapun; hukum, agama, ekonomi dan sebagainya. Sehingga wajar, bila masyarakat menyerahkan total segala urusannya kepada tokoh agama dan bersifat *taqlid.* Lihat dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa.* Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981, 488-493.

tuhan atau *waritsat al-anbiya'*. Ketaatan pada pemimpin, merupakan proteksi keagamaan yang terbentuk berkat pengakuan konsensus sosial. Model ketaatan ini tidak mudah diciptakan. Keselarasan kultur, karakter dan sifat masyarakatk harus berbanding lurus satu sama lain.

Prinsip keempat, prioritizing relegion. Prinsip ini adalah sikap mengutamakan kepentingan agama sebagai prioritas sosial.[433] Dalam artian, masalah keagamaan diutamakan daripada masalah pribadi. Jika ada salah satu umat agama yang membangun tempat ibadah, maka kegiatan lain berupa muamalah ditinggalkan jika tidak bersifat *daruri.* Semua pemeluk agama bahu membahu membangun tempat ibadah. Dalam urusan apapun, agama berada di garda depan program sosial. Sehingga, gambaran keberagamaan ini tampak begitu interaktif.

Empat pondasi sosial keagamaan ini, menjadi nilai prinsipil yang diaktualisasikan dalam keragaman agama. Jejaring tokoh agama, pemerintah dan masyarakat semua agama bertahan dari segala gelombang ideologi merusak. Nilai prinsip bersifat konvensi, yaitu tidak ditulis dalam lembaran aturan

[433] Sikap mengutamakan agama bukan berarti eksklusif maupun tertutup, namun mengedepankan kepantingan sosial keagamaan diatas kepantingan individu. Menurut Harun Nasution (1998), pada masyarakat yang plural, keagamaan merupakan prioritas utama baik pada dataran bersikap (*attitude*), berfikir (*think*) ataupun bertindak (*actuacting*) dalam kedupan sosial. Prioritas yang dimaksud bersifat ragam, tidak hanya individu agama itu sendiri yang diutamakan. Karena masyarakat keragaman, berpikir dan bertindak melalui cara-cara pluralisme. Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran.* Jakarta: Mizan, 1998, 273.

formal, namun dirasakan dan diimplementasikan sebagai kodrat sosial keagamaan. Dalam hukum, hal demikian dikatakan *culture before the law*,[434] memiliki sanksi bagi yang melanggar. Keempat prinsip ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar VI. I

Prinsip Keragaman Umat Muslim-Tionghoa d pusat Kota Kediri
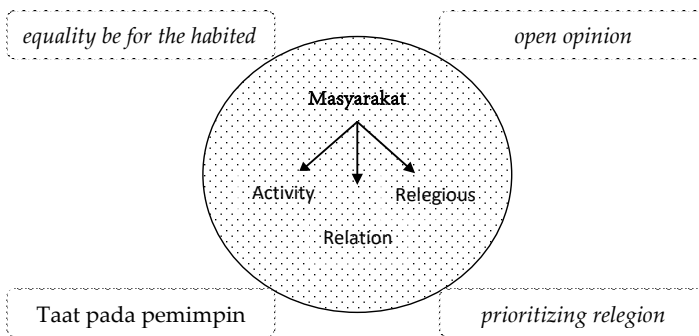
Dari prinsip tersebut, digagas model kerukunan antar umat beragama. Karena bagian triologi kerukunan yang kedua ini fokus pada dua agama atau lebih, maka model yang diterapkan mengarah pada jangkauan internal dan eksternal. Internal yang dimaksud adalah kerukunan intern agama, sedangkan eksternal yaitu kemampun kelompok agama bersikap rukun kepada agama yang lain. Oleh karena itu, umat muslim-

[434] Pengistilahan ini dimabil dari cabang prinsip hukum yan disebut asas tunggal keadilan dalam hukum yaitu *equality bofore the law,* yang dalam cabang prinsipnya disebut *culture before the law* yakni suatu norma sosial yang dijadikan pijakan dalam pembentukan hukum. Periksa lebih jelas dan terjabar dalam Anna Arstein-Kerslake; Eilionoir Flynn, "The General Comment on Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: a Roadmap for Equality Before the Law", *The International Journal oof Fuman Right,* 20(4) 2016, 471-490.

Tionghoa menancapkan beberapa model kerukunan antar umat beragama, yaitu:

Pertama, collaboration religious figures model.[435] Mendamba kondisi kerukunan, memang tidak bisa dikonsep secara parsial. Banyak peran yang harus berkolaborasi, saling mengayomi dan bertukar ide. Begitu pula yang menjadi jurus sakti para tokoh agama umat Muslim-Tionghoa di Kota Kediri. Situasi intern agama yang mapan, memudahkan tokoh agama untuk berkolaborasi. Maksud kolabora-si disini adalah membentuk forum antar agama dalam satu payung. Hanya tokoh agama saja, baik dari kalangan umat muslim, tokoh etnis Tionghoa dan pemerintahan. Pergelutan agent struktur dan *otority* merupakan perpaduan otoritatif yang dapat menghasilkan kekuasaan dalam ilmu sosiologi.[436] Dalam posisi ini,

---

[435] Dalam teori sosilogi modern menilai bahwa eksistensi tokoh agama dalam kurungan struktur sosial di masyarakat berkembang dari dasar sentral tokoh agama bergeser walaupun tidak seluruhnya pada tokoh-tokoh lain seperti sarjana, ilmian dan ahli. Oleh karena itu, dalam tulisan ini lebih menggunakan "figur" karena istilah tersebut tidak terpatok hanya pada pemuka agama. Kolaborasi antar figur ini pernah disinggung oleh Peiter George (2005) sebagai *one get leader,* dimana semua individu yang dijadikan pemimpin mampu menyatukan ide dan sikap pada tujuan yang sama yaitu kerukunan. Lihat dalam Pieter George Manopo, *Revolusi Konflik Interaktif Berbasis Komunitas.* Surabaya: PT Dieta Pratama, 2005, 89-92.

[436] Peran "agent" dalam kerangka sosial masyarakat sangat strategis, berpengaruh total terhadap seluruh sendi keagamaan. Agen yang terdiri dari tokoh agama, tokoh sosial dan semacamnya dalam pandangan Anthony Gidden agen dalam konteks sosial terkadang hanya satu entitas, namun juga kadang banyak agent yang berperan. Satu posisi mendatangkan kondisi baik, namun di sisi lain juga dapat berkeruh. Lihat Anthoty, *Constituion of Society: the Outline of the Theory of Stucturation.* Cambridge: Polity Press, 1984, 210-218.

agen struktur diperankan oleh tokoh agama masing-masing, sedangkan *otority* adalah pemerintah formal.

Posisi tokoh agama, satu sisi sebagai katalisator dalam tujuan mewujudkan kerukunan, dan disisi lain sebagi antisipator lahirnya gejala-gejala radikalisme.[437] Dengan dua tugas intern dan ekstern ini mereka mampu membongkar sifat-sifat eksklusifisme, fanatisme dan cenderung saling curiga. Menjadikan kerukunan sebagai landasan etnis, adalah ciri khas kepemimpinan terhadap daerah yang beragam.[438] Selain antar tokoh agama melakukan kordinasi melaui forum khusus sebagai kontrol dan filterer konflik agama, dalam kaitannya dengan pemersatu antar penganut agama, otoritas tokoh-tokoh agama bermuara pada tiga hal;

---

[437] Peran tokoh agama oleh Mawardi diistilah dengan teori peran. Dengan mengutip pendapat Durkheim "*The role of religious figures in maintaining harmony between religious communities is analyzed using the concept of role theory, namely the dynamic role of position (status), when a person exercises his rights and obligations according to one's position. So someone plays a role. Role is a dynamic aspect of a person's position (status), where status is a collection of rights and obligations that a person has, if someone carries out rights and obligations in accordance with the position, it is expected that the status can carry out a function. Etymologically, the definition of function is position, position. This function is the essence of the position and position itself. Position and position are status caused because they have behavior or actions that are expected to fulfill a position in social status. The dynamic aspect of position (status) is an attitude or behavior that must be carried out according to the function expected by an individual or group of people*."Marmiati Mawardi, *Tokoh Agama di Tengah Keragaman Etnis dan Agama.* Semarang: Balai Litbang Agama, 2010, 249-254.

[438] Kemampuan elite agama dalam membongkar akar radikalisme dan membuang jauh-jauh sekat konflik sosial keagamaan, hal ini menurut Phipus (1994) ditengarai oleh kompetensi dan skill elit agama dalam memainkan peran sebagai resolur dan penjaga. Lihat Philpus Tule, *Agama-Agama Kerabat dalam Semesta.* Ende: Nusa Indah, 1994, 235.

pertama, otoritas yang bersumber dari pengakuan antar umat terhadap kapabelitasnya; *kedua,* otoritas ekleksiatik melalui proses pengakuan; *ketiga,* otoritas yang diberikan oleh negara.[439]

Denganotoritasdemikian,upayauntukmenciptakan harmoni antar umat beragama, dikolaborasikan dengan para tokoh agama yang berbeda. Kordinasi antar tokoh agama dikonsep dengan model dialogis, baik resmi maupun tidak. Maka sifat dialogis tokoh agama adalah menggeser sekat-sekat *buttom up* dari intern agamanya, kemudian disadur pada dialog yang bersifat *top down.* Relasi demikian, termasuk dalam kerangka sosiologis dependen yang mengarah pada *pease building.*

Kedua, socio-cultural model. Budaya merupakan *tameng* kuat dari segala pengaruh ideologi keras, norma-norma yang melekat pada masyarakat menjadi panglima dari segala perkembangan sosial, baik keagamaan maupun entitas lain.[440] Nyatanya, budaya

---

[439] Dalam wacananya Leibiniz (1634-1704) mengatakan "*Religious leaders have a strategy as agents of social change or development. There are three important roles that can be played by religious figures, namely the first, the role of education which covers all dimensions of humanity and builds character. Second, the role of giving enlightenment to society in times of uncertainty, and third, the role of building a system, a tradition, a culture that reflects glory. The role of religious leaders in minimizing clashes that occur between groups of different religions so as not to tarnish the history of community harmony and tolerance. Religious harmony must always be socialized by religious leaders who are used as role models for them. It is hoped that religious figures can minimize internal and external religious conflicts*." Dengan tesis ini maka peran pemimpin agama Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam.* Jakarta: Paramadina, 1999, 56-58.

[440] Dalam penelitian Bherta Sri Eko (2019), seluruh negara hakikatnya menjadikan *culture* sebagai sumber nilai dalam bertindak. Hanya sanya, tidak semua *culture* secara internasional diimplementasikan

atau sering disebut dengan berbagai istilah seperti kearifan lokal, *sosio-culture,* adat istiadat, memberikan sumbangan nyata jaminan kerukunan yang antar umat beragama. Pada posisi tertentu, *culture* menjadi resolusi konflik agama, disisi lain entitas yang mengawal terjalinnya harmonisasi keagamaan.

Ruang lingkup budaya sangat luas, karena berkenaan dengan sikap dan pemikiran manusia yang dinamis. Jika budaya diartikan sebagai rutinitas, kesenian, kebiasaan ataupun ciri khas, bisa jadi pengertian tersebut berubah hari ini menjadi kebiasaan lain yang diciptakan oleh generasi. Sifat budaya dinamis, temporal dan kontekstual.[441] Meskipun demikian adanya, nilai-nilai budaya bersifat universal. Nilai-nilai inilah yang tidak

---

dengan baik, adakalanya juga dimaknai dengan sifat tidak baik. Temuan dalam penelitian modern, banyak negara yang kehilangan identitas keagamaan karena melupakan kultur yang telah terbangun dan malah beralih pada culture lain. Negara-negar Asia, termasuk negara yang masih *full action* menerapkan culture dari asal histiorisitas mereka. Oleh karna itu, culture memiliki nilai fundamental yang dapat menggerakan jalan-mundurnya peradaban dan ilmu pengetahuan, begitupun juga rukun-konfliknya suatu kondisi daerah yang beragam. Lihat dalam penelitiannya Bherta Sri Eko; Hendar Putranto, "The role of Intercultural Compeence and Local Wisdom in Building Intercultural and Inter-Religious Tolerance", *Joural of Intercultural Communication,* 48(4) 2019, 341-369.

[441] Budaya mengalami perkembangan secara verbal, bentuk atau implementatif, namun tidak sampai merubah pada aspek akar atau nilai culture itu sendiri. Hal demikian disebabkan oleh pemaknaan agama (*mains culture*) yang berkembang. Pada konteks global, hal demikian juga terjadi pada norma-norma agama sebagai bagian dari perubahan cultur, sehingga wajar jika ada negara yang tidak menjadikan agama sebagai landasan normatif. Lihat dalam Habibi, "Protecting National Identity Based on tha Value of Nation Local Wisdom", *International Journal of Malay-Nusantara Studies,* 1(2) 2018, 24-27.

lekang oleh zaman. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan kerukunan perlu peletakan nilai-nilai budaya. Beberapa nilai budaya yang diterapkan di Kota Kediri adalah nilai perdamaian dan persatuan, persaudaraan dan kekeluargaan, solidaritas dan saling membantu. Nilai budaya ini berlaku dan dilaksanakan oleh semua masyarakat tanpa melihat perbedaan apapun, termasuk agama.

Modal nilai budaya ini, menjadi perekat kerukunan umat beragama. Nilai persaudaraan dibangun diatas interaksi sosial, seprti menjadikan pengant agama lain diperlakukan seperti saudara sendiri, membantu jika membutuhkan uluran tangan, menjenguk ketika sakit dan sebagaina. Nilai kekeluargaan, menganggap semua masyarakat adalah satu keluarga. Bila terdapat masalah sosial, keluarga dan apapun itu diselesaikan secara musyawarah kekeluar-gaan, dan jarang sekali konflik dibawa ke meja pengadilan. Antar penganut agama menerapkan nilai budaya ke dalam kehidupan nyata tanpa dikomando.

Ketiga, cooperation model. Suatu model kerukunan umat agama yang mengacu pada nilai kesatuan.[442]

[442] Beragam perbedaan sosial yang terjadi di masyarakat, pada prosesnya, merupakan hal yang niscara dan disadari keberadaannya. Karakter, prinsip, agama, ras, etnis, bahasa dan bahkan warna kulit juga berbeda. Namun perbedaan ini tidak semat-mata diingkari dan dipaksa untuk menjadi sama. Namun perasaan bersatu atau menganggap hal yang berbeda sebagai suatu keniscayaan, maka prinsip kebersatuan adalah mengayomi seluruh manusia dengan memandang sisi humenisme, inilah yang dimaknai kesatuan dalam perspektif humanisme. J. Baudrilland, iThe Precession of Simulacra: in Simulacra and Simulation. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1994, 87-90.

Dalam kerangka ilmu sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan primer tanpa bantuan orang lain (*political will*). Konsep *paten* sosial ini, tidak memandang kesamaan atau perbedaan agama, namun bersifat komprehensif dan universal. Meskipun kerukunan antar umat beragama -semisal- tidak dijadikan tujuan, konsep *politiacal will* tetap berlaku. Artinya, kerjasama antar umat dilestikan agar semua kebutuhan sosial dapat terpenuhi.

Cooperation model, atau disebut model kerjasama antar umat beragama memiliki beberapa bentuk, diantaranya adalah; 1) kerja-sama dalam hal keagamaan, ini point yang paling penting, dmana umat beragama tergerak serentak untuk bergotong royong dalam menyelesaikan hajat yang berhubungan dengan keagamaan, seperti pembangunan/renovasi tempat ibadah, perayaan hari-hari besar umat beragama, kegiatan dialog/pengajian dan lain-lain. 2) kerja-sama sosial, meliputi kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti pernikahan, *slametan* dan sebagainya. 3) kerjasama perekonomian, beberapa model kerjasama seperti pemberian modal usaha, bagi hasil, dan sebagainya. Menurut J.J. Fox (1994) kerjasama berada pada kategori puncak kerukunan sosial, setelah kecemburuan sosial dan etnisitas. Bahkan kerjasama menyisir ruang-ruang kekosongan psikologi dan ketegangan konflik.[443]

Ketiga model kerukunan umat beragama ini, jika dispesifikan menghasilkan hipotensis yang bermuara

[443] J.J. Fox, *Memories of Ride Poles and Cross Beams: the Catagorical Foundation of a Rotinese Cultural Design.* Camberra: Departement of Antropology, 1994, 170.

hubungan agent, cultur dan konseptual. Agent yang diperankan oleh tokoh agama dan pemerintah formal berkelindan dengan tanggungjawab menerapka budaya yang telah ada berlandaskan pada saling kerjasama. Tokoh agama agama sebagai subyek, budaya sebagai nilai dan kerjasama adalah implementasi nilai. Meka jelas, bahwa syarat keruknan untuk menciptakan keharmonisan antar umat beragama adalah tiga elemen; tokoh agama, budaya dan kerjasama. Hal demikian bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar VI.2
Model kerukunan antar umat beragama umat Muslim-Tionghoadi
Kota Kediri
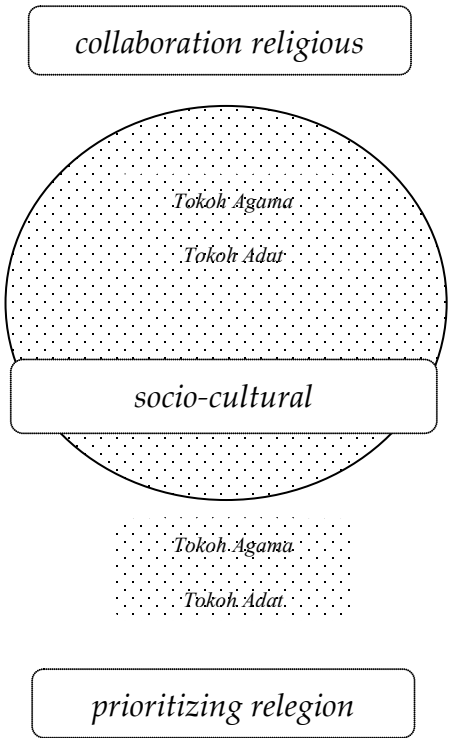
3. Moderasi antara umat beragama dengan pemerintah

Indonesia merupakan negara hukum.[444] Segala *tindak-tanduk* sosial keagamaan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan konflik agama, untuk menciptakan kerukunan beragama, ditetapkanlah aturan. Fungsi peraturan, sebagai pengikat sekaligus memaksa agar umat berbeda agama dapat hidup rukun dan harmonis. Maka kewajiban masyarakat adalah mematuhi dan melaksanakan sebaik-baiknya. Bentuk patuh dan taat pada aturan negara inilah yang disebut "kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah". Yakni kesadaran untuk melaksanakan perintah negara dan menjauhi hal yang dilarang.

Sebagaimana disampaikan oleh Milgram (1963) bahwa dalam konsep kepatuhan (*obedience theory*) individu cenderung patuh pada individu lain dalam kerangka hubungan yang dipimpin dan yang memimpin (*otority*). Sebagai yang dipimpin, maka segala perintah yang diinstruksikan oleh pemerintah akan dilakukan jika dapat memberikan dampak yang menyakitkan pada orang lain. Milgram mengatakan:

---

[444] Indonesia sebagai negara hukum merupakan amanah UUD 1945, GBHN dan sesuai arahan presiden Seekarno. Hanya saja dalam memahami, berbeda-beda. Sehingga kemudian dirinci oleh Brin Tmananaha (2004) ang dikuti oleh Marjanne Termoshuizen-Artz yang membagi konsep negara sebagai negara hukum dalam dua kategori; *formal and substantive,* yaitu hukum diwujudkan dengan peraturan tertulis negara; *Substantive Views,* yaitu hukum yang berjalan tanpa ada aturan yang tertulis, namun tetap hidup sebagai aturan sosial. Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", *Jurnal Hukum Jentera,* 3(2) 2004, 83-92.

"The nature of orders that come out of the government can be obeyed by those who are led if the orders are coercive or hurtful. Individuals in general, tend to follow orders from figures who have authority, obedience to authority has existed in humans since the human was born. Individuals tend to obey orders because they really know that it is true, but there are also individuals who carry out orders because of coercion or because of a belief that those responsible for obedient behavior are the source of authority, not the individuals who do them."[445]

Negara melalui pemerintah, memiliki kewajiban menciptakan kerukunan bangsa. Pemerintah sendiri bertindak sebagai pelaksana hukum, bergerak dan bertindak sesuai koridor perundang-undangan. Maka mentaati pemerintah, berarti bentuk ketaatan pada peraturan sebagai kewajiban warga negara.[446] Fakta di masyarakat mencatatkan bahwa peraturan yang sifatnya tegas, biasanya, dipakai setelah cara-cara lain sudah tidak mampu. Begitu juga dengan peran pemerintah, saat penyelesaian konflik agama tak kunjung selesai, maka pemerintah yang turun tangan.

Kita ketahui bersama, dalam konteks masyarakat, terdiri dari banyak elemen struktur masyarakat. Sebutlah tokoh agama, tokoh adat atau kepala suku,

---

[445] Lihat dalam S. Milgram, "Behavioral Study of Obedience", *Journal of Abnormal and Social Psychologyy,* 67(2) 371-378.

[446] Ketaatan terhadap hukum menurut Ali Ahamd dikatakan sebagai bentuk sikap warga negara yang demokratis. Pasalnya, hukum tidak dapat ditafsirkan sesuai kepentingan pribadi warga negara, namun telah dirumuskan oleh legislasi nasional. Menurut Ewick dan Silbey, ketaatan hukum merupakan kelanjutan kesadaran hukum yang terbentuk tindakan secara emperis. Dalam hal ini, ketaatan hukum bukan sebagai norma, asas atau juga aturan baku, namun hukum adalah prilaku sikap nyata. Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial pridence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang.* Jakarta: Kencana, 2009, 510-511.

pemerintah formal, masyarakat dan sebagainya. Struktur ini memiliki peran dan fungsi sosial yang diakui secara *de facto.* Mereka memiliki aturan hukum yang dijalani baik tertulis maupun tidak, sebutlah tokoh agama memiliki sumber dari ajaran agama, tokoh adat memiliki konversi tidak tertulis, pemerintah formal memiliki perundang-undangan dan masyarakat sebagai sasaran.

Dalam penelitian Ronald (2004), mengungkap bahwa tokoh agama (kiai, ulama, cendikiawan muslim, *read.*) memiliki pengaruh karena adanya kekuatan kepemimpinan yang melekat dari keilmuannya (*barokah,* madura). Status tokoh agama dalam semua masyarakat mencakup empat hal; pengetahuan, keturunan (dari bapak atau ibunya keturunan kiai), kekuatan spiritual dan akhlak atau moralitas.[447]

Realita kontek sosial tersebut, satu sisi dapat menimbulkan dualisme, namun disisi lain *hierarkis*

---

[447] Dengan penelitian demikian, status tokoh agama sebenarnya tidak mendapatkan pengangkatan secara formal sebagai pemimpin, namun karena ilmu yang dimiliki memiliki kualitas unggul terutama dalam ilmu agama maka masyarakat memberikan kedudukan yang tinggi serta memiliki pegnaruh besar terhadap kondisi keagamaan masyarakat. Secara tidak langsung, tokoh agama menjadi representasi dari adanya sifat kepemimpinan yang dipedomani oleh masyarakat untuk mewujudkan keinginan-keinginan mereka. Dengan demikian, warga masyarakat mengabdikan diri kepada tokoh agma untuk dapat menyambung tali vertical kepada Tuhan. Lihat dalam Ronald, *Tokoh Agama dalam Masyarakat.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004, 23; lihat pula dalam Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, 10; lihat juga Julius Sanjaya, *Ciri-Ciri Pemimpin yang Berprinsip: Principle Centered Leadership.* Jakarta: Binapura Aksara, 1997, 23.

simbiosisme.[448] Dualisme dalam arti tumpang tindih antar peraturan dan perannya, *hierarkhis simbiosisme* semua elemen dapat daling berkolaborasi dan mengisi. Oleh karna itu, dalam konteks kerukunan umat beragama yang dipraktekan oleh umat muslim-Tionghoa di pusat Kota Kediri adalah memilih cara kedua, yaitu *hierarkis simbiosisme.* Antara tokoh agama, tokah formal dan tokoh adat sama-sama kompromi untuk menciptakan kerukunan. Sehingga antar umat beragama baik muslim maupun Tionghoa patuh dan mengikuti aturan negara melalui peran pemerintah. Terdapat tiga strategi untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan pemerinta, yaitu:

Pertama, hierarkis concept.[449] Keberadaan tokoh agama, adat dan pemerintah formal memang tidak dapat disangkal. Untuk itu, strategi paling akurat terkait dengan pemosisin para elite berpengaruh pada masyarakat bersifat hierarkis. Artinya, pelaku garda terdepan dalam menciptakan kerukunan antar

---

[448] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, 112.

[449] Konsep hierarki dalam struktur agen sosial keagamaa, berbeda antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Asumsinya, jika pedesaan menjadik posisi utama pada hierarki struktur adalah tokoh agama, sedangkan pada pusat perkotaan adalah pemrintah. Namun simpulan ini flaktuatif, terkadang berbanding terbalik. Namun yang pasti, tergantung pada model masyarakat dan karakter yang melingkupinya. Tokoh di masyarakat peran dan fungsinya persifat akodatif baik pada sektor politik keagamaan maupun sosial keagamaan. Pada peran politik inilah, tokoh masyarakat dapat menjalakan *rule politic* nya untuk menciptakan kerukunan. Periksa dalam Katon Galih Setyawan; Kusnul Khotimah, "Politik Akomodatif dalam Masyarakat Multi Agama", *The Journal of Society and Media,* 3(1) 2018, 1-16.

umat beragama adalah tokoh agama. Peran persuasif kepada masyarakat baik intern maupun ekstern, ketika terdapat sembualan konflik maka tokoh agama-lah yang memasang badan di depan. Kemudian, tokoh adat melalui cara-cara budaya sebagai bahan atau nilai. Pada proses yang terakhir, setelah semua tugas berjalan maksimal, baru peran pemerintah formal dilibatkan. Untuk memahami, digambarkan sebagai berikut:

Gambar VI.3
Posisi Relasi hierarkis antara tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah
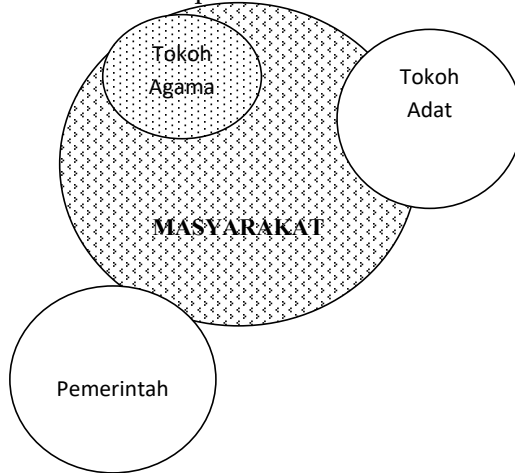
Dengan pola ini, peran semua elemen kelihatan saling mengisi pos masing-masing. Keberadaan tokoh agama sebagai garda utama yang bersentuhan langsung dengan pemahaman agama dan praktik keagamaan, sedangkan tokoh adat memiliki peran untuk memasukan budaya pada setiap aktivitas masyarakat. Pada garda terakhir, posisi pemerintah bertanggungjawab untuk mengawasi dan menindak bagi semua masyarakat. Inilah yang dinamakan dengan

konsep hierarkis, paralel dan berhubungan satu sama lain.

Kedua, intenalization concept. Yaitu memasukan aturan formal negara ke dalam adat dan agama. Dalam artian, aturan-aturan tentang kerukunan umat beragama tidak ditampilkan dengan wajah *beringas* dan menakutkan. Namun dipoles melalui bahasa-bahasa budaya agar kelihatan bersahabat.[450] Dengan intenalissi aturan tersebut, maka peran pemerintah sama dengan peran tokoh agama atau adat, sama-sama menjaga keutuhan sosial.

Model kolaboasi antara tokoh agama dengan pemerintah dapat digambarkan seperti bangunan rumah, sebagian pondasi dan sebagian lainnya dasar bangunan. Maka kedua elemen ini saling ambil peran sesuai dengan *posisioning* di masyarakat. Seperti yang diungkap oleh Diana L. Eck (2005), bahwa:

> *"Religious and government figures that are formally recognized by the state, are both influential leaders in society. Both of these cannot be compared and even contested, both in religious and governmental matters. On a certain side, religious leaders act as resulutors of all conflicts in society, but on the other hand, the role of government is more dominant. Both of them get the same portion in a multicultural society. The collaboration between the two has many models, including the first, the dependent-collaborative model, which is a model of cooperation that complements each other in certain posts. For example, religious leaders are in the religious section, while the government is in the social sector. Second, the symbolic-authority cooperation model. It is a cooperation model that places one party as the sole leader, while the other is a symbol*

[450] Tafsir, *Hubungan Budaya Jawa dan Islam, Pengaruhnya terhadap Politik di Indonesia.* Yogyakarta: Media Gama, 2000, 178.

or tool. Third, the relegiuos illustrative cooperation model, namely the intense cooperation between the two in any field."[451]

Internalisasi aturan negara ke dalam wadah budaya dan agama memiliki beragam bentuk; 1) memasukkan teks aturan negara ke dalam etika sosial, seperti dilarang makar, anarkis dan mengganggu ibadah oang lain menjadi aturan adat atau agama dengan bahasa yang lebih ringan. 2) membingkai sosialisasi aturan negara melalui forum-forum dialog antar agama, baik berupa komunikasi dialogis formal atau tidak. 3) melali pemeragaan budaya setempat, seperti wayang atau *jaranan* yang dbungkus dengan pentas drama dan sebagainya.

Ketiga, government participation. Menciptakan masyarakat yang taat pada pemerintah sebagai pelaksana hukum, memerlukan model pendekatan yang halus, tidak seperti wajah hukum yang tanpak keras. Maka untuk itu, pemerintah harus mampu mensejajarkan dirinya di depan masyarakat sebagai bagian dari struktur sosial, bukan berada di luar struktur sebagai pengadil. Pemerintah harus berpartisipasi dalam segala kegiatan masyarakat. Namun yang paling

---

[451] Dengan argumentasi demikian, maka tokoh agama memiliki peran penting dalam mengatur pemahaman keagamaan masyarakat, namun bisa juga menyelesaikan konflik berbau lainnya karena dianggap mampu. Namun pada aspek yang lain, pemerintah memiliki andil dalam mengatur roda social dan sisi-sisi yang lain seperti kesejahteraan masyarakat, identitas, keberdayaan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Lihat dalam Is Our God Listening? Exclusivism, Inclusivism and Pluralism in islam and Global Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Peace. London: Queen Mary College University, 2005, 100-101.

penting adalah, mampu duduk sejajar dengan para tokoh agama dan tokoh adat. Karena merekalah yang paling dekat dengan masyarakat.[452]

Disinilah peran tokoh agama sangat menentukan, yaitu dapat memberikan posisi di masyarakat untuk berdialog dan melakukan pendekatan persuasif melalui komunikasi sederhana. Bagi tipe masyarakat

[452] Shane Joshua Barter (2011) mengatakan bahwa peran tokoh agama dimasyarakat yang jauh dari daerah perkotaan, menumpukan otoritas keagamaan dan social kepada tokoh agama. Sedangkan di perkotaan, mendudukan sejajar antara pemerintah dengan tokoh agama. "dalam urusan perkawinan, tokoh agama dipercaya memiliki kualitas unggul dan mengandung *barokah* yang dapat mengantarkan pada hidup rukun dan di bawah tiang agama. Begitu juga dalam urusan yang lain yang berhubungan dengan agama seperti waris, hibah, ekonomi syariah, konflik tanah, dan masalah privat lainnya dipasrahkan kepada tokoh agama. Bahkan di beberapa daerah seperti Jawa dan Madura, tokoh agama memegang peran penting pada seluruh aspek social masyarakat, agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Tidak ayal, ketika ada sebagian tokoh agama yang terjun ke dunia politik, maka lebih dekat terpilih dibandingkan yang bukan dari kalangan tokoh agama. Masyarakat memandang bahwa tokoh agama memiliki keilmuan yang mumpuni dari semua cabang ilmu. Lihat dalam Shane Joshua Barter, "Ulama, the State and War", dalam *Contemporary Islam.* 5(1) 2011, 12-18. Lihat juga dalam artikal Ibnu Rusy yang mengatakan bahwa sejak dalam sejarah nusantara, mulai masa kerajaan, masa kesultanan, pesantren hingga kini, mengajarkan untuk mentaati individu yang memiliki ilmu agama sebagai panutan dalam berbicara, bersikap dan berikhtiar. Ajran agama ini telah terjalin lama dan bahkan menjadi sebuah tradisi paten yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Dari sejarah, kemudian bertahan memasuki sendi-sendi kebudayaan sosiologis yang menurut ahli sosiolog klasik hingga kontemporer tetap mempertahankan sifat *ta'dzim* atau menghormati secara penuh terhadap tokoh agama. Karena alasan kecondongan untuk mengharap doa dan bantuannya-lah, tokoh agama menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Lihat lebih rinci dalam penelitian yang dilakukan oleh "Ibnu Rusyi; Siti Zolehah, "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan", *Jurnal for Islamic Studies, 1(1)* 2018, 70-81.

yang menjunjung tinggi kultur dan etika, tokoh agama adalah bagian integral dari struktur sosial. Sedangkan posisi pemerin-tah formal berada jauh di luar. Maka dari itu, peran pemerintah kerap kali dibutuhkan setelah semua cara kultur dilakukan namun tidak berhasil. Kemudian, campur tangan pemerintah baru kelihatan setelah terjadi konflik yang kentara dan tidak dapat diselesaikan.

C. Analisis Teori *Peace Building*

1. Penjelasan Teori *Peace Building*

Kerapkali, perdamaian dalam suatu masyarakat yang plural, menyisihkan potret kedamaian yang fatamorgana, suatu kondisi sosial keragaman yang damai namun tersisip sembilu pada daging. Atalia Omar (2015) mendeskripsikan bahwa perdamaian adalah hal genting untuk diciptakan, namun kenyataannya penuh dengan jebakan konseptual. Sebagaimana dikatakan olelh Omar:

> *Countries with multicultural and religious pluralism are only a small part of which can maintain social harmony and stability. Most of them are hit by prolonged conflicts even to anarchism. Even though they are not anarchist, the conditions of social and religious interactions that exist are very rigid and, in time, will become a boomerang that can destroy social forces. Many countries are struggling to find strong, durable formulations without conflict. Most of them, only create socio-religious conditions with the face of false peace. Peace, which is in essence, is not at all the same between reality and what is felt by followers of multicultural religions. So no doubt, just a little burning embers, then a big conflict will burn, burning down to the existing social pillars. A false peace can*

also be ignited by political power interests that are laden with politics, the status quo and economic interests."[453]

Sehingga mudah tersulut konflik dari problem-problem kecil. Seperti arang kayu yang menyimpan bara api di setiap celahnya. Model kedamaian verbal ini, adalah kondisi yang dikritisi total oleh teori *pease building*.

Tentu saja, definisi pasti *peacebuilding* bervariasi tergantung pada aktor, dengan beberapa definisi yang menentukan kegiatan apa yang termasuk dalam lingkup *peacebuilding* atau membatasi *peacebuilding* untuk intervensi pasca-konflik. Bahkan jika definisi pasti *peacebuilding* pada umumnya tidak memiliki bentuk baku yang jelas,[454] secara umum untuk semua definisi adalah kesepakatan bahwa meningkatkan keamanan manusia adalah tugas utama *peacebuilding*. Dalam hal ini, *peacebuilding* mencakup berbagai upaya oleh beragam aktor dalam pemerintahan dan masyarakat sipil di tingkat masyarakat, nasional, dan internasional untuk mengatasi akar penyebab kekerasan

---

[453] Kategori kerukunan dengan indikasi jebakan konseptual yang dimaksud oleh Omar adalah kondisi rukun umat beragama, tapi kerukunan tersebut tidak melahirkan komitmen dan kerjasama. Kerukunan tersebut memiliki 3 indikasi; 1) kondisi damai nnamun tidak dibarengi oleh saling membantu dan menolong, sekat-sekat social mirip perkotaan yang saling privat; 2) sedikit saja kena senggol, maka tersulut konflik. 3) kerukunan hanya bebrsifat verbal, semantara dalamnya tidak ada ekrukunan. Lihat dadlam Atalia Omer, "Religious Peacebuilding: the Exotik, the Good, and the Treatrical" in book Atalia Omar; R. Scott Appleby; David Little, *The Oxford Handbook of Religion, Conflict and Peasebuilding*. New York: Oxford University Press, 2015, 11-12.

[454] Jennifer M. Hazen, "Can Peacekeepers Be Peacebuilders?," *International Peacekeeping* 14, no. 3 (2007): 323–38.

dan memastikan warga sipil memiliki kebebasan dari ketakutan (perdamaian negatif), kebebasan dari keinginan (perdamaian positif) dan kebebasan dari penghinaan sebelum, selama, dan setelah konflik kekerasan.

2. Analisis Implementasi Moderasi Muslim-Tionghoa

Telah jelas dipaparkan secara definitif, bahwa *peasebuilding* menghendaki terciptanya kondisi damai, bebas dan aman.[455] Suatu kondisi harmoni sosial yang dibangun bersama tanpa paksaan dari pihak manapun. Kondisi damai yang bukan fatamorgana, temporal dan sensitif. Kondisi tersebut dilakukan dan disepakati bersama-sama semua stakeholders, baik tokoh agama, pemerintah, masyarakat dan sebagainya. Baik organisasi atau non-organisasi, swasta maupun

[455] Dalam penelitian Ah. Zakki Fuad yang menganalisis unsur *peacebuiding* dalam suatu tatanan kehidupan social keberagamaan, menemukan tesis bahwa istilah damai, bebas dan aman memiliki ruang tersendiri yang spesifik. Damai artinya, kondisi social yang harmonis, tenang, mengalir seperti air di sela-sela bebatuan, tanpa konflik, tanpa rasa dengki, tanpa pengakuan agamanya paling benar, tanpa mencampur baurkan agama kedalam doktrin, yang pada intinya system social berjalan pada jalurnya yang tepat. Bebas dalam artian, bebas memilih pekerjaan, bebas menentukan unsur konsumsi sesuai agamanya masing-masing, bebas beribadah, bebas berpolitik, dan bebas berpendapat sesuai aturan agamanya. Sedangkan aman artinya tidak ada halangan beribadah, dilindungi oleh otoritas yang seiirama, bebas beragama, bebas yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kondisi *peacebuilding* dimana masyarakat tahu tentang tatacara menghormati kegiatan, ibadah, hak dan kewajiban agama lain. Lihat dalam penelitian Ah. Zakki Fuad, "*Peace Building* Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Plural", *Jurnal Ibda',* 14(1) 2016, 1-15.

negeri, swadaya maupun intervensi, yang kesemuanya, menginginkan kondisi rukun dan damai.

Dengan demikian, Umat muslim dan etnis Tionghoa dalam menjalin hubungan harmonis, memanfaatkan eksistensi tokoh agama, pemerintah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan karakter masyarakat itu sendiri. Relasi antar umat ini saling bersimbiosis satu samai lain untuk mewujudkan kerukunan antar umat melalui kerangka konseptual *peacebuilding.* Karakter damai yang tertanam di benak masyarakat, ditopang oleh tokoh agama dan elemen elit lainnya, menciptakan kondisi damai.

Penerapan *peacebuilding* di pusat Kota Kediri terlihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan, *pertama* adalah gerakan kultural yang dikemas dengan dialog persuasif antar umat beragama.[456] Dialog disini, bukan lantas diadakan secara resmi dan monoton, melainkan diselipkan dalam kegiatan sosial yang bersifat

[456] Dialog merupakan bagian dari komunikasi intens yang disetting oleh elit agama dalam bentuk dialog keagamaan. Menurut Azyumardi Azra, model dialog antar umat beragama ada beberapa model; 1) dialog parlementer (*parliamentary dialogue*) yakni konsep dialog yang melibatkan ratusan peserta, biasanya berskala nasional bahkan internasilan. Output yang dihasilkanpun adalah konversi atau tractat. 2) dialog kelembagaan (*institutional dialogue*) dialog yang diwakili oleh perwakilan masing-masing kelompok dari setiap golongan, bisa jadi perwakilan antar kelompok, antar agama, pemerintah dan sebagainya, dialog ini diadakan untuk membicarakan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat beragama, ataupun cara-cara efektif untuk menciptakan kerukunan. 3) dialog teologi (*theological dialogue*), pertemuan yang dikhususkan untuk membahasa persoalan-persoalan teologi dan filosofis. Lihat dalam Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam.* Jakarta: Paramadina, 1999, 63-64.

holistik. Semisal, pada acara tahun baru, hari raya dan sebagainya. Dialog bertujuan untuk menyelamai dan memahami persoalan-persoalan nyata yang dihadapi agar tumbuh saling pengertian. Dialog yang dibangun juga bukan adu argumentasi antar agama, berdebat maupun mencari pemenang. Bukan lagi dialog yang bsersifat wacana, namun aksi nyata yang dibumbui dengan budaya.

Imbas nyata dari gerakan kultural tersebut adalah cara pandang masyarakat yang semakin terbuka, tidak menganggap agama lain kelliru dan agama sendiri yang paling benar. Dialog ini juga tidak hanya melibatkan masyarakat antar umat saja, tapi semua elemen seperti pemerintah, tokoh agama, FKUB dan masyarakat duduk bersama dalam suatu perkumpulan kultur. Sehingga, trilogi kerukunan yang dicetuskan oleh Menteri Agama dengan mudah tercipta dengan menggunakan pendekatan *peacebuilding*.[457]

Kedua, transfer aspirasi. Kegiatan ini merupakan agenda wajib yang diamanahkan kepada tokoh agama masing-masing. Selain disampaikan pada acara gerakan kultur diatas, terkadang muncul perasaan yang diungkep tidak dapat disampaikan di depan umum, maka melalui kegiatan ini masyarakat bisa menitip-kan

---

[457] Trilogi kerukunan yang dikonsep melibatkan semua unsur, mulai dari satu komunitas pemeluk agama, hubungan antar penganut agama dan ketaatan kepada Negara. Ketiganya adalah model kerukunan sejati yang dicita-citakan oleh semua masyarakat dan Negara. Kerjasama elemen-elemten tersebut yang dapat menghasilkan situasi social yang damai. Lihat dalam Asy'ari, Menggugat Islam Indonesia dalam Mewujudkan Religious Peacebuilding di Era Konflik", *Jurnal Fenomena,* 16(2) 2017,191-201.

atau berbicara langsung kepada tokoh agama. Aspirasi tersebut ditampung dan direspon dengan cepat. Dengan demikian tokoh masyarakat ingin membentuk nilai karakter, karena bila masyarakat sendiri yang menyelesaikan, dapat bergejolak konflik.

Aspirasi yang tertampung, pada prosesnya digodok bersama oleh tim keragaman yang terdiri dari semua tokoh agama, FKUB, RT dan RW, pemerintah setempat dan perwakilan tokoh pemuda. Masyarakat tidak dilibatkan karena mereka adalah sasaran damai, sedangkan pemuda merupakan penerus yang melanjutkan estafeta sosial. Penampungan aspirasi ini berfungsi untuk menanamkan sikap bebas berpendapat, menjaga kesatuan dan menghindar sikap keras. Sebab jika suatu persoalan dipendam dan disimpen sebagai prasangka, dapat menyulut konflik.

Ketiga, community development. Sebagai upaya perekatan sosial masyarakat, ekonomi menjadi pertaruhan pertama. Hipotesis yang dibangun adalah saat masyarakat tidak berdaya, maka berimbas pada timbulnya masalah lain.[458] Oleh karena itu, elite agama

[458] Pemberdayaan masyarakat baik melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan social, kerjasama yang menghasilkan profit, untuk mendukung dan menyelematkan masyarakat dari kekurangan gizi dan kebutuhan pokok. Asumsi M. Atho Mudzhar, bahwa agama memiliki semua elemen dalam kehidupan, ekonomi, politik, social dan seluruhnya. Maka jika satu elemen terganggu gerak sempurnanya, maka tidak menutup kemungkinan aka nada gejolak konflik agama. Sehingga, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu ikhtiar untuk mencegah terjadinya konflik agama. M. Atho mudzhar, "Pluralisme, pandangan Ideologis dan Konflik Sosial Bernuasa Agama" dalam Moh. Saleh Isre, *Konflik Etno Religius Kontemporer.* Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama, 2003, 1. Bisa juga dilihat dalam artikel jurnal penelitian oleh Abdul

secara bersama-sama melakukan pemberdayaan ekonomi berupa pembe-rian modal usaha dari lembaga zakat dan komunitas Tionghoa baik menggunkaan akad *musyarakah* maupun *mudharabah.* Sebagai kota dengan lalu-lintas perdagangan yang memusat, masyarakat dengan mudah mengembangkan usaha. Karena memang, fokus utama umat beragama adalah bidang agro bisnis.

Tanpa disadari, pemberdayaan masyarakat ini menumbuh-kan rasa kerjasama antar pemeluk agama, pemerintah dan tokoh-tokoh agama. Selain itu, masyarakat juga diberi pelatihan untuk bersikap jujur, pekerja keras, amanah, bertanggungjawab, disiplin, ramah, beretika dan niai-nilai bisnis yang baik dalam berbisnis.[459] Pada perjalanannya, nilai-nilai bisnis ini merupakan perintah agama masing-masing yang membentuk karakter dan jati diri masyarakat.

---

mun'im DZ; AS Burhan, "Problem Historigrafis dalam Rekonsiliasi di Indonesia: Upaya Memberi Makna Baru terhadap Tragedi Kemanusiaan 1965", *Jurnal Taswirul Afkar,* 15(2) 2003, 9-23.

[459] Nilai-nilai kemanusiaan yang diterapkan pada dunia ekonomi merupkan bagian integral dari nunsar agama yang dianut. Karena nilai kemanusiaan pada hakikatnya bersumber dari ajaran agama, aktivitas manusia menjalankan dan menerapkan niali tersebut ke dalam bentuk kebutuhannya. Karena bagaimanapun, menurut penelitian. J. Cassanova kekeringan bahwa nilai kemanusiaan berpengaruh terhadap cara memahami agama sekaligus cara menyelesaikannya. Konflik berbagai Negara, baik nasional maupun di Negara-negara global terjadi karena melupakan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan yang diambil dari sari agama. Sehingga konsep sekuralitas masih dianggap lebih baik dari komunisme karena masih menerapkan aspek nilai agama. Michael Welzer, *On Toleration Castle Lectures in Ethics, Politics and Economic.* New York: yale University Press, 1997, 56-58.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, dapat mendorong sikap dan sifat saling mendorong untuk menjaga kerukunan umat beragama. Hal demikian dapat dilihat dari analisis teori *peacebuilding* yang menyapu seluruh aspek sosial agar tertuju pada konsep damai, suatu perdamaian tanpa ada sekat yang berpotensi konflik, tidak menyisakan masalah pada generasi berikutnya, menampakkan kerukunan yang hakiki. Semua elemen, mulai dari tokoh agama, adat, pemerintah setempat maupun FKUB, pemuda, lembaga lain, dan sebagainya bergelut bersama untuk menciptakan kerukunan. Maka dengan analisis ini, ditemukan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan dapat mendorong pada kerukunan hakikak dengan indikasi sebagai berikut:

Pertama, setiap kegiatan sosial keagamaan yang dibangun dan dilestarikan oleh elit agama tidak pandang bulu dan agama, semua masyarakat (umat muslim dan etnis Tionghoa) berpartisi-pasi mengikuti kegiatan. Asumsi ini, dalam teori *peacebuilding* dikatakan dengan *participatory totality,* dimana kerukunan umat beragama diikut andilkan dalam agenda kerukunan.[460] Tidak ada individu, kelompok atau golongan yang dibedakan untuk menjadi obyek kerukunan. Karena

---

[460] *Partisipatory religious* merupakan bagian dari upaya teori *peace building* yang melibatkan semua anggota masyarakat tanpa terkecuali untuk berpikir dan bertindak bersama mencapai kondisi rukun. Pelibatan semua elemen masyarakat bertujuan untuk menyisir seluruh anggota masyarakat sampai ke lapiran paling bawah, karena jika tidak kompherensif berimbas pada munculnya bibit-bibit muda yang berpotensi konflik. Sumanto al-Qurtuby, "Pluralisme, Dialog dan Peacebuilding Berbasis Agama di Indonesia" dalam Elza Peldi Tahir, *Merayakan Kebebasan Beragama: Bungan Rampai 70 Tahun Djohan Effendi.* Jakarta: ICRP dan Buku Kompas, 192-193.

prinsipnya, kerukunan harus bersifat komprehensif tanpa menyisakan apapun.

Dalam teori sosiologis, intensitas interaksi sosial antar masyarakat akan menambah hubungan emosional semakin erat. Rasa curiga dan patologi abstrak yang menerpa sifat manusia dapat terangkat melalui intesitas. Namun interaksi ini bukan sebatas perkumpulan semata, tapi menjelma ajang silaturrahim yang kental akan budaya dan persaudaraan. Sebab inteksi sosial tidak hanya terjadi pada rutinitas kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga disiasati agar dapat berkumpul. Karena topangan adat, masyarakat dengan mudahnya diatur.

Kedua, parameter implementasi. Untuk mengeratkan rasa sosial antar umat beragama tanpa melihat perbedaan sebagai tujuan untuk menciptakan kerukunan, tokoh agama dan tokoh pemerintah memberikan stimulus kegiatan tanpa direncanakan agar masyarakat dapat sering berkumpul.[461] Bagi etnis Tionghoa, mengadakan festival Cap Go Meh, Festifal Ceng Beng, Festifal Duan Wu dan sebagainya, dimana umat muslim juga diundang dan bahkan harus hadir untuk merayakan. Sedangkan umat muslim semisal mengadakan acara *maulid Nabi Muhammad,* tahun baru Hijriah dan sebgainya. Maka tokoh masyarakat

[461] Kerukunan tidak bisa dibiarkan pasif dan monoton, melainkan perlu diprogram dan dikonsep ke berbagai kegaitan yang mengarah pada kebersamaan untuk kerukunan. Setiap kegiatan mengacu pada prinsip visi kedamaian atau *peacebuilding.* Thomas Dean (ed.) *Religious and Truth: Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion.* New York: State University of New York, 1985, 54.

menyetting semua kegiatan dilaksanakan dengan ramai, melibatkan semua agama.

Upaya untuk selalu berkumpul, merupakan perwujudan saling asih dan merawat tali persaudaraan. Implementasi kegiatan dimaksudkan untuk menjaga stabilitas emosional masyarakat. Para pemuda dilibatkan dalam kegiatan apapun, saling bekerjasa-sama dan bahu membahu. Sehingga muncul sifat saling mengerti, terjadi koneksitas emosional yang mapan, saling memahami, yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Maka pada hakikatnya tujuan dari semua kegiatan adalah mempererat hubungan emosi antar sesama umat.

Ketiga, dari aspek model kegiatan, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat muslim dan etnis Tionghoa lebih banyak pada aspek kerjasama, aktivitas sosial yang mampu berkolaborasi antar sesama umat. Segala kegiatan diarahan untuk menumbuhkan sifat terbuka, toleransi dan menjaga harmoni keagamaan. Dialog-dialog terbuka baik formal maupun *rembukan* semata-mata untuk memahami ajaran agama lain, cara bersikap kepada penganut agama lain, sehingga dengan memahami ajaran agama lain dapat menghilangkan prasangka buruk terhadap penganut agama.[462]

---

[462] Memahami agama lain melalui dialog dan komunikasi inten identic dengan resolusi konflik yang mengarah bagian pemaknaan keagamaan. Pasalnya, rasa merasa agamanya paling benar dan agama lain keliru, disebkan oleh fanatisme agamanya sendiri sekaligus ketidak-pahaman pada agama lain yang dianggap keliru. Cara seperti ini, oleh Parekh (2005) disbut dengan *rethingking religious,* dimana pemaknaan agama disadur dari nilai universal semua agama. Lihat lebih jelas, Bikhu Parakh, *Rethingking Multikulturalisme;*

Salah satu penyebab terjadinya konflik keagamaan, berawal dari sikap saling curiga, prasangka buruk dan merasa benar, yang pada gilirannya melahirkan guncangan psikologi seperti bom waktu yang tiba-tiba meledak menjadi kekerasan.[463] Menyadari demikian, maka diadakan kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir berbagai "penyakit dalam" yang berpotensi menyulut konflik.

Maka secara tidak langsung, cara pemilihan kegiatan untuk menciptakan kerukunan umat beragama harus berprinsip pada beberapa hal penting; 1) prinsip kerjasama, yakni saling bahu membahu untuk mencapai tujuan dengan cara mengerahkan pikiran, ide, tenaga dan keringat; 2) prinsip persaudaraan, yaitu menghormati perbedaan umat dan mengutamakan rasa sosial humanistik; 3) prinsip keagamaan, yaitu mengedepankan unsur agama daripada kepentingan pribadi; 4) unsur toleransi, yaitu upaya yang dapat mengantarkan pada tumbuh-kembang sikap toleransi. Dengan prinsip ini, dapat menambal sekat-sekat patologi konflik secara merata baik pada aspek emosional, spiritual dan intelektual.

Cultural Diversity and Political Theory. New York: Palgave Macmillan, 2005, 78-79.

[463] Menurut penelitian yang dilakukan Triana Rosalina Noor (2018), menemukan temuan penting dalam kerukunan umam beragama, yakni gambaran konflik keagamaan dipengaruhi oleh unsur psikologi yang lahir dari sifat dengki dan merasa benar. Kerontang jiwa persaudaraan dan kerukunan mengantarkan pada konflik yang berkepanjangan. Triana Rosalina Noor, "Meneropong Indonesia: Sebuah Analisis Sosiologis dan Psikologis atas Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia", *Journal an-Nafs,* 3(2) 2018, 135-149.

3. Implikasi dengan teori *Peacebuilding*

Beberapa pengamat konflik keagamaan, meneliti pluralisme keagamaan dengan latar konflik yang berbeda. Meyoritas menga-takan bahwa untuk menuju kondisi *peacebuilding* diperlukan adanya saling memahami antar pemeluk agama secara psiko-religious. Tanpa itu, kondisi damai yang dikonsep sedemikian rupa tidak akan efektif. Sebagiamana dikatakan oleh David Little dan Scott Appleby (2004) setelah melakukan berbagai penelitian dan penelusuran tentang resolusi konflik mengatakan :

> *Building social peace, necessitating conflict transformation and elimainating violence with nonviolence in resolving any disputes, which will happen if there is complementarity between conflict management and conflict resolution. Many efforts have been made to achieve peacebuilding, including through conflict management and resolution.*[464]

Dengan asumsi ini, jelas bahwa kerukunan umat beragama dilatari oleh nilai-nilai karakter manusia secara sosial, seperti rasa peduli kepada sesama umat beragama, tolong menolong, cinta dan kecenderungan untuk berkomunikasi. Seperti halnya yang dibangun oleh umat Islam dan etnis Tionghoa yang rata-rata

[464] Dekadensi karakter psikologi antar umat beragama kemudian menimbulkan perlakuan tidak adil (*injustice*), diskriminatif atau tindakan anarkis yang membeda-bedakan suku, ras, agama dan asal-usul, 99% konflik agama disebabkan oleh karakter dan sifat manusia selebihnya disebabkan oleh oleh hal lain seperti kepentingan politik dan kelompok. Periksa dalam David Little dan Scott Appleby, "A Moment of Opportunity? The Promise of Religious Peacebuilding in an Era of Religious and Ethnic Conflict", in Harold Coward dan Gordon S. Smith (ed.), *Religion and Peacebuilding*. New York: State University of New York Press, 2004, 5-13.

beragama Konghuchu dan Katolik, pada tahap utama adalah mematenkan pondasi etika dan prinsip sosial, baik melalui pendekatan persuasif tokoh agama dan pemerintah, maupun kegiatan temporal. Sebagaimana juga diperkuat oleh Teori Durkheim –sebagaimana dikutip oleh Abdul Munir Mulkan- yang mengatakan bahwa :

The key of religion is not belief, but social ceremonies performed by it's adherents. Therefore, the direction of religion depends on social solidarity and religious beliefs have an important function as symbols of social groups.[465]

Dengan teori Durkheim ini, maka agama setidaknya harus mampu memosisikan diri sebagai tranformasi sosial, yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Jika menanalisis teori Durkheim ini, maka posisi agama (lebih tepatnya, penganut agama sebagai penggerak agama) harus berada pada posisi kunci dalam arus tranformasi sosial, baik pada wilayah perkembangan pemaknaan agama, maupun saat pemerosotan makna agama. Agama harus mampu ditempatkan pada semua lini, agar tetap terjalin hubungn harmonis.

Teori ini dibenarkan oleh cara menempatkan agama oleh umat muslim dan Tionghoa di Kota Kediri, unsur keagamaaan diintegrasikan ke semua sisi sosial,

---

[465] Sifat universal agama, mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia bahkan hal yang bersifat *futuristic* juga dapat dijangkau. Sehingga agama adalah pedoman seluruh kehidupan manusia, dalam persoalan ekonomi, politik, budaya, social dan semuanya. Agama mengatur hubugan manusia seluruhnya, baik vertical maupun horizontal. Agama memberikan aturan seluruh aspek kehidupan. Abdul Munir Mulkan, *Membongkar Praktik Kekerasan: Menggagas Kultur Nir-Kekerasan.* Yogyakarta: PSIF UMM, 2002, 276.

baik ekonomi, budaya maupun aktivitas masyarakat. Pada aspek ekonomi, diinternalisasikan nilai agama seperti kejujuran, kerjasama usaha, kemanusiaan. Aspek budaya, diinternalisasikan mengenai budaya rukun, duduk bersama, kesamaan hak dan sebagainya. Kemudian aspek aktivitas manusia, diselipkan unsur kerjasama sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan yang lain. Semuanya mengarah pada cita kerukunan dan harmonis.

Selanjutnya, Muhammad Ali mengatakan bahwa kondisi *peacebuilding* pada kerukunan umat beragama memiliki beberapa proses, yaitu: *pertama,* proses penyadaran untuk mengubah pandangan hidup beragama dari budaya *violence* menuju budaya *peace* atau *non-violence. Kedua,* dapat memahami akar konflik agama dengan mengedepankan nilai-nilai agama yang dianut. *Ketiga,* melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara melibatkan mereka dalam kegiatan yang bernuansa kerukunan.[466]

Pada point *pertama,* perlu ada hijrah paradigmatik dari budaya *hard* (keras ke budaya damai (*peace*). Pemahaman ini, diperuntukan bagi wilayah plural atau tingkat sensitif keagamaannya yang tinggi. Dimana

---

[466] Muhammad Ali membagi upaya penyelesaian konflik atau meinciptakan perdamaian ke dalam dua aspek besar; internal dan eksternal. Internal lebih didahulukan karena menyangku pasalah karakter dan pemahaman keagamaan. Factor internal dapat juga meliputi psikologi pemeluk agama, cara berpikir agama dan karakter. Sedangkan factor eksternal pada proses selanjutnya, yaitu hubungan interaktif antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Lihat paparan lebih rinci dalam Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan.* Jakarta: Kompas Press, 2003, 163-164.

masyarakat berbudaya *hard* (keras) namun terdapat indikasi mengarah ke konflik, harus dapat bergeser ke budaya *peace.* Suatu budaya yang semua masyarakat menghendaki adanya perdamaian, seluruh gerak sosial diarahkan kesana.

Budaya *peace* ini digambarkan oleh umat muslim dan etnis Tionghoa di Kota Kediri, dimana aksi perdamaian antar umat telah dilakukan mulai dari akar rumput (*grass root*) dan masyarakt paling bawah (*civil society*) yaitu dipupuk mulai dari individu, masa anak-anak, keluarga, lingkungan sosial.[467] Untuk mencapai pada budaya *peace,* diantara upaya yang dilakukan adalah mendidik dengan keterampilan tentang cara memecahkan masalah dan resolusi konflik agar tertanam karakter resolutor dan pemberdayaan masyarakat melalui konstruksi pemikirann.

Point *kedua,* pemahaman toleransi seperti yang diajarkan oleh pemerintah, bahkan tersaji dalam banyak kegiatan dan simposium internasional sekalipun, sebenarnya bukan inti dari terciptanya kerukunan. Analisis ini berangkat dari fenomena kerukunan yang tercipta melalui penelitian mendalam. Toleransi adalah buah dari prinsip kemanusiaan yang meletup pada

[467] Seperti yang temuan R. Fidiyani dalam penelitiannya yang mengungkap bahwa kerukunan perlu dipupuk dari bawah sampai ke pucuk,, sebab bila hanya diraksa bagian batang dan tangkainya saja, konflik tersebut bisa muncul kembali pada generasi setelahnya. Seperti yang sudah-sudah, Indoensia kerap ditimpa konflik agama yang berkelindan. R. Fidiyani, "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)". *Jurnal Dinamika Hukum,* 13(3), 468-482.

ranah sosial. Prinsip persaudaraan, kemanusiaan, kejujuran, keadilan dan nilai-nilai keagamaan lainnya adalah akar yang membuahkan rasa toleransi, sehingga pada tahap akhir muncullah kerukunan.[468]

Hal ini yang dipegang oleh para tokoh agama di Kota Kediri yang memulai upaya menuju *peasebuilding* dengan mengokohkan pondasi prinsip kemanusiaan, psikologi dan karakter masyarakat melalui penanaman nilai-nilai baik ditempa terlebih dahulu. Setelah berhasil, baru melangkah ke tahap berikutnya yaitu interaksi sosial, kerjasama dan saling menolong. Dari pemahaman ini, jelas bahwa keragaman perlu dipupuk dari akar (prinsip) kemanusian yang terangkat pada tingkatan sosial.

Point *ketiga,* pola pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang asing dilakukan oleh masyarakat untuk menggapai kondisi rukun antar umat. Pasalnya, pemberdayaan terkesan dipahami pragmatis. Padahal maksud dari pemberdayaan masyarakat disini adalah bagian dari resolusi konflik agama yang ketika ditelusuri proglem keragaman terindikasi atau bersentuhan dengan wilayah-wilayah ekonomi. Ekonomi menjadi masalah utama, yang pada perkembangannya merambat sampai ke permasalahan agama.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk meminimalisir munculnya gejolak psikologis yang bernara-si tidak enak. Pola pemberdayaan menjadi bagian dari tugas umat

[468] Fabio Petito, "Religions in the Global World: Prospects for Sophia Global Studies", *Claritas: Journal od Dialogue of Culture,* 7(2) 2018, 34-38.

beragama, sekalipun menganut agama yang berbeda. Masyarakat yang berdaya akan melupakan sisi perbedaan agama, konflik sosial terminimalisir dan dapat menjalin hubungan sosial dengan pola pemberdayaan. Istilah "pemberdayaan" bisa dilakukan secara *top down* ataupun *bottom up* dan *paralel.* [469]

Menurut John Hick, perlu ditambah satu lagi agar tercapai hasil yang sesmpurna. Ia menambahkan bahwa nilai kebudayaan berentuhan langung dengan aspek teologis. John Hick percaya bahwa kesempurnaan suatu kondisi rukun harus melibatkan unsur budaya yang dikenal dengan pendekatan lintas budaya (*cross-culture*). Secara tegas mengemukakan bahwa ada satu Tuhan yang tidak terbatas kekusaannya, Tuhan berada dibalik agama dan budaya. Maka sangat tidak logis, jika perbedaan agama dan budaya luput dari kekuasaan Tuhan. Bila ada agama yang mengklaim paling benar dan agama yang lain salah, ini sangat tidak realistis, tidak mungkin Tuhan menciptakan agama dan budaya saling bertentangan.[470]

---

[469] Scott Thomas, *The Global Resurgence of Religion and the Tranformation of International Relations.* New Work: Palgrave, 2005, 89-99. Pemberadayaan atas nama agama sudah sering dilakukan, terutama umat Muslim yang pada saat masa rasulullah, umat agama lain diberikan hak dan kesejahteraan yang sama sebagai manusia. Maka konsep keragaman dimulai dari atas ke bawah atau sebaliknya. Lihat juga dalam Fabio Petito and Pavlos Hatzopoulos, *Religion in International Relation: The Return from Exile.* New York: Palgrave, 2003, 11-12.

[470] Lihat daam John Hick, *Program of Religious Pluralism.* London: The Macralism Press, 1985, 53; bias juga lihat dalam Thomas Dean (ed.), *Religious Pluralism and Truth: Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion.* New York: State University of New York, 1985, 92.

Masyarakat muslim dan Tionghoa dalam berinteraksi sosial sering mengesampingkan perbedaan agama. Dalam artian, bukan berarti tidak memprioritaskan agama, namun membuang egoisme agama dan memasukan agama ke bagian interaksi sosial. Karena jika menilai interaksi sosial dengan masyarakat yang berbeda agama menggunakan kacamata agamanya sendiri, sangat berpotensi konflik. Hal ini senada dengan pernyataan Hick, agama ditempatkan pada tradisi yang utuh ketimbang memandang sebagai fenomena keagamaan yang parsial.[471] Dengan begitu, agama dijadikan tradisi yang total dan tidak dilihat sebagai tradisi keagamaan.

Pernyataan lain yang menarik disimak adalah argumentasi Judy Carter dan Gordon S. Smith (2004), bahwa konflik agama sebenarnya tidak ada, tidak akan pernah terjadi, karena semua agama menginginkan kedamaian antar manusia. Konflik direka oleh sifat ego penganut agama, kepentingan individu atau kelompok yang mengarah pada *status quo* maupun pragmatisme. Kedagkalan pemahaman tentang ajaran agamanya yang dangkal, sifat taqlid pada sandaran yang salah dan pengajaran ajaran yang tidak sempurna. Konsep kedamaian memiliki dua hal penting;

> *The first, the peace process between religious adherents starts from conflict analysis, prevention and resolution, all of which reqire religious condideration, both the dynamics of conflict and peacebuilding. The secont, religious reachings and praactices can basically make strategic contributions in preventing,*

[471] M. Zainuddin, "Pluralisme dan Dialog Antar Umat Beragama", *ar-Risalah,* 12(2) 2012, 13-16.

managing, resolving conflicts and in campaigning for pease. There are also many oppoutunities and strategic places for political leaders, religious activists and social actors to play their role in resolving conflicts, preventing and building a culure of peace.[472]

Argumentasi ini didasarkan pada beberapa penelitian di Asia Tenggara dan sejarah penumpasan Afrika Selatan beberapa abad yang lalu. Jika dikembangkan, argumen Carter dan Smith ini patut dianalisis dalam kacamatan fenomena sosial keagamaan di Kota Kediri, pergelutan keberagamaan antara umat muslim dengan etnis Tionghoa. *Pertama,* perlu susunan konsep yang bersifat hierarkis dalam memutuskan strategi apa yang akan diterapkan dalam menciptakan kerukunan. Untuk itu, analisis sosial dengan melihat sisi karakter dan sifat masyarakat, tingkat pemahaman keagamaan beserta ajaran-ajaran yang digeluti, budaya masyarakat setempat dan pengaruh stakeholder.[473] Semua ini memerlukan analisis, sebagai bahan bertindak. Sama halnya yang telah dilakukan oelh tokoh agama dan pemerintah Kota Kediri, analisis dilakukan secara bertempo, setiap saat dan elastis untuk memahami

---

[472] Judi Carter and Gordon S. Smith, "Religious Peacebuilding: From Potensial to Action", dalam Harold Coward dan Gordon S. Smith, *Relegion and Peacebuiding.* New York: State University of New York Press, 2004, 192.

[473] Analisis eksitensiaalisme manusia atau penganut agama merupakan tahap pertama untuk membuat strategi kedamaian, tanpa memahami karakterisitik pemeluk agama, segala strategi akan berujung konflik. Semisal, upaya pemerintah dengan mengedepankan atuan sebagai resolusi konflik, hasilnya adalah bentrokan dan anarkisme. Gilles Kepel, *the Revenge of God; The resurgence of Islam, Christianiry and Judaism in the Modern World.* Londong: Polity, 1994, 98.

budaya dan cara beragama masyarakat baik dilakukan dengan pendekatan tokoh agama kepada masyarakat secara persuasif, dialog yang dikemas dengan integratif, perayaan-perayaan penting agama, kerjasama dan sebagainya.

Dari hasil analisis, disusun strategi pencegahan, baik bersifat spesifik maupun komprehensif. Pencegahan spesifik adalah filter tameng yang menutup semua jalur yang berpotensi konflik, dari hal-hal kecil seperti penyakit sensitifitas hati (rasa iri, dengki, dendam dsb.) yang ditutup dengan dialog ringan dan *ronde sosial.* Sedangkan pencegahan komprehensif artinya suatu bentuk filter konflik berskala besar, seperti melibatkan pemerintah dan berujung pada artibitrase. Pada tahap hierarki yang terakhir, baru diadakan resolusi konflik, yang telah sesuai dengan arus sosial.

Kedua, memahami agama secara total, tidak parsial dan menyeluruh.[474] Semua agama, sebagaimana diungkap oleh Carter dan Smith, pada dasarya memberikan konstribusi strategis daam menciptakan kedamaian keberagamaan, mencegah bahkan resolu-si konflik. Semakin dalam dikaji, kehadiran agama adalah untuk menyelematkan manusia, mengatur hubungan

[474] Pemahaman keagamaan masyarakat menjadi embrio dari jatuh-bangunnya konflik social keagamaan, sebab parsialistik memahami agama berakibat pada terputuskan ideology dan mengarah pada kekerasan. Hal ini juga yang terjadi pada berbagai ideology radikal, dimana agama hanya berkisar pada teks semata tanpa memahami kenapa teksk tersebut diturunkan. Sehingga memaknai teks agama hanya separoh-separoh. Scott R. Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation.* Lanham: Rowman and Littlefield, 1999, 90-92.

harmonis antar sesama manusia tanpa melihat berpedaan agama, beribadah kepada Tuhan dan taat kepada pemimpin. Karena hakikatnya, sekalipun berbeda agama, namun tetap satu Tuhan. Hal ini adalah pemahaman agama secara konprehensif ketika ditarik pada nilai-nilai krusial.

Sajian-sajian dialog agama dipoles dalam bentuk ringan untuk memahamkan, sebagaimana yang tergambar dari realitas keragaman umat muslim-Tionghoa di Kediri. Agama-lah yang dapat menciptakan kedamaian sosial, bukan dimaknai sebaliknya. Karena kedamaian abadi bersumber dari agama, agama diajarkan untuk kedamaian manusia. Inilah makna hakikat agama, diajarkan sampai tuntas kepada masyarakat sebagai bangunan pondasi *tauhid kemanusiaan.*

BAB X
POTRET MODERASI AGAMA MASYARAKAT RELIGIUS-KAPITALIS KAMPUNG ENGLISH PARE, KEDIRI

A. Pendahuluan

Tidak selamanya, perubahan sosial membawa angin segar bagi realitas kehidupan masyarakat. Terkadang menghanyut nilai-nilai agama dan budaya yang telah lama hidup (*cultural living and relegiuon*). Termasuk perubahan social yang bersinggungan dengan ekonomi, tipe masyarakat yang mulanya relegius bergeser jauh karena tuntutan konteks social. Tipe masyarakat yang semula menjunjung tinggi budaya lokal, terhempas ruah meninggalkan tradisi dan menciptakan tradisi baru yang relevan dengan perkembagnan ilmu pengetahuan. Pergeseran tersebut sebenarnya fenomena yang lumrah, namun menjadi problem ketika bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya.

Kajian mengenai perubahan social, salah satunya yang paling banyak diperbincangkan di dunia global, adalah hubungan erat antara agama dengan ekonomi. Tingginya frekuensi agama, berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat yang berupa energi berbisnis dan mensejahterakan. Perubahan ekonomi masyarakat yang meningkat, dipengaruhi oleh konstelasi beragama yang

juga tinggi. Asumsi ini sesuai dengan pendapat Max Weber (w. 1920) sebagaimana dikutip oleh Zulkarnain (2020) bahwa perubahan social masyarakat di Eropa Barat dan Amerika Serikat setelah dianalisis dan diteliti, mencapai kesimpulan bahwa penyebab utamanya adalah apa yang disebut dengan "etika prosestan" suatu agama yang hidup di Eropa Barat.[475] Kemajuan ekonomi Eropa dan Amerika ternyata memang ditopang oleh spiritualitas umat Protestan. Itu artinya, perubahan sosial kearah peningkatan ekonomi mesti memuat nilai-nilai agama.

Karya Weber adalah salah satu yang pertama menyelidiki hubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi sosial. Ketika agama meluas ke budaya, karya Weber menjadi pendorong utama munculnya penelitian tentang aspek budaya itu sendiri. Peran agama sangat penting karena salah satu nilai sosial memiliki dampak yang besar bagi warga masyarakat.[476] Bukan hanya Weber, penelitian Wasisto R. Jati (2018) dengan memanjangkan pendapat *Weberian* tentang relasi agama dan ekonomi, Wasisto memotret kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia juga sama, yakni pola perubahan sosial kearah ekonomi dapat stabil jika disandangkan dengan nilai-nilai agama.[477]

---

[475] Zulkarnain, "Etos Kerja dalam Kajian Teologi Islam (Analisis Penelitian Max Weber tentang Etika Protestan di Amerika dan Analoginya di Asia)", *al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam,* 2, 1(2020): 29-30..

[476] Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 30.

[477] Wasisto Rahatjo Jati, "Agama dan Spirit Ekonomi: Studi Etos Kerja dalam Komparasi Perbandingan Agama", *al-Qalam* 35, 2(2018): 212.

Namun, di *kampung inggris* Pare, Kediri terjadi sebaliknya, di mana perubahan ekonomi masyarakat justru membuat masyarakat tidak bisa mengendalikan rasionalitas keagamaannya, masyarakat yang semula relegius dalam beragama, akhirnya bergeser menjadi agraris kapitalistik, baik secara individual maupun secara sosial. Ini merupakan pergeseran budaya-keagamaan ketika masyarakat yang semula agamis bertransformasi menjadi masyarakat kapitalis. Kehadiran bentuk baru (*new performance*) tipologi sosial yang disebut *kampong pare* membawa wabah perubahan pola hidup masyarakat Pare seketika berubah. Perilaku keagamaan yang semula hidup, pelan-pelan tergantikan oleh etos ekonomi yang padat.

Perubahan masyarakat dari mistik menjadi industrialis jelas mempengaruhi iklim umum, baik secara nyata maupun tidak nyata. Dampak-dampak ini mencakup, antara lain, dampak pada penggunaan kawasan yang melingkupi dan keadaan keuangan dan ketatnya kawasan setempat. Salah satu dampaknya adalah kapitalisasi latihan. Latihan instruktif dapat berdampak pada iklim umum baik mengenai jaringan sosial, ketat dan moneter. Namun, itu juga memicu tatanan sosial industrialis baru, yang digerakkan oleh arus pasar yang membentuknya. Salah satu ilustrasi penyesuaian kota Inggris daerah Pare yang awalnya mistis menjadi pengusaha akibat penyesuaian dagangannya, yang awalnya dengan bercocok tanam berubah menjadi pemberi pinjaman kursus bahasa Inggris dan motel di sekitarnya.[478]

[478] Lihat dalam Imam Fachruddin; Darsono Eisadirama; Sanggar Kanto; Mudjia Raharjo, "the Dynamics of Community Behavior Changes

Mayoritas penduduk Pare pada awalnya mencari nafkah dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan buruh. Namun, di daerah dengan banyak kursus, banyak pendatang baru belajar bahasa asing yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari seperti makanan. Alhasil, banyak warga di kawasan itu yang menjadi pedagang dan penyedia jasa. Karena faktor-faktor ini, ada banyak toko kelontong yang relatif murah di sepanjang jalan di Palais, toko suvenir dan suvenir dari Palais, dan banyak tempat persewaan sepeda. Sepeda merupakan salah satu kendaraan yang paling digemari oleh mahasiswa yang belajar di Palais untuk berjalan-jalan dan menikmati keindahan kota Palais.[479]

Kursus di "Kampung Inggris" dimulai pada tahun 1977. Saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 171 organisasi kursus. Dalam 1 tahun yayasan ini dapat menampung lebih dari sekitar 4.000 mahasiswa. Latihan-latihan ini mempengaruhi area lokal sosial, ketat dan keuangan di kota Inggris. Misalnya, perluasan norma-norma keuangan dan menghilangnya keberadaan sosial-ketat wilayah lokal di wilayah persekolahan kota Pare Inggris yang dibanjiri oleh orang luar.[480] Sedangkan masyarakat pribumi menjadi teralienasikan, meskipun disalah satu aspek mereka diuntungkan secara ekonomi.

---

in "Kampung Inggris" Kediri", *Jour of Adv Research in Dynamiccal& Control System* 12, 8(2020): 402-407..

[479] Stevanus Gatot Supriadi; Nabila Yuansa Pratiwi, "Analysis of Factors that Influence the Interest of Buying Consumers at Sticky Rice Milki (Tansu) Stall in English Village Pare Kediri", *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 2, 3(2018): 66-67.

[480] Dokumentasi *Kampung Inggris Pare* tahun 2017.

Penulis telah melakukan penelusuran ke beberapa penelitian, ada banyak penelitian, hal ini mengindikasikan bahwa pembahasan mengenai pergelutan sosial keagamaan kearah etos tinggi pengembangan ekonomi sangatlah menarik. Lely Indah Mindarti menamukan temuan pada penelitiannya 83,2% partisipasi masyarakat dalam kursus bahasa Inggris berkontribusi pada pelaksanaan 72,19% pendidikan berbasis masyarakat dan berjalan dengan baik. Pada hasil perhitungan uji korelasi diperoleh nilai 0,437 yaitu nilai sedang. Artinya, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi pencapaian pendidikan berbasis masyarakat. Nilai p positif 0,008 menunjukkan hubungan antara partisipasi masyarakat dan pencapaian pendidikan berbasis masyarakat. [481] Nilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi pelibatan masyarakat maka semakin baik pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat. Ahmad Subakir (2018) juga melakukan penelitian di lokasi yang sama dengan judul Kajiannya. Dari Desa ke Desa Inggris (Studi Sejarah Ekonomi Desa Tulungrejo Pare Kediri 1977-2011). Kajian mengungkapkan bahwa keberadaan lembaga kursus telah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Turunglejo, mulai dari sektor pertanian hingga sektor jasa seperti kos-kosan dan warung makan. Persaingan antara orang-orang dengan modal besar dan kecil mulai muncul seiring dengan munculnya lapangan

[481] Lely Indah Mindarti; Ronny Subroto Suryo Guritno, "the Development of Communty-Based Tourism in "Kampung Inggris" Pare, Kediri Regency, East Java", *Karsa: Journal of Social Islamic Culture* 27, 1(2019): 76.

kerja baru yang menarik orang-orang dari daerah lain untuk berbondong-bondong ke sini.[482]

Oleh sebab itu, penelitian ini sebenarnya telah didukung oleh banyak penelitian. Hingga kemudian berkembang ke ranah yang lebih luas yakni perubahan sosial keagamaan disebabkan oleh peningkatan daya ekonomi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal. Penelitian ini menarik dan konstributif. Dibilang menarik, karena realitas nilai-nilai agama atau religiuitas masyarakat Pare, Kediri terlepas atau mengelupas disebabkan oleh perubahan fenomena sosial. Umumnya, agamalah yang menciptakan budaya ekonomi baru. Sementara dibilang substantif, penelitian ini melahirkan kebijakan dan pemahaman utuh bahwa peningkatan ekonomi semestinya tidak mencerabut nilai-nilai religuisitas.

B. Ekonomi dan Sosial Keagamaan

Perubahan sosial budaya (dalam hal ini agama di dalamnya) dan ekonomi masyarakat, baik yang revolusioner maupun yang evolusioner, akan terjadi seiring dengan perubahan dan perkembangan dunia di masa depan. Tentu saja perubahan ini akan terus terjadi, karena perubahan ini dapat mengarah pada perkembangan kelompok masyarakat. Sebagai contoh, perubahan sosial dalam agama dapat dilihat dari perbedaan pemikiran masyarakat pada saat itu dan sekarang.[483]

---

[482] Ahmad Subakir, "Pergulatan Sosioreligius di Tengah Arus Perubahan Ekonomi pada Masyarakat Kampung Inggris Pare Kediri", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 8, 2(2018): 485-508.

[483] Sardjana Orba Manullang, "Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan di Era Tekhnologi", *Cross-Border* 4, 1(2021): 83-88.

Perubahan yang terjadi tentunya bukan perubahan ke arah kemunduran, melainkan perubahan yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik dan sosial dan keagamaan masyarakat. Menurut Inglehart, perubahan mendalam dalam pandangan dunia massa mengubah kehidupan ekonomi, politik dan sosial.[484]

Jadi, perubahan ini perlu dan harus selalu terjadi. Hal ini dimungkinkan karena masalah politik, sosial, ekonomi dan agama begitu mendesak bagi masyarakat di Indonesia atau bahkan global. Dalam hal perubahan sosial budaya dan ekonomi, agama sebagai bagian dari sosial budaya memiliki dampak evolusioner terhadap perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Peran sosial budaya juga meningkatkan agama dan pendidikan (dan sebaliknya). Pembentukan agama dan kondisi pembelajaran yang baik juga menanamkan norma sosial, budaya dan lingkungan sekitar agar mampu memberikan sumbangsih terhadap konflik sosial.[485] Menurut Philip H. Phenix:

> *the process of learning a culture, called "sosialization", takes place by sosial interaction, through which internalized object are built up. Included among these internalizations are the many roles which define the system of duties toward others, and these enter into the structure of the developing sosial life.*
>
> *the activity of education and training of all kinds has become one of the prime movers of development. It is contributes to scientific and technological progress, and to the widespread advance*

---

[484] Dian Cita Sari dkk., *Sosiologi Agama* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 22-24.

[485] Lihat dalam Ketut Bali Sastrawan; Kadek Hengki Primayana, "Urgensi Pendidikan Humanisme dalam Bingkai a Whole Person", *Haridracarya: Jurnal Pendidikan Agama Hindu* 1,1(2020): 34-35.

of knowledge, which are the most decisive factors of economic growth. [486]

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diambil asumsi bahwa pendidikan bisa menjadi agen perubahan sosial budaya masyarakat dan perubahan itu sendiri mengharuskan perubahan dan pengembangan kebijakan pendidikan. Sebaliknya jika terjadi transaksional pendidikan maka akan terjadi semacam pengkultusan komoditi yang pada akhirnya melahirkan kapitalisasi pendidikan dan melahirkan masyarakat-masyarakat kapitalis baru.

Menurut Tilaar, tidak ada masyarakat yang tetap tidak berubah. Sosiologi sangat tertarik dengan perubahan sosial. Oleh karena itu, lahirlah berbagai teori perubahan sosial. Tilaar berpendapat bahwa perubahan sosial didorong oleh tiga faktor utama. Perlunya demokratisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan globalisasi. Pertama, demokratisasi menjadi sangat berpengaruh mengingat masyarakat dunia merupakan masyarakat tanpa batas yang saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Kedua, kemajuan teknologi memiliki dampak besar pada perubahan sosial.[487]

Kemajuan ini didasarkan pada rasa ingin tahu manusia, didorong oleh kebutuhan manusia untuk bertindak lebih cepat dan memenuhi kebutuhan semua manusia yang ada.

---

[486] Ronald Inglehart, *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997), 3.

[487] T.A.M. Tilaar, *Peran Perguruan Tinggi di Daerah Dalam Otonomi Daerah,* dalam buku *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru: 70 Tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.* Cet. Ke-3 (Jakarta: Grasindo, 2016), 243.

Ketiga, globalisasi memiliki dampak yang sangat besar terhadap perubahan. Menimbang bahwa hubungan akan menjadi lebih intim dan kompetitif. Seperti disebutkan sebelumnya, masyarakat memiliki potensi untuk mempengaruhi perubahan sosial. Indonesia, anggota masyarakat internasional, juga akan terkena dampaknya. Masyarakat Indonesia saat ini sangat tergantung dan terpengaruh oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi.[488] Agama tidak lagi hanya mengacu pada hal yang sangat sakral, tetapi berfokus pada supranatural (nominatif). Tetapi agama juga menjadi penting, terutama dalam situasi ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan.

Dalam keadaan seperti itu, agama menawarkan pandangan dunia di luar jangkauan. Sebaliknya, dalam dunia sosial manusia, saling ketergantungan antar bidang kehidupan tidak dapat dihindari, meskipun masing-masing bidang kehidupan memiliki karakteristik dan nilai tersendiri.[489] Secara ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama. Misalnya dalam bidang ekonomi, bisnis pada khususnya memiliki target keuntungan. Ini adalah ukuran siapa yang berhasil dalam bisnis ketika menghasilkan keuntungan. Namun, manfaat yang diperoleh tidak tercapai tanpa landasan moral dan agama.[490]

---

[488] Lihat dalam penelitian Adisel, "Penggunaan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Manajemen Pemebelajaran pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal of Adminitration and Educational Management (Alignment)* 3, 1(2020): 91.

[489] Prawiradilaga D.S., *Wawasan Tekhnologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 87-88.

[490] Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Postkolonial* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012) 195.

C. Korelasi Perubahan Ekonomi dan Moderasi Agama

Teori selanjutnya yang bisa dijadikan pisau analisis dalam kajian masalah ekonomi dan agama tentu saja Weber. Dalam bukunya The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, Max Weber menulis bahwa pemikiran keagamaan, baik politik, ekonomi, sosial atau budaya, (kehidupan di dunia ini) menjelaskan bahwa hal itu memiliki pengaruh besar pada perkembangan materi. aspek. Dengan kata lain, ada hubungan yang sangat penting antara kemajuan di alam pikiran (tidak penting) dan kemajuan di alam materi.[491] Weber menganalisis bahwa perubahan masyarakat Barat menuju pembangunan ekonomi tidak semata-mata karena bisnis dan investor. Untuk Brian S Teori-teori Turner dan Weber harus dianggap mengandung teori-teori nilai yang ideal, dan selama ada batas-batas tertentu, teori-teori itu dapat dibenarkan.

Konsisten dengan Turner, Aratas juga mengatakan tesis Weber dapat diterapkan di Asia Tenggara, membutuhkan penyesuaian tertentu antara Protestan dan Muslim, yang memiliki perbedaan dalam konsepsi mereka tentang Tuhan. Kajian perilaku keagamaan dan ekonomi ini setidaknya memberikan konteks akademis dimana kajian agama dan perubahan sosial memiliki konteks sosiologis yang berbeda.[492] Ini memperoleh referensi ilmiah yang diperluas lebih lanjut untuk memperkaya masalah pemahaman agama, dan berupaya untuk menargetkan seberapa besar kemungkinan agama untuk menerapkan

---

[491] Roland, *Agama: Dalam Analisis.,* 115.

[492] Deden Ridwan Maman, M. Ali Mustofa, dan Ahmad Gaus, *Metode Penelitian Agama: Teori dan Praktik,* Cet. Ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2015), 46.

transformasi sosial ekonomi dengan mengembangkan yang baru Cari tahu betapa pentingnya konteks penelitian. Apa yang dikatakan Weber dalam risalahnya

Buku The Ethics of Protestantism tampaknya sejalan dengan apa yang terjadi dalam Islam. Taufik Abdullah dalam bukunya Religion, Work Ethic, and Economic Development, menyatakan bahwa 'etika' yang dipancarkan Al-Qur'an hampir tidak bisa dibedakan dengan apa yang disebut Weber sebagai 'etika Protestan'.[493] Dari teori di atas kita dapat memperoleh teori yang akan digunakan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini. Semakin tinggi pemahaman keagamaan seseorang, semakin progresif perilaku ekonominya dan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya sendiri.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama dan perilaku ekonomi. Dalam pandangan Marx, perubahan sosial, termasuk agama, melekat pada kondisi historis perilaku manusia. Lebih khusus lagi, karena dalam sejarah kehidupan material manusia, perubahan sosial pada hakikatnya dapat dijelaskan dalam pengertian seperangkat hubungan sosial yang timbul dari pemilikan modal atau materi. Menurut Marx, ada tiga tema yang menarik, terutama ketika membahas perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan metode atau teknologi produksi material sebagai sumber perubahan sosial budaya.

[493] Ahmad Putra, "Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber", *al-Adyan: Journal of Leligious Studies* 1, 1(2020): 15-17.

Lagi pula, kondisi-kondisi material dan cara-cara produksi di satu sisi, dan hubungan-hubungan sosial dan norma-norma kepemilikan di sisi lain, adalah perubahan-perubahan sosial esensial yang membawa dari komunitas-komunitas nasional primitif ke bentuk-bentuk kapitalisme modern. Pada tataran kehidupan komunal, masyarakat hidup di bawah ideologi individualistis, mereduksi relasi antarmanusia menjadi relasi kepemilikan. Dalam hubungan kapitalis, hubungan pekerja-majikan ditentukan oleh hubungan antara pekerja, yang menjual listrik kepada pengguna dalam sistem pasar impersonal.[494]

Dapat dikatakan bahwa seseorang menciptakan sejarah materialnya sendiri. Selama manusia hidup, mereka bergulat dengan lingkungan materialnya dan memasuki hubungan sosial yang terbatas dalam proses pembentukannya.[495] Kemampuan manusia untuk menciptakan sejarah dibatasi oleh materi dan lingkungan sosial yang ada. Seseorang dibatasi oleh kepemilikan alat-alat produksi, hubungan antara perjuangan kelas yang merupakan turunan dari hubungan sosial yang diciptakannya.

D. Dialektika Perubahan Sosial keagamaan dan Ekonomi

Nilai-nilai keluarga, interaksi masyarakat, perubahan negara, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendidikan. Perubahan ekonomi adalah perubahan

[494] Weber Max, *From Max Webber.Essays in Sociology,* Edited by H.H Gearthand C. Wright Mills (Ne York: Oxford University Press, 1947), 194.

[495] Lihat dalam bukunya Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Islam* cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2016), 45.

kesejahteraan, mata pencaharian, pendapatan ekonomi dan etos kerja. Ajaran agama dalam hal ini dapat berdampak sangat kuat terhadap nilai-nilai yang ada dalam budaya masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks ini, semangat yang memandu keberadaan dan aktivitas berbagai pranata masyarakat (keluarga, ekonomi, politik, dan lain-lain) dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai sistem nilai yang bersumber dari afiliasi keagamaan tersebut. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang ada di masyarakat.[496]

Oleh karena itu, agama merupakan salah satu faktor non-ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi, menciptakan pola-pola tertentu dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Kenneth E. Boulding, pengaruh agama dalam kehidupan ekonomi begitu kuat sehingga mempengaruhi jenis barang yang dihasilkan, pembentukan lembaga ekonomi dan, tentu saja, keputusan tentang praktik dan perilaku ekonomi. Pandangan bahwa menganalisis dampak pemahaman agama terhadap pemberdayaan ekonomi bersumber dari pertimbangan Weber tentang etika Protestan dalam perkembangan kapitalisme.

Salah satu isu solutif utama yang dikaji oleh Weber adalah peran agama sebagai figur pengembangan perusahaan swasta di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Weber berusaha menjawab pertanyaan tentang kerangka kerja perusahaan swasta Eropa dan Amerika mengapa negara tersebut mengalami kemajuan finansial. Setelah

---

[496] Made Saihu, *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Plurisamise Agama di Indonesia),* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 178.

pemeriksaan, Weber menyimpulkan bahwa salah satu pendorong utama adalah apa yang disebutnya etika Protestan. Etika Protestan menyatakan bahwa orang terikat pada satu atau lain surga atau kutukan. Namun, orang yang bersangkutan tidak memiliki kenalan dengannya.[497] Hal ini membuat mereka resah dan khawatir akan ketidakpastian nasib mereka.

Keyakinan ini bekerja keras untuk membuat pengikut Calvinis berkembang. Mereka tidak bekerja dengan egois. Artinya, kita bekerja terutama untuk mengatasi rasa takut daripada mencari kekayaan materi. Weber, etika Protestan dan semangat kapitalisme, berteori bahwa etika dan pemikiran Puritan mempengaruhi perkembangan kapitalisme. Namun, ketaatan beragama biasanya disertai dengan penolakan terhadap urusan duniawi, termasuk mengejar kekayaan. Studi Weber adalah salah satu yang mengeksplorasi hubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi.[498] Ketika agama diperluas ke budaya, karya Weber menjadi pendorong utama munculnya penelitian tentang aspek budaya ini, dan peran agama sebagai salah satu nilai sosial yang sangat mempengaruhi anggota masyarakat menjadi sangat penting.

McClellaland telah mengembangkan konsep psikologis yang disebut Need for Achievement. Ini disingkat sebagai simbol terkenal n-Ah. Menurut McClelland (1961), orang dengan n-Ah tinggi yang memiliki kebutuhan kinerja tidak puas karena mereka dihargai atas pekerjaannya,

---

[497] Max Weber, *Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme* (Yogyakarta: Narasi Pustaka Promethea, 2015), 65-66.

[498] Anthony Giddens. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009), 156.

tetapi hasil kerjanya dianggap sangat baik. Dia mampu melakukan pekerjaannya dengan sempurna, jadi dia memiliki kepuasan batin. Imbalan penting adalah faktor sekunder. McClellaland juga mengatakan bahwa jika ada banyak orang dalam masyarakat dengan n-Ah yang tinggi, masyarakat tersebut diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.[499]

Proses pemahaman agama dapat dilihat melalui tiga peristiwa penting dalam kehidupan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmuwan sosial umumnya setuju bahwa hubungan antara aktor dan masyarakat bersifat dialektis. Di sisi lain, aktor individu mempengaruhi masyarakat, tetapi pada saat yang sama aktor juga ditentukan oleh masyarakat. Hubungan dialektis antara aktor dan masyarakat ini terjadi dalam tiga tahap penting: tahap internalisasi, tahap objektifikasi, dan tahap eksternalisasi. Oleh karena itu, ketiga hubungan tersebut dapat digunakan untuk memahami bagaimana perilaku pedagang informal dalam aktivitas sehari-harinya, baik dalam bisnis maupun dalam aktivitas sosial lainnya.[500] Dari sudut pandang ini, manusia sebagai individu dan aktor adalah pengubah budaya yang aktif. Pada fase internalisasi, aktor dipengaruhi oleh masyarakat melalui institusi yang dilembagakan.

Selain itu, pada tahap objektifikasi, terbentuklah pengetahuan, yang membentuk pandangan hidup yang menentukan cara mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan

---

[499] Lembaga Al Kitab, *AL KITAB* (Jakarta: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 2013), 71.

[500] Moh. Yasir Alim, *Meditasi Agama, Post Truth dan Ketahanan Nasional: Sosiologi Agama di Era Digital* (Yogyakarta: LKiS, 2018), 56-58.

tersebut, aktor ditentukan oleh kuat atau lemahnya tenaga penggerak dari dalam yang ada dalam dirinya. Kekuatan pendorong ini disebut "niat". Kekuatan atau kelemahan inisiatif yang mempengaruhi fase eksternalisasi. Fase eksternalisasi adalah fase di mana orang membentuk atau mempengaruhi masyarakat.[501] Di sisi lain, studi oleh beberapa peneliti Barat menunjukkan bahwa tradisi Islam tidak mendukung proses akumulasi ekonomi kapitalisme secara keseluruhan, sehingga sulit atau tidak berhasil untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di kalangan pemeluk Islam.[502] Islam dicap sebagai agama yang menanamkan lemahnya etos kerja dan daya saing pada pemeluknya.

E. Gambaran Umum *Kampung inggris* Pare

Kampung Inggris tepatnya adalah nama Kampung Tulungreho dan Kampung Palem yang terletak di Dusun Singahan, Kabupaten Kediri, karena kemampuannya dalam mengembangkan kursus bahasa Inggris. Julukan Kampung Ingris berasal dari seorang jurnalis yang meliput kampung tersebut pada masa lalu. Dengan hadirnya kampung Inggris, kampung Palem dan Tulungrejo menjadi salah satu primadona investasi baru di kabupaten Palais dan sekitarnya.[503] Sistem ekonomi menerapkan

---

[501] Fery Adhi Dharma, "the Social Contruction of Realitiy: Peter L. Berger's Thoughts About Sociala Reality", *Kanal* 7, 1(2018): 99.

[502] . Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantra: Memahami Sosiologi Integralistik* (Jakarta: Kencana, 2017), 38.

[503] Kampung Inggris yang berada di Dusun Singgahan mulai awal terbentuk sejak pada tahun 1977 yang mana mulai berdirinya tempat kursus bahasa asing yang pertama kalinya. Keadaan masyarakat Dusun Singgahan pada saat itu sangatlah memprihatinkan dan dikelilinggi oleh banyak pepohonan dan layaknya seperti keadaan

sistem calendism dimana lembaga pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebagai inisiator ekonomi yang bertugas menjadi jantung dari pergerakan ekonomi di sekitarnya. Kehadiran English Village lambat laun mengubah pola gaya hidup masyarakat desa yang ditandai dengan meningkatnya pekerjaan.[504]

Jumlah lembaga pembelajaran pada tahun 2016 sebanyak 171 unit. Jumlah ini tidak bertahan lama hingga tahun 2010. Hingga akhir Mei 2010, jumlah itu turun menjadi 4.444.161. Jumlah siswanya mencapai 4.500 dari berbagai daerah di Indonesia. Ruang belajar merupakan ruang sementara dengan ukuran yang sama dengan ruang tetap berukuran 3x4m. Setiap kelas memiliki kapasitas rata-rata 15 siswa, meskipun beberapa institusi menawarkan hingga 40 siswa per kelas. Waktu belajar adalah 6 s.d. 12 bulan. Fakultas terdiri dari mahasiswa institusi yang memiliki keterampilan untuk mempelajari materi. Masa magang sekitar satu sampai tiga tahun. Ada 11 organisasi masyarakat di desa Tulungrejo dan Pelem.[505] Setiap

---

perdesaan yang berada di tempat yang pelosok. Dipinggiran jalan banyak ditanami pepohonan bambu. Keadaan Dusun Singgahan atau Kampung Inggris tentunya sekarang sudah banyak berubah dan mulai mengalami perkembangan dari pada awal munculnya lembaga pertama kali. Letak geografis Kampung Inggris itu sendiri berada di bagian barat Kecamatan Pare berbatasan dengan Desa Tulungrejo. Sebagaimana desa pelem memiliki 4 pembagian wilayah diataranya Dusun Pelem, Singgahan, Ngeblek, dan Dusun Cangkring. Yang mana jarak Desa Pelem dengan pusat pemerintahan di Kabupaten Kediri berjarak sekitar 24 km. Ali Sukron, *Wawancara*, (Kediri, 13 Maret 2018). Ali Sukron adalah kepala desa Desa Palem, Singgahan Kediri.

[504] Wiwin Yualianingsih; Gunarti Dwi Lestari; Utari Dewi, *Learning Society Kampung Inggris* (Surabaya: Beta Aksara, 2020), 78.

[505] Pusat Informasi "Kampung Inggris" tahun 2015.

organisasi memiliki struktur yang terdefinisi dengan baik di mana otoritas dibagi antara administrator dan anggota. Kegiatan organisasi disesuaikan dengan jenis organisasi.

Organisasi tersebut terdiri dari asosiasi pemilik asrama di depan "Desa Dreamton". Organisasi NU memiliki jumlah anggota dan peserta terbesar, dan Mina Jaya Group, asosiasi pengusaha budidaya ikan, memiliki jumlah terkecil. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian, dengan 5693 orang bekerja. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di dekat pusat kecamatan sebagian besar bekerja di sektor non-pertanian seperti perdagangan, pegawai negeri, dan sektor non-pertanian lainnya. Pendapatan rata-rata per rumah tangga mencapai Rp 1.500.000 per tahun pada tahun 2008. Oleh karena itu, desa Trunlejo dan desa Perem tergolong desa mandiri. Tipologi desa ini adalah mata pencaharian masyarakat telah bergeser ke mata pencaharian non-pertanian, sistem ekonomi telah berubah menjadi kapitalis, dan adat istiadat telah dilestarikan.[506] Ini berarti bahwa pandangan yang lebih tradisional dan pra-kapitalis tentang tatanan ekonomi pedesaan tidak dapat sepenuhnya ditegakkan.

F. Karakteristik Sosial Keagamaan Berdasar Ekonomi Masyarakat

Salah satu yang menarik dari persoalan ini adalah membahas tentang perubahan pekerjaan warga *Kampung inggris* Pare. Sebelumnya warga *Kampung inggris* Pare bermata pencaharian utama sebagai petani tapi sekarang mata pencaharian utama warga *Kampung inggris* Pare

[506] Pusat Informasi "Kampung Inggris" tahun 2017.

bukan hanya petani saja tetapi juga wirausaha.[507] Seperti yang dketahui bahwa keadaan Dusun Singgahan pada saat ini sudah berbeda. Berbeda dengan keadaan Dusun Singgahan sebelum munculnya lembaga kursus bahasa asing yang mana semakin meluas. Sebutan nama dari *Kampung inggris* sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas dan banyak didatanggi oleh pendatang dari berbagai daerah. Tempat kursusnya sendiri semakin meluas, dan tidak hanya di Dusun Singgahan saja. Akan tetapi, sampai pada desa lainnya, yaitu Desa Tulungrejo.[508]

Sebagaimana dalam tahapan suatu proses menuju perubahan, tempat lembaga kursus pada akhirnya bisa menyebar sampai perdukuhan berikutnya. Hal ini menjadi Desa Pelem yang telah memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan Desa lainnya. Para pendatang semakin mengenal akan keberadaan *Kampung inggris*. Dari berbagai daerah baik dari luar pulau pun datang dengan tujuan untuk belajar bahasa asing di *Kampung inggris*.

Dengan beralih sebutan menjadi *Kampung inggris*, masyarakat di dusun singgahan dan desa Tulungrejo merasakan akan perubahan yang terjadi. Diantara perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar terdiri dari beberapa aspek diantaranya, perubahan di dalam pemikiran (*mind set*), perubahan dalam bidang perekonomian, perubahan dalam segi life style, serta perubahan dalam segi pendidikan atau pengetahuan. Bentuk perubahan yang telah terjadi di dalam masyarakat dusun singgahan dilatarbelakanggi oleh adannya *Kampung*

---

[507] Miswanto, *Wawancara* (Kediri, 20 Juli 2021).
[508] Ali Sukron, *Wawaancara* (Kediri, 13 Juli 2021).

inggris serta banyak pendatang yang memasuki dusun tersebut, sebagaimana masyarakat dusun Singgahan dan Tulungrejo berfikir untuk mulai menjadi lebih maju.[509]

Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dahulu sebagaimana perubahan yang telah terjadi dan terkadang berjalan sangat cepat sehingga membuat masyarakat sekitar kurang menyadari akan perubahan yang telah terjadi. Perubahan itu sendiri selalu terikat akan waktu dan tempat dan berlangsung secara terus menerus sebagaimana dalam menuju perubahan memerlukan suatu proses atau tahapan dalam menuju keberlangsungan dalam pola perubahan.

Walaupun perubahan sosial itu sendiri merupakan suatu proses atau tahapan yang selalu melekat dalam perkembangan masyarakat yang semakin bersifat maju atau berkembang maka, perlu untuk memaknai dan memahami secara jelas akan proses perubahan sosial yang telah terjadi pada suatu masyarakat. Dengan mengetahui akan tahapan serta proses dalam menuju perubahan sosial itu sendiri akan diketahui berasal dari mana saja awal perubahan itu terjadi dan tahapan awal yang melatar belakanggi proses perubahan sosial tersebut.[510] Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

[509] Wiwin Yulianingsih; Supriyono; Ach. Rasyad; Umi Dayati, "the Involvement of Informal Sector Workers in Society Learning Activities a Kampung Inggris Pare Kediri", *Journal of Social Studies Education Research* 9, 3(2018): 136.

[510] Nawari Ismail, *Perubahan Sosial-Budaya Komunias: Agama Dam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 27-28.
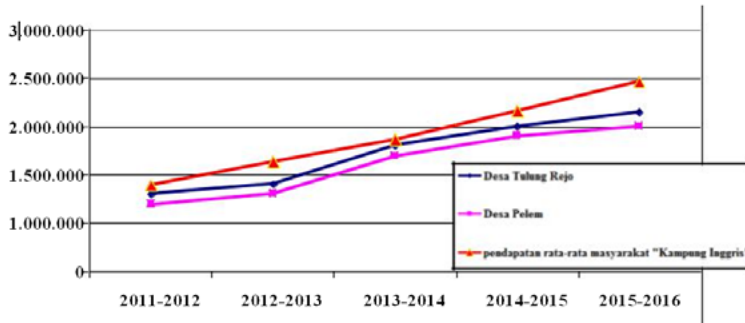
Gambar 1.
Pendapatan rata-rata masyarakat *Kampung inggris* Pare

Selain itu terjadi perubahan pola pikir masyarakat di *Kampung inggris*, melalui tahapan perubahan pemikiran masyarakat menjadi lebih berkembang hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perubahan dan keinginan dari masyarakat sendiri untuk berinsiatif atau memiliki ide dengan memanfaatkan peluang dengan kondisi yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat dusun singgahan tentunya mengamati bagaimana pola kebiasaan yang dibawa oleh para pendatang sehingga dari munculnya para pendatang, masyarakat mendapatkan banyak hal dan pemikiran untuk berkembang dialami oleh warga. Sebagaimana diungkapkan oleh John salah seorang warga dusun singgahan:

> *Masyarakat sudah berfikir maju sekarang nggak seperti dulu lagi, dengan banyaknya orang yang masuk kampung membuat masyarakat jadi punya pemikiran yang maju dan ingin berkembang. Yang dulunya punya tanah tidak terpakai mereka mulai mengumpulkan modal baik pinjam bank, cari investor untuk membangun kursusan, kos-kosan maupun usaha yang lainnya.*[511]

---

[511] Asmo John, *Wawancara* (Kediri, 22 Juli 2021). Asmo adalah warga *kampong inggris* yang membuka kos-kosan.

Masyarakat yang masih menggangur dan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dapat membantu didalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara berjualan makanan, minuman, serta kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya sebagian masyarakat yang memiliki ide untuk membuka usaha, membuat masyarakat bisa merasakan hadirnya lembaga kursus yang berada di dusun tersebut. Dapat dilihat bahwa para penjual yang berjualan di lingkungan *kampung inggris* atau dusun singgahan sangatlah banyak, tidak hanya berasal dari masyarakat dusun singgahan saja, akan tetapi juga terdapat pendatang yang berasal dari luar.

Dengan beragamnya usaha yang dimiliki oleh sebagian warga di *Kampung inggris* maka, dapat meminimalisir terjadinya pengganggguran. Walaupun di *kampung inggris* dari segi usaha yang ada, tidak berasal dari warga dusun Singgahan dan Tulungrejo sendiri dan terdapat juga dari pihak luar, akan tetapi masyarakat di *Kampung inggris* dapat merasakan keuntunggannya. Usaha loundry yang berada di *Kampung inggris* ini kurang lebih ada sekitar 28 tempat loundry yang diataranya berada di jalan Seruni, Anyelir, Singgahan, Pinang, Brawijaya, flamboyan dan masih banyak lagi. Baik yang berada di jalan besar maupun yang berada di gang jalan dalam. Rata-rata biaya loundry per *Kg* nya dapat mencapai sekitar 3.500, dan dapat diantar atau diambil secara langsung oleh pemilik loundry tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat dimaklumi bahwa penyesuaian individu Kampung Inggris yang semula agraris menjadi industrialis, juga berubah contoh kakunya, menjadi mekanis-ketat. Artinya, masyarakat Kampung

English Pare memiliki kewaspadaan lokal yang ketat bukan karena ketergantungan mereka pada kebutuhan keuangan, keamanan dan administrasi untuk hidup mereka sekali lagi, tetapi karena perubahan konstruksi masyarakat, yang disebabkan oleh perubahan moneter mereka. rancangan. Contoh koneksi yang mereka buat dalam sudut pandang sosio-ketat juga bergerak dari kebutuhan ke kebutuhan komunikasi, ini karena desain sosial yang mendorong mereka untuk melakukan seperti itu.

G. Spiritual-Kapitalis Masyarakat Pare Kediri: Menuju Moderasi Agama

Masyarakat kampong Inggris dengan sendirinya tentunya mengamati bagaimana pola kebiasaan yang dibawa oleh para pendatang sehingga dari munculnya para pendatang, masyarakat mendapatkan banyak hal dan pemikiran untuk berkembang dialami oleh masyarakat. Sebagaimana masyarakat mulai mengenal suatu hal yang bersifat baru yang sebelumnya masyarakat tidak mengetahuinya dan berfikir bahwa banyak peluang usaha yang bisa mereka bangun, dengan kebutuhan para pendatang akan segala potensi komoditi di *Kampung inggris* miliki, maka para masyarakat mulai berpikir kreatif dan inovatif untuk meraih keuntungan.

Hal ini seperti pendapat Karl Marx yang berpegang teguh pada prinsip bahwa manusia menentukan sejarahnya sendiri, meskipun dia memaksakan dirinya melawan kodratnya dalam usaha mengatasi proses itu. Sepanjang sejarah ternyata manusia kian banyak merubah alam untuk membuat lebih berguna bagi tujuan manusia dan

dalam proses mengubah alam itu pun manusia merubah dirinya sendiri.[512] Warga *Kampung inggris* mengubah alam sekitarnya kemudian dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai keinginannya tanpa disadari perubahan fisik tersebut juga merubah nilai-nilai keagamaan yang ada di daerahnya yang disebabkan pertukaran nilai-nilai keagamaan yang dibawa oleh para pendatang yang belajar dan berinvestasi di Kampung inggris.

Perubahan tersebut contohnya mengubah lahan persawahan menjadi tempat kursus, warung makan, camp bahasa Inggris, tempat laundry, tempat kos dan lain sebagainya. Lahan persawahan hanya dapat mendapat untung bagi pemiliknya saja. Meskipun dia memiliki pekerja namun pekerjanya tersebut juga terbatas. Tidak seperti Lembaga-lembaga kursusan yang dapat menyerap tenaga kerja ribuan orang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup ribuan orang tersebut. Tenaga kerja tersebut tidak terbatas hanya di dalam lembaga-lembaga tersebut saja namun di luar lembaga-lembaga tersebut. Seperti banyaknya warung makan, tempat laundry, travel, camp bahasa Inggris dan kos-kosan yang didirikan setelah adanya lembaga-lembaga kursus.[513]

Sesuai dengan apa yang telah diperoleh peneliti di lapangan, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat menjadi penentu bagi dirinya sendiri dalam kehidupan

---

[512] Munarofah; Masyhuri, "Analisis Kritis terhadap Pemikiran Max Waber (Perspektif Islam)", *JPIK: Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 2, 2(2019): 392.

[513] Nur Afni Lathifah; Agus Purnomo; Sukamto, "Dinamika Pengelolaan Kampung Inggris oleh Masyarakat Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, 2(2020): 189-190.

yang dialaminya. Jika mereka berkeinginan terhadap suatu hal maka mereka harus bisa berusaha untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Jika keinginan itu muncul tanpa diiringi adanya usaha maka keinginan itu pun hanya akan menjadi angan-angan saja. Tidak akan menjadi kenyataan. Masyarakat di *Kampung inggris* menyadari bahwa kebutuhan hidup mereka semakin hari semakin naik maka dari itu mereka berkeinginan untuk sebisa mungkin mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mereka berkeinginan untuk menjadikan hidup mereka lebih baik lagi. Kemudian timbullah ide-ide di dalam pikiran mereka untuk mewujudkan keinginan mereka. Ide-ide yang muncul tersebut antara lain menambah pekerjaan lagi dan berubah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain (dari masyarakat agraris menjadi masyarakat kapitalis yang oportunis).[514]

Seperti halnya yang terjadi di *Kampung inggris* struktur yang dapat mengubah masyarakat secara signifikan adalah struktur ekonomi. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris di Desa tersebut. Keberadaan lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris berpengaruh banyak terhadap kehidupan masyarakat sekitar terutama menyangkut masalah ekonomi. Struktur ekonomi yang semula agraris berubah menjadi struktur kapitalis, di mana struktur ekonomi tersebut mengubah

[514] Muhammad Agus Mushodiq; Ali Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid: Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'ie* 7, 5(2020): 455-470.

cara pandang masyarakat dalam beragama, dari semula organis-religius menjadi mekanik-religius.[515]

Dengan kata lain semula masyarakat *Kampung inggris* memiliki kesadaran organis-religius yaitu kesadaran dalam melaksanakan nilai-nilai keagamaan didorong oleh kebutuhannya bermasyarakat dan berafiliasi di dalam masyarakat sebagai bentuk ketergantungannya pada lingkungan sosial yang bisa melindunginya dan memimpin kehidupannya yang diikat oleh norma-norma keagamaan yang tradisional. Karena pada waktu itu masyarakat *Kampung inggris* masih bercorak agraris, di mana kehidupan mereka tidak memungkinkan untuk menjalani kehidupan individualis. Selain itu, kesamaan profesi (sama-sama menajdi petani) menjadi factor penting dalam menggantungkan diri mereka kepada masyarakat.

H. Pergulatan Sosial Kapitalistik dan Nilai-Nilai Agama

Korelasi antara nilai-nilai agama Islam dan ekonomi menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di desa-desa Inggris diperlukan untuk bekerja. Karena bekerja adalah jawaban dari kenyamanan hidup. Bagi mereka, agama adalah penuntun hidup, tuntunan dan penuntun kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.Menurut ajaran Calvin, Max Weber menulis dalam bukunya "Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism". harus dimulai dengan menyadari pentingnya negara dan

[515] William Kornblum, *Sosiology in a Changing World*, (New York; tp, 1988), 92. Bisa pula dilihat dalam penegasan yang dikatakan oleh Barnabas Ratuwalu, "Transisi Masyarakat Agraris Menuju Masyarakat Industrial Indonesia", *Journal of Industrial Engineerin* 1, 2(2016): 1-12.

tanggung jawabnya terhadap masa depan negara.[516] Dorongan untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan hanya mungkin terjadi jika masyarakat secara keseluruhan memiliki arah kehidupan untuk masa depan yang lebih baik. semangat membangun ekonomi milik Calvinis.[517]

Bagi Calvin, bekerja adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia, dan menunaikan kewajiban di bidang pelayanan merupakan tanda syukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Menjalankan peran dengan itikad baik adalah kunci etika profesional profesional. Mereka yang menerima tugas Tuhan harus memiliki integritas untuk menerima peran mereka dan melayani secara altruistik. Kejujuran, hati yang murni dan tulus, serta kebebasan dari kepentingan pribadi atau kolektif adalah ciri orang yang menghargai anugerah Tuhan. Bentuk kejujuran ini menanggapi pekerjaan sebagai skenario dari Tuhan kepada manusia.

Pekerjaan itu suci, jadi kita perlu melakukannya dengan suci hanya untuk Tuhan. Pekerjaan yang dicintai dan dilakukan dengan baik membawa manfaat besar tidak hanya bagi mereka yang bekerja, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Ini adalah wujud dari persepsi masyarakat Islamic English Village sebagai khalifah dunia, dan masyarakat mewakili Tuhan dalam melindungi dan

---

[516] Kalend, *Wawancara* (Kediri, 12 Agustus 2021).

[517] Marx Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (New York: Charles Scribners Sons, 1958), 23. Bisa juga diperiksa dalam A. Putra, "Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber"…, 88.

menggunakan planet Tuhan untuk kepentingan semua makhluk hidup di planet ini, saya bertanggung jawab.[518]

Konsekuensi dari tanggung jawab ini harus dicapai melalui kerja keras. Menurut Tasmara, pekerjaan umat Islam adalah ibadah dan bukti dedikasi dan rasa syukurnya untuk memelihara dan memenuhi panggilan Tuhan Yang Maha Esa. Karena dia tahu bahwa itu diciptakan sebagai ujian bagi mereka yang memiliki semangat tertinggi yang seharusnya dimiliki Bumi.[519] Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, bekerja adalah (1) bekerja sebagai pekerjaan iman, (2) bekerja sebagai bentuk masa depan, (3) bekerja sebagai pertumbuhan, (3) bekerja sebagai kesabaran, (4). Dapat dikatakan bahwa itu adalah karya. peluang.[520]

Kampong Keyakinan akan dunia post-mortem yang diyakini oleh Muslim Inggris ini dapat menimbulkan sikap tertentu, yaitu sikap mengambil tanggung jawab. Jika kita tidak percaya dengan dunia post-mortem, berarti perbuatan kita tidak akan terbalas, tidak akan ada pahala atau dosa, dan seterusnya. Dengan begitu, kita tidak memiliki dorongan untuk berbuat baik, karena yang benar dan yang buruk itu sama dalam hal pekerjaan. Kedua, sangat penting bagi orang-orang tertentu, terutama pengusaha, untuk memahami hayat atau hidup sederhana. Kehidupan yang mudah dari seorang pengusaha tradisional telah menciptakan sikap sederhana daripada

---

[518] Abraham Kuyper, *Ceramah-Ceramah Mengenai Calvinisme* (Surabaya: Penerbit Momentum, 2012), 14.

[519] Binti Nur Aisyah, "Etos Kerja dalam Islam", *Ekonomi Syariah* 1, 1(2019): 12-14.

[520] Tri Setyo, "Etos Kerja TInggi Cermin Kepribadian Muslim Unggul", *Wahana Akademika* 3, 2(2016): 138.

pemborosan, memungkinkan dia untuk menabung dan kemudian menginvestasikan kembali.Dia tidak hanya tidak ingin boros, dia ingin jujur.Ada di sana.

Sikap integritas ini juga menciptakan etos menjaga kualitas dan tidak membohongi kualitas produk yang diproduksi atau dijual. Hal ini senada dengan Toto Tasmara yang mengatakan bahwa bagian dari etos kerja Islami adalah hidup hemat daripada menumpuk harta dan mengembangkan watak pelit individualistis. Tapi kami hidup hemat karena kami punya cadangan. Dengan kata lain, waktu tidak selalu lurus, ia memiliki pasang surut. Oleh karena itu, hemat berarti memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Bagi Muslim dengan etos kerja Islami yang tinggi, melakukan segala sesuatu dengan benar (dan efisien) dalam hidup adalah bentuk orang-orang yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

Aan, Aspihanto; Fatkhul Muin, "Sinergi Terhaadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme," *Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, 1 (2017).

Abdul Rohman, Dudung. *Moderasi Agama dalam Bingkai Keislaman di Indonesia*. Jakarta: LEKKAS, 2021.

Abdullah, Aminol Rosid. *Teologi Islam: Memahami Ilmu Kalam Dari Era Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Abdullah, Mudofir. *Argumen Pengarusutamaan Budaya dan Kearifan Lokal (Lokal Wisdom) dalam Proyek Moderasi Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2019.

Abdurrohman, Asep. "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam", *Rausyan FIkr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, 1(2018).

Abidin, Zaenal. "Menanamkan Konsep Multikulturalisme Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Global* 1, 3(2019).

Achmad, "Pluralisme Dalam Problema". *Jurnal Sosial Humaniora* 7, 2 (2014).

Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial pridence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang.* Jakarta: Kencana, 2009.

Adzim, M. F; N. S. Vrikati, "Studi Islam Dalam Kaca Mata Normatif Dan Historis". *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman* 8, 3 (2020).

Afni, Lathifah Nur; Agus Purnomo; Sukamto, "Dinamika Pengelolaan Kampung Inggris oleh Masyarakat Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, 2(2020).

Afrizal, Nur. "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an : Studi Konparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar at-Tafasir." *An-Nur* 4,2 (2015).

Agustino, Leo. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Ahmada, Hanafi. *Theology Islam.* Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1982.

Akbar, Ali; Hidayatullah, "Metode Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, 1 (2017).

Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia", *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 13, 2 (2019).

-------. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity", *Jurnal Diklat Keagamaan Surabaya* 13, 2,(2019).

-------. "Religious Moderation In Indonesia's Diversity", *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, 2 (2020).

Alam, Masnur. "Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi," *Islamika* 17, 2 (2017).

Albab, A. U. "Interpretasi Dialog Antar Agama Dalam Berbagai Prespektif". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, 1(2019).

Ali, Muhammad. "The Muhammadiyah's 47 th Congress and Islam Berkemajuan", *STUDIA ISLAMIKA: Indonesian Journal for Islamic Studies* 22, 2 (2015).

Al-Maarif, "Islam Nusantara : Studi Epistemologis Dan Kritis". *Jurnal Analisis* 15, 2 (2015).

Almu'tasim, Amru. "Berkaca NU dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia". *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, 2 (2019).

Amin, A. R. M. "Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisihukum Islam", *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya (Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama* 3, 2 (2014).

-------. "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam," *Al-Qalam* 20, 3 (2014).

Amin, Rauf. "Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisihukum Islam." *Al- Qalam* 20, 3 (2014).

Amstrong, Karen. *the Battle for God: a History of Fundamentalism.* New York: Alfred A. Knoft, 2001.

Anah, S, "Masyarakat Islam Indonesia Pada Abad Modern Dan Kontemporer", *Jurnal Keislaman* 4, 2 (2021).

Anwar, F; Haq, I. "Religious Moderation Campaign Through Social Media At Multicultural Communities", *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 12, 2(2019).

Arif, M. K. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Al-Risalah* 11, 1(2020).

Arif, S. "Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid", *Jurnal Bimas Islam* 13, 1(2020).

Arif, Syaiful. *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural.* Depok: British Council 2017.

Aritonang, A. "Peran Sosiologis Gereja Dalam Relasi Kehidupan Antar Umat Beragama Indonesia. *TE DEUM: (Jurnal Teologi dan Keislaman* 12, 1(2019).

Ashfahani, Ragib. *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an.* Damaskus: Dâr al-Qalam, t.th.

Asmuri, "Pendidikan Multikultural (Telaah Terhadap Sistem Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Agama Islam)." *Jurnal Kependidikan Islam* 2, 2(2016).

Asroni, Ahmad. "Resolusi Konflik Agama: Perspektif Filsafat Perennial", *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 16, 1(2020).

Azhary, Muhammad Thahir. *Negara Hukum (Studi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Dilihat dari Segi Hukum islam).* Bogor: Kencana, 2003.

Azra, A. *Moderasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

-------. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia.* Yogyakarta: Institute Pluralism and Multikulturalism Studies (Impulse) dan Kanisius, 2007.

-------. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam.* Jakarta: Paramadina, 1999.

-------. *Harmoni agama, Kebangsaan dan Pancasila*. Yogyakarta: UGM: 2019.

-------. *Identitas Dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia.* Jakarta: Universitas Indoneisa, 2018.

Bachtiar, Tiar Anwar. *Pertarungan Pemikiran Islam di Indoensia: Kritik-Kritik terhaap Islam.* Jakarta: Pustaka ala-Kautsar, 2017.

Baco Sarluf, "Pluralisme Adalah Fundamentalisme", *Dialektika* 11, 2 (2018).

Bahri, Idik Saipul. "Konsep Mayoritas Ahlussunnah Wal Jamaah", *Jurnal NU* 159, 2(2019).

Bahri, Syamsul. "Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikulturalisme di Indonesia (Landasan Filosofis dan Psikologis Pengembangan Kurikulum Berebasis Multikulturalisme)", *Jurnal DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran* 19, 1(2018).

Bahrudin, Moh. "Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Menyiarkan Paham Keagamaan Moderat Di Provinsi Lampung", *Jurnal Analisis* 3, 2 (2017).

Baidhawy, Zakiyuddin. "The problem of multiculturalism: radicalism mainstreaming through religious preaching in Surakarta." *Journal of Indonesian Islam* 4, 2 (2010).

Banton, Michael. *Racial and Ethnic Competition.* New York: Cambridge Universitas Press, 1983.

Barnabas Ratuwalu, “Transisi Masyarakat Agraris Menuju Masyarakat Industrial Indonesia”, *Journal of Industrial Engineerin* 1, 2(2016).

Basid, Abdul. “Islam Nusantara: sebuah Kajian Post Tradisionalisme dan Neo Modernisme”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 5, 1(2017).

Beiharz, Peter. *Social Theory: A Guide to Central Thinkers,* terj. Sigit Jatmiko, *Teori-Teori Sosial Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Berger, P. L. *The limits of Social Cohesion: Conflict and Mediation in Pluralist Societies*. New York, London: Routledge, 2018.

Berger, P.L *Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion.* New York: Anchor Press, 2011.

Berggren, N; T. Nilsson, T. “Globalization and the Transmission of Social Values: The Case of Tolerance”. *Journal of Comparative Economics*, 43, 2 (2019).

Bherta, Sri Eko; Hendar Putranto, “The role of Intercultural Compeence and Local Wisdom in Building Intercultural and Inter-Religious Tolerance”, *Joural of Intercultural Communication,* 48, 4 (2019).

Bisri, A. Musthofa *Khittah dan Khidmah: Kumpulan Tulisan Majma' Buhuts An-Nahdiyyah*. Pati: Roudloh Al-Thohiriah, 2018.

BM, St. Aisyah, “Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama.” *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, 2(2019).

Brata, Ida Bagus. “Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa.” Jurnal Bakti Saraswati (JBS) 5, 1 (2016).

Buchari, Sri Astuti. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Burhanuddin, Nunu. “Akar Motif Fudnamentalisme Islam: Reformulasi Tipologi Fundamentalisme dan Prospeknya di Indonesia”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, 2(2016).

Busro, “Moderasi Islam (*Wasatiyyah*) di Tengah Pluralisme Agama di Indonesia”, *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan,* Vol. 3, No. 1 (2019).

Bustanuddin, Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Bustomi, Ahmad; Zuhairi, “Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi dalam Pandangan Islam”, *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 5, 2(2021).

Busyro, B., Ananda, A. H., & Adlan, T. S. “Moderasi Islam (Wasathiyyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia”, *FUADUNA : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3, 1(2020).

Busyro; Aditiya Hari Ananda; Tarihoran Sanur Adlan, “Moderasi Islam (Wasathiyyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia”, *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3, 1(2019).

Charles, A. Coppel, *Tionghoa dalam Pusaran Politik.* Jakarta: Eklasa, 2003.

Clark, Walter Houston. *The Psychology of Religion: an Introduction to Religious and Behavior.* New York: The McMillan Company, 1968.

Creswell, John W. *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Trans*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Dahana, A. *Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia*. Bandung: PT Wacana, 2000.

Darlis, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarajat Muktikultural" *Jurnal Rausyan Fikr* 13, 2 (2013).

Darlis, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural", *Rausyan Fikr* 13, 2 (2017).

David A. Westbrook, "Strategic Consequences of Radical Islamic Neofundamentalism," *Orbis* 51, 3 (2007).

Dawing, Darlis. "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural."*Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 13, 2 (2017).

Dawkins, Richard. *The God Devolusion.* London: Black Swam, 2006.

Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003.

Dhofier, Zamakhsyari. "Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai" *Archipel* 28, 1 (2019).

Dodego, S. Hi. A., & Witro, D. "The Islamic Moderation And The Prevention Of Radicalism And Religious Extremism In Indonesia", *Dialog* 43, 2(2020).

Dsouli, O., Khan, N., & Kakabadse, N. K. “Spiritual Capital: The Co-Evolution Of An Ethical Framework Based On Abrahamic Religious Values In The Islamic Tradition. *The Journal of Management Development* 31, 10 (2018).

Duan, J. E. “Relasi Kristen – Islam di Halmahera dalam Kerangka Pembangunan Jemaat. *Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan* 2, 2(2020).

Dzaki, Fatonah. “Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama di Indonesia” *al-Kautsar* 9, 1 (2014).

Efendi, Djohan. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Ekan, Aqimuddin, “Islam sebagai Sumber Hukum Internasional”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 5, 1(2019).

Elizabeth K. Nottingham, *Religion and Society.* Diterjemahkan oleh Abdul Muis Naharong, *Agama dan Masyarakat.* Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Elliade, Mircea. *The Sacred and the Profane: the Nature of Religion.* New York: Harper, 1961.

Erawati, Desi. “Interpretasi Multikulturalisme Agama Dan Pendidikan.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 13, 1 (2017).

Fabio, Petito and Pavlos Hatzopoulos, *Religion in International Relation: The Return from Exile.* New York: Palgrave, 2003.

Fachruddin, Imam; Darsono Eisadirama; Sanggar Kanto; Mudjia Raharjo, “the Dynamics of Community Behavior Changes in “Kampung Inggris” Kediri”, *Jour of Adv Research in Dynamiccal& Control System* 12, 8(2020).

Fadl, K.A. *Selamatkan Islam dari Muslim Purita.* Jakarta: Serambi, 2018.

-------. *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*. Jakarta: Serambi, 2005.

-------. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif.* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.

-------. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan.* Jakarta: Serambi,2006.

Fahmi, Arrauf Nasution. "Minoritas dan Politik Perukunan (FKUB, Ideologi Toleransi dan Relasi Muslim-Kristen Aceh Tamiang)", *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 19, 1(2018).

Fahri, M; A. Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia", *Intizar* 25, 2(2019).

Fahy, J. "The international politics of tolerance in the Persian Gulf", *Religion, State and Society* 46, 4 (2018).

Faiqah, Nurul, And Toni Pransiska. "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, 1 (2018).

Faiz, A., Kurniawaty, I; Purwati. Eksistensi Nilai Kearifan Lokal Kaulinan Dan Kakawihan Barudak Sebagai Upaya Penanaman Nilai Jatidiri Bangsa. *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 8, 4(2020).

-------. Soleh, B., Kurniawaty, I; Purwati. "Tinjauan Analisis Kritis Terhadap Faktor Penghambat Pendidikan Karakter di Indonesia", *Jurnal Basicedu* 5, 4(2021).

Faizal; A.A.M. Ridhwan; A.W. Kalsom, "the Entreprenuers Characteristic from al-Quran and al-Hadis", *International Journal of Trade, Economic and Finance* 4, 4(2019).

Fanani, A. F. "Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda", *Jurnal Maarif* 8, 1(2018).

Farida, Umma "Peran Organisasi Massa Perempuan Dalam Pembangunan Perdamaian (Studi Kasus Muslimat NU Jawa Tengah)," *Palastren* 11, 1 (2019).

Fauziah, N. "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18 1 (2020).

Fidiyani, Rini. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)", *Jurnal Dinamika Hukum* 13, 3 (2013).

Firdaus M Yunus, "Agama Dan Pluralisme". *Jurnal Ilmiah Futura* 13, 2 (2014): 213–19. https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.72.

Fox, JJ., *Memories of Ride Poles and Cross Beams: the Catagorical Foundation of a Rotinese Cultural Design.* Camberra: Departement of Antropology, 2000,

Galtung, Johan "Violence, Peace and Peace Research," *Jounal of Peace Research* 6, 3 (1969).

Gani, A. "Pendekatan Sufistik Dalam Pendidikan Islam Berwawasan Perdamaian." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 23, 2 (2018).

Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa.* Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981.

Gerstein, S.L. Moeschberger, "Building Culture of Peace: An Urgent Task for Counseling Professionals", *Journal of Counseling and Development* 81, 1 (2019).

Ghazali, Adeng Muchat. *Antropolgi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama.* Bandung: Alfabeta, 2011.

Ghufron, G. "Relasi Islam-Kristen: Studi Kasus di Desa Tegalombo, Pati, Jawa Tengah", *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 9, 1(2020).

Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Strukturation,* terj. Maufur dan Daryanto, *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gilles, Kepel, *the Revenge of God; The resurgence of Islam, Christianiry and Judaism in the Modern World.* Londong: Polity, 1994.

Gondo, Utomo, "Merancang Strategi Komunikasi Melawan Radikalisme Agama," *Jurnal Komunikasi Islam* 6, 1 (2016).

Habibi, "Protecting National Identity Based on tha Value of Nation Local Wisdom", *International Journal of Malay-Nusantara Studies* 1, 2(2018).

Hanafi, M. *Moderasi Islam.* Ciputat: Pusat Studi Ilmu al-Qur'an, 2018.

-------. "Konsep al-Wasathiyyah dalam Islam", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 8, 2(2019).

Handoyo, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia (Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

Harahap, Syahrin. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada Group, 2011.

-------. "Konflik Etnis dan Agama di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 1, 2(2018).

Hardi Tambunan, "The Effectiveness of the Problem Solving Strategy and the Scientific Approach to Students' Mathematical Capabilities in High Order Thinking Skills," *International Electronic Journal of Mathematics Education* 14, 2 (2019).

Harin, Hiqmatunnisa; Ashif Az-Zafi, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn", *Jurnal JIPIS* 29,1 (2020).

Haris, Sam. *the End of Faith : Religion, Terror and the Future of Reason*. New York: Norton, 2005.

Harvey W. Kushner, *Encyclopedia of Terrorism*. London: Sage Publication, 2003.

Harvey, David. *The Condition of Postmodernity: An Inquiry into The Origins of Cultural Change*. Cambridge: Blackwell Publisher, 1990.

Hasan, Muhammad Tholchah. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2000.

Hasbullah, M.; M. A. Abdullah, *Wasatiyyah Pemacu Peradaban Negara*. Negeri Sembilan: Institut Wasatiyyah Malaysia, 2013.

Hasyim, N. M. "Tasawuf dan Internalisasi Moderasi Beragama dalam Menghadapi Problematika Bangsa", *Jurnal Analisis* 3, 2(2020).

Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Agama.* Surabaya: Bina Ilmu, 1979.

Hefni, W. "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital : Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri". *Jurnal Bimas Islam* 13, 1 (2020).

Hefni, W., "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital : Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Religious Moderation In The Digital Space : Case Study Of Mainstreaming Religious Moderation Among Islamic Higher Education Institut. *Bimas Islam* 13, 1(2020).

Hendro Puspito D. *Sosiologi Agama.* Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Heriyudanta, Muhammad. "Modernisasi Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra", *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 8, 1 (2016).

Hichens, Christoper. *God is Not Great.* Toronto: McClelland & Stewart, 2007.

Hick, John. *Program of Religious Pluralism.* London: The Macralism Press, 1985, 53; bias juga lihat dalam Thomas Dean (ed.), *Religious Pluralism and Truth: Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion.* New York: State University of New York, 1985.

Hilmy, Masdar. "*The Political Economy of Sunni-Shi'ah Conflict in Sampang Madura*", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 53, 1(2015).

-------. "Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia", *Jurnal Miqot* 36, 2 (2018).

Hoon, Chang Yau. *Identitas Tionghoa: Pasca Soeharto Buda, Politik dan Media.* Jakarta: Media LP3S, 2012.

Huda, M. T. "Pengarusutamaan Moderasi Beragama ; Strategi Tantangan Dan Peluang Fkub Jawa Timur", *Tribakti* 3, 2 (2021).

Hughes, Geoffrey. "European Social Antropology in 2018: An Increasingly Recursive Public", *Social Antropology* 10, 1(2019).

Husaini, Adian, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

I. Svensson, "Fighting with Faith: Religion and Conflict Resolution in Civil Wars." *Journal of Conflict Resolutin* 51, 6 (2019).

Idri, *Epistemologi : Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis Dan Ilmu Hukum Islam.* Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Imam Solichun, "Peran Organisasi Pemuda dalam Menangkal Radikalisme (Studi pada GP Ansor Kota Surabaya Periode 2017-2021)", UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Iman, Fauzul. "Menyoal Moderasi Islam", Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: dari Indonesia untuk Dunia.* Yogyakarta: LKiS, 2019.

Inglehart, Ronald *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies.* Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997.

Irawan, I. K. A. "Merajut Nilai-nilai Kemanusiaan melalui Moderasi Beragama", Prosiding STHD Klaten Jawa Tengah, 1, 1(2020).

Irwansyah, "Radikalisme Agama: dari Kasus Dunia sampai Sumatera Utara", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 8, 1 (2018).

Ishomuddin, *Sosiologi Agama.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Islam, K.N. "Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an Khalil Nurul Islam. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, 1(2020).

Islamiyah, Djamiatul. "Distinction: Islam and Islamic Fundamentalism", *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu: Kajian Kebudayaan dan Keislaman* 16, 32, (2020).

Ismail, Arifuddin. "Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama", *Jurnal Analisa,* XVII (2) 2010.

Isti, Fatonah, "The Role of Multicultural Education towards the Strengthening of Bhinneka Tunggal Ika (Case Study

University of Muhammadiyah Metro)," *ADDIN* 13, 1 (2019).

Jaelani, "Menyorot Fudnamenalisme-Radikalisme Islam: Tinjauan Historis atas Gerakan Hizbugg Tahrir Indonesia", *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan Ekonomi dan Humaniora* 7, 2(2021).

Jamaluddin, Jamaluddin. "Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia." *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, 1 (2022).

Jamaluddin, *Materi Penguatan Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan Bagi Penyuluh Agama Islam Tahun 2021.* Bandung: Bidang Penais Zawa Kemenag Jabar, 2021.

James, William. *The Varieties of Religious Experience: a Study in Human Nature.* New York: Modern Library, 2009.

Jati, Wasisto Rahatjo. "Agama dan Spirit Ekonomi: Studi Etos Kerja dalam Komparasi Perbandingan Agama", *al-Qalam* 35, 2(2018).

Jauhari, Muhammad Ahsan "Perilaku Sosial Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri Setelah Mengikuti Pengajian Kitab Al-Hikam," *Spiritualita* 1, 1 (2018)

Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan dan Riset Nyata.* Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Jaya, Septi Aji Fitra. "al-Quran dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam", *JII : Jurnal Indo-Islamika* 9, 2(2019).

Jazuli, Ahmad, "Strategi Pencegahan Radikalisme dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," *JIKH: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, 2 (2016).

Jennifer, M. Hazen, "Can Peacekeepers Be Peacebuilders?," *International Peacekeeping* 14, 3 (2007).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2019.

Judi, Carter and Gordon S. Smith, "Religious Peacebuilding: From Potensial to Action", dalam Harold Coward dan Gordon S. Smith, *Relegion and Peacebuiding*. New York: State University of New York Press, 2004.

Julianti, "Internalisasi Nilai toleransi Melalui Model Telling Story pada Pembelajaran PKn Untuk mengatasi Masalah tawuran (Studi kasus Tawuran pelajar Sekolah menengah di Sukabumi)", *Jurnal Penelitian Pendidikan* 14,1 (2019).

Junaedi, Edi. "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag." *Harmoni* 18, 2 (2019).

Juwaini, Lutfi. "Pendekatan Wasatiyyah Bagi Menangani Ikhtilaf Fiqh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Nusantara'. Pattani Thailand: UM Research Repository, 2015.

Kurniawan, Asep. "Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren dalam Menjawb Krisis Sosial", *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*, 9 2 (2016).

Kamarusdiana, K. "Al-Qur'an dan Relasi Antar Umat Beragama; Diskursus Tentang Pendidikan Pluralisme

Agama di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 5, 3(2020).

Kambooa, F. M. "The approach of the Quran in the education of generations to moderation", *Journal of University of Anbar For Islamic Sciences* 9, 2(2019).

Karim, H.A. "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin dengan Nilai-Nilai Islam", *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 4, 1(2019).

Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

-------. *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (1st ed.). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

-------, *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta, 2017.

-------. *Moderasi Beragama*. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.

Khalim, Abdul. *Model Pendidikan Islam Anti Radikalisme di Pesantren al-Hikmah 2 Benda Sirampong Kabupataen Brebes Jawa Tengah,* Tesis UIN Walisongo Semarang, 2017.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih.* Semarang: UMS Press, 2014.

Khamami, Akhmad Rizqon. "Dialog Antar-Iman sebagai Resolusi Konflik, Tawaran Mohammed Abu Nimer", *al-Tahrir* 14, 2(2014).

Khoiri, A. "Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 12, 2(2019).

Khotimah, H. "Internalisasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pesantren. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, 1(2020).

Kornblum, William. *Sosiology in a Changing World*. New York; tp, 1988.

Kunu, H. K. "Interaksi Simbolik Islam-Kristen Tantangan Toleransi (Studi Kasus Simbol Salib Terpotong di Kotagede Yogyakarta). *Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, 1(2020).

Kurnia, Ita. "Mengungkap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kediri sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa Indonesia", *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 11, 1(2018).

Kusuma, Wira Hadi. "Agama dan Resolusi Konflik (Analisis terhadap Konflik Keagamaan di Indoenesia)", *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 15, 1(2015).

Louis, W. R. Wibisono; J. Jetten. "A Multidimensional Analysis of Religious Extremism", *Frontiers in Psychology* 10, 2(2019).

Ma'arif , Ahmad Syafi'i, *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam.* Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2018.

Made, Saihu, *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Plurisamise Agama di Indonesia).* Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Madjid, Nurcholish. *Khazanah Intelektual Islam.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019.

Mahfud, Choirul. "The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-China Relations in Islamic Cultural Identity." *Journal of Indonesian Islam* 8, 1 (2014).

Mahmudin, "Dakwah Kontemporer dan Radikalisme Agama di Bulukumba," *Al-Ulum* 16, 2 (2016).

Makhmudah, Siti. "Upaya Masyarakat dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama,* 4, 2(2016).

Maksum, Ali; Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Manshur, F. M; Husni, "Promoting Religious Moderation through Literary-based Learning: A Quasi-Experimental Study", *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29, 6(2020).

Manullang, Sardjana Orba. "Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan di Era Tekhnologi", *Cross-Border* 4, 1(2021).

Marjanne, Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", *Jurnal Hukum Jentera,* 3, 2 (2004).

Mark, Jurgensmeyer. *Terorisme Para Pembela Agama.* Yogyakarta: Terawang Press, 2003.

Mas'ud, A. *Strategi Moderasi Antar Umat Beragama.* Jakarta: Kompas, 2018.

Masykuri, M., Qodriyah, K., "Pendidikan Islam Multikultural Berwawasan Wasathiyah: Penguatan Karakter Wasathiyah Santri Patriot Panji Pelopor", *Jurnal Islam Nusantara* 4, 2(2020).

Max, Weber, n*on Charisme and Institution Building.* Chicago: The Univ of Chicago Press, 1968.

Max, Weber. *From Max Webber.Essays in Sociology,* Edited by H.H Gearthand C. Wright Mills. Ne York: Oxford University Press, 1947.

McClearly, Rachel "Religion and Economy", *Journal of Economic Perspective,* 20(2) 2011.

Mcternan, Oliver. *Violence in Gods Name Religion in an Age of Conflict.* London: Darton Longman and Todd, 2003.

Meisarani, Giyandra. "Resolusi Konflik di Dunia Islam: Studi Kasus al-Shabaab di Somalia", *Jurnal Hubungan Internasional* XII, 2(2019).

Milgram, S. "Behavioral Study of Obedience", *Journal of Abnormal and Social Psychologyy,* 67, 2(2019).

Mindarti, Lely Indah; Ronny Subroto Suryo Guritno, "the Development of Communty-Based Tourism in "Kampung Inggris" Pare, Kediri Regency, East Java", *Karsa: Journal of Social Islamic Culture* 27, 1(2019).

Minftahuddin, M. "Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis. Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 5,1 (2015).

Misrawi, Z. *Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari; Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*. PT Kompas Media Nusantara, 2014.

Moghissi, Haide. *Feminisme dan Fundamentalisme.* Yogyakarta: LKiS, 2021.

Mohammad Hasyim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasathiyah.* Oxford: Oxford University Press, 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Muammar, Khalif. *Tanggapan Kritis Terhadap Wacana Islam Liberal*. Kuala lumpur: Akademi Kajian Ketamadunan, 2006.

Mubarok, Ahmad Agis; Rustam Diaz Gandara. “Islam Nusantara: Moderasi Islam Di Indonesia”, *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, 2 (2018).

Mubit, Rizal. “Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia.” Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman 11, 1 (2016).

Mubit, Rizal. “Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11,1 (2016).

Muchith, M. Saekan “Radikalisme dalam Dunia Pendidikan,” *Addin: Ilmu Sosial dan Keagamaan* 10, 1 (2016).

Muchlish Hanafi, *Moderasi Islam.* Ciputat: Pusat Studi Ilmu Al-Qur'an, 2019.

Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhajir, Afifudin. *Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018).

Muhammad, Hasyim "Diskursus Deradikalisasi Agama: Pola Resistensi Pesantren terhadap Gerakan Radikal," *Jurnal Walisongo* 23, no. 1 (2015).

Mukhlis, Lubis, "Konsep Wasathiyah Dalam Alquran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir)", *An-Nur* 4, 2 (2015).

Mukzizatin, S. "Relasi Harmonis Antar Umat Beragama dalam Al- Qur'an. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, 1(2019).

Munawaroh, Ayu. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Peran Perempuan di Lembaga Legislatif Tahun 2009-2014)," *At-Tabligh* 1, no. 1 (2016).

Munip, Abdul. "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, 2 (2012).

Munir, Abdullah. *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia.* Bengkulu: Zigie Utama, 2019.

Munir, Asep Arsyul. "Agama, Politik dan Fundamentalisme", *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, 1(2018).

Mursid, A. *Pluralitas Sosial dan Hubungan angar Agma Bingkai Kultural dan Treologi, Kerukunan Hidup Umat Beragama.* Jakarta: Badan Peneliti Pengembangan Agama Depag RI, 2018.

Murtaufiq, Sudarto."The NU Concept of Islam Nusantara in Dealing with Radicalism and Terrorism," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, 1 (2019).

Muslihun, "Dakwah dan Radikalisme (Studi pada Kiai di Desa Kandang Semangkon Paciran Lamongan)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Mustafa, Agus. *Islam Jalam Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Agama.* Bandung: Mizan Saifuddin, 2019.

Musthofa, Budiman Mahmud. "Pengembangan Budaya Menuju Kesejahteraan Budaya: Pelajaran Dari Pengembangan Masyarakat Di Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat", *Sosio Informa* 4, 3 (2018).

Mutawali, "Moderate Islam in Lombok: The dialectic between Islam and local culture." Journal of Indonesian Islam 10, 2 (2016).

Nasrul, Hamdani, *Komunitas Cina di Medan dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960.* Jakarta: LIPI Press, 2013.

Nasrullah, Muhammad. "Tarekat Syadziliyah Dan Pengaruh Ideologi Aswaja Di Indonesia," *Jurnal Islam NU Nusantara* 04, 02 (2020).

Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran.* Jakarta: Mizan, 1998.

Nata, Abuddin. *Islam dan Ilmu Pengetahuan.* Jakarta: Prenadamedia, 2018.

Nazmudin. "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal of Govenment and Civil Society* 1,1 (2107).

Ni Putu Winanti dan Ni Gusti Ayu Kartika, "Bhinneka tunggal ika in kakawinsutasoma in multicultural societyof Denpasar City," *International Journal of Research in Social Sciences* 8, 3 (2018).

Niebuhr, Reinhold. *The Tolerance and Intolerance in Early Judiasm and Christianty.* Cambridge-Cambridge University Press, 1998.

Nopriansyah Eko, "Tela'ah Pemikiran Alwi Shihab Tentang Toleransi Beragama Dalam Buku Islam Inklusif," *Nurani* 17, 2 (2017).

Nor, Jamaniah Zakaria, "The Wasatiyyah (Moderation) Concept: Its Implementation In Malaysia'", *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, 4 (2015).

Novianto, Bagus. "Moderasi Islam Di Indonesia Perspektif Peradaban Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 5, 2 (2018).

Nugraha, Dera, Uus Ruswandi, and M. Erihadiana, "Urgensi Pendidikan Multikultural Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan PKN* 1, 1(2016).

Nuhrison, M. Nuh *Peranan Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.

Nur, A; Mukhlis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar AtTafasir)", *Jurnal An-Nur* 4, 2 (2019).

Nur, Askar, “Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam”, *Jurnal al-Ubudiyah* 2, 1(2021).

Nur, Askar. “Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam”, *al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, 1(2022).

Nur, Said, “Nalar Pluralisme John Hick Dalam Keberagaman Global”, *Fikrah: Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3, 2 (2015).

Nurrohman, H.“Model Toleransi dan Kerukunan dalam Pluralitas Kehidupan Beragama (Interaksi Sosial Keagamaan antar Umat Islam dan Kristiani di Desa Sindang Jaya Kecamatan Ciranjang, Cianjur)”, *Jurnal al-Tsaqafa,* 14, 1 (2017).

Nurchlosih, Ahmad. “Peran Tasawwuf dalam Merekonstruksi Krisis Spiritualitas Manusia Modern”, *Jurnal Sosio-Religia* 6, 2(2019).

-------. “Islam Dan Pendidikan Perdamaian.” *Al-Ibrah* 3, 2 (2018).

-------. *Merajut Damai Dalam Kebinekaan.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.

Nurul Faiqah, “Radikalisme Islam VS Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, 1 (2019).

Nurul, K. “Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al- Qur’an”.

KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan 13, 1(2019).

Octavian, Hendra Priyatno; Anjar Mukti Wibowo, "Pola Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Umat Beragama (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)", *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan,* 3(2) 2014.

Omer, Atalia. "Religious Peacebuilding: the Exotik, the Good, and the Treatrical" in book Atalia Omar; R. Scott Appleby; David Little, *The Oxford Handbook of Religion, Conflict and Peasebuilding.* New York: Oxford University Press, 2015.

Parekh, Bhikhu. *Politics, Religion & Free Speech in Rethingking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory.* Cambridge, Massachutts: Harvard University Press, 2002.

Parosojo, Zaenuddin Hudi; Mustaqim Pabbajah, "Akomodasi Kultural dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, 1(2020).

Pasha, Musthafa Kamal. *Akidah Islam.* Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Pelu, L. U, "Implementasi Pendidikan Moderat Terhadap Pemahaman Guru dalam Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 4 Maluku Tengah", *Uniqbu Journal of Social Sciences* 1, 3(2019).

Peursen, C.A. Van. *Strategi Kebudayaan*, cet. Ke-5. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Piliang, Yasraf Amir. *Dunia Yang Berlari: Dromologi, Implosi, Fantasmagoria.* Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017.

Porta, Donatella Dela "Guest Editorial: Processes of Radicalization and Radicalization", *International Journal of Conflict and Violence,* 6(1) 2011.

Primayana, K. H., & Dewi, P. Y. A. Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital. *Tampung Penyang* 19, 1(2019).

Purwanto, Y., Qowaid, Q., Ma'rifataini, L., & Fauzi, R. (2019). Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 17, 2(2019).

Putra, Ahmad. "Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber", *al-Adyan: Journal of Leligious Studies* 1, 1(2020).

Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqasid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017).

Qasim, Muhammad. "Membangun Moderasi Beragama Umat melalui Integrasi Keilmuan. Alauddin University Press; Rizqa Ahmadi, "Kontestasi Atas Otoritas Teks Suci Islam di Era Disrupsi: Bagaimana Kelas Menengah Muslim Indonesia Memperlakukan Hadis Melalui Media Baru", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,* Vol. 15, No. 1 (2019).

Qodir, Zuli. "Perspektif Sosiologis tentang Radikalisasi Agama Kaum Muda". *MAARIF: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial* 8, 1(2016).

Qomar, Mujamil. *Pesantren : Dari Tranformasi Motodologi menuju Demokratisasi Institusi.* Jakarta: Erlangga, 2013.

Quintan, Wiktorowicz. *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus.* Jakarta: Gading Publishing, 2012.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Raharjo, Sandy Nur Ikfal. "Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012-2013", *Jurnal Kajian Wilayah* 6, 1(2015).

Rahayu, Luh Riniti; Putu Surya Wedra, "Moderasi Beragama di Indonesia", *Intizar* 25, 2(2019).

Rahmad, M. Imdadun. *Islam Pribumi : Mendialogkan Agama Membaca Realitas.* Jakarta: Erlangga, 2017.

Rahman, Khalid; Aditia Muhammad Noor, *Moderasi Agama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme.* Malang: UB Press, 2020.

Rahmat, S. T. "Dialog Antropologis Antaragama dengan Spiritualitas Passing Over", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1(2020).

Rambe, Tappil. "Membingkai Kebhinekaan Dan Kedaulatan Dalam Berbangsa Dan Bernegara Dari Sudut Pandang Sosial Politik Nasional." *Generasi Kampus* 10, 2 (2017).

Rasyid, "Dakwah Islam Di Era Globalisasi: Revitalisasi Prinsip Moderasi Islam", *Al-Qalam,* 20, 3 (2019).

Ridho, Ali. "Memahamai Makna Jihad Dalam Serial Film Kartun Cisform: Jihad FiSabilillah (Analisis Wacana Teun

A. Van Dijk)", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi IAIN Curup*, 4,1 (2019).

Ridho, Ali; Thibburruhany, "Prinsip Toleransi Beragama Sebagai Pondasi Membangun Peradaban Islam di Era Modern", *Jurnal El-Afkar* 8,1 (2020).

Ridwan al-Makassary, Amelia Fauzia, dan Irfan Abubakar, *Masjid dan Pembangunan Perdamaian* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture [CSRC], 2011).

Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Riza, M. "Relasi Antar Iman di Negeri Syari'at Islam (Studi Peran dan Fungsi FKUB dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Aceh Tengah). *Jurnal As-Salam* 3, 1(2020).

Rizal, Ahmad Syamsu. *Transformasi Corak Edukasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren, dari Pola Tradisi ke Pola Modern,* Jurnal Pendidikan Agama Islam, 09 2 (2011).

Rohimat, Asep Maulana. *Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil'alamin.* Surakarta: IAIN Surakarta Press, 2017.

Rohman, Dudung Abdul. *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia*. Yogyakarta: Lekkas, 2021.

Rokhmad, A. "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, 1(2018).

Rosyada, Dede. “Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional.” *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 1, 1 (2014).

Rozi, R. “Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia”, *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, 1(2019).

Ruslan, Idrus, “Etika Islam Dan Semangat Pluralisme Agama Di Era Global”, *Al-Adyan* 5, 1 (2010).

Rusyi, Ibnu; Siti Zolehah, “Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan”, *Jurnal for Islamic Studies* 1,1(2018).

Safingin, Agus; Putu Bagus Suka Arjawa dkk., “Kerukunan Umat Beragama di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Ilmiah,* 3, 2(2020).

Safitri, E. “Instilling the Value of Religious Pluralism as the Effort to Overcome the Religious Conflict. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 15, 1(2019).

Sahal, Akhmad; Munawar Aziz. *Islam Nusantara : Dari Ushul Fiqih Hingga Konsep Historis.* Bandung: Mizan, 2015.

Saifuddin, Ahmad. “Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan”*, Jurnal Pendidikan Agama Islam* 03, 01 (2005)

Sajjad, H. Rizvi, “A Primordial e Pluribus unum? Exegeses Q. 2:213 and Contemporary Muslim Discourses on Religious Pluralism”, *Journal of Qur’anic Studies* 6, 1 (2004).

Sakina, Ade Irma. “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia.” *Share: Social Work Journal* 7, 1 (2017).

Saleh, Muhammad; Ahmad Edwar, “Redefinisi Peran Guru Menuju Pendidikan Islam Bermutu,” *Alim: Journal of Islamic Education* 3, 1 (2021).

Salhani, C. *Religious Contributions to Peacemaking.* Wanghington DC: Middle East Times, 2008.

Salim, A., & Andani, A. “Kerukunan Umat Beragama; Relasi Kuasa Tokoh Agama dengan Masyarakat dalam Internalisasi Sikap Toleransi di Bantul Yogyakarta”, *Arfannur* 1, 1(2020).

Salim, Agus. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia,* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.

Samsul, Armi. “Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama*”, Al-Irfan* 3, 1 (2020).

Sanjaya, Julius. *Ciri-Ciri Pemimpin yang Berprinsip: Principle Centered Leadership.* Jakarta: Binapura Aksara, 1997.

Santoso, Arif Gunawan. *Pergeseran Strategi Fundamentalisme Islam: Studi HTI sebagai Gerakan Sosial.* Ciputat: Irama Offset, 2017.

Sari, Dian Cita dkk., *Sosiologi Agama.* Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Sari, Novita; Yudi. *Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

Sastrawan, Ketut Bali; Kadek Hengki Primayana, “Urgensi Pendidikan Humanisme dalam Bingkai a Whole Person”, *Haridracarya: Jurnal Pendidikan Agama Hindu* 1,1(2020).

Sayono, Joko. "Perkembangan Pesantren di Jawa Timur", *Jurnal Bahasa dan Seni* 33, 1 (2005)

Schultz, M., Baddarni, K., & Bar-Sela, G. (2011). Reflections on Palliative Care from the Jewish and Islamic Tradition. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2012.

Scott M. Cutlip dan Allen H. Center, *Effective Public Relations*, 9th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2005.

Scott, R. Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation.* Lanham: Rowman and Littlefield, 1999.

Sesmiarni, Zulfani. "Membendung Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan Melalui Pendekatan Brain Based Learning," *KALAM* 9, 2 (2017).

Setiono, Benny G. *Tionghoa dalam Pusaran Politik.* Jakarta: Trans Media Pustaka, 2008.

Setyawan, Katon Galih; Kusnul Khotimah, "Politik Akomodatif dalam Masyarakat Multi Agama", *The Journal of Society and Media,* 3, (2018).

Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan.* Jakarta: Kencana, 2020.

Shihab, M. Q. *Islam Yang Saya Anut*. Bandung: Lentera Hati Group, 2009).

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Kalam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 2019.

Shimogaki, Kazuo. *Kiri Islam, Antara Modernisme dan Posmodernisme.* M. Imam Aziz; M. Jadul Maula. Yogyakarta: LKiS, 2017.

Shobahah, Nurush. “Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik”, *Ahkam* 7, 1(2019).

Shofa, Abd Mu’id Aris. “Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila.” *Jpk (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 1, 1 (2016).

Siregar, Ibrahim. “Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Sistem Kekeluargaan Masyarakat Dalihan Natolu”, Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: dari Indonesia untuk Dunia.* Yogyakarta: LKiS, 2019.

Siregar, T. A. *Millenial Berperan Penting Sebagai Agen Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenkopmk, 2021).

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajarn, Sejarah, dan Pemikirannya.* Jakarta: UI Press, 2019.

Smock, David. *Religions Perpspektives on War: Christian Muslim and Jewish Attitudes Toward Force.* Washington DC: USIP Press, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Stiawan, Kelik; M. Tohirin, *Format Pendidikan Pondok Pesantren* Salafi dalam Arus Perubahan Sosial di Kota Magelang, *CAKRAWALA* X, 2 (2015).

Subakir, Ahmad “Pergulatan Sosioreligius di Tengah Arus Perubahan Ekonomi pada Masyarakat Kampung Inggris

Pare Kediri", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 8, 2(2018).

Subhi, M. "Desakralisasi dan Alenasi Manusia Dalam Peradaban Modern Persepektif Sayyed Hossein Nasr", *Jurnal Universitas Paramidana* 6, 1(2017).

Sudarji, S. "Moderasi Islam: Untuk Peradaban dan Kemanusiaan," *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 1, 1, (2020).

Sudira, I Nyoman. "Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia", *Global: Jurnal Politik Internasional* 19, 2(2017).

Sufirmansyah, "Actualization of Andragogical Learning Strategies for Higher Education in Disruption Era," *Didaktika Religia* 6,2 (2018).

Sufirmansyah, "Aplikasi Visi Islam Moderat: Eklektisisme Pembelajaran Bermakna dan Pendidikan Berbasis Nilai sebagai Antitesis Radikalisme Keberagamaan," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 1, 1 (2018).

Suharto, Toto. "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Al-Tahrir", Jurnal Pemikiran Islam 17, 1 (2017).

Sulaeman, Eman, Ahmad Asmuni, And Septi Gumandari. "Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sman 1 Rajagaluh Kabupaten Majalengka: Eman Sulaeman, Ahmad Asmuni, Dan Septi Gumandari." *My Campaign Journal* 2, 4 (2021).

Sumbulah, Umi. Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama. 4th ed. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Suparman, "Peran dan Fungsi Pesantren sebagai Agen Pengembangan Masyarakat," Undergraduate Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.

Suprapto. "Sasak Muslims And Interreligious Harmony: Ethnographic Study of the Perang Topat Festival in Lombok-Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 11, 1 (2017).

Supriadi, Stevanus Gatot; Nabila Yuansa Pratiwi, "Analysis of Factors that Influence the Interest of Buying Consumers at Sticky Rice Milki (Tansu) Stall in English Village Pare Kediri", *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 2, 3(2018).

Suryadinata, Leo *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa.* Jakarta: Pustaka LP3ES, 1978.

Suryani, Tamat. "Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme", *Jurnal Keagamaan Nasional* 3, 2(2017).

Sutrisno, E. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan". *Jurnal Bimas Islam* 12, 2(2019).

Syafei, Zakaria."Tracing Maqasid al-Shari'ahin the Fatwas of Indonesian Council of Ulama", *orunal of Indonesian Islam* 11, 2(2017).

Syam, Nur *Islam Nusantara Berkemajuan: Tantangan dan Upaya Moderasi Agama* (Semarang: FATAWA PUBLISHING, 2018).

Syam, Nur. *Bukan Duni Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam.* Surabaya: Eureka, 2005.

Syauqi, Muhammad Labib. 'Islam (Di) Nusantara; Esensi, Genealogi Serta Identitasnya Islam (In) Archipelego; Its Essence, Genealogy, And Identify'. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman 15, no. 2 (2015).

Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thale sampai James.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Tafsir, *Hubungan Budaya Jawa dan Islam, Pengaruhnya terhadap Politik di Indonesia.* Yogyakarta: Media Gama, 2000.

Taylor, David. *Politik Islam dan Islamisasi Pakistan‖ dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, Perkembangan Modern dalam Islam.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.

Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Gema Insani Press, Jakarta, 2018.

Thomas, Scott *The Global Resurgence of Religion and the Tranformation of International Relations.* New Work: Palgrave, 2005.

Thoyyib, M. "Radikalisme Islam Indonesia." *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, 1(2019).

Tilaar, T.A.M. *Peran Perguruan Tinggi di Daerah Dalam Otonomi Daerah,* dalam buku *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru: 70 Tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.* Cet. Ke-3. Jakarta: Grasindo, 2016.

Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama.* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Triwardani, Reny, and Christina Rochayanti. "Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal." *Reformasi* 4, 2 (2014).

Tumanggor, Rusmin. "Masalah-masalah sosial budaya dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia." Jurnal masyarakat dan Budaya 12, 2 (2010).

Ulya, Inayatul. "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia." *Fikrah* 4, 1 (2016).

Umam, Khaerul. "Konstruksi Nilai Inklusif Tokoh Agama dalam Memandang Pluralitas Agama di Kediri", *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama* 9, 1(2019).

Umar, H. Nasaruddin *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia.* Jakarta: Gramedia, 2019.

Usman, Abd. Malik. "Islam Rahmah Dan Wasathiyah (Paradigma Keberislaman Inklusif, Toleran Dan Damai)", *Humanika* 15, 1 (2015).

W. Hefni, "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", *Jurnal Bimas Islam* 12,1 (2019).

Wahab, Abdul Jamil. *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.

Wahid, Ramli Abdul "Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, 2 (2017).

Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya dan Tradisi Sosial.* Jakarta: Prenadamedia, 2018.

Watt, Montgomery. *Islamic Philosophy and Theologi.* Edinburg at the University Press, 1999.

Wawan, H. Purwanto, *Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme hingga ke Akar-akarnya, Memungkinkah?*. Jakarta: CMB Press, 2007.

Widodo, P.; Karnawati, K. "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia", *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 15, 2 (2019).

Widodo, Priyantoro; Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen", Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen 15, 2 (2019)

Wijaya, H., *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik.* Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray., 2016.

Wiji, Hidayati, *Ilmu Kalam : Pengertian, Sejarah, Dan Aliran-Alirannya.* Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Yogyakarta, 2017.

Wijianti; Siti Aminah, "Kewarganegaraan (Citizenship)". Jakarta: Piranti Darma Kalokatama, 2017.

Winarni, Leni. "Media Massa dan Isu Radikalisme Islam," *Jurnal Komunikasi Massa 7*, 2 (2014).

Wiranata, Irawan Hadi; Marzuki, "Kerjukunan Antarumat Beragama Sebagai Dasar *City Branding* Harmoni Kediri *The Service City*", *JIPPK* 3, 1(2018).

Wulan Purnama Sari, Sinta Paramita, dan Suzy Azeharie, "Kerukunan dalam Komunikasi antar Kelompok Agama Islam dan Hindu di Lombok," *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 23, 1 (2019).

Yakin, Ayang Utriza. *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016).

Yaqin, M. Ainul. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan.* Yogyakarta: Pilar Media, 2015.

Yasid, Abu. *Islam Akomodatif Rekontruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.

Yasin, M. N. "The Pluralism of Islamic Economic Law: Dialectic of Moslem and non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia. *Journal of IndonesianIslam* 10, 1(2019).

Yucel, Salh. "Fethullah Gulen: Spiritual Leader in a Global Islamic Context", *Journal of Relegion & Society* 12, 2(2010).

Yulianto, "Implementasi Budaya Madrasah dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, 1(2020).

Yunus, A. Faiz "Radikalisme,Liberalisme, dan Terorisme," *Studi Al-Qur'an* 13, 1 (2017).

Yunus, Rasid. "Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 13, 1 (2013).

Yusuf, Achmad. "Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, Dan Tasawuf)", *Al-Murabbi* 3, 2 (2018).

-------. "Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama" *Jurnal pemikiran keislaman dan Kemanusiaan* 1, 2 (2017).

Yusuf, Himyari. "Eksistensi Tuhan dan Agama dalam Perspektif Masyarakat Kontemporer", *Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 27, 2(2012).

Zafi, A. "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Al-Qur'an dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Studi Ilmu- ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, 1(2020).

Zainuddin, M. "Pluralisme dan Dialog Antar Umat Beragama", *ar-Risalah* 12, 2(2012).

-------. Esha *Islam Moderat: Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi*. Malang: UIN- Maliki Press, 2020.

Zakiyuddin, "Modifikasi Multikulturalisme untuk Pendidikan Agama", *Jurnal Studi Islam* 5, 1 (2008).

Zamimah, I. "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M.Quraish Shihab). " *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir (Institute Ilmu Al-Quran (Iiq)* 1, 1 (2019).

Zamimah, Iffati. "Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab)", *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 1, 1(2018).

Zuhairi Misrawi; Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: *Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019.

Zulkarnain, "Etos Kerja dalam Kajian Teologi Islam (Analisis Penelitian Max Weber tentang Etika Protestan di Amerika dan Analoginya di Asia)", *al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam,* 2, 1(2020).

BIODATA PENULIS

Dr. Limas Dodi, M.Hum lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada tanggal 6 Oktober 1985. Kini Ade (sapaan akrabnya) tinggal di Dusun Brodot Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sejak didaulat sebagai master di bidang Studi Agama dan Resolusi Konflik tahun 2011, Ade langsung dipinang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri (STAIN waktu itu) untuk mengabdi sebagai dosen (hingga sekarang). Namun disela-sela sebagai dosen tetap, Ade melanjutkan studi doktoral di bidang Dirasah Islamiyyah/Islamic Studies/Ilmu Keislaman UIN Sunan Ampel Surabaya dan dikokohkan sebagia doktor bidang tersebut pada tahun 2015.

Ade dikenal pribadi *ulet* dan tidak cepat puas, terlihat dari catatan pendidikan yang dijalani; Tingkat Sarjana diraih pada bidang Ushuluddin di STAIN Kediri, Jawa Timur tahun 2009. Pun sama di tingkatan magister (S2), di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bidang Filsafat dan Agama tahun 2011 (konsentrasi bidang Studi Agama dan Resolusi Konflik). Pada jenjang doktoral ditempuh pada UIN Sunan Ampel tahun lulus 2015.

Ade termasuk penulis buku yang produktif, bahkan Ia dikenal sebagai editor handal di segala bidang. Tidak heran, jika Ia dijadikan editor pada penerbitan buku dan reviewer di beberapa jurnal. Lima tahun terakhir, ada dua buku karyanya dan 15 buku sebagai editor. Diantaranya menulis buku *Epistemologi Islami Studies: Pendekatan dan Teori Pemikiran dalam Metodologi Studi Islam* (2015), *Metodologi Penelitian* (2015). Sebagai editor disini hanya disebutkan delapan buku dari 15 buku, diantaranya *Antologi Scientific Paper* (2019), *Konstruksi Epistemologi Toleransi di Pesantren* (2020), *Manajemen Pendidikan Kontemporer: Konstruksi Pendekatan Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal* (2020), *Pembelajaran Bahasa Arab Kontemporer : Konstruksi Metodologis Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Komunikatif – Sosiolinguistik* (2020), *Rule Model Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (gambaran ideal kerukunan umat muslim-tionghoa di pusat kota kediri perspektif trilogi kerukunan dan peacebuilding)* (2020), *Rekonsepsi Pendidikan Karakter Era Kontemporer: konstruk epistemologis penguatan pendidikan karakter (PPK) di Indonesia melalui evaluasi model CIPP* (2021), *Rethingking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: sebuah konstruksi metodologis berbasis sejarah* (2021), *Rethingking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya* (2021).

Selain menjadi produktifitasnya di bidang buku, Ia juga terkenal menulis di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional, tiga tahun terakhir diantaranya adalah *Ideologi Agama dalam Praktik Dominasi antara LDII Versus Non-LDII di Jombang* (2018), *Antara Spiritualitas dan Realitas Tarekat Shiddiqiyyah dalam Bingkai Fenomenologi Annemarie Schimmel* (2018), *Nilai Spiritualitas Sayyed Hossein Nasr dalam Manajemen*

Pendidikan Islam (2018), *Educational Value of Johan Vincent Galtung's Conflict Resolution in Reducing Gender Issues Based Violence* (2019), *Membaca Pendidikan Perdamaian dalam Pesantren sebagai Antitesis Konflik* (2019), *Critical Philosophical Study on Policy in Educational Institution: Response to the global competitive environment* (2020), *Grounding the Vision of Religious Moderation as a Strategic Step in Preparing the Next Generation of the Nation towards Global Era* (2021) dan *Power-Based Economic Politics in Persatuan Islam (Persis) in Sapeken, Sumenep-Madura* (2021).

BHINNEKA TUNGGAL IKA
UNITY IN
DIVERSITY